

Dr. Eko Harry Susanto



Dalam bidang demokratisasi berbangsa dan bernegara, esensi, harus ditempatkan secara proporsional ketika akan menelaah dinamika sosial-budaya, ekonomi dan politik. Komunikasi yang substantif, sejatinya harus berjalan linier dengan peradaban manusia, yang diwarnai oleh beragam masalah.

Persoalannya, komunikasi seringkali dieksploitasi hanya sebatas untuk retorika yang tidak menghasilkan makna bersama. Pada konteks ini, ada persoalan serius menyangkut konsistensi antara informasi yang dieksploitasi dengan kondisi faktual. Karena itu, buku ini berupaya memaparkan pendekatan kritis yang memberikan gambaran seperti :

- Komunikasi Manusia yang mencakup Esensi, Konteks, Teknologi Komunikasi, Efektivitas Komunikasi dan Penelitian Komunikasi
- Batasan Komunikasi Politik, yang terkait batasan Pembangunan, Media Massa dan Kekuasaan
- Komunikasi Politik dan Globalisasi, yang fokus kepada Konflik, Opini, Ketergantungan Informasi
- Teknologi Komunikasi, dengan titik berat pada Dampak Perubahan Sosial, Demokrasi dan HAM

Secara substantif, tidak semua esensi dan model komunikasi bisa dipakai untuk membedah penyelesaian masalah. Kendati demikian, komunikasi yang efektif tetap diperlukan demi kesejahteraan umat manusia.



KOMUNIKASI MANUSIA

ESENSI DAN APLIKASI
DALAM DINAMIKA
SOSIAL EKONOMI POLITIK

ISBN : 978-602-8678-33-0



9 786028 495530

KOMUNIKASI MANUSIA
ESENSI DAN APLIKASI DALAM DINAMIKA
SOSIAL EKONOMI POLITIK

Dr. Eko Harry Susanto



Komunikasi Manusia
Esensi dan Aplikasi Dalam Dinamika Sosial Ekonomi Politik
Dr. Eko Harry Susanto

Editor : 1. Drs. Widayatmoko, MM,
2. Dra. Riris Loisa, M.Si.



Edisi Asli
Hak Cipta ©2010, Penerbit Mitra Wacana Media
Telp. (021) 824-51931
Faks. (021) 824-31931
Website: <http://www.mitravacanaonline.com>
E-mail: info@mitravacanaonline@gmail.com

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang menjiplak atau menyalin sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit.

UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja melanggar, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Dr. Eko Harry Susanto

Komunikasi Manusia
Esensi dan Aplikasi Dalam Dinamika Sosial Ekonomi Politik

Edisi Pertama
— Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010
1 ill., 11 x 24 cm, hal. 200

ISBN: 978-602-8495-53-0

1. Paperback 2. Jilid

Kata Pengantar

Buku berjudul Komunikasi Manusia: Esensi dan Aplikasi Dalam Dinamika Sosial Ekonomi Politik berupaya untuk melihat komunikasi dalam perspektif teoritis dan penerapannya pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara.

Tulisan yang terdapat dalam buku ini, terbagi menjadi dua bagian, yaitu pada Bab I sampai Bab IV mengemukakan aspek yang substansial dalam komunikasi manusia, dan Bab V sampai Bab VI merupakan artikel yang ditulis pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 yang berkaitan dengan demokrasi, keterbukaan informasi dan pemahaman terhadap keanekaragaman masyarakat dilihat dari sudut pandang ilmu komunikasi.

Kumpulan artikel sebagai bentuk penerapan komunikasi manusia yang ada dalam buku ini, sebelumnya sudah dimuat di *Harian Kompas*, *Koran Tempo*, *Suara Pembaruan*, *Media Indonesia*, *Bisnis Indonesia*, *Sepuhar Indonesia*, *Jurnal Nasional*, *Suara Karya* dan *Pikiran Rakyat Bandung*. Tentu saja sejak tahun 2004 terjadi perubahan, sehingga artikel yang ada di buku ini mungkin tidak sesuai dengan kondisi sekarang, atau justru menjawab keadaan sekarang yang sebelumnya sudah diprediksikan.

Khusus tulisan – tulisan tentang transparansi informasi yang beruntun, sesungguhnya tidak terlepas dari pengalaman keikutsertaan penulis dalam berbagai diskusi yang membahas kompleksitas transparansi informasi yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun berbagai lembaga yang memiliki kepedulian untuk memperjuangkan kebebasan informasi. Secara kontekstual, tulisan didalamnya, disamping berisi analisis, penjelasan, kritik maupun saran dalam upaya menciptakan transparansi informasi juga mengandung dorongan agar institusi publik yang memiliki otoritas dalam pengelolaan informasi, mau menginternalisasi prinsip keterbukaan informasi, demi untuk mencapai masyarakat informasi yang demokratis.

Pada hakikatnya, aplikasi komunikasi manusia yang dituangkan pada tulisan ini, merupakan gambaran faktual situasi yang berlangsung pada saat

itu, yang ditelaah dari sudut perspektif ilmu komunikasi sebagai bidang ilmu yang multidisipliner.

Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terimakasih kepada Ir. Alphonsus Priyo Hutoro, S.Si., M.Si; Drs. Widayanto, MM; Dr. Andy Cory W. Dra. Riris Loris, M.Si; Drs. Atang Sugiyono, M.Si., dan Dr. Chairy Saadian sebagai teman diskusi penulisan buku. Terimakasih kepada semua pihak di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Turumanagara Jakarta, perguruan tinggi lainnya tempat penulis mengajar yang memberikan dukungan, kritik ataupun saran pada setiap tulisan saya yang dimuat di surat kabar, dan Yayat Supriatna yang mengumpulkan artikel saya di surat kabar.

Kepada Maya, Dekky, Dennis dan Delfri, yang selalu memberikan komentar pendek terhadap tulisan saya di surat kabar, saya mengucapkan terimakasih. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita semua.

Jakarta, September 2009

Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Bab 1 Komunikasi Manusia	1
A. Esensi Komunikasi	1
1. Menggambarkan Realitas	1
2. Menjelaskan Realitas	3
3. Prediksi, Kontrol dan Pemahaman	3
4. Reformasi	3
B. Konteks Komunikasi	6
1. Komunikasi Intrapersonal	7
2. Komunikasi Interpersonal	7
3. Komunikasi Kelompok	7
4. Komunikasi Organisasi	8
5. Komunikasi Massa	9
C. Teknologi Komunikasi	12
D. Komunikasi Efektif	13
E. Penelitian Dalam Komunikasi	14
Bab 2 Komunikasi Politik	17
A. Batasan Komunikasi Politik	17
1. Komunikator Politik	20
2. Pesan Politik - Pembicaraan Politik dan Persuasi Politik	20
a. Pembicaraan Politik	20
b. Persuasi Politik	22
3. Media Komunikasi Politik	22
4. Khalayak Komunikasi Politik	22
5. Dampak Komunikasi Politik	23

	B. Komunikasi Politik dan Pembangunan	23
	C. Media Massa dan Kekuasaan Politik	29
Bab	3 Komunikasi Politik dan Globalisasi	35
	A. Konflik Antar Kelompok dan Opini Global	37
	B. Ketergantungan Informasi	41
	C. Marginalisasi Negara Pinggiran Dalam Opini Internasional	44
Bab	4 Teknologi Komunikasi dan Perubahan Sosial	51
	A. Dampak Teknologi Komunikasi	52
	B. Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Teknologi Komunikasi	54
	C. Teknologi Komunikasi: Sarana Menuju Globalisasi	56
Bab	5 Dinamika Partai Politik	59
	1. Kredibilitas Politik PDIP	59
	2. Mempersiapkan Partai Lokal	62
	3. Target PAN Tahun 2009	64
	4. Marissa dan PDIP 2009	66
	5. Peran Oposisi Partai Moncong Putih	68
	6. Menduga Pemenang Pilkada Jakarta	70
	7. Menakar Megawati Pada 2009	73
	8. Tokoh Muda, Penilih Muda dan Megawati	75
	9. Kabinet Bayangan Calon Presiden	78
	10. Menimbang Pasangan Mega - Sultan	80
	11. Duet Megawati - Jusuf Kalla	82
	12. Menduga Pasangan Presiden 2009	85
	13. Koalisi Pasca Kemenangan Demokrat	87
	14. Menduga Arah Partai Golkar	91
Bab	6 Komunikasi Politik dan Kekuasaan	95
	1. Deputy Khusus Pancasila Lemhannas	95
	2. Standar Informasi Gempu	97
	3. Kemandirian Penasehat Presiden	99
	4. Komunikasi di Wilayah Politik	102

5. Lee Kuan Yew dan Demokrasi	104
6. Program Instan Kompor Gas	107

Bab	7 Transparansi Informasi dan Korupsi	111
	1. RUU Informasi dan Pemberantasan Korupsi	111
	2. RUU Rahasia Negara dan Pelembagaan Anti Kritik	113
	3. Meneropong Korupsi di Legislatif	115
	4. Melahirkan Bibit Pemberantasan Korupsi	118
	5. RUU KMP dan Kultur Keterbukaan	120
	6. Keterbukaan Informasi BUMN	122
	7. Keterbukaan Informasi dan FOIA Freedom of Information Act (FOIA) Menumbuhkan Kultur Demokrasi	125
	8. Keterbukaan Informasi dan Pemberantasan Korupsi	127
	9. Birokrasi Informasi dan Korupsi	130
	10. Perkecualan Informasi RUU KIP dan Potensi Alam	132
	11. Rahasia Negara, Korupsi dan Komisi Informasi	135
	12. Rahasia Negara, KPK dan Komisi Informasi	138
	13. Rahasia Negara dan Keterbukaan Informasi	140
	14. Demokratisasi Informasi dan Transaksi Elektronik	142
Bab	8 Iklan Politik dan Pencitraan	145
	1. Membaca Hasil Jajak Pendapat	145
	2. Iklan Puas Diri Mendagri	148
	3. Sentimen Anti Amerika Pendahuluan Hasil Survei Semicon Anti Amerika Asosiasi Kendala Penelitian Dalam Kutub Pendapat Mayoritas Penutup	150
	4. Polling Pilkada Dalam RLU Pemilu	156
	5. Iklan Politik	159
	6. Pluralisme dan Retorika Politik	161
	7. Jajak Pendapat dan kampanye Terselubung	163

Bab	9	Kebebasan Informasi dan Politik Lokal	167
	1.	Marginalisasi Politik Pedesaan	167
	2.	Transparansi Politik Kepala Desa	170
	3.	Exxon Mobil : Harapan Masyarakat Desa	172
	4.	Bunuh Diri Korban Gempa	174
	5.	Revitalisasi (Politik) Pertanian	176
	6.	Plus Minus Calon Independen	178
	7.	Rating dan Integrasi Nasional	181
Daftar Pustaka			185
Biodata Penulis			191

Bab 1

KOMUNIKASI MANUSIA

A. Esensi Komunikasi

Dalam pembahasan tentang komunikasi manusia, Ruben (1992:41) menyatakan: "komunikasi merupakan studi interdisipliner berbagai ilmu pengetahuan memberikan corak perkembangan terhadap ilmu komunikasi itu sendiri". Sejalan dengan pernyataan tersebut adalah pendapat Littlejohn (1992 : 11), komunikasi manusia merupakan studi interdisipliner yang menyelidiki proses komunikasi, dengan menggunakan pandangan dari berbagai disiplin tradisional ilmu pengetahuan.

Karena itu, sesuatu yang wajar jika pengertian komunikasi sangat beragam, tergantung dari pendekatan yang digunakan dalam menelaah eksistensi maupun kompleksitas komunikasi. Keberagaman tentang batasan komunikasi tersebut, merupakan implikasi terbentuknya teori, yang memiliki tujuan tertentu, sehingga satu sama lain mempunyai perbedaan pendekatan yang spesifik.

Menurut Julia T. Wood (2006: 31), "teori di formulasikan untuk mencapai tujuan – tujuan tertentu, yang menggambarkan realitas (deskripsi), menjelaskan realitas (eksplanasi), dan melakukan prediksi, kontrol, dan pemahaman, dan reformasi". Faktor – faktor tersebut memiliki karakteristik tertentu dalam menggambarkan atau membentuk suatu fenomena dalam teori komunikasi.

1. Menggambarkan Realitas

Teori menggambarkan realitas atau suatu fenomena, yang dimulai dengan merinci karakteristik dan komponen utama dari suatu fenomena. Didalam menggambarkan suatu fenomena tersebut, ilmuwan cenderung subjektif, karena apa yang ditangkap dalam pemahaman seorang ilmuwan dipengaruhi

oleh latarbelakang pribadi, keterampilan panca indra dan nilai atau keyakinan dasar yang diimut oleh individu. Pada konteks ini teori dari Shannon dan Weaver mengarah kepada penggambaran realitas dalam komunikasi manusia.

Claude Shannon adalah ahli matematika dan peneliti di laboratorium Bell Telephone. Sedangkan Warren Weaver merupakan anggota Lembaga Penelitian Penyakit Kanker. Dengan latarbelakang yang berbeda, mereka mengembangkan suatu model yang menggambarkan apa yang terjadi ketika orang berkomunikasi. Secara esensial, komunikasi sebagai arus informasi dari pikiran seseorang sebagai sumber (*source*) ke pikiran orang lain yang dituju (*destination*). Orang yang menjadi sumber menciptakan pesan dan memindahkannya melalui suara, atau peralatan transmisi (*transmitter*) lainnya. Pesan tersebut, selanjutnya diterima oleh telinga ataupun alat penerima (*receiver*) lainnya. Dalam prosesnya, ada kemungkinan terjadi kehilangan suatu informasi tertentu, yang disebabkan oleh gangguan (*noise*) didalam sistem komunikasi. Noise dapat berupa gangguan pada pemawat telepon, suara musik di ruangan, dan gangguan lainnya yang berpotensi untuk mengaburkan pesan yang diterima.

Model Shannon & Weaver ini dinilai memiliki kelemahan, karena penjelasannya bersifat satu arah (*linear*), sementara pada kenyataannya, orang berkomunikasi secara timbal balik. Selain itu, dalam uraiannya menempatkan orang sebagai *sender* (pengirim pesan) yang dibedakan dari *receiver* (penerima pesan). Padahal pada hakikatnya, orang dapat menjadi *sender* maupun *receiver*.

Dalam perkembangannya, Norbert Weiner menambahkan umpan balik (*feed back*) sebagai unsur penting untuk mencapai komunikasi yang efektif. Umpan balik memberikan informasi tentang bagaimana komunikasi yang sudah dilakukan dapat digunakan untuk menyesuaikan aktivitas berikutnya. Jika Shannon & Weaver menerapkan sistem teknis terhadap manusia, ini dapat dimaklumi mengingat latarbelakang Shannon yang ahli dalam komunikasi teknis (telepon). Seharusnya komunikasi teknik hanya untuk benda, bukan pada komunikasi manusia yang dinamis dan dapat berubah dalam posisinya sebagai pengirim pesan maupun penerima pesan. Selain itu komunikasi manusia tidak hanya berfokus kepada arus informasi, sebab melibatkan berbagai faktor yang lebih kompleks seperti perasaan, kebutuhan, empati, simpati dan berbagai karakter lain yang melekat pada manusia.

2. Menjelaskan Realitas

Teori yang diformulasikan untuk menjelaskan realitas terkait dengan bagaimana dan mengapa sesuatu bekerja, dan bagaimana proses kerja komponen-komponen yang ada saling berinteraksi dengan cara tertentu. Teori Mary Lund (1985), menjelaskan apa yang menyebabkan munculnya komitmen didalam hubungan yang romantis. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa cinta membuat hubungan menjadi langgeng. Tetapi penelitian yang dilakukan Lund, menemukan bahwa faktor komitmen (niat untuk mempertahankan hubungan) justru lebih menentukan kelanggengan. Hubungan lebih langgeng bukan sebatas akibat hasil yang diperoleh, tetapi justru karena investasi waktu, energi, material dan perasaan selama menjalin hubungan.

3. Prediksi, Kontrol dan Pemahaman

Dalam formulasi prediksi, kontrol dan pemahaman, tujuan teori berbeda-beda, dan saling bersinggungan timpaung undih. Prediksi menyangkut upaya memperhitungkan apa yang akan terjadi pada suatu fenomena dalam kondisi tertentu. Kontrol, mengikat penjelasan dan prediksi untuk mengendalikan apa yang sedang terjadi didalam suatu fenomena. Sedangkan pemahaman, tidak mementingkan prediksi dan kontrol, tetapi nilai suatu teori dilihat dari kemampuannya untuk memberikan pengetahuan dalam menjelaskan suatu fenomena.

4. Reformasi

Teori dapat dibentuk untuk melakukan reformasi dengan tujuan melakukan perubahan ke arah yang positif. Ilmuwan mempunyai rasa tanggungjawab sosial untuk membuat suatu perubahan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup manusia dalam berbagai bidang kehidupan. Meskipun demikian, tidak semua menyukai reformasi dalam pembentukan teori, sebab ada yang mengunggulkan tradisi teoritis yang lebih bersifat baku dengan penyesuaian terhadap teori yang sudah ada.

Dari berbagai formulasi teori, Julia T. Wood (2006: 9), menyatakan bahwa, "komunikasi adalah proses yang beroperasi secara sistemik, dimana individu saling berinteraksi satu sama lain dengan menggunakan simbol-simbol untuk menciptakan dan menginterpretasikan makna. Proses berlangsung secara terus-menerus berkesinambungan yang sulit untuk mencari atau menetapkan awal maupun akhirnya. Sistemik, terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan, saling mempengaruhi, pada saat berlangsungnya komunikasi maupun masa

sebelumnya. Simbol, mewakili sesuatu entitas, bahasa, atau tindakan tertentu yang diartikan berbeda-beda dan dapat membingungkan. Sedangkan makna merupakan suatu arti yang bukan semata-mata terdapat dalam kata-kata atau benda, tetapi didalam pikiran manusia. Terlepas dari pola yang berbeda dalam proses penyampaian pesan, tetapi pemahaman makna merupakan faktor yang esensial dalam komunikasi antar manusia.

Bower dan Bradac (1982 : 4) menginventarisasi berbagai macam pengertian tentang komunikasi dalam pengelompokan yang berbeda. Faktanya, komunikasi tergantung konteksnya. Kejadian-kejadian yang terkait secara kritis dan mempengaruhi pesan. Konteks situasional ini mencakup peranan sosial, pengenalan batas-batas wilayah dan pengetahuan tentang jenis acara.

Dikaitkan dengan simbol, komunikasi merupakan suatu pertukaran gagasan verbal. Ditinjau dari sudut pemahaman, maka komunikasi adalah proses interaksi yang berupaya memberikan pemahaman. Sedangkan jika dilihat dari aspek interaksional, komunikasi menyangkut interaksi biologis. Sementara itu, pada konteks pengurangan ketidakpastian, komunikasi identik dengan upaya untuk mengurangi ketidakpastian.

Pengertian lain adalah komunikasi sebagai suatu proses transmisi, komunikasi merupakan mentransferan pemahaman. Komunikasi adalah proses untuk menghubungkan satu entitas dengan entitas lain, komunikasi merupakan saluran untuk mengirimkan pesan, komunikasi sebagai tindakan mengeluarkan stimulus untuk memperoleh respon. Komunikasi juga merupakan proses atensi menjadi ingatan, dan komunikasi memiliki maksud untuk mendorong munculnya perilaku.

Jika ditambahkan upaya untuk menguasai, komunikasi adalah proses yang mendorong suatu tindakan untuk menguasai. Sedangkan dalam pendekatan waktu, komunikasi terkait dengan waktu dan situasi. Prinsipnya, komunikasi memiliki pengertian yang kompleks, bahkan bisa saja komunikasi diartikan sebagai respon yang berbeda, ataupun komunikasi adalah mekanisme penggunaan kekuasaan.

Sejalan dengan banyaknya konsepsi komunikasi, MacBride (1983 : 42) memaparkan bahwa, komunikasi tidak hanya diartikan sebagai pertukaran berita dan pesan tetapi sebagai kegiatan individu dan kelompok mengimpor, ekspor, menukar data, fakta dan ide, maka fungsinya dalam sistem sosial mencakup informasi, sosialisasi, motivasi, perdebatan dan diskusi, pendidikan,

menyajikan kebudayaan, hiburan dan integrasi. Dalam kaitannya dengan keragaman teori, Littlejohn dan Foss (2003 : 3), menyatakan bahwa teori adalah hasil dari berbagai diskusi dan setiap orang yang berbeda, bisa memilih jalan berbeda dalam proses pemahaman. Jadi dapat dimaklumi jika suatu teori berbeda dengan teori lainnya.

Pendapat yang menggarisbawahi komunikasi berhubungan dengan proses, antara lain dikemukakan oleh Rogers (1986 : 209), "komunikasi merupakan proses dimana mereka yang terlibat didalamnya, menciptakan dan berbagi informasi satu dengan lainnya, untuk mencapai pengertian bersama". Intinya, komunikasi merupakan kejadian bersama, yang menyangkut proses informasi diantara dua orang atau lebih. Jaringan komunikasi terdiri dari individu-individu yang saling berhubungan dalam arus informasi dengan menggunakan pola tertentu.

Barclson dan Steiner (dalam Bower dan Bradac, 1982 : 4), menegaskan, komunikasi adalah, "suatu proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian dan lain-lain melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar-gambar, angka-angka dan lain-lain". Penggunaan simbol-simbol dalam konteks komunikasi dikemukakan oleh Erns Casserer (1946) yang menyatakan bahwa komunikasi manusia adalah unik, dalam prakteknya manusia merupakan satu-satunya makhluk yang menggunakan simbol-simbol dan penggunaan simbol ini sangat fundamental bagi kemanusiaan. Pendapat lebih singkat dari Barlund (dalam Ruben, 1992), menyebutkan bahwa, "komunikasi adalah upaya memhangkitkan makna".

Tiga level yang selalu muncul sebagai problem komunikasi yang berhubungan dengan simbol dan makna menurut Weaver (dalam Shannon and Weaver, 1972 : 4) mencakup bagaimana simbol-simbol komunikasi ditransmisikan (problem teknik), bagaimana ketepatan simbol-simbol yang sudah dikirimkan tersebut mampu memhangkitkan makna yang dikehendaki (problem semantik), dan bagaimana efektivitas dari makna yang diterima dapat mempengaruhi hasrat dan tingkah laku (problem efektivitas).

Sedemikian banyaknya definisi, konsep maupun pengertian komunikasi menunjukkan bahwa, komunikasi tidak terlepas dari anggapan sebagai ilmu yang multi disiplin. Schramm (dalam Berger and Chaffee, 1987) menyebutkan, komunikasi bukan hanya berkaitan dengan model psikologi dan matematika tetapi juga persimpangan dari berbagai disiplin ilmu yang mempengaruhi dan membentuk karakter komunikasi itu sendiri. Wilbur Schramm (dalam Berger,

1987 : 16), menyatakan bahwa eksistensi dan perkembangan ilmu komunikasi berasal dari berbagai disiplin ilmu dan ahli psikologi yaitu Hayland dan Lewin, dari sosiologi oleh Lazarsfeld, sedangkan dari ilmu politik oleh Harold Lasswell.

Menurut Ruben (1992 : 14), "komunikasi adalah suatu proses dengan mana kita bisa memahami dan dipahami oleh orang lain", komunikasi merupakan proses yang dinamis dan secara konstan berubah sesuai dengan situasi yang berlaku, sedangkan pendapat Barlund (dalam Bower dan Bradac, 1982 : 3) menyebutkan, komunikasi merupakan gambaran yang muncul dari ungkahan laku dua belah pihak. Hubungan pihak-pihak yang berinteraksi merupakan unit terkecil dalam analisis. Dari dua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa komunikasi merupakan proses yang dinamis dalam suatu interaksi yang didukung pula oleh situasi pada saat berlangsungnya komunikasi.

Dalam pembahasan tentang komunikasi politik, Dan Nimmo (1993:5) mengutip pengertian komunikasi dari beberapa sumber, antara lain; komunikasi adalah pengalihan informasi untuk memperoleh tanggapan (Aranguren). Komunikasi adalah pengkoordinasian makna antara seseorang dengan khalayak (Melvin I. DeFleur). Komunikasi merupakan tindakan saling berbagi informasi, gagasan atau sikap (Wilbur Schramm). Komunikasi identik dengan saling berbagi unsur-unsur perilaku, atau *modus* kehidupan, melalui perangkat aturan (Colin Cherry).

Pendapat lain dari William Stephenson (dalam Dan Nimmo, 1993), komunikasi sekadar penerusan informasi dari suatu sumber kepada publik, ia lebih mudah dipahami sebagai penciptaan kembali gagasan-gagasan informasi oleh publik jika diberikan petunjuk dengan simbol, slogan atau tema pokok. Secara esensial, Dan Nimmo berupaya menelaah pengertian dan batasan tentang komunikasi manusia dengan komunikasi politik yang dibahas lebih terinci, menyangkut komunikator, pesan, media, khalayak dan efek.

B. Konteks Komunikasi

Dalam pandangan Littlejohn dan Foss (2005 : 11), ada lima konteks analisis dalam teori komunikasi, yaitu : Komunikasi Interpersonal (*Intrapersonal Communication*), Komunikasi Kelompok (*Group Communication*), Komunikasi Publik (*Public Communication*), Komunikasi Organisasi (*Organizational Communication*), dan Komunikasi Massa (*Mass Communication*).

1. Komunikasi Intrapersonal

Merupakan proses komunikasi yang terjadi dalam diri seseorang. Pusat perhatian ada pada proses pengolahan informasi yang dialami seseorang melalui sistem syaraf dan indranya. Teori Komunikasi Intrapersonal, umumnya membahas proses pemahaman, ingatan dan interpretasi terhadap simbol-simbol yang ditangkap melalui panca indera. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa komunikasi intrapersonal adalah komunikasi yang terjadi dengan diri sendiri, yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja. Karena itu, dapat berlangsung setiap saat pada diri seseorang, maka komunikasi intrapersonal juga dikatakan sebagai inti dari kegiatan komunikasi manusia. Sebab tanpa memahami diri sendiri, maka sulit untuk memahami orang lain dalam suatu interaksi dan komunikasi.

2. Komunikasi Interpersonal

Komunikasi Interpersonal atau komunikasi antar pribadi, adalah komunikasi perorangan yang bersifat pribadi, baik secara langsung tanpa medium, ataupun langsung melalui medium. Contoh percakapan tatap muka (*face to face communication*), percakapan melalui telepon, surat menyurat pribadi. Teori Komunikasi Antar Pribadi umumnya memfokuskan pengamatannya pada bentuk-bentuk dan sifat hubungan (*relationship*), percakapan (*discourse*), interaksi dan karakteristik komunikator.

Komunikasi interpersonal, banyak membahas tentang bagaimana suatu hubungan dimulai, dipertahankan atau mengalami kemunduran. Sub pembahasan dalam komunikasi interpersonal antara lain, keluarga, pertemanan, pernikahan, hubungan dokter-pasien dan relasi di lingkungan kerja.

3. Komunikasi Kelompok

Komunikasi kelompok menitikberatkan pembahasan pada interaksi diantara orang-orang dalam kelompok kecil, yang terdiri dari beberapa orang yang bekerja untuk mencapai 8 tujuan bersama. Ada perbedaan pendapat tentang jumlah orang dalam kelompok kecil, misalnya ada yang berpendapat maksimal 5 sampai 7 orang, tetapi semuanya sepakat bahwa kelompok kecil harus terdiri dari minimal tiga orang.

Pembahasan terhadap komunikasi kelompok kecil berkisar kepada dinamika kelompok, efisiensi dan efektivitas penyampaian informasi dalam kelompok, pola atau bentuk interaksi, serta pembuatan keputusan dalam

kelompok kecil, dikenal juga kohesif yaitu rasa kebersamaan dalam suatu kelompok, sinergi sebagai proses dari berbagai sudut pandang untuk mengatasi permasalahan, dan jaringan yaitu pola komunikasi yang menyalurkan informasi

4. Komunikasi Organisasi

Komunikasi Organisasi merujuk kepada pola dan bentuk komunikasi yang terjadi dalam konteks jaringan dan struktur organisasi. Komunikasi organisasi juga melibatkan bentuk komunikasi formal, informal, komunikasi interpersonal maupun komunikasi kelompok. Pembahasan dititikberatkan kepada struktur dan fungsi organisasi, hubungan antar manusia, komunikasi dan proses pengorganisasian serta budaya organisasi.

Secara fungsional, menurut Pace dan Faules (1998 : 31), "komunikasi organisasi merupakan penafsiran pesan diantara unit-unit komunikasi, yang merupakan bagian dari suatu organisasi tertentu". Suatu organisasi terdiri dari unit-unit komunikasi yang memiliki hubungan hirarkis diantara unit yang satu dengan unit yang lainnya dalam suatu sistem komunikasi dan informasi yang terintegrasi

Dalam pandangan Myers dan Myers (1988 : 17), terdapat tiga fungsi umum komunikasi organisasi, yaitu (1) Produksi dan Pengaturan (*production and regulation*), (2) Pembaharuan (*innovation*), dan (3) Sosialisasi dan Pemeliharaan (*socialization and maintenance*). Secara terinci ketiga fungsi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Produksi dan Pengaturan
 - a. Menentukan sasaran dan tujuan
 - b. Merumuskan bidang-bidang masalah
 - c. Menilai prestasi
 - d. Mengkoordinir tugas-tugas yang secara fungsional saling bergantung
 - e. Menentukan ukuran prestasi
 - f. Memberi komando, menunjukkan kepada pegawai apa yang harus dikerjakan dan memberi perintah
 - g. Memberi instruksi kepada pegawai bagaimana melaksanakan suatu perintah, mengembangkan prosedur dan kebijakan
 - h. Menimpin dan mempengaruhi

2. Pembaharuan
3. Sosial atau Pemeliharaan
 - a. Apa saja yang mempengaruhi penghargaan diri staf
 - b. Hubungan antar pribadi dalam organisasi
 - c. Motivasi untuk menyatukan sasaran-sasaran individual dengan tujuan organisasi

Berpijak kepada fungsi komunikasi dalam organisasi tersebut diatas, pada intinya, komunikasi memiliki eksistensi yang kuat terhadap dinamika organisasi. Dengan kata lain, komunikasi merupakan faktor yang berperan dalam perkembangan atau kemunduran organisasi.

5. Komunikasi Massa

Merupakan komunikasi melalui media massa yang ditujukan kepada sejumlah khalayak yang besar. Proses komunikasi massa melibatkan aspek komunikasi intrapersonal, komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok dan komunikasi organisasi. Teori Komunikasi massa umumnya memfokuskan pada struktur media, hubungan media dan masyarakat, hubungan antara media dan khalayak, aspek budaya dari komunikasi massa, serta dampak atau hasil komunikasi massa terhadap individu.

Media massa, selain membawa pesan persuasi, sudah melekat dalam kehidupan masyarakat modern dan dianggap sebagai sumber berita maupun hiburan yang dibutuhkan. Berdasarkan hasil riset Veronis Suhler (dalam John Vivian, 2008 : 3), orang menghabiskan rata-rata 40 persen dari hari mereka, dan 60 persen dari waktu bangun mereka bersama media massa. Berarti, orang memiliki ketergantungan yang sangat besar terhadap media massa. Bahkan perekonomian konsumen Amerika Serikat tergantung kepada iklan untuk menciptakan pangsa pasar yang besar. anak-anak AS menonton 30.000 sampai 40.000 pesan komersial setiap tahun.

Menurut John Vivian (2008 : 5), ada empat hal yang terkait dengan eksistensi media massa, yaitu :

- a. Melalui media massa, kita mengetahui hampir segala sesuatu kejadian di seluruh dunia walaupun jauh diluar lingkungan kita
- b. Warga yang berpengetahuan (*informed*) dan aktif, sangat mungkin terwujud didalam demokrasi modern jika media massa berjalan dengan baik.

- c. Orang memanfaatkan media massa untuk mengekspresikan ide-ide mereka kepada masyarakat luas.
- d. Negara-negara kuat menggunakan media massa untuk menyebarkan ideologinya dan untuk tujuan komersial. Media massa adalah alat utama para propagandis, pengiklan dan orang-orang yang berusaha mempengaruhi orang lain.

Selain lima konteks komunikasi dari Littlejohn dan Ross tersebut diatas, dalam komunikasi manusia, Tubb dan Moss (2006 : 18) menetapkan enam konteks komunikasi yang mencakup: (1) komunikasi dua orang, (2) wawancara, (3) komunikasi kelompok kecil, (4) komunikasi publik, (5) komunikasi organisasional dan (6) komunikasi massa. Selain itu, keenam konteks juga melibatkan komunikasi antar budaya. Secara umum konteks tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Komunikasi dua orang atau komunikasi diadik (*dyadic communication*), adalah satuan dasar komunikasi. Pada hakikatnya komunikasi dua orang mencakup hampir semua komunikasi informal dan percakapan sehari-hari yang dilakukan manusia sepanjang hari. Komunikasi diadik juga mencakup hubungan manusia yang paling erat.
2. Wawancara, merupakan percakapan dengan tujuan tertentu. Biasanya melibatkan dua orang, sehingga dapat digolongkan sebagai komunikasi diadik yang khusus.
3. Komunikasi Kelompok Kecil, adalah proses pertukaran pesan verbal dan non verbal antara tiga orang atau lebih anggota kelompok, yang bertujuan untuk saling mempengaruhi.
4. Komunikasi Publik seringkali dihubungkan dengan *public speaking*. Ada beberapa ciri komunikasi publik, yaitu sering muncul di tempat umum daripada di tempat pribadi, relatif lebih formal dan terstruktur dan memiliki norma etiket yang jelas yang harus dipatuhi.
5. Komunikasi organisasi, merupakan arus pesan dalam suatu jaringan hubungan yang saling bergantung.
6. Komunikasi Massa, adalah komunikasi yang menggunakan media cetak maupun media elektronik. Pesan ditujukan untuk sejumlah besar individu dan kelompok yang memperoleh umpan balik yang terbatas, jika dibandingkan dengan komunikasi dua orang atau komunikasi kelompok kecil.
7. Komunikasi Antar Budaya adalah komunikasi yang terjadi diantara orang-orang yang memiliki kebudayaan berbeda atau bisa saja

perbedaan ras, etnik, sosial ekonomi, atau gabungan dari semua perbedaan tersebut.

Dikaitkan dengan konsep yang berkembang dalam studi komunikasi, Blake dan Haroldsen (1975 : 25), menetapkan bentuk komunikasi yang terdiri dari: (1) Komunikasi Intrapersonal, (2) Komunikasi Interpersonal atau Komunikasi Antar Pribadi, (3) Komunikasi Organisasi, (4) Rumor atau berita yang beredar luas tetapi tidak jelas sumbernya, (5) Media Komunikasi yang lebih bersifat instrumen teknis (6) Komunikasi Massa, (7) Media Massa, (8) Telekomunikasi sebuah produk revolusi industri yang mempermudah proses komunikasi, (9) Komunikasi Non Verbal sebagai penyampaian pesan melalui simbol-simbol, (10) Komunikasi Politik.

Berpijak kepada konteks komunikasi maupun bentuk yang lazim digunakan dalam komunikasi antar manusia, pada intinya bahwa komunikasi memiliki cakupan yang bervariasi dari luas, namun tidak lepas dari proses penyampaian pesan dari pengirim atau sumber pesan kepada penerima pesan, dengan pola ataupun proses yang beraneka ragam.

Jika ditinjau dari pemahaman terhadap hubungan yang kompleks diantara elemen-elemen dalam proses komunikasi, West dan Turner (2008 : 14) menetapkan tiga model komunikasi yaitu : model komunikasi linear yang bergerak satu arah, model komunikasi interaksional yang menghasilkan pertukaran makna melalui umpan balik, dan komunikasi transaksional, yaitu komunikasi antara pengirim dan penerima pesan yang membangun kesamaan makna berdasarkan pengalaman sebelumnya.

Selain masalah konteks, bentuk ataupun model komunikasi tersebut, maka Deddy Mulyana (2005 : 83), menetapkan 12 (dua belas) prinsip komunikasi, yaitu:

1. Komunikasi adalah suatu proses simbolik
2. Setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi
3. Komunikasi mempunyai dimensi isi dan dimensi hubungan
4. Komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesungguhan
5. Komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu
6. Komunikasi melibatkan proses prediksi peserta komunikasi
7. Komunikasi itu bersifat sistemik
8. Semakin mirip latarbelakang sosial budaya, semakin efektiflah komunikasi

9. Komunikasi bersifat nonsekuensial (tidak selalu teratur secara linear)
10. Komunikasi bersifat prososial, dinamis dan transaksional
11. Komunikasi bersifat *irreversible* (tidak dapat dikembalikan seperti bentuk semula, termasuk diralat)
12. Komunikasi bukan panacea (obat mujarab) untuk menyelesaikan berbagai masalah

Prinsip-prinsip tersebut diatas merupakan penjabaran lebih jauh dari berbagai definisi dan hakikat komunikasi yang telah dibahas oleh para pakar komunikasi yang diwujudkan dalam bentuk asumsi komunikasi ataupun karakteristik-karakteristik komunikasi.

C. Teknologi Komunikasi

Perkembangan teknologi komunikasi yang mendukung penyebaran pesan dengan cepat melalui televisi, surat kabar, telepon seluler, internet dan perangkat elektronik lainnya, semakin memudahkan komunikasi manusia. Karena itu pembahasan terhadap teknologi komunikasi seringkali dihubungkan dengan adopsi terhadap penggunaan teknologi baru yang dipakai dalam komunikasi, dan dampak sosial, yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi komunikasi.

Teknologi yang digunakan dalam komunikasi manusia pada umumnya, mempunyai perangkat keras, yang terdiri dari material atau *physical object*, dan perangkat lunak, yang terdiri dari perangkat keras informasi. Menurut Roger (1986: 1-2), teknologi merupakan sesuatu yang dapat dipakai untuk mengurangi ketidakpastian dalam hubungan timbal balik, demi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Selain itu teknologi komunikasi dapat membuka jendela dunia yang membuat kita mengetahui berbagai macam peristiwa yang sesungguhnya kita tidak mengalaminya secara langsung.

Dari berbagai teknologi komunikasi baru, maka internet merupakan media baru yang memiliki pengaruh amat kuat dalam penirosean dan penyebaran informasi. John Vivian (2008: 262) pada intinya menegaskan, bahwa komunikasi internet menggeser kontrol komunikasi yang dilakukan melalui media massa. Penerima informasi tidak hanya menerima serangkaian pesan sebagaimana dalam siaran berita televisi, tetapi mereka bisa berpartisipasi ke banyak saluran yang mirip dengan siaran lisan-lisan (*web*), dan mereka menghubungkan setiap pengirim dan penerima dalam waktu yang sangat cepat.

Namun jika ditinjau dari dampak sosial, penggunaan teknologi komunikasi tidak selalu menguntungkan dalam hubungan sosial di masyarakat. Menurut Sendjaja (1991:147), "penggunaan produk teknologi komunikasi tidak semata-mata menyangkut aspek fisik teknologi dan ekonomi, tetapi juga melibatkan faktor sosial kultural". Dengan demikian, penggunaan teknologi komunikasi harus memperhatikan pula aspek sosial budayanya, diluar faktor efisiensi maupun efektivitas yang berorientasi kepada faktor material semata. Namun demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa ada kecenderungan kuat teknologi komunikasi yang semakin dikenal oleh masyarakat, telah memarginalkan nilai sosial budaya yang bagi sekelompok komunitas masih menjadi pegangan.

D. Komunikasi Efektif

Komunikasi dinilai efektif, bila rangsangan yang disampaikan dan yang dimaksud oleh pengirim atau sumber, berkaitan erat dengan rangsangan yang ditangkap dan dipahami oleh penerima. Intinya, antara *Sender* (S) dan *Receiver* (R) ada kesamaan dalam memahami makna. Bila ini terjadi, maka komunikasi dapat dikatakan berjalan dengan baik.

Secara umum, menurut Goyer (dalam Tubb dan Moss, 2006 : 24), menyebutkan, komunikasi dinilai efektif, bila rangsangan yang disampaikan dan dimaksud oleh pengirimnya ataupun sumber pesan, sejalan dengan rangsangan yang ditangkap dan dipahami oleh penerima pesan.

Lima faktor yang dapat dipakai sebagai ukuran untuk menetapkan komunikasi berjalan dengan efektif adalah: (1) pemahaman terhadap pesan oleh penerima pesan, (2) memberikan kesenangan kepada pihak-pihak yang berkomunikasi seperti halnya dalam mempertahankan hubungan, (3) mampu mempengaruhi sikap orang lain, (4) memperbaiki hubungan, (5) memberikan hasil yang sesuai dengan yang diinginkan dalam bentuk tindakan dari penerima pesan.

Untuk menentukan komunikasi efektif tercapai sasaran yang dikehendaki, Deddy Mulyana (2005 : 107), menyebutkan, bahwa, "komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang hasilnya sesuai dengan harapan para pesertanya (orang-orang yang sedang berkomunikasi)". Kesanannya dalam hal tertentu, misalnya bahasa, tingkat pendidikan ataupun tingkat ekonomi akan mendorong orang-orang untuk saling tertarik sehingga komunikasi yang dilakukan bisa lebih efektif.

Meskipun komunikasi efektif dapat ditunjang oleh berbagai kesamaan karakter dari pihak-pihak yang berkomunikasi, tetapi ada masalah-masalah yang berpotensi menjadi penghalang komunikasi efektif. Pada konteks ini, khususnya yang menyangkut aliran informasi dalam organisasi. Stephen P. Robbins (1996 : 14) dalam pembahasan tentang perilaku organisasi yang dihubungkan dengan peran ataupun eksistensi komunikasi dalam organisasi, memaparkan tiga faktor yang berpotensi menghambat tercapainya komunikasi, yaitu :

1. Penyaringan atau manipulasi terhadap informasi, dengan tujuan supaya menguntungkan atau merugikan bagi penerima informasi.
2. Persepsi Selektif, melihat, mendengar berdasarkan kebutuhan individual. Tindakan ini cenderung mengabaikan substansi pesan yang lebih luas, tetapi hanya menggaris bawahi pesan yang dibutuhkan.
3. Emosi atau perasaan penerima ketika menerima pesan. Jika penerima pesan dalam keadaan emosi, maka pengirim pesan sulit untuk memperoleh respon yang diharapkan, demikian juga sebaliknya jika pengirim pesan masih diliputi rasa emosi, penerima pesan pun juga memberikan respon yang berbeda dengan maksud pesan yang sesungguhnya.

Pada prinsipnya komunikasi yang efektif mampu menciptakan kesamaan makna antara pengirim dan penerima pesan. Namun mengingat proses komunikasi juga menyangkut kerangka pemikiran pihak-pihak yang berkomunikasi, karakteristik pengirim, penerima, jenis pesan dan media yang digunakan, maka untuk menghasilkan komunikasi yang efektif tidak mudah. Namun melalui strategi yang baik, termasuk didalamnya menggunakan etika dan penggunaan teknologi yang memadai, dapat menghasilkan komunikasi efektif sebagaimana yang diharapkan.

E. Penelitian Dalam Komunikasi

Untuk mendukung pemahaman terhadap bentuk, konteks, prinsip dan asumsi-asumsi dalam komunikasi, perlu dikemukakan pula aneka pendekatan dalam proses penelitian komunikasi. Beberapa bentuk yang lazim digunakan adalah, (1) Pendekatan Positivistik (Empiris) "sebagai pendekatan yang berasumsi akan adanya realita yang objektif dan penelitian yang bebas dari nilai", (2) Pendekatan Interpretif (Hermeneutik) dihubungkan dengan tindakan yang penuh makna, kebenaran dilihat sebagai sesuatu yang subyektif, dan partisipasi peneliti dalam penelitian sangat ditekankan (Garia, 1999:26),

dan, (3) Pendekatan Kritis, yang menekankan pada tanggung jawab peneliti untuk mengubah ketidakadilan dalam kondisi status-quo.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian komunikasi, antara lain adalah Metode Kuantitatif, yang mengkonversikan data menjadi angka, dan ditujukan untuk analisis statistik". Selain itu terdapat Metode Kualitatif, sebagai suatu metode, dimana data diinterpretasikan melalui analisis pemahaman, dan menekankan kepada pengamatan mendalam terhadap manusia dan lingkungannya (Bogdan dan Taylor, 1975 : 5). Disamping metode kuantitatif dan kualitatif, menurut West dan Turner (2008 :69), ada model Triangulasi, yaitu suatu pendekatan terhadap riset yang melibatkan lebih dari satu metode. Dalam penelitian komunikasi dikenal juga berbagai jenis penelitian dan aneka macam pendekatan untuk mengeksplorasi data, antara lain adalah :

1. Penelitian Survei, yaitu metode penelitian tertentu yang meminta partisipan merespon pertanyaan tertulis. Menurut Singarimbun (dalam Singarimbun dan Effendi, 1989 : 1), penelitian survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok.
2. Penelitian Eksperimen, sebagai metode penelitian khusus, dimana peneliti melakukan manipulasi kondisi; seringkali dilakukan di dalam laboratorium.
3. Wawancara mendalam (*in-depth interview*), wawancara semi terstruktur atau tidak terstruktur dan berlangsung selama paling tidak satu jam dan bertujuan untuk mengumpulkan deskripsi yang mendalam dari para responden.
4. Etnografi "metode penelitian khusus dimana para peneliti melibatkan diri mereka dalam kehidupan partisipan dengan tujuan untuk mendeskripsikan pola-pola komunikasi manusia yang unik secara budaya
5. Analisis Teksual "metode penelitian yang mengharuskan peneliti untuk menganalisis teks tertentu seperti pidato kepresidenan atau film sinema televisi. Teks menurut Ricoeur adalah wacana (berarti lisan) yang difiksikan ke dalam bentuk tulisan, atau pendapat Kris Budiman, teks merupakan seperangkat tanda yang ditransmisikan dari seorang pengirim kepada penerima (Alex Solari, 2006 :53).
6. Analisis Isi "teknik untuk analisis tekstual yang menggunakan peneliti untuk mengodekan unit-unit menjadi kategori yang pasti

Hasilnya, berbagai macam pendekatan, metode, model pengumpulan data dan analisis dalam penelitian komunikasi, penerapannya sangat bergantung kepada kelayakan terhadap topik yang akan diteliti, namun tidak menutup kemungkinan justru yang paling mendasar adalah kemampuan ataupun ketertarikan peneliti terhadap metodologi yang dianggap memadai untuk mendukung penelitiannya.

Bab 2

KOMUNIKASI POLITIK

Secara substansial, komunikasi politik biasa dihubungkan dengan pembicaraan politik atau penyampaian pesan politik verbal maupun non verbal, yang dapat mempengaruhi rakyat ataupun pemegang kekuasaan dalam suatu sistem politik. Dapat juga dikatakan, komunikasi politik adalah penyampaian pesan yang bermuatan politik dari suatu sumber kepada penerima untuk menciptakan pemahaman makna bersama.

Keterkaitan erat komunikasi dan politik, khususnya dalam penelitian terhadap peran negara, ditegaskan oleh MacBride (1983:85), bahwa komunikasi secara keseluruhan tidak dapat dimengerti apabila tidak dihubungkan dengan dimensi politik, masalah-masalahnya tidak dapat diselesaikan apabila tidak diperhatikan hubungan politik-politiknya. Secara umum, komunikasi politik digunakan dalam konteks penelitian pesan-pesan yang diorganisasikan dan disebarkan kepada rakyat oleh organ-organ kekuasaan negara maupun institusi pemerintah.

A. Batasan Komunikasi Politik

Untuk memahami komunikasi politik, ada baiknya diketahui lebih dahulu pernyataan mendasar dari Watzlawik (dalam Bower dan Bradac, 1982 : 3), "manusia adalah makhluk yang tidak bisa tidak berkomunikasi". Dengan kata lain, semua tingkah laku manusia, termasuk pada saat diam, tidak merespon pesan politik dari suatu sumber, tetap saja menimbulkan makna yang terkait dengan nuansa politik. Sedangkan Dan Nimmo (1993 : 167), menyatakan bahwa, saluran komunikasi bukan sekadar titik sambungan, tetapi terdiri atas pengertian bersama tentang siapa dapat berbicara kepada siapa, mengenai apa, dalam keadaan bagaimana, sejauhmana dapat dipercaya.

Pengertian komunikasi yang beragam, jika dipakai sebagai landasan untuk memahami komunikasi politik, harus dihubungkan pula dengan konsep-konsep politik yang berkembang sejalan dengan dinamika komunikasi. Menurut Harold D. Lasswell, ilmu politik mempelajari siapa mendapatkan apa, kapan dan bagaimana. Sedangkan Roger F. Soltou (dalam Mirriam Budiardjo, 2003), menafsirkan, ilmu politik adalah "ilmu yang mempelajari negara, tujuan negara, dan lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu, hubungan negara dengan warga negaranya serta hubungan dengan negara lain".

Politik sendiri dari beberapa ahli diartikan sebagai siapa memperoleh apa, kapan dan bagaimana, pembagian nilai-nilai oleh yang berwenang; tindakan yang diarahkan untuk mempertahankan dan atau memperluas tindakan lainnya, atau kegiatan orang secara kolektif yang mengatur perbuatan mereka di dalam kondisi konflik sosial.

Sementara dalam kaitannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, Bambang Setiawan (1990 : 407), menyatakan bahwa, "komunikasi politik adalah proses penyampaian pendapat, sikap dan tingkah laku orang-orang, lembaga-lembaga atau kekuatan-kekuatan politik dalam rangka mempengaruhi pengambilan keputusan politik, sedangkan yang dimaksud dengan politik tidak lain adalah kehidupan bernegara". Dengan kata lain, penyampaian pesan dalam komunikasi politik diwarnai oleh kompleksitas kehidupan politik dalam bernegara.

Sedemikian eratnya hubungan antara komunikasi politik dengan ruang lingkup politik, seperti kekuasaan dan sistem pemerintahan, menghasilkan definisi yang merujuk kepada karakter komunikasi dalam lingkup studi ilmu politik. Pendapat lain menyebutkan, Komunikasi Politik merupakan proses komunikasi massa, termasuk komunikasi antar pribadi dan elemen-elemen di dalamnya yang mungkin mempunyai dampak terhadap perilaku politik (Krans dan Davis, 1976 : 7). Mempunyai substansi yang sama dengan batasan itu adalah pendapat Rühl dan Althoff, (1997 : 225) yang menyebutkan, "komunikasi politik merupakan transmisi informasi yang secara politis dari satu bagian sistem politik, kepada sistem politik yang lain, dan antara sistem sosial dan sistem politik merupakan unsur dinamis dari suatu sistem politik secara keseluruhan". Pernyataan tersebut lebih menitikberatkan kepada penyampaian pesan-pesan politik dalam suatu sistem politik dan tidak melihat eksistensi individual dalam proses komunikasi politik.

Dalam tuturan riset komunikasi politik, Deha (1987:267) menyatakan, bahwa riset komunikasi dan masalah-masalah politik selalu berhubungan dengan

dasar-dasar pengagungan pemerintah dalam mempengaruhi opini publik yang menyangkut kondisi politik domestik maupun internasional. Pendapat ini lebih menekankan kepada peran negara dalam upaya mempengaruhi rakyat, melalui pesan-pesan politik yang diorganisasikan dan disebarluaskan melalui strategi tertentu.

Pemahaman terhadap komunikasi politik memerlukan juga suatu gambaran tentang kekuasaan yang berlaku, karena kekuasaan politik sangat dipengaruhi oleh bagaimana realitas distribusi kekuasaan dalam suatu masyarakat, bangsa dan negara. Jika ada ketimpangan dalam distribusi kekuasaan, maka komunikasi politik menjadi semakin dinamis, tetapi tidak selalu menguntungkan bagi pihak tertentu, khususnya masyarakat.

Proses komunikasi politik yang bernuansa pada pengambilan keputusan politik biasanya selalu menunjuk pada posisi kekuasaan yang lebih besar, dan akan mendominasi semua keputusan politik yang berlaku dalam suatu negara. Pengabaian suara rakyat dalam komunikasi politik merupakan kecenderungan pemerintah otoriter yang membatasi kebebasan berkomunikasi dalam masalah-masalah politik. Sedangkan kekuasaan yang demokratis biasanya akan memberikan kesetaraan luas kepada masyarakat untuk melakukan pembicaraan politik, termasuk mengkritik kebijakan pemerintah yang dinilai tidak sejalan dengan tujuan menyejahterakan rakyat.

Menyangkut perubahan peran yang melekat pada sejumlah elitis dalam kekuasaan negara, Lippman (dalam Chatte, 1986 : 14), berpendapat, "tradisi utama yang melandasi munculnya bidang studi komunikasi politik adalah hubungan-hubungan atau perimbangan-perimbangan antara pers, pemerintah dan pendapat umum". Meski pemerintah dalam kondisi ini, terikat oleh strategi dalam rangka menjalankan kekuasaan politik, ekonomi maupun kekuasaan lain dalam urusan kenegaraan, tetapi tidak bisa mendominasi atau mengarahkan secara paksa dalam menciptakan pendapat umum melalui media massa.

Pada konteks yang lebih fleksibel terhadap eksistensi komunikasi politik, secara singkat Dan Nimmo (1993 : 8) menyebutkan bahwa, "Komunikasi politik merupakan komunikasi yang mengacu pada kegiatan politik". Dengan demikian semua kegiatan yang bernuansa politis yang dilakukan oleh pemerintah, atau kekuasaan negara beserta institusi pendukungnya maupun yang dilakukan rakyat juga termasuknya, dapat dikatakan sebagai bentuk komunikasi politik.

Studi komunikasi politik dapat diamati melalui lima komponen yang memiliki peran tersendiri, namun secara substansial memiliki hubungan secara langsung ataupun tidak langsung dalam aplikasinya. Lima komponen tersebut adalah: komunikator politik, pesan politik, media komunikasi politik, khlayak komunikasi politik, dan dampak komunikasi dalam politik.

1. Komunikator Politik

Komunikator politik merupakan seseorang yang memiliki kemampuan dalam komunikasi politik. Tiga kategori posisinya dalam masyarakat, meliputi:

- a. Politikus yang bertindak sebagai komunikator politik, mereka mencari pengaruh politik melalui komunikasi, memiliki posisi di dalam atau di luar jabatan pemerintah, berpandangan nasional atau sub-nasional, berurusan dengan berbagai macam masalah maupun masalah tunggal.
- b. Profesional dalam politik, kemunculan dipicu oleh revolusi komunikasi sebagai representasi dari media massa dan media khusus untuk kepentingan komunitas tertentu. Komunikator profesional memiliki kemampuan memiliki kemampuan untuk mengendalikan keterampilan mengolah simbol-simbol untuk mempengaruhi orang-orang yang memiliki perbedaan atau kelompok yang dibedakan.
- c. Aktivis sebagai komunikator politik. Termasuk dalam kelompok ini adalah para juru bicara kelompok kepentingan (*interest group*) tertentu, dan pemuka pendapat (*opinion leader*), yaitu orang-orang yang dikategorikan dapat dipercaya, karena dinilai mempunyai kredibilitas tinggi di lingkungannya.

Pada hakikatnya, politisi, komunikator profesional dan aktivis sebagai komunikator politik, harus memiliki kemampuan di dalam berkomunikasi, memiliki kesempatan dan kapasitas sebagai pemimpin.

2. Pesan Politik: Pembicaraan Politik dan Persuasi Politik

a. Pembicaraan politik

Pesan Politik menyangkut pembicaraan dan aneka informasi politik tentang kekuasaan, pengaruhnya dalam masyarakat, otoritas yang dimiliki dan konflik politik dalam persaingan yang melibatkan masyarakat, lembaga politik, pemerintah dan entitas lain yang bergerak dalam kegiatan politik.

Pembicaraan politik merupakan kegiatan simbolik yang dihubungkan dengan (1) lambang, (2) bahasa dan (3) opini publik. Ketiga faktor itu selalu melekat pada pesan-pesan politik yang disampaikan oleh komunikator politik kepada masyarakat dalam upaya untuk mencapai tujuan politik.

Secara umum, lambang atau simbol merupakan rujukan, sesuatu hal atau obyek yang memiliki kegunaan, kegiatan maupun fungsi dalam komunikasi politik. Simbol memungkinkan seseorang memikirkan sesuatu yang lebih mudah dipahami karena formulasinya yang sederhana, walaupun tidak semua simbol dalam bentuk yang familiar bagi suatu komunitas tertentu dalam masyarakat. Setiap simbol mengkomunikasikan suatu konsep, ide umum, pola atau bentuk yang dapat memberikan pemahaman makna dalam hubungan antar manusia, hubungan antara manusia dengan lingkungan maupun hubungan antara manusia dengan entitas lainnya.

Diantara semua bentuk simbol, menurut S.I. Hayakuwa (dalam Mulyana dan Rakhmat, 2006 : 98), "bahasa merupakan simbol yang paling rumit, halus dan berkembang". Rumit pada konteks ini, lebih ditekankan pada perbandingan fisik seperti atribut-atribut yang melekat dalam komunitas tertentu, yang lebih mudah untuk dipahami. Manusia berdasarkan kesepakatan bersama, dapat menjadikan bahasa sebagai suatu simbol untuk menetapkan berbagai hal yang ada disekelilingnya. Dengan demikian, bahasa merupakan suatu sistem kesepakatan-kesepakatan yang diperlukan dalam komunikasi antar manusia.

Sedangkan, opini publik dalam konteks pembicaraan politik ditekankan kepada peran komunikator dalam menciptakan opini publik untuk mempengaruhi masyarakat. Opini publik adalah kumpulan pendapat orang tentang suatu peristiwa, kasus, masalah yang mempengaruhi, melibatkan dan menarik minat khlayak, komunitas maupun masyarakat. (James Brice). Sementara itu dikaitkan dengan pencitraan, Walter Lippman (1998 : 153), menyatakan, "kalau opini umum dipopulerkan lewat pidato-pidato, headline surat kabar, sampulwara, film, kartun, novel atau lukisan, transformasi mereka ke dalam kepentingan manusia pertama-tama memerlukan abstraksi dari keadaan aslinya, dan kemudian animasi dari apa yang telah diabstraksikan itu". Seringkali orang tidak tertarik apalagi tergugah oleh hal-hal yang dilihat, tetapi seseorang yang dengan bakat artistiknya, mampu mengemas hal yang tidak menarik tersebut, menjadi daya pikat yang memaksa pengetahuan orang lain untuk menerimanya. Intinya, komunikator politik dituntut mampu untuk membuat sesuatu yang tidak menarik bagi rakyat, diubah menjadi salian yang disukai masyarakat luas, demi untuk mendukung tujuan dan target politik yang sudah ditetapkan.

b. Persuasi Politik

Dalam penyampaian pesan politik dipakai strategi persuasi untuk mempengaruhi masyarakat. Persuasi Politik merupakan teknik penyampaian pesan komunikasi politik melalui (1) Propaganda, menurut Dan Simono (1993: 125), merupakan suatu cara yang dipergunakan oleh kelompok terorganisasi, untuk menjangkau individu-individu yang secara psikologis dimanipulasi dan digabungkan ke dalam organisasi, (2) Iktim Politik, diarahkan kepada individu sebagai unit unit yang anonim dalam suatu kelompok massa yang heterogen, (3) Retorika, merupakan komunikasi transaksional yang dilakukan oleh seorang komunikator dengan khalayaknya, yang bertujuan untuk memperoleh manfaat (Mubaf Bahi).

3. Media Komunikasi Politik

Secara umum alat untuk mengirimkan pesan-pesan politik adalah (1) Saluran Organisasi, adalah institusi penyalur pesan politik, seperti partai politik, kelompok kepentingan dan organisasi massa yang memiliki tujuan spesifik, (2) Saluran Interpersonal, merupakan bentuk komunikasi tatap muka atau berperantara untuk mencapai tujuan politik, (3) Saluran Media Massa, penggunaan media massa seperti media cetak, media elektronik maupun media-online, untuk menyebarkan pesan politik yang dapat menjangkau sasaran khalayak heterogen dan sangat luas.

Selain tiga saluran tersebut diatas, Harsuno Suwardi (1995), menambahkan pesan politik dapat juga dimanifestasikan melalui "saluran khusus", seperti demonstrasi, huru-hara, atau peristiwa-peristiwa tertentu dalam kegiatan politik untuk mempengaruhi masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah bentuk pernyataan tidak puas atau boikot. Sedangkan dalam bentuk lain yang sifatnya lebih lunak adalah polling pendapat umum, yang digunakan sebagai saluran untuk mengungkapkan pikiran kontroversial yang ada dalam masyarakat.

Keempat bentuk media komunikasi politik tersebut dapat dipakai secara selektif untuk mengirimkan pesan politik yang dikehendaki, dan yang lebih penting lagi harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi politik yang terjadi. Sebab tidak semua saluran komunikasi politik tersebut dapat digunakan dalam menghadapi berbagai peristiwa politik yang memiliki karakteristik beragam.

4. Khalayak Komunikasi Politik

Secara umum, khalayak komunikasi politik dapat dibentuk melalui opini

publik, dengan catatan jika opini yang dibentuk oleh komunikator politik dapat diterima secara luas oleh masyarakat. Sebab tidak semua opini bisa dengan mudah menjadi pendapat umum yang memiliki banyak pengikut. Karena itu keberhasilan membuat opini publik adalah kunci dari terbentuknya khalayak komunikasi politik.

Komunikator politik membentuk opini publik dengan merumuskan isu tentang konflik politik, persaingan politik dan kegiatan politik lainnya, agar dapat dipahami, menarik dan mempengaruhi rakyat untuk bersikap. persoalannya, tidak mudah membuat suatu isu menjadi menarik bagi masyarakat luas, sebab jika tidak menyangkut kepentingan langsung atau tidak langsung, maka opini menjadi tidak menarik perhatian. Pada hakikatnya, pendapat umum memang sangat sensitif terhadap masalah yang menyangkut kepentingan dan dirasakan oleh masyarakat luas.

5. Dampak Komunikasi Politik

Konsekuensi dari sosialisasi politik yang dilakukan oleh komunikator politik, antara lain adalah pembelajaran politik dan partisipasi politik dari masyarakat. Sosialisasi politik merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem politik kepada seseorang, dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya terhadap gejala-gejala politik (Rush dan Althoff, 1997: 27). Sedangkan partisipasi politik menurut Budiardjo (1994: 183), adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih kepala negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah. Partisipasi politik, antara lain mencakup tindakan memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum tentang politik, menjadi anggota partai politik dan kelompok kepentingan.

Partisipasi politik yang seringkali dipakai sebagai ukuran keikutsertaan dalam kehidupan politik adalah keterlibatan di dalam pemungutan suara atau pemilihan umum untuk memilih presiden, anggota legislatif maupun pejabat publik lainnya yang ditentukan sesuai dengan sistem politik yang berlaku.

B. Komunikasi Politik dan Pembangunan

Jika mendiskusikan komunikasi politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka akan bersentuhan pula dengan eksistensi pemerintah dalam menetapkan kebijakan di bidang pembangunan. Nuanisa komunikasi politik akan

terasa ketika mengartikan peran kekuasaan negara dalam mengorganisasikan pesan politik kepada rakyat untuk mendukung program pembangunan. Pesan politik untuk memberikan dukungan terhadap program pemerintah, dilakukan oleh komunikator yang mempunyai kekuasaan politik, seperti agen pembaharuan dan sub-ordinat kekuasaan negara yang memiliki tugas dan tanggungjawab memberikan pelayanan publik dalam pembangunan.

Pembangunan, sering ditafsirkan pula sebagai upaya memodernisasi diri, yang dianjurkan kepada pemerintah berkuasa untuk menjalin hubungan yang lebih dekat dengan negara maju. Pendekatan modernisasi tujuannya jelas, demi memperoleh bantuan keuangan, teknologi, dan dukungan lainnya dari negara maju. Tetapi kehendak ini tidak selamanya dapat diterima karena sebagian kelompok masyarakat memiliki pendirian berbeda, mereka lebih percaya terhadap teori dependensi, yang mengkaitkan bantuan dari negara maju, tidak memberikan keuntungan yang memadai bagi negara sedang berkembang. Suwarsono dan Alvin Y. So (1991:95), menegaskan bahwa teori dependensi mewakili suara-suara negara pinggiran, untuk menantang hegemoni ekonomi, politik, budaya dan intelektual dari negara maju.

Kelompok yang berpijak kepada pendekatan dependensi, berpendapat bahwa bantuan ataupun kerjasama dengan negara maju, akan menguatkan ketergantungan dan keterbelakangan negara periferi (pinggiran). Dalam tinjauan historis, negara periferi telah mengalami begitu banyak mengalami kerugian akibat keterkaitannya dengan negara maju. Bahkan sejak kekuasaan kolonial, sebagaimana dialami oleh sebagian besar negara berkembang di dunia, struktur sosial, ekonomi dan politik sudah disesuaikan dengan kepentingan negara maju atau pemerintahan kolonial pada masa itu.

Hakikatnya, diskursus perdebatan tentang pembangunan dalam suatu negara yang melibatkan kekuasaan politik dan masyarakat, akan bersentuhan dengan komunikasi politik yang berlangsung di suatu negara. Karena itu, pembahasan seputar pembangunan di negara sedang berkembang tidak bisa lepas dari konteks komunikasi politik. Dalam konteks pembangunan, komunikasi politik menurut Fagen (1966:20), adalah, "pertanyaan-pertanyaan tentang partisipasi, sosialisasi dan pembangunan". Jelas disini, pembangunan memiliki unsur komunikasi politik yang sangat kental. Untuk menarik masyarakat aktif dalam partisipasi terhadap pembangunan, maka diperlukan komunikasi politik yang bisa diterima dan sejalan dengan kehendak rakyat. Dalam arti pembangunan bukan sebagai upaya memaksakan kehendak politik, tetapi juga memberikan kepedulian terhadap kesejahteraan untuk rakyat, tanpa tersegmentasi dalam masalah sosial ekonomi, budaya dan politik.

Pemahaman terhadap komunikasi politik dan aplikasinya terhadap problem yang dihadapi negara sedang berkembang, dalam kamus negara maju (*core*) sangat beragam, dari masalah propaganda sebagai upaya sistematis untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang, melalui simbol-simbol demi mencapai tujuan yang dikehendaki sampai retorika pembangunan yang penuh dengan jargon bermakna represif terhadap rakyat.

Setelah menelaah esensi komunikasi dan komunikasi politik dari berbagai sudut pandang, maka dapat diketahui bahwa sifat fleksibel dari komunikasi dapat dipakai untuk menguraikan lebih lanjut tentang perannya, dalam kehidupan bernegara yang mencakup kekuasaan politik dan sosial ekonomi, pembangunan di negara-negara dunia ketiga yang diwarnai oleh ketidakadilan, kontradiksi, konflik dan ketimpangan lain yang tidak mudah dihilangkan begitu saja.

Jika pelaksanaan pembangunan penuh dengan problem yang kompleks, semestinya komunikasi politik mampu berperan untuk memberikan informasi yang menenteramkan masyarakat. Bukan sebaliknya dimana komunikator politik tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik malahan memperuncing persoalan. Komunikator politik sebagaimana banyak dibahas oleh Blanchard (1974), adalah aktor dalam komunikasi politik yang meliputi politikus, komunikator profesional yang terdiri dari jurnalis dan promotor, dan aktivis. Biasanya komunikator yang erat kaitannya dengan pembangunan adalah para juru bicara kelompok kepentingan dan para pemuka pendapat. Para komunikator politik ini terlibat langsung atau hanya sebagai pendukung yang keterlibatannya tidak secara langsung dalam kegiatan politik dan kekuasaan negara.

Sedemikian banyaknya tipologi komunikator politik mestinya dapat diandalkan untuk memberikan sumbangan pemikiran yang terbaik dalam pelaksanaan pembangunan di negara-negara berkembang. Tetapi kenyataan yang dihadapi, komunikator politik lebih banyak mendukung kebijakan politik pemerintahan yang berkuasa, menjadi juru bicara kelompok kepentingannya saja, menjadi corong negara asing yang mempunyai kekuatan paksa besar, dan lebih banyak berkolaborasi dengan pemilik modal atau kelompok-kelompok elite lainnya, yang mengendalikan kekuasaan politik negara. Intinya sehingga para komunikator politik tidak dapat diisrapkan terlalu banyak oleh masyarakat, karena berpotensi memberikan informasi yang menyimpang atau mereduksi informasi yang riil, menjadi informasi yang dilobis sesuai dengan kepentingannya. Problem semacam itu banyak diulas oleh Daniel Lerner

(1983) dalam penelitiannya di Timur Tengah, tentang memudarnya masyarakat tradisional dan peran para komunikator politik.

Rogers dan Svenning (1969), menelaah begitu banyak peran komunikator yang terkait dengan politik maupun *opinion leader*. Substansinya, walaupun ada harapan untuk memperoleh informasi yang obyektif, barangkali figur yang tepat ada pada para *opinion leader* tradisional, maupun juru bicara kelompok kepentingan yang berada di luar pemerintah dan kekuasaan politik. Mereka dinilai masih mempunyai ideologi obyektif sebagai komunikator program-program pembangunan yang digalakkan di masyarakat.

Obyektivitas sebuah informasi sangat diperlukan oleh masyarakat maupun individual sebab di dalam penelaahan yang mengarah pada kepentingan individual, Miller dan Steinberg (1975 : 207) menyatakan, komunikasi dan informasi diperlukan sebagai kebutuhan-kebutuhan untuk mengurangi rasa ketidakpastian, bertindak secara efektif, mempertahankan atau memperkuat kepercayaan sendiri dalam menghadapi berbagai persoalan. Peran *opinion leader* di luar ordinal kekuasaan negara, diasumsikan masih memiliki informasi yang tidak menipis, sehingga dipercaya oleh masyarakat.

Sejalan dengan pembahasan tentang ketidakpastian suatu informasi yang diperoleh dari hasil interaksi, Frank Dance (dalam Littlejohn, 1992 : 7) menemukan, salah satu paradigma penting di dalam komunikasi adalah, konsep reduksi ketidakpastian, para pakar yang berfokus pada konsep ini melihat komunikasi itu sendiri muncul karena adanya kebutuhan untuk mereduksi ketidakpastian, supaya dapat bertindak secara efektif demi melindungi atau memperkuat ego yang bersangkutan. Karena itu informasi yang faktual diperlukan, untuk memperkuat sikap dan mengurangi keraguan dalam perilaku komunikasi.

Kelompok komunikator yang berposisi diluar pemerintah, biasanya juga dipakai informasi oleh pencari berita, jurnalis, peneliti bahkan inteljen negara maju, sebagai sumber informasi yang kredibel untuk mengkonfrontasikan dengan informasi yang diperoleh dari agen-agen pemerintah. Perlu untuk diutarakan disini, pendapat tentang masalah dipercaya atau tidak dipercaya dalam konteks ini dihubungkan dengan tingkat kredibilitas.

Kredibilitas sumber informasi ataupun saluran komunikasi merupakan salah satu faktor yang mendukung terciptanya komunikasi yang efektif. Jika seseorang memiliki kredibilitas yang relatif tinggi dibandingkan beberapa

sumber atau saluran lainnya, maka apa yang datang dari orang tersebut lebih mudah diterima oleh individu ataupun kelompok lain. Kredibilitas menunjukkan nilai yang dihasilkan dari keahlian yang mengukur sejauhmana seorang komunikator diterima sebagai suatu sumber pernyataan yang tegas dan valid. Sifat dapat dipercaya merupakan tingkat kepercayaan dalam tujuan komunikasi yang mempertunbangkan kebenaran.

Kredibilitas atau mempercayai adalah tindakan penerima informasi yang digunakan berserta sebagai hal yang sah dan benar. Mempercayai juga berarti menerima ketulusan orang yang menggunakan informasi bersama-sama. Dengan begitu terdapat dua hal yang dipercaya yaitu dipercayainya pesan atau informasi, dan dipercayainya sumber pesan tersebut. Semua penting untuk menjelaskan perbedaan antar kedua sifat dipercayai tersebut.

Berbagai penelaahan tentang kredibilitas, khususnya di lingkungan masyarakat tradisional, menunjukkan pada sifat subyektivisme dan merujuk pada nilai kebenaran yang diyakini setiap individu maupun kelompok. Asumsi nilai dan kebenaran tersebut, melekat pula dalam pandangan Kincaid dan Schramm (1987: 34), yang menyatakan, bahwa ukuran untuk menilai dipercayai atau tidaknya sumber suatu pesan adalah : (1). Kecakapan dan kompetensinya mengenai persoalan yang bersangkutan dengan masalah di lingkungan khalayaknya, (2). Sampai seberapa jauh sumber itu dapat dipercayai untuk mengatakan kebenaran; (3). Kadang-kadang juga dinilai kedinamisan sumber yang dimaksud, juga dinilai semangat dan sikap ketulusannya yang nampak pada saat informasi digunakan bersama.

Sementara itu Michael L. Ray (1973 : 147) berpendapat, "sikap percaya dan sifat dapat dipercaya dibedakan dalam tiga zona yaitu penerimaan, non komitmen dan penolakan". Isu yang sesuai dengan pengetahuan yang telah ada mungkin diterima, sedangkan isu yang berada di luar ruang kehidupan seseorang akan ditolak. Sementara isu yang terdapat diantara kedua ekstrim ini akan jatuh pada zona nonkomitmen, misalnya isu yang keterlibatannya rendah dan tidak banyak menarik perhatian partisipan dalam suatu situasi komunikasi.

Pengkajian terhadap eksistensi kredibilitas sering masuk dalam wacana yang dinamis seperti diungkapkan De Vito (1987 : 78) yang mengemukakan berbagai jenis kredibilitas yaitu :

1. Kredibilitas awal (*initial credibility*), adalah sejauhmana komunikator diakui sebelum komunikasi aktual dimulai, tanpa memperhatikan

siapa yang kita ajak bicara atau tulisan siapa yang kita baca, sumber harus sudah terlihat kredibilitasnya. Kerap kali awal ini merupakan suatu fungsi penghargaan atau posisi individual.

2. Kredibilitas perolehan (*derived credibility*) merupakan kredibilitas yang diterima seorang pendengar yang didasarkan pada apa yang terjadi selama menghadapi komunikasi.
3. Kredibilitas terminal (*terminal credibility*) adalah kredibilitas yang dimiliki komunikator setelah interaksi komunikasi selesai. Kredibilitas terminal ini merupakan suatu produk dari kredibilitas awal dan kredibilitas perolehan. Berdasarkan pada kredibilitas awal dan kredibilitas perolehan tersebut maka terbentuk kredibilitas terminal.

Berbagai tulisan ilmiah komunikasi, komunikator sering disamakan dengan sumber pesan, komunikasi sebagai tingkah laku antar personal, dapat efektif merubah sikap khalayaknya tergantung kepada kredibilitas komunikator. Ada sejumlah penelitian yang menunjukkan bahwa keefektifan komunikasi banyak ditentukan oleh ciri komunikator seperti kredibilitas, daya tarik dan afiliasi kelompok. Penelitian Hovland dan Weiss (dalam Krech, Crutchfield dan Ballachey, 1962 : 231) menunjukkan komunikator sebagai sumber informasi yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi, lebih mampu untuk merubah sikap dan memberikan pemahaman dibanding dengan komunikator yang mempunyai tingkat kepercayaan rendah di mata khalayaknya. Kepercayaan yang tinggi, biasanya terkait pula dengan karakteristik individual, isi pesan, hubungan dengan kelompok-kelompok yang memiliki kesamaan nilai sosial kultural, dan situasi yang terkait pada saat dilakukan komunikasi. Faktor tersebut tidak bersifat mutlak selalu sejalan dengan perubahan, maka aspek kepentingan individual juga memegang peran yang penting.

Terikat dengan kredibilitas, problem komunikasi salah satunya adalah masalah percaya dan tidak percaya dari penerima pesan yang menyangkut sumber, saluran dan isi dari informasi yang disebarkan oleh komunikator. Penggunaan sumber informasi yang kompeten dan tidak mempunyai maksud-maksud lain tidaklah mudah ditemukan seperti dalam penelitian terhadap komunikasi pembangunan di negara-negara dunia ketiga. Masyarakat juga tidak mempunyai cukup keberanian untuk berbeda pendapat atau menolak informasi yang tidak benar ketika kekuasaan negara secara ketat ikut mengendalikan informasi, dan melakukan propaganda terus menerus untuk mempengaruhi khalayak secara paksa.

Dalam Model Spiral of Silence atau spiral kehutanan menurut Noelle-Neuman (1974), individu pada umumnya berusaha menghindari isolasi, dalam

arti sendiri, mempertahankan sikap dan keyakinan tertentu, oleh karena itu orang akan mengamati lingkungannya untuk mempelajari pandangan-pandangan mana yang bertahan dan mendapatkan dukungan, serta pendapat mana yang tidak dominan atau populer. Berkaitan dengan bagaimana terbentuknya pendapat umum Devito (1978 : 26) menggarisbawahi, di negara berkembang pandangan-pandangan yang dominan berasal dari penguasa, sehingga masyarakat tidak berani untuk berbeda pendapat. Kondisi ini bukan tidak diketahui oleh negara-negara lain terlebih lagi dengan dukungan teknologi komunikasi, maka informasi dapat tersebar luas melintasi batas etnik, ras dan geografis dalam waktu yang sangat cepat.

C. Media Massa dan Kekuasaan Politik

Ketika masyarakat lebih leluasa untuk menerima informasi, dan pada saat sumber-sumber pesan mampu mengalirkan informasinya lebih cepat dengan dukungan teknologi komunikasi yang tidak mengenal jarak dan waktu (Tebb dan Moss, 1996 : 224), maka berbagai peristiwa di seluruh dunia yang jauh dari jangkauan dapat diketahui melalui media massa, ataupun melalui sumber-sumber lainnya. Menurut de Sola Pool (1965 : 106), "studi komunikasi politik juga menitikberatkan kepada peranan media massa". Perhatian kepada media dititikberatkan kepada aliran pesan yang memiliki konten politik dan menelaah efek pesan yang disampaikan melalui media.

Dengan dukungan teknologi komunikasi yang memadai, media massa mampu memunculkan wawasan dan pengetahuan masyarakat menjadi luas, untuk mencermati segala sesuatu yang berhubungan keadaan sosial, ekonomi dan politik, sehingga dalam konteks politik, masyarakat juga paham tentang gambaran yang ideal bagi suatu pemerintah yang berkuasa atau citra buruk terhadap suatu rezim yang memerintah dengan otoriter. Media massa diperlukan, karena masyarakat berusaha untuk menambah wawasan pengetahuan (informasi), dan memperoleh bimbingan melalui opini yang didifusikan oleh media massa.

Dalam konteks demokratisasi kehidupan bernegara, diperlukan peran media yang bebas. Tulisan yang menyangkut naskah ke delapan demokrasi di Amerika Serikat, ditegaskan bahwa agar masyarakat dianggap benar-benar demokratis, harus ada perlindungan dalam derajat tinggi untuk mengeluarkan ide-ide dalam bentuk yang terpublikasikan, apakah mediamnya surat kabar, majalah, buku, pamflet, film, televisi, atau yang paling mutakhir internet (USIS, 2005). Konstitusi Amerika melindungi kebebasan-kebebasan individu, namun suatu kebebasan bila tidak untuk mengeluarkan pendapat bebas di media

ditempatkan di urutan pertama dari sepuluh amandemen yang disebut Hak-Hak Dasar untuk melindungi kebebasan individu.

Menurut Schramm (dalam Juh, 1988: 126) bahwa, "media massa khususnya radio, televisi dan surat kabar berperan dalam memberikan informasi kepada masyarakat". Tetapi kenyataannya di negara Duma Ketiga menghadapi berbagai hambatan untuk menjalankan fungsinya, sebab dalam perspektif kekuasaan negara berdasarkan pendapat McQuail (1991: 109), penyebaran informasi melalui media massa, adalah dominasi kekuasaan politik sehingga jauh dari hak atau kebebasan masyarakat untuk memperoleh informasi yang realistik, akurat dari sumber yang kredibilitasnya diakui. Sedangkan dalam konteks fungsi, Suwardi (1993) menyatakan, "media massa mampu menggambarkan realitas politik, namun harus diingat pula bahwa kehidupan pers di suatu negara akan mengikuti sistem yang hidup dalam negara yang bersangkutan".

Dengan demikian setiap negara mempunyai sistem pers sendiri dan sebagaimana pendapat Denis McQuail (1987) pada dasarnya sistem pers adalah sub sistem dari sistem politik yang ada. Namun satu hal yang tidak bisa dibiarkan, sebagaimana pendapat Wilbur Schramm (1977), media massa memegang peranan penting di dalam kehidupan politik. Tanpa dukungan atau penggunaan media, maka pesan-pesan politik dan pembangunan sulit untuk menjangkau masyarakat luas yang sangat heterogen.

Tanpanya asumsi tersebut bukan hal yang menyimpang, dalam pandangan DeFleur (1970: 11), "kekuasaan politik dan media massa mempunyai hubungan yang saling kuat". Keterkaitan dua hal tersebut selalu menjadi persoalan yang menarik untuk dibicarakan, terlebih lagi dalam konteks aplikasi di negara berkembang yang sarat dengan problem komunikasi politik. Pernyataan Dan Nimmo (1993: 220), pada latinya mengemukakan, peranan media dalam komunikasi politik menggambarkan cara-cara tertentu dalam mana seluruh proses politik terintegrasi dengan jaringan komunikasi yang lebih luas, dan pada umumnya media massa itu sendiri mutlak bersifat politis, ataupun padat dengan masalah-masalah politik.

Dalam hubungannya dengan pemilikan dan ideologi media, Dreier (1983: 439) menegaskan "media massa memainkan dua peran penting dalam masyarakat, pertama orientasi keuntungan yang dikehendaki oleh perusahaan, pemilik media, direktur, supplier dan pengelola iklan demi perkembangan perusahaan, yang kedua adalah ideologi institusi seperti yang tampak dalam agenda pemberitaan politik, ekonomi dan sosial". Selain itu pendapat Gebner

(dalam Cornet, 1984: 164) yang menganalogikan media massa dengan fungsi komunikasi massa menyebutkan, "komunikasi massa adalah teknologi dan kelembagaan, yang berbasis pada produksi massa dan distribusi yang seluas-luasnya untuk dibagikan secara terus menerus melalui aliran publik dalam masyarakat industri".

Eksistensi media massa di negara-negara Duma Ketiga yang sarat dengan persoalan sosial, ekonomi dan politik, tentu saja sulit untuk menjalankan fungsi-fungsi ideal. Dreier dan Gebner (dalam McQuail, 1992: 111), menegaskan, "kekuasaan politik sangat menonjol dalam hal pengendalian isi media dimana sensor mempunyai kekuatan yang tidak bisa dilawan oleh media massa". Sedemikian besar pengaruh kekuasaan politik terhadap media di suatu negara, karena umumnya media dipakai sebagai upaya menciptakan keadaan yang dikehendaki oleh kekuasaan politik yaitu stabilitas kekuasaan.

Secara esensial upaya pemerintah membatasi media tercermin dalam Teori Media Pembangunan. Menurut Denis McQuail (1991) pendekatan teori itu pada prinsipnya meliputi (1). Media seyogianya menerima dan melaksanakan tugas pembangunan positif sejalan dengan kebijaksanaan yang ditetapkan secara nasional, (2). Kebebasan media dibatasi sesuai dengan prioritas ekonomi dan pembangunan masyarakat, (3). Media perlu memprioritaskan isi pada kebudayaan dan bahasa nasional, (4). Media hendaknya memprioritaskan berita dan informasinya pada negara sedang berkembang lainnya, yang erat kaitannya secara geografis, kebudayaan atau politik, (5). Para wartawan dan karyawan media lainnya, memiliki tanggungjawab serta kebebasan dalam tugas mengumpulkan informasi dan penyebarluasannya, (6). Bagi kepentingan tujuan pembangunan, negara memiliki hak untuk campur tangan, atau membatasi, pengoperasian media, sarana penyensoran, subsidi, dan pengendalian langsung terhadap media.

Pola media pembangunan ini lazim digunakan di negara-negara sedang berkembang (Jayaweera dan Amunugama, 1987). Namun memasuki abad informasi, kecenderungan ini juga semakin pudar, mengingat kekuatan teknologi komunikasi memicu kebebasan berpendapat dan demokratisasi informasi di berbagai belahan dunia.

Dalam bingkai pers pembangunan yang memberikan kebebasan penuh kepada media, maka sesungguhnya semua informasi yang didifusikan oleh media, telah melalui proses pengawasan yang berlapis, sehingga berita yang munculpun sesuai dengan kehendak pemegang kekuasaan. Implikasinya:

berita yang mengungkap tentang sisi gelap dari sebuah entitas sub-ordinat kekuasaan negara maupun yang ada ditengah masyarakat, tidak akan pernah muncul, kecuali yang tidak sehalus dengan pemerintah. Karakter media dibentuk dengan pola harmoni dalam perspektif integratifistik. Akibat, walaupun sekelompok masyarakat tidak puas, mereka sulit untuk menyuarakan pendapatnya.

Secara substantif, menurut Olien (1983 : 458), media massa memang mempunyai hubungan yang integral dengan sistem politik diberbagai lembaga maupun kelompok dalam suatu negara. Kekawatiran munculnya ketidakstabilan merupakan salah satu pengabaian terhadap semua tindakan, tindakan ketat untuk mengendalikan media massa. Kekuasaan negara tidak memperdulikan apakah tindakan-tindakan yang dilakukan membelenggu kebebasan yang tidak sinkron dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, sebab yang lebih penting dalam ideologi kekuasaan negara adalah, kontinuitas jalannya pemerintahan dan bisnis yang dilakukan oleh sekelompok elite yang berkuasa secara ekonomis, politis maupun sosial.

Konsep pengendalian media, yang juga dipakai dalam pemerintahan tiran adalah teori media otoriter (McQuail, 1992 : 112). Teori ini pada intinya, menekankan, bahwa kekuasaan negara sama sekali tidak memberikan kebebasan pada media massa, media dilarang melakukan kecaman yang sifatnya merusak wewenang penguasa, dan media selamanya harus tunduk kepada penguasa dalam semua pemberitaan yang tidak hanya menyangkut politik, tetapi semua yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Dengan kata lain, media massa di negara-negara sedang berkembang yang tidak demokratis sulit untuk menjalankan peran pers bebas. Biasanya regulasi tentang peran dan fungsi media, memberikan sanksi dan ancaman yang cukup berat terhadap pelanggaran yang dilakukan.

Berdasarkan uraian tersebut, masyarakat khususnya elite dalam politik maupun kekuasaan negara, terbiasa dalam lingkaran pemberitaan yang datar tanpa gejolak, atau serasi, selaras seimbang, sebagaimana jargon kekuasaan yang sering disuarakan. Karena itu, dalam konteks Indonesia, ketika reformasi politik membuka peluang munculnya pers bebas, maka sejumlah entitas yang semula memperoleh perlindungan "manajemen pemberitaan pemerintah", merasa tidak nyaman dan muncul pula tuduhan pers yang kebablasan. Bisa saja memang ada sejumlah media yang terlampau bebas, dan tidak menghiraukan kode etik jurnalistik, tetapi transparansi informasi sendak-tidaknya membawa berbagai perubahan signifikan dalam kehidupan bernegara yang demokratis.

Pers bebas pada prinsipnya (1) Publikasi seyogianya bebas dari penyensoran, pendahuluan oleh pihak ketiga, (2) Tindakan penerbitan dan pendistribusian sebaiknya terbuka bagi setiap orang atau kelompok, tanpa memerlukan izin atau lisensi (3) Kecaman terhadap pemerintah, pejabat atau partai politik (yang berbeda dari kecaman terhadap orang-orang secara pribadi, atau pengkhianatan dan gangguan keamanan), seyogianya tidak dapat dipidanakan, bahkan setelah terjadinya peristiwa itu, (4) Seyogianya tidak ada kewajiban mempublikasikan segala hal, (5) Publikasi kesalahan dilindungi sama halnya dengan publikasi kebenaran, dalam hal yang berkaitan dengan opini atau keyakinan, (6) Selayaknya tidak ada batasan hukum yang diberlakukan terhadap upaya pengumpulan informasi untuk kepentingan publikasi, (7) Seyogianya tidak ada batasan hukum yang diberlakukan dalam impor, ekspor atau pengiriman dan penerimaan pesan, diseluruh pelosok negeri, (8) Wartawan selayaknya mampu menuntut otonomi profesional yang sangat tinggi di dalam organisasi mereka.

Menyangkut kebebasan pers di negara *core* sebagaimana Amerika Serikat, dalam mengeluarkan keputusan mengenai kebebasan berbicara dan kebebasan pers, pengadilan Amerika selama bertahun-tahun, memberikan perlindungan lebih besar untuk pesan-pesan politik dibandingkan jenis mengeluarkan pendapat yang lain. Tentu saja tidak semua negara maju memiliki semangat yang sama dengan Amerika Serikat, dalam memberikan keleluasaan terhadap pers. Hakikatnya, agar sebuah negara dianggap benar-benar demokratis, negara harus siap memberikan perlindungan substansial terhadap ide-ide untuk mengeluarkan pendapat di media (USIS, 2005).

Dalam perspektif komunikasi global yang tidak menghiraukan faktor etnisitas, ras, jarak geografis dan berbagai diferensiasi sosial, ekonomi serta politik dalam komunikasi internasional, Anokwa, Liu dan Salwen (2005 : 5), menganjurkan, kebebasan pers merupakan konsep fundamental yang kental dalam komunikasi internasional dan merupakan pusat dari berbagai macam diskusi yang membahas tentang peran pers dan demokrasi.

Esensinya, kebebasan pers dan demokratisasi menjadi gerakan global dan tanggungjawab bersama dari setiap negara. Namun, tanpa menafikan negara-negara berkembang yang sudah menjalankan pers bebas dengan baik, tetapi masih ada berbagai kendala dalam penerapannya, sebab ada kegamangan dan organ-organ kekuasaan negara disatu pihak, yang terbiasa memperoleh keistimewaan sebagai sumber informasi yang dilindungi oleh berbagai regulasi pemerintah. Di pihak lain masyarakat juga masih terperangkap dalam pola komunikasi yang cenderung tertutup sebagai akibat belenggu budaya yang menafikan kebebasan dan keterbukaan dalam menyuarakan pendapat.

Bab 3

KOMUNIKASI POLITIK dan GLOBALISASI

Negara kawasan selatan mempunyai persoalan yang pelik dalam urusan domestik maupun urusan internasional. Problem yang muncul merupakan gambaran konkrit keadaan negara yang belum mapan secara sosial, ekonomi dan politik. Ketidakstabilan tersebut tampak dari timbulnya gejolak, konflik bahkan huru-hara yang terjadi di dalam negeri maupun dalam hubungan bilateral dengan negara lain. Ketika negara-negara sedang berkembang masih dikuasai oleh rezim-rezim represif, dan penyebaran teknologi komunikasi masih menjadi problem potensial bagi negara pinggiran, maka gaung ketidakdemokratisan pun hanya bisa didukmati oleh sekelompok masyarakat yang memiliki akses khusus dengan media alternatif, di luar kendali manajemen komunikasi para penguasa.

Namun, dengan semakin berkembangnya teknologi komunikasi dalam penyebaran informasi, maka persoalan dalam negeri suatu negara berkembang selalu menimbulkan penilaian atau opini masyarakat internasional yang mempunyai kepedulian terhadap perdamaian dunia, atau mereka yang memiliki kepentingan secara langsung maupun tidak langsung. Artinya, kejadian di suatu negara dan tingkah laku politik rezim yang berkuasa dimatahari, di belahan dunia, akan terdeteksi dengan mudah oleh masyarakat internasional.

Penyebaran pesan yang sangat cepat tidak terlepas dari kekuatan komunikasi global yang didukung oleh teknologi komunikasi. Menurut Baylist dan Smith (2005 : 8), globalisasi berkembang dengan cepat dan menimbulkan dampak ke seluruh dunia. Globalisasi merupakan ruang bersama yang menghilangkan batas sosial, ekonomi, politik dan batas relatif terhadap nasionalisme.

Celaikanya, dalam koridor globalisasi, kedudukan negara sedang berkembang justru mempunyai ketergantungan dalam bidang sosial, ekonomi maupun politik terhadap negara maju. Oleh sebab itu sulit untuk menghindar

begitu saja, dalam menanggapi opini internasional, yang mengkritisi berbagai peristiwa bernuansa penjinjangan terhadap hak azasi manusia dan demokratisasi. Sebab, globalisasi secara konseptual mampu menghubungkan masyarakat dari berbagai kawasan di seluruh penjuru dunia.

Dalam skala global, domain HAM dan demokrasi seringkali tidak sejalan dengan konsep universal yang dipakai sebagai *mainstream* negara-negara maju. Terlebih lagi dalam kerangka globalisasi informasi, maka semua peristiwa yang terjadi di negara sedang berkembang, dengan mudah dapat terdeteksi oleh masyarakat internasional. Sebagai faktor penting yang mempengaruhi dinamika informasi dunia, globalisasi berkaitan dengan perubahan dalam menciptakan sistem politik dunia, setiap entitas saling terhubung dan memiliki ketergantungan. Karakter lain dari globalisasi adalah eksistensi komunikasi elektronik, yang mampu menyebarkan informasi dengan cepat. Dunia diklat oleh kultur global yang homogen dan perbedaanpun menjadi semakin menipis.

Oleh sebab itu, jika negara tidak mampu mengatasi persoalan-persoalan dalam negeri ataupun masalah internasional, maka dengan mudah akan diketahui oleh negara lain dalam waktu yang sangat cepat. Menurut Baylis dan Smith (2005), globalisasi meniadakan batas ruang, waktu dan batas geografis. Informasi menyebar dengan cepat dengan dukungan dan peran media yang memanfaatkan teknologi komunikasi modern.

Berpijak kepada substansi globalisasi, maka posisi pemerintahan negara - negara berkembang dalam menjalankan kekuasaan, dengan mudah dapat diketahui oleh masyarakat internasional. Namun persoalannya, dalam opini internasional, negara - negara maju cenderung memberikan stigma, bahwa negara periferi pada umumnya menjalankan pemerintahan tidak transparan, kekuasaan dijalankan dengan otoriter, pengabaian terhadap hak asasi manusia dan pengingkaran demokrasi yang universal. Walaupun retorika para pemimpin selalu diwarnai dengan jargon demokrasi, tetapi ada kecenderungan menafikan kebebasan secara integralistik sesuai dengan kepentingan pemerintah.

Representasi sikap yang ditunjukkan oleh negara - negara maju terhadap stigma negatif tersebut adalah, penggalangan opini internasional dengan mereduksi substansi pesan, mengolah ulang berita yang faktual dan tindakan lain dalam pengungkapan pesan yang berusaha untuk menolak, memarginalkan secara ekonomis ataupun politik posisi negara dunia ketiga.

Dalam konteks ini, muncul suatu pemerintahan global yang di dukung oleh lembaga - lembaga internasional. Namun, pada sisi lain, negara maju yang merasa sebagai pengontrol pemerintahan internasional, membuat mereka opini internasional yang menjokkan negara - negara sedang berkembang yang dinilai bermasalah.

Alibatnya, posisi negara berkembang dalam dinamika opini internasional masuk dalam kutub hitam yang tidak menguntungkan. Bahkan, bukan mustahil jika penggalangan opini internasional terhadap negara yang dituduh tidak demokratis, disertai pula dengan penyerangan langsung melalui kekuatan tentara, dalam suatu konflik yang sebenarnya bertentangan dengan prinsip universal tentang hak asasi manusia.

Namun mengingat negara - core memiliki kekuatan dalam menggalang opini global, maka masyarakat internasional juga lebih percaya terhadap pesan - pesan yang dikeluarkan oleh media dari pemerintahan negara maju yang dianggap sudah menjalankan fungsi pers bebas secara proporsional. Pers bebas, dalam konsep komunikasi internasional menurut Anokwa, Lin dan Salwen (2005: 5), ditekankan kepada peran pers dan demokrasi. Kebebasan pers sebuah terminologi yang sudah membudaya, dan kebebasan pers merupakan kebebasan individual, bebas dari intervensi pihak luar maupun dari kekuasaan negara. Tentu saja dalam konteks pers yang lebih demokratis, maka masyarakat internasionalpun lebih mempercayai media - media dari negara maju, walaupun sesungguhnya dalam koridor teknologi komunikasi, sesungguhnya media di negara sedang berkembangpun mampu menjalankan fungsinya untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat internasional. Namun yang menjadi persoalan biasanya menyangkut akurasi isi pesan yang dianggap belum mampu transparan dalam penyajiannya.

A. Konflik Antar Kelompok dan Opini Global

Banyak negara berkembang atau pemerintahan negara dunia ketiga mempunyai karakter yang pluralistik dari segi etnik. Di Indonesia terdapat ratusan - ratus etnik pribumi dan disatu sisi terdapat banyak etnik pendatang dari bangsa lain yang cukup dominan (Geertz, 1981:2). Kemajemukan etnik sepanjang dapat diciptakan suasana harmonis tidak akan menjadi persoalan, tetapi yang lebih sering terjadi di negara dunia ketiga justru konflik berkepanjangan antar kelompok.

Menurut Samovar, Porter dan McDaniel (2007: 364), "bertahun-tahun sebelum terjadinya peristiwa tragis 11 September 2001, konflik antara ideologi dan lingkungan sudah banyak dibicarakan di seluruh dunia". Tetapi ketika pesawat terbang menabrak Twin Tower, masyarakatpun menjadi semakin sadar bahwa budaya atau masalah agama dapat menyebabkan timbulnya pertentangan dimana suatu saat dunia saling terhubung oleh hal yang baik maupun buruk.

Dalam perspektif komunikasi antar budaya, konflik – konflik yang muncul dipicu oleh persoalan perbedaan budaya yang sangat kompleks. Secara umum, komunikasi antar budaya terjadi ketika seorang pengirim pesan dari suatu budaya, sedangkan penerima pesan dari suatu kelompok budaya yang berbeda. Persoalan – persoalan yang muncul dalam konflik antar budaya, antara lain dari masalah dominasi ekonomi, perbedaan nilai, sikap dan kepercayaan, perbedaan agama, sampai pada masalah stereotipe masing – masing etnik yang dominan dalam satu aspek.

Menurut Samovar, Porter dan McDaniel (2007: 367), "terdapat tiga faktor yang mempengaruhi komunikasi antar budaya di masa depan yaitu masalah internasional, teknologi dan etnis dan identitas budaya". Khusus terhadap masalah internasional yang sangat beragam, akan berpengaruh dalam interaksi antar manusia. Dengan dukungan teknologi yang berkembang dengan cepat, pertemuan dan interaksi antar bangsa di dunia dapat dilakukan dengan mudah. Namun di sisi lain, konflik juga terus mengancam. Ketika seseorang yang berkebangsaan atau beretnik beda yang menggunakan bahasa berbeda, memiliki pola hidup yang berbeda, harus bekerja dan tinggal bersama, maka muncul potensi konflik, kecuali ada tujuan umum yang mengikat mereka untuk tetap bekerjasama. Mengingat interaksi antar budaya yang berbeda mudah terjadi, maka di pihak lain dalam kutub yang negatif adalah munculnya potensi konflik yang terus mengancam dalam hubungan antar kelompok. Karena itu, yang paling penting untuk menghindari benturan antar kelompok adalah menciptakan tujuan yang bisa memberikan manfaat dan keuntungan bersama.

Masyarakat sadar bahwa pertentangan ataupun konflik, dipicu oleh masalah keragaman dan perbedaan yang terdapat di masyarakat. Fleisman (dalam Baylis dan Smith, 2005), menyatakan "kita berada pada keadaan dimana sumber daya telah semakin menipis, terorisme, perang, fanatisme agama, pertumbuhan populasi, totalitarisme dan senjata nuklir". Sedangkan Huntington menyebutkan, "dunia pada dasarnya bersifat anarki, dipenuhi

dengan konflik nasional, tetapi konflik yang paling berbahaya adalah ketika menyangkut pihak yang berbeda, daerah ataupun perbedaan peradaban. Padahal hubungan antar kelompok di dunia saat ini justru dipenuhi oleh perbedaan (Baylis dan Smith, 2005).

Menyangkut konflik budaya, etnik maupun rasial, Duverger (1997), menegaskan, ada dua konflik yang mengancam perdamaian dunia, yaitu (1) konflik rasial vertikal yang terjadi, antara kelompok rasial dominan yang bertempat tinggi di atas tangga sosial, dan kelompok rasial yang diperintah dalam posisi dibawahnya, dan (2) konflik rasial horisontal terjadi antar kelompok dalam dataran yang sederajat, dalam berbagai karakter sosial, ekonomi, politik dan berbagai atribut lain yang melekat sebagai ciri ras. Konflik vertikal maupun horisontal antar etnik maupun ras menurut Samovar, Porter dan lain (1981 : 121), antara lain dipicu oleh stereotipe sebagai penggeneralisasian karakter etnik, ras maupun kelompok, khususnya yang negatif sangat potensial menimbulkan konflik yang tersembunyi maupun frontal. Potensi konflik semacam ini dapat diperkecil jika pemahaman terhadap komunikasi antar budaya atau diperluas menjadi antar kelompok yang berbeda menjadi dominan. Tetapi ini tidak mudah dilakukan, mengingat proses dalam komunikasi antar budaya atau antar kelompok sangat kompleks karena mencakup konteks asumsi budaya dan filosofi tertentu, ketergantungan orientasi temporal, ketergantungan dari kondisi situasi (Saral, 1979 : 23). Faktor – faktor tersebut, tentu saja jika dihubungkan dengan kelompok etnik dan ras masing – masing memiliki perbedaan yang signifikan.

Meskipun demikian, bukan berarti konflik antar kelompok etnik maupun ras tidak bisa diminimalisir atau bahkan dihindari sama sekali. Sebab jika menunjuk kepada eksistensi komunikasi sebagai sarana penyaluran informasi, maka konflik rasial ataupun konflik kelompok yang lebih besar dapat dihindari. Secara sederhana Devito (1992: 292) menyatakan, bahwa saluran komunikasi untuk melepaskan diri dari situasi konflik dan konfrontasi langsung adalah memecahkan persoalan dengan membuka saluran komunikasi untuk berunding. Namun sesungguhnya upaya membuka saluran komunikasi untuk berunding juga memerlukan proses yang rumit dan memakan waktu yang cukup panjang.

Berbagai konflik internal dalam bentuk konflik rasial maupun konflik kelompok, sering menjadi isu menarik dalam komunikasi politik antar negara yang disebarkan media massa menjadi opini publik internasional. Terbentuknya pendapat umum melalui media massa ditinjau oleh teknologi

komunikasi yang digunakan oleh media cetak, media elektronik dan media komunikasi lain yang didukung oleh teknologi. Dalam pembentukan opini internasional, biasanya media negara maju jauh lebih lugas, karena mereka memiliki banyak sumber informasi yang transparan dibandingkan dengan opini pada level nasional yang lebih sering dikendalikan oleh pemerintah melalui berbagai pembatasan.

Selain itu, dalam kajian komunikasi massa, semakin jauh jarak geografis, jarak sosial dan jarak ekonomis khalayak dari sumber kejadian yang sebenarnya, maka semakin membentuk sikap yang lebih percaya terhadap informasi yang diperoleh tersebut. Sejalan dengan itu, Adoni dan kawan-kawan menyatakan bahwa, pemberitaan televisi tentang konflik sosial yang jauh dari kehidupan khalayak, lebih membentuk persepsi khalayak daripada konflik sosial yang dialami khalayak dalam kehidupan sehari-hari (Adoni, Cohen dan Mene, 1981 : 189).

Dari opini masyarakat internasional tentang konflik antar kelompok di negara kawasan selatan, biasanya negara core mengambil posisi berpihak pada kerangka universal dalam menegakkan HAM dan demokrasi. Tetapi sebaliknya negara berkembang menuduh bahwa negara maju tersebut tidak netral, dan mempunyai kepentingan - kepentingan ekonomi, politik dan kepentingan lain dalam skala global atau seringkali dalam nada klise mengkaitkan pula dengan kapitalisme internasional, maupun gerakan politik internasional dari suatu kelompok tertentu.

Berbagai persoalan domestik yang muncul termasuk didalamnya konflik vertikal yang terjadi antara kekuasaan negara dengan kelompok masyarakat, kelompok oposisi dan kelompok - kelompok yang berseberangan dengan pemerintah, atau juga konflik horisontal yang terjadi antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya karena berbagai perbedaan, ternyata tidak berdiri sendiri atau lepas dari perhatian khalayak internasional. Perkembangan teknologi komunikasi dengan penyebaran arus informasi yang sedemikian cepat membuat masyarakat global mengetahui sesuatu peristiwa di kawasan lain. Ketika publik internasional mengetahui pelanggaran yang terjadi di suatu negara maka opini internasional yang menitik beratkan asas kemanusiaan, terlebih lagi yang penuh dengan muatan politik, sudah barang tentu tidak akan tinggal diam menyaksikan berbagai peristiwa di negara berkembang yang bermuara ketidakadilan dan pelanggaran hak azasi manusia.

B. Ketergantungan Informasi

Dalam pandangan komunikasi politik, perbedaan antara negara kaya dan negara miskin, atau pertentangan kawasan utara dan kawasan selatan setidaknya menimbulkan dampak terhadap opini internasional yang tidak seimbang, sebab informasi dalam tataran global lebih banyak dikuasai oleh negara - negara maju. Esensi tersebut sama dengan apa yang dikemukakan oleh MacBride (1980:177) bahwa pertentangan utara dan selatan, membawa akibat ketidakseimbangan dan ketidakadilan di dalam sistem komunikasi internasional. Perbedaan tersebut menuntut reaksi yang tepat terhadap berbagai masalah dari media sendiri. Sejalan dan mempunyai makna yang kurang lebih sama adalah, pernyataan McQuail (1987), negara maju khususnya Amerika Serikat merupakan produsen informasi yang paling produktif untuk disebarkan ke seluruh dunia. Dalam hal ini, Amerika dan negara - negara maju masih memegang kendali pemberitaan internasional, yang menyangkut negara - negara maju maupun negara periferi yang secara internal memiliki beragam persoalan.

Bersaing untuk menciptakan keseimbangan dalam menciptakan opini, jika dikaitkan dengan konteks komunikasi politik internasional yang berupaya memposisikan kebenaran ada di pihak pemerintahan di kawasan selatan, tidak mungkin berhasil, tanpa keterlibatan negara maju yang menjadi sekutunya. Sebagaimana diketahui, hampir semua negara maju selalu menjadi sekutu negara berkembang yang potensial secara ekonomis (Chiror, 1976 : 8). Di pihak lain negara berkembang membutuhkan dukungan teknologi, finansial maupun dukungan administrasi untuk menjalankan kekuasaannya seperti ditulis oleh Wallerstein (1979) yang memiliki perhatian besar terhadap masalah di negara periferi.

Hubungan antara utara dan selatan, pada akhirnya mengacu pada terjadinya ketergantungan negara - negara berkembang, negara miskin atau negara pinggirin kepada negara kaya. Ketergantungan sendiri dalam perspektif Blomstrom dan Hotine (dalam Stewardson dan So, 1991 : 105) mempunyai asumsi dasar sebagai gejala yang sangat umum berlaku di seluruh negara dunia ketiga, dan sebagai kondisi yang diakibatkan warisan sejarah dalam pembagian kerja internasional yang timpang, mengalirnya surplus ekonomi dari negara dunia ketiga ke negara maju, serta nilai tukar perdagangan yang relatif rendah di negara miskin. Menarik pada pendapat tersebut, situasi ketergantungan merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses polarisasi regional di dalam tataran ekonomi dunia yang global. Dalam perspektif komunikasi seperti

banyak dipengaruhi oleh Naishitt (1994), "globalisasi terbentuk karena interaksi yang berjalan dengan dukungan teknologi komunikasi dan sistem informasi serta pengembangan transportasi yang pesat". Artinya teknologi komunikasi merupakan pendukung kekuatan globalisasi informasi yang melanda berbagai belahan dunia.

Ketergantungan informasi, terlepas dari yang bersifat nasional, regional maupun global merupakan kecenderungan tuntutan komunikasi antar manusia yang terus berkembang. Masyarakat internasional, termasuk Indonesia berupaya untuk masuk dalam ranah masyarakat informasi demi untuk beradaptasi dengan nilai global dalam berbagai segi kehidupan. Secara esensial Naishitt (1994 : 54) menegaskan, informasi adalah kekuasaan dalam paradigma global banyak dimiliki oleh negara - negara maju. Sedangkan Berger (1978 : 47) menyebutkan, bahwa "informasi sangat berguna untuk mengurangi ketidakpastian, negara - negara maju mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk memperoleh informasi yang dapat menghindarkan dari kesulitan ekonomi maupun politik". Kita juga memaklumi betapa kekuasaan negara maupun korporasi bisnis yang ada di negara berkembang sangat tergantung pada informasi dari negara maju, menyangkut berbagai hal, dari nilai kurs mata uang, harga komoditas sampai pada pergolakan politik di suatu negara. Semua informasi itu diperlukan oleh negara dan pemerintah untuk menunjang jalannya kekuasaan maupun kepentingan bisnis kelompok swasta maupun perusahaan.

Masih mempunyai kaitan dengan ketergantungan, adalah pernyataan dari Fardiaz (1988 : 150), perkembangan teknologi telah menimbulkan revolusi komunikasi di berbagai penjuru dunia; bermula dari negara - negara industri yang telah maju, dan berangsur-angsur merambat ke negara - negara sedang berkembang di dunia ketiga, yang berusaha masuk dalam era informasi. Dari pendapat tersebut, jelas bahwa negara - negara dunia ketiga mempunyai ketergantungan terhadap informasi dari sumber - sumber yang dipercaya. Di sisi lain informasi merupakan dominasi dari negara - negara maju yang melengkapi industrialisasi dengan kekuatan informasi.

Tipe lain yang selalu muncul dalam konteks ketergantungan adalah kemiskinan, kelaparan, kesehatan, pertumbuhan penduduk dan sejumlah problem sosial, ekonomi serta politik di negara dunia ketiga. Di pihak lain surplus pangan, kekuatan finansial serta teknologi menjadikan negara maju mempunyai posisi yang sangat kuat untuk mendikte negara berkembang (Chirot, 1983 : 243). Posisi yang kuat dari negara maju membuat kemerdekaan

politik menjadi terbatas bahkan digerogoti karena ketergantungan ekonomi. Bahkan ketergantungan kebudayaan dan intelektual sama pentingnya dengan masalah ketergantungan ekonomi dan penajalaran.

Dalam kaitan hubungan antara negara kaya dan miskin, MacBride (1983) mengemukakan, "komunikasi seringkali merupakan pertukaran dua pihak yang tidak sama tinggi, menguntungkan yang lebih kuat, lebih kaya dan lebih lengkap fasilitasnya". Perbedaan di dalam kekuasaan dan kekayaan, disengaja atau tidak, mempunyai akibat dan pengaruh pada struktur dan arus komunikasi. Disinilah letak ketidak samaan, perbedaan dan ketidak seimbangan pada komunikasi internasional, khususnya interaksi antara negara maju dan negara berkembang.

Keperksaan negara maju banyak dikritik oleh Teori Dependensi, yang menyarankan agar negara berkembang maupun negara periferi memutus hubungan dengan negara maju, karena yang memperoleh keuntungan lebih banyak adalah negara maju jika dibandingkan keuntungan yang didapatkan oleh negara berkembang. Suwarsono dan So (1991 : 118) menegaskan, para penguasa yang telah mapan, pemilik modal besar, petani kaya dan tuan tanah serta para elite lain, kemungkinan besar tidak akan menyetujui kebijaksanaan pembangunan yang mencoba memutuskan hubungan dengan negara maju yang selama ini telah berjalan dengan baik.

Sikap pesimis Teori Dependensi adalah merupakan keberhasilan pembangunan di negara dunia ketiga, karena surplus ekonomi yang terus menerus dari negara pinggiran ke negara maju tidak terpisahkan dari ketergantungan kolonial dan ketergantungan industri dan keuangan (Suwarsono dan So, 1991 : 107). Walaupun demikian, banyak pendukung teori ini yang menyatakan bahwa dependensi menghendaki peninjauan kembali pengertian terhadap pembangunan yang sekadar proses industrialisasi, peningkatan keluaran (output) dan peningkatan produktivitas. Bagi teori dependensi, peningkatan lebih tepat diartikan sebagai peningkatan standar hidup bagi setiap penduduk di negara dunia ketiga.

Menyiasati problem di negara Dunia Ketiga dan lebih menarik beratkan pada peran komunikasi dalam menghadapi persoalan internasional. MacBride (1983 : 272) merumuskan, "dalam dunia yang saling membutuhkan ini, mengunggulkan kemiskinan adalah untuk kepentingan siapa? negara, baik maju maupun berkembang? Oleh sebab itu komunikasi harus mengejar tiga tujuan : (a) meningkatkan pengetahuan atas masalah pembangunan,

(b) membina jiwa solidaritas didalam usaha bersama, (c) meningkatkan kemampuan manusia menangani usaha pembangunan sendiri.

Sepintas ketiga faktor itu teramat amir, namun tidak bisa diabaikan bahwa pemahaman pembangunan dan kesejahteraan saja, masih sering terperangkap dalam belenggu penafian sepihak dari kekuasaan negara maupun pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dalam proyek pembangunan.

C. Marginalisasi Negara Pinggiran Dalam Opini Internasional

Kompleksitas persoalan yang sedemikian krusialnya di negara dunia ketiga seperti perubahan sosial, pelaksanaan demokrasi, penegakan hak asasi manusia dan konflik antar etnik, maupun kelompok tidak diimbangi dengan antisipasi kekuasaan negara yang progresif. Malahan di negara dunia ketiga, negara perifer ataupun negara pinggiran, yang terjadi sebaliknya, kebijakan dilaksanakan tidak berjalan linier dengan harapan terciptanya masyarakat informasi yang transparan dan demokratis. Padahal masyarakat secara alamiah dalam (terpapar media, mengalami dan menjalani) proses pembelajaran kehidupan bernegara sesuai dengan perkembangan sosial, ekonomi dan politik yang didifusikan oleh media massa. Kekuasaan negara di dunia ketiga, menurut Daniel Clune (1976 : 5), dengan kekuasaan politiknya, berupaya untuk mengendalikan semua kegiatan masyarakat yang berhubungan langsung dengan politik maupun tidak ada sangkut pautnya dengan politik. Komunikasi politik juga lebih mengarah kepada propaganda sebagai upaya sistematis yang menggunakan simbol-simbol untuk menggerakkan sikap dan tindakan orang lain demi untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. (Anokwa, Liu dan Salwen, 2005: 17). Walaupun di era globalisasi informasi kecenderungan itu semakin berkurang, namun nilai kekuasaan negara untuk tetap mengontrol informasi atau mengorganisasikan pesan politik sesuai kepentingan kekuasaan pemerintah yang menafikan tuntutan publik tidak dapat hilang begitu saja.

Sesungguhnya dalam konteks globalisasi, informasi menembus ke seluruh penjuru dunia melintasi batas geografis, bangsa maupun kultur masing-masing kelompok etnik maupun ras. Terbentuknya kultur global, paling tidak bersentuhan dengan prinsip dalam komunikasi antar budaya, yang mengacu kepada partisipan atau mereka yang berkomunikasi mempunyai perbedaan latar belakang budaya yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Konteks sosial yang muncul dalam komunikasi antar budaya antara lain, menurut Kim (1984:14) adalah konteks politik, akulturasi pada imigran, transfer

teknologi dalam pembangunan. Berdasarkan pendapat Kim, komunikasi antar budaya, selain berfokus pada konteks kultur tetapi juga sarat dengan muatan politik dan permasalah persoalan pembangunan. Sementara itu Condon dan Saito (1976 : 34) menegaskan bahwa model komunikasi transkultural dapat memecahkan problem dan tantangan dalam berbagai bidang kehidupan.

Esensi dari komunikasi dalam hubungan antar budaya atau antar bangsa yang merujuk pada komunikasi global, sangat diperlukan untuk menciptakan saling pengertian dalam hubungan internasional. Komunikasi Internasional merupakan proses komunikasi antar bangsa yang secara fisik dipisahkan oleh batas-batas teritorial bangsa (F. Rachmadi, 1988). Komunikasi internasional berhubungan dengan diplomasi, propaganda dan seringkali situasi interkultural (Nimmo, 1989). Pada komunikasi internasional interaksi yang terjadi dipengaruhi oleh kebijaksanaan, tujuan dan kepentingan serta keadaan ekonomi masing-masing negara. Dalam komunikasi internasional lebih banyak menampilkan komunikasi politik, seperti pendapat MacBride (1983 : 32); perdebatan internasional mengenai komunikasi lebih banyak bersifat politik, karena kekhawatiran, tujuan dan argumentasi yang dikemukakan merupakan pandangan politik.

Komunikasi memainkan peran penting sebagai sarana hubungan antar bangsa dan negara, terutama untuk menciptakan serta mengembangkan saling pengertian dan kerjasama antar negara yang lebih baik dengan jalan mengadakan pertukaran informasi dan komunikasi yang lebih baik. Dalam pandangan lain yang tidak hanya sebagai pertukaran informasi tetapi bisa menimbulkan ketegangan dalam hubungan antar bangsa, Condon dan Saito (1976 : 89) berpendapat, komunikasi dipakai sebagai alat politik dan alat kekuasaan yang dapat mengganggu keserasan hubungan antar bangsa. Artinya, jika komunikasi tidak digunakan dengan baik dalam hubungan antar negara berpotensi menimbulkan konflik, tetapi apabila dimanfaatkan dengan mengacu kepada penghargaan, empati dan etika dalam komunikasi, akan diperoleh manfaat yang positif dalam hubungan antar negara.

Menurut Kellerman (1984:42), hubungan antar bangsa diwarisi pandangan hidup bangsa, kepentingan nasional, kebijakan politik luar negeri dan prinsip-prinsip yang dimiliki oleh suatu bangsa. Hubungan antar bangsa juga terikat oleh hubungan antar individu berlatar bangsa yang saling mengalirkan informasi diantara mereka. Hubungan dan pertukaran informasi antar bangsa dengan segala atribut yang melekat pada kekuasaan pemerintah maupun individu sebagai bagian terkecil dari bangsa diperlukan untuk mendapatkan

hasil yang positif dan mengurangi ketidakpastian dalam upaya menciptakan kesejahteraan dunia.

Prediksi positif tentang hasil yang akan diperoleh merupakan pemacu yang dapat meningkatkan hubungan, sedangkan hasil negatif atau ketidakpastian akan mengurangi intensitas atau menghentikan hubungan sama sekali (Berger, 1986 : 34). Sementara itu komunikasi juga diperlukan untuk mengurangi ketidakpastian sebagaimana pendapat Berger (1978 : 42) ketidakpastian memainkan peran yang besar sekali dalam kehidupan sosial, sedangkan komunikasi mampu memprediksikan dan menjelaskan segala sesuatu yang berhubungan dengan konteks sosial, ekonomi maupun politik sehingga komunikasi dapat mengurangi ketidakpastian bagi mereka yang terlibat dalam interaksi. Walaupun prinsip-prinsip tersebut kemungkinan hanya berlaku pada komunikasi antar pribadi atau kelompok tetapi lazimnya prinsip-prinsip hubungan secara makro pun mengacu pada hasil yang akan dicapai dari pengurangan ketidakpastian.

Komunikasi antar bangsa dapat berjalan dengan lancar karena dukungan dari teknologi. MacBride menyatakan (1983 : 67) berkat kemajuan teknologi, negara-negara dapat lebih saling berbauh daripada masa-masa sebelumnya. Jaringan elektronik internasional secara potensial dapat berfungsi sebagai sistem syaraf, menghubungkan pemikir yang satu dengan yang lain sehingga menciptakan suatu pusat pemikiran kolektif.

Peranan komunikasi dalam hubungan internasional sangat penting dan vital, karena itu, semua negara perlu membuat opini internasional supaya sanggup memahami masalah yang mengancam kelangsungan hidup manusia terhadap masalah yang tidak mungkin diselesaikan hanya dengan konsultasi antar negara seperti perlombaan senjata, kelaparan, kemiskinan, buta huruf, rasialisme, pengangguran, ketidakadilan ekonomi, pertumbuhan penduduk, perusakan lingkungan, diskriminasi terhadap wanita (MacBride, 1983 : 67).

Dukungan lain dalam hubungan bilateral antar negara adalah, peran media massa yang memperkokoh peranan komunikasi, kecepatan perkembangan media massa mempengaruhi luasnya komunikasi antar bangsa, karena dengan media massa suatu bangsa dapat membina hubungan dengan bangsa lain dan meluaskan pengaruhnya kepada bangsa lain. Tetapi harus diakui selain membawa segi-segi positif, pertukaran informasi dan komunikasi tidak jarang membawa hal negatif yang dapat menimbulkan permasalahan dalam hubungan bilateral. Chafee (1988 : 17) berpendapat, peran media massa dalam

komunikasi politik adalah memsosialisasikan politik, tetapi efek politik dapat berakibat pada hal-hal yang buruk bagi media, khalayak maupun penguasa. Namun, dalam era yang mengunggulkan informasi sebagai entitas yang mampu menerobos semua lapisan masyarakat, maka yang diperlukan bukan menghindari informasi, tetapi mengelola informasi menjadi bermanfaat bagi kesejahteraan manusia di seluruh dunia.

Komunikasi politik internasional yang dalam hubungan bilateral antar negara yang interaktif, ditunjang oleh eksistensi teknologi komunikasi yang semakin baik. Komunikasi politik biasa digunakan sebagai sarana politik yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan bidang diplomasi, ekonomi dan militer (Sastropoetro, 1991). Konsep komunikasi internasional, menurut Anokwa dan kawan-kawan, biasa juga ditekankan kepada peran dan tekanan terhadap demokrasi dan kebebasan dalam menyampaikan pendapat. Pada konteks ini, kebebasan individu juga menjadi perhatian yang intens dalam komunikasi politik internasional.

Komunikasi internasional yang sarat dengan unsur kekuasaan dan politik, mengharuskan setiap negara, lebih khusus lagi yang dikendalikan pemerintahan represif tidak dapat menyembunyikan setiap peristiwa politik dan ekonomi yang terjadi di negaranya. Misalnya dalam pelanggaran hak asasi manusia, demokratisasi dan masalah sosial, seperti konflik etnik, rasial dan berbagai pelanggaran lain yang berhubungan dengan norma universal. Intinya, masalah pada suatu negara adalah masalah yang bisa mendunia. Setiap negara di dunia merasa ikut bertanggung jawab terhadap beraneka peristiwa yang bermuara ketimpangan, ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia. Dicontohkan dalam buku *Global Paradox*, apa yang berlaku untuk rakyat Venezuela berlaku pula untuk rakyat dimana saja. Apakah godfather politik Jepang akan dipaksa mengundurkan diri dari pemerintahan politik dan belakangan menghadapi dakwaan kriminal, seandainya rakyat Jepang tidak melihat televisi pengunduran diri Collor de Mello di Brazil. Seberapa luas penyelidikan kejahatan korupsi di Italia seandainya rakyat tidak mengetahui rahasia kejadian-kejadian yang tersingkap di setengah dunia (Naishitt, 1994 : 162).

Kepedulian negara maju dalam memperhatikan masalah di negara-negara periferi yang sedemikian besar melalui opini internasional, maupun saluran-saluran teknologi informasi terbatas yang diwujudkan dalam bentuk bantuan pangan dan finansial, bantuan tenaga ahli, bantuan teknologi bahkan bantuan militer, sepiantas akan menampakkan posisi negara dunia ketiga di pihak yang diuntungkan, tetapi dalam jangka panjang, hal tersebut bisa saja

berubah seperti dikemukakan oleh Condon dan Saito (1976:89), dilema dan kekhawatiran negara – negara berkembang, walaupun mereka mendapat keuntungan, mereka merasa cemas terhadap beberapa bahaya yang inheren dalam arus informasi internasional, misalnya arus yang tidak bisa dibendung bisa menimbulkan problem yang mulanya tidak bisa diramalkan.

Lebih tegas lagi dalam persoalan bantuan dikemukakan oleh Duverger (1997:236) yang menyatakan bahwa, bantuan teknis, bagaimanapun bergunanya, tidak jauh berbeda dari jenis belas kasihan, namun pada umumnya, di seluruh dunia, korban yang diambil bangsa – bangsa kaya untuk membantu negara – negara miskin lebih sedikit daripada keuntungan yang diambil dari bahan mentah murah yang dibelinya dari negara – negara yang sama.

Kekhawatiran negara pemerintahan kawasan selatan tentang akibat – akibat negatif tersebut sangat beralasan, sebab posisi negara maju yang sangat unggul mampu mengendalikan negara dunia ketiga melalui kekuatan finansial maupun teknologi. Dalam kaitannya dengan komunikasi, Goonasekera (1987:62) menyatakan, “perkembangan komunikasi dalam kultur negara dunia ketiga dipengaruhi oleh tatanan informasi baru akibat teknologi dan program – program pembangunan bantuan negara maju”. Namun secara substansial negara sedang berkembang belum mampu sepenuhnya untuk mengadopsi teknologi komunikasi yang merata untuk kepentingan rakyatnya.

Dalam persoalan komunikasi politik internasional, posisi negara atau pemerintahan di kawasan selatan cenderung tidak mampu bersaing dengan negara maju. Komunikasi politik internasional adalah suatu bentuk penyampaian pesan politik yang terucapkan, tertulis ataupun melalui pesan – pesan visual secara langsung/tidak langsung kepada sejumlah sasaran, dalam hubungan antar negara, yang terikat pada hubungan bilateral, ataupun tidak terikat hubungan bilateral. Negara – negara kawasan selatan selalu menjadi sasaran kritik ketika banyak pelanggaran terhadap demokrasi dan hak asasi manusia tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah sebagaimana dipaparkan oleh Siregar dan Sulaeman (1999). Celakanya, opini internasional tidak akan berpihak kepada negara kawasan selatan. Walaupun salah satu negara core melindungi negara periferi, biasanya tidak terlepas dari politik bantuan luar negeri yang menguntungkan negara donor. Dalam kondisi domestik yang sangat kompleks maka posisi komunikasi politik internasional dari negara – negara Dunia Ketiga sangat rentan dan tersisih ke pinggiran dalam hubungan antar negara yang didominasi negara – negara maju.

Secara esensial negara – negara maju, atau banyak pakar pembangunan lebih suka dengan istilah negara core, merupakan kekuatan global yang mampu mendikte negara – negara sedang berkembang di kawasan selatan. Dengan kekuatan finansial dan teknologinya, pemerintah kawasan selatan tidak mampu untuk bersaing dalam bidang apapun juga. Retorika dari banyak pemimpin negara maju untuk mencapai globalisasi di bidang ekonomi dan perdagangan dengan menegakkan demokrasi dan hak asasi manusia universal, sepertinya tidak mudah untuk diikuti para pemimpin di kawasan selatan yang terbiasa dengan kekuasaan absolut.

Bab 4

TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN PERUBAHAN SOSIAL

Perubahan sosial merupakan gejala yang wajar di dalam masyarakat, tetapi pemicu terjadinya perubahan, adalah permasalahan yang perlu ditelaah lebih mendalam. Hoogvelt (1976 : 9) menyatakan, "tidak ada masyarakat yang stagnan, oleh karena setiap masyarakat mengalami perubahan yang terjadi secara cepat atau lambat". Hakikat perubahan sosial menurut Rogers dan Svenning (1969 : 8) adalah, "proses dimana terjadi perubahan struktur dan fungsi suatu sistem sosial". Sementara itu secara singkat arti perubahan sosial dikemukakan oleh Daniel Lerner (1983 : 29 - 31) yang pada intinya menyebutkan, "perubahan sosial adalah mengubah cara - cara di dalam mana umat manusia hidup sehari - hari.

Faktor - faktor yang memicu terjadinya perubahan sosial dalam pandangan komunikasi dikemukakan oleh Rogers (1986 : 110), "teknologi komunikasi baru adalah salah satu dari sebab - sebab yang penting dari perubahan - perubahan sosial di masyarakat". Teknologi komunikasi lebih banyak berpengaruh terhadap anak - anak muda dibandingkan kepada anak - anak dan orang tua. misalnya efek dari televisi dan komputer yang banyak beredar di masyarakat. Namun dalam perkembangannya, televisi dan komputer juga memiliki pengaruh yang kuat terhadap anak - anak maupun orang dewasa, karena mengandung pesan dan informasi yang dibutuhkan ataupun menarik bagi semua orang, tanpa tersegmentasi dalam usia.

Kelewatiran terhadap teknologi komunikasi yang berdampak negatif, juga menjadi pembicaraan yang menarik ketika masyarakat menghubungkan dengan era kebebasan akses informasi. Dalam konteks itu, Tom Bottomore (1983 : 114) mengatakan, "sewaktu gelombang industrialisasi dan modernisasi bergerak ke luar, ia merusak unit - unit sosial dan politik sebelumnya yang secara umum sebelumnya dipercaya". Rusaknya tatanan dalam masyarakat

akan berpengaruh pula terhadap sikap dan perilaku yang mengandung nilai-nilai sosial budaya, yang semula dipakai sebagai rujukan dalam interaksi dan komunikasi menjadi pudar digantikan oleh nilai baru yang lebih komersial-konsumtif.

A. Dampak Teknologi Komunikasi

Dampak teknologi komunikasi dalam kehidupan sosial masyarakat, secara singkat dikemukakan oleh Rogers (1986 : 254), dengan mengungkapkan "modernisasi teknologi komunikasi menyebabkan pengawasan masyarakat menjadi lebih penting, walaupun lebih sukar dilaksanakan". Perkembangan sistem informasi yang berukuran raksasa dan bank data, menyebabkan menumpuknya informasi yang sangat berguna bagi lingkungan politik, ekonomi dan ilmu pengetahuan. Akibat sosial lain dalam arti yang lebih luas dilontarkan MacBride (1983:60), "media komunikasi adalah alat kultural yang mendorong atau mempengaruhi sikap, memberi motivasi, mengembangkan pola tingkah laku dan menyebabkan integrasi sosial". Teknologi komunikasi berperan utama dalam menerapkan kebijakan kebudayaan dan membantu mendemokratisasi kebudayaan, melalui pola penyebaran informasi yang lebih cepat diterima oleh khalayak.

Dilanjutkan dengan bisnis yang sangat menekan aspek komersialisasi produk, penggunaan teknologi komunikasi dalam perusahaan multi nasional juga mampu mengubah kondisi sosial masyarakat setempat. Perusahaan raksasa tidak hanya memupuk modal dan memanfaatkan teknologi serta menjualnya ke pasar komunikasi, mereka juga menjual sejumlah kebutuhan sosio kultural, yang merupakan sarana tempat bersatunya ide, rasa, nilai dan kepercayaan. Perusahaan transnasional berpengaruh langsung atas alat - alat produksi negara dan berperan memperdagangkan kebudayaan mereka sehingga dapat mengubah fokus sosio kultural.

Tampalnya perubahan sosial budaya dapat terjadi lebih cepat karena dituang oleh teknologi komunikasi, seperti pendapat Rogers (1986) yang menyebutkan, "sebuah saluran komunikasi lebih khusus lagi yang didukung teknologi, adalah sarana untuk mendifusikan suatu pesan dari seorang individu kepada individu yang lain, dalam menciptakan pengetahuan dari inovasi - inovasi". Saluran - saluran antar perorangan lebih efektif dalam membentuk dan mengubah sikap terhadap ide baru, dengan demikian dapat mempengaruhi langsung keputusan untuk menerima ide - ide perubahan.

Secara kontekstual difusi informasi ataupun difusi inovasi berhubungan dengan perubahan sosial. Rogers (1983 : 3), menunjuk langsung hubungan antara inovasi dengan perubahan, dengan mengemukakan, bahwa difusi adalah suatu proses dimana ide - ide baru dikomunikasikan ke dalam sistem sosial. Jadi difusi inovasi adalah upaya mengkomunikasikan ide - ide baru ke dalam sistem sosial dengan maksud untuk mengadakan perubahan kearah yang diinginkan.

Perubahan sosial sebagai akibat langsung maupun tidak langsung karena pengaruh teknologi komunikasi, ternyata di negara - negara dunia ketiga tidak diimbangi dengan tindakan kekuasaan negara yang memposisikan bahwa, masyarakat telah berubah dan lebih luas wawasannya berkat teknologi komunikasi. Kekuasaan negara hanya melakukan tindakan sloganistik dan retorika ideologi pembangunan bertubi - tubi, tentang rakyat yang sejahtera secara moral maupun material. Sementara masyarakat justru melihat berbagai tindakan pemerintah yang dinilai tidak populer dan bertentangan dengan kehendak masyarakat dalam meraih kesejahteraan.

Dukungan teknologi komunikasi, membuat masyarakat dapat menilai upaya kekuasaan negara dalam menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, namun di pihak lain, pemerintah yang berkuasa seringkali tidak menyadari, sehingga model penyebaran informasi pun dilakukan dengan pola pengorganisasian pesan sepihak, yang bukan mustahil membatasi komunikasi yang interaktif dengan masyarakat. Jika muncul disharmonisasi antara penguasa dengan program pembangunannya, dan rakyat dengan segala pengorbanan moral maupun material demi perubahan yang lebih baik, semestinya komunikasi mampu mengatasi atau menjembatani pertentangan yang terjadi. Memang harapan itu pun ada seperti ditulis banyak pakar, yang mengulas tentang komunikasi secara empirik, harus mampu menghadapi modernisasi dan pembangunan. Komunikasi diharapkan menjadi pemenang ataupun penegang kendali dalam tatanan informasi baru yang semakin berkembang dengan pesat. Komunikasi sejatinya dapat menjawab konsekuensi - konsekuensi munculnya teknologi komunikasi sebagai salah satu fondasi untuk melakukan perubahan ke arah yang diinginkan. Sesungguhnya masalah ini sangat klise dan telah menjadi bahan penelaahan yang seolah - olah membosankan.

Namun secara faktual, teknologi komunikasi yang menyisakan banyak persoalan, dari pola distribusi ataupun akses yang tidak merata, sampai pemanfaatannya untuk kampanye, penggalangan opini publik dan propaganda pembangunan, dari pemerintah maupun sejumlah entitas politik dan bisnis

tetap mewarisi eksistensi teknologi komunikasi sebagai pemicu perubahan yang terjadi di masyarakat

B. Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Teknologi Komunikasi

Universalitas makna demokrasi dan hak asasi manusia mengalami proses difusi, karena perkembangan teknologi komunikasi yang banyak digunakan oleh media massa. Antara demokrasi dan hak asasi manusia, sering memegang peran penting dalam ukuran dalam menjalankan *good governance*. Bahkan isu – isu tentang demokrasi, selalu menjadi perhatian dari negara – negara maju dalam pemberian bantuan, hutang maupun berbagai macam bentuk kerjasama lainnya. Memang ada asumsi, upaya mengkaitkan demokrasi dengan bantuan luar negeri hanyalah sebagai pemantas belaka, mengingat negara – negara maju tidak terlampau selektif, ketika yang diberi bantuan atau diajak bekerjasama adalah sekutu dekatnya yang mampu menjamin kepentingan politik, ekonomi dan keamanan negara maju. Padahal telah muncul berbagai wacana yang memisahkan antara hak asasi manusia dengan bantuan dari suatu negara kepada negara lainnya. Bahkan, tidak sekadar diskursus dalam hubungan internasional saja tetapi sudah menjadi kesepakatan yang dilembagakan.

Secara empirik, problem ataupun penyimpangan terhadap demokratisasi, seringkali dipicu oleh kekuatan ideologi pembangunan ekonomi dan stabilitas politik yang dianut negara, dipakai sebagai alat untuk melegitimasi tindakan pemerintah, termasuk yang tidak menghormati universalitas hak asasi manusia dan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Demokrasi universal yang tidak diartikan sendiri untuk kepentingan pemerintah seringkali berseberangan dengan rezim berkuasa yang menafsirkan demokrasi secara integralistik yang justru menghambat kebebasan politik, ekonomi maupun sosial, termasuk didalamnya kebebasan untuk memperoleh informasi. Padahal Mac Bride (1983 : 46) menyatakan, kebebasan adalah syarat demokrasi yang paling berharga, biasanya diperoleh melalui perjuangan yang sulit melawan kekuatan ekonomi, politik dan penguasa. Kebebasan diperoleh dengan banyak pengorbanan, termasuk korban jiwa. Namun upaya memperjuangkan kebebasan tidak akan pernah puas mengingat kebebasan adalah penjaga demokrasi yang ampuh. Dalam konteks komunikasi, adanya kebebasan mengemukakan pendapat adalah suatu indikasi demokrasi di suatu negara.

Demokrasi dalam perspektif komunikasi secara gamblang didefinisikan sebagai proses dimana individu sebagai *partner* yang aktif bukan hanya sebagai

obyek komunikasi. Keanekaragaman pesan bertambah, perkembangan kualitas yang melibatkan masyarakat didalam komunikasi selalu didorong. (MacBride, 1983 : 252). Sedangkan Walter Lippmann mengemukakan bahwa demokrasi berubahnya, sebagai agen – agen komunikasi massa modern membentuk kelompok sosial berpengetahuan yang berakar pada realita. Munculnya demokrasi akan mengancam eksistensi penguasa yang otoriter dengan ideologi pembangunan dan stabilitas politik, sehingga seperti sudah dibahas di bagian terdahulu, bahwa kekuasaan politik lebih condong untuk membatasi penyebaran – penyebaran informasi, yang mengancam otoritas pemerintah melalui sensor yang sangat ketat.

Melekat dengan prinsip demokrasi, yang sering menjadi isu – isu komunikasi politik nasional maupun internasional adalah masalah Hak Asasi Manusia (HAM). Menurut Budardjo (1994 : 140) bahwa Hak Asasi Manusia dianggap sebagai hak yang dimiliki setiap manusia, yang melekat atau inheren padanya karena dia adalah manusia. Hak Asasi Manusia sesuai dengan proses globalisasi yang sedang kita alami tidak lagi menjadi monopoli dunia Barat, tetapi sudah universal sifatnya. Sementara itu menurut Suseno (1987 : 121) Hak Asasi Manusia adalah hak – hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Oleh sebab itu negara seharusnya tidak menghilangkan (Suseno, 1987 : 121).

Banyak perdebatan tentang HAM pada umumnya seputar pendirian negara, bahwa HAM tidak universal tetapi bersifat integralistik, sesuai dengan karakter sosial budaya setempat, dan seperangkat alasan lain yang sangat simplistik. Tetapi sebenarnya ini semata – mata dipakai oleh negara, khususnya negara periferi sebagai upaya membela diri menghadapi opini publik yang memposisikan hak asasi manusia secara universal.

Hak Asasi Manusia yang ditafsirkan secara integralistik cenderung dipakai sebagai alat – alat propaganda kekuasaan negara untuk membuat rakyat ketakutan dan menaklukkan gerakan – gerakan yang mendukung kebebasan. Tentang kekuatan propaganda, Brown (1977:247), menyatakan bahwa propaganda selalu berhubungan dengan indoktrinasi politik yang mampu merubah sikap – sikap fundamental seseorang atau kelompok untuk mendukung kelompok lainnya yang berkuasa. Namun terlepas dari kekuatan propaganda untuk mempengaruhi rakyat, nilai politik penguasa, dengan berbagai tindakan, termasuk yang represif, pada umumnya menghendaki untuk diposisikan sebagai patron yang wajib diikuti segala perintahnya. Gibb (1961 : 191) menegaskan, ketika individu merasa istimewa dalam

kekusaan, posisi, kekuatan dan intelektual maka dia akan merasa sebagai individu yang harus didengarkan dan diikuti dengan tindakan – tindakan yang diharapkan. Dalam konteks politik tentu dapat menunjuk bahwa karakter tersebut melekat pada para penguasa di negara – negara otoriter atau totaliter. Namun sebagaimana telah disebutkan diatas, bahwa penguasa yang tidak demokratispun merasa sudah menjunjung tinggi hak azasi manusia. Tentu saja sesuai dengan penafsiran dan kepentingan subyektif penguasa yang memafikan substansi HAM yang universal.

Telaahan praktis maupun akademis memang akan menempatkan posisi HAM adalah universal. Deklarasi Bangkok selalu menyebutkan hak asasi bersifat universal, berlaku untuk semua manusia dari semua ras, agama, kelompok etnis, kedudukan sosial dan sebagainya. Indivisibility dan interdependence, hak azasi tidak boleh dibagi – bagi atau dipilah, harus dilihat dalam keseluruhannya, hak politik, hak ekonomi, sosial dan budaya tidak boleh dipisah – pisah, dan semua hak azasi berhubungan (*interrelated*) dan bergantung satu sama lain (Budiarjo, 1994 : 167).

Ditinjau dari sudut komunikasi, HAM akan bersentuhan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan memperoleh informasi yang kredibilitasnya diakui; MacBride (1983 : 137), menyatakan bahwa Deklarasi hak – hak azasi manusia yang universal mengatakan, setiap orang bebas berpendapat tanpa campur tangan orang lain dan kebebasan mencari, menerima dan mengumumkan informasi maupun melalui media tanpa mengenal batas – negara. Sementara itu Pernyataan Umum tentang HAM Perserikatan Bangsa – Bangsa menyebutkan, setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan ; dan untuk mencari, menerima serta menyampaikan keterangan ataupun pendapat dengan cara apapun dan dengan tidak memandang batas – batas. (Asasi, Juni 1999 : 1). Pada konteks ini, hak azasi manusia tidak dapat ditafsirkan secara subyektif tetapi lebih mengarah kepada pemahaman secara universal, berlakunya umum untuk semua bangsa – bangsa di dunia.

C. Teknologi Komunikasi : Sarana Menuju Globalisasi

Perkembangan teknologi secara universal mempengaruhi berbagai sendi kehidupan manusia seperti perubahan, konflik maupun integrasi. Bersinggungan dengan teknologi Lee (1987 : 14) menyatakan, bahwa kemajuan teknologi dan transportasi telah mendorong mobilitas yang tidak terikat jarak

dan waktu. Pendapat lain dari lingkup komunikasi, banyak disebut – sebut bahwa teknologi komunikasi juga telah menyatukan dunia yang berbeda pandangan, politik, sistem sosial dan kepercayaan yang membawa bangsa – bangsa dalam orde bangsa global. (Rogers, 1986).

Dalam konteks komunikasi dan globalisasi, teknologi modern mengubah cara individu, kelompok dan berbagai entitas dalam masyarakat dapat memperoleh, menyimpan, memanggil kembali dan menyebarkan informasi atau data untuk kepentingan sendiri maupun untuk disebarkan kepada khalayak yang lebih luas. Teknologi komunikasi baru menimbulkan revolusi komunikasi di berbagai penjuru dunia yang semakin memudahkan orang untuk saling berinteraksi dan berkomunikasi dalam berbagai hal yang dibutuhkan.

Teknologi penyiaran dan pemrosesan informasi berkembang dengan kecepatan yang semakin meningkat, teknologi baru yang mendukung akses komunikasi menambah ketepatan dan meningkatkan kemampuan teknologi komunikasi yang sudah ada sebelumnya. Menghubungkan dengan kondisi negara dunia ketiga, Reddi (1987 : 42) menyatakan, teknologi komunikasi baru membawa negara dunia ketiga dapat melibatkan diri secara langsung dalam dunia baru, yaitu desa global yang tidak mengenal konsep jarak dan waktu. Berkaitan dengan globalisasi, internet dan telekomunikasi beserta atribut yang melekat didalamnya, adalah kekuatan penggerak yang secara serentak menciptakan kekuatan ekonomi global yang besar, dan menjadikan bagian – bagian yang kecil pun jika didukung oleh teknologi komunikasi bisa lebih kuat dan menunjukkan eksistensinya.

Secara umum karakter teknologi komunikasi menurut Rogers (1986 : 4 – 5) adalah sebagai – berikut: (1). Semua sistem komunikasi baru mempunyai tingkatan interaktivitas yang langsung bertatap muka antara dua orang dengan bantuan komputer. (2). Media baru juga bisa mengalami kesalahan jika pesan yang disampaikan kepada audiens dalam jumlah yang besar. (3) Teknologi komunikasi juga bersifat tidak sinkron yang berarti bahwa mereka berkemampuan untuk mengirimkan atau menerima pesan dalam waktu yang tepat bagi individu dimanapun individu tersebut berada.

Dalam pemikiran yang berorientasi kepada media, pendapat Williams (dalam Tubbs dan Moss, 1996 : 22) menyebutkan, "teknologi baru dapat dianggap sebagai perluasan media yang lebih interaktif dan menuju pada ranah global". Cepatnya arus kemajuan teknologi komunikasi terutama media komunikasi modern, yang mampu mencapai sasarannya dalam

waktu yang relatif singkat dan lebih interaktif, disoroti oleh Suwardi (1996 : 8) yang pada prinsipnya menyatakan, pesan - pesan yang belum sempat tersaring dapat dengan mudah lolos sampai kepada sasarannya, sehingga dapat membawa dampak - dampak tertentu yang mungkin tidak cocok dengan situasi dan kondisi setempat, akan tetapi bisa mendatangkan hal yang sebaliknya mendatangkan keuntungan tergantung kepada keadaan yang ada pada penerima pesan.

Kekhawatiran semacam ini wajar saja seperti banyak pakar komunikasi mengingatkan tentang dampak negatif penggunaan teknologi komunikasi. Sesungguhnya disamping teknologi modern memberikan memberi prospek baru bagi perkembangan komunikasi, tetapi juga menimbulkan bahaya dan masalah dalam komunikasi antar manusia. Karena itu, kita tidak bisa menyatakan bahwa teknologi sebagai alat struktural yang serba bisa untuk memecahkan berbagai persoalan sosial ekonomi dan politik yang terdapat negara maju dan berkembang.

Sifat teknologi komunikasi baru, mengandung implikasi untuk melakukan pengkajian terhadap media baru yang semakin beragam, yang berupaya untuk memenuhi kebutuhan khalayaknya. Media dengan dukungan teknologi komunikasi dapat berperan menanggapi perubahan yang mencakup pembelajaran, maupun penambahan pengetahuan yang disalurkan melalui perangkat yang lebih interaktif.

Dalam tinjauan yang menghubungkan antara teknologi komunikasi, media massa dan komunikasi politik, maka peran media massa adalah menginformasikan dan menggambarkan cara - cara tertentu dalam mana seluruh kegiatan politik melalui jaringan teknologi komunikasi yang mampu menjangkau audiense lebih luas. Semua informasi peristiwa politik atau yang mempunyai kaitan politik, adalah pelajaran bagi masyarakat sehingga sangat wajar jika dimanifestasikan dalam sikap dan tindakan, ketika masyarakat menghadapi persoalan - persoalan politik atau berhubungan dengan kekuasaan negara.

Proses pembelajaran dan luasnya wawasan karena peran teknologi komunikasi merupakan salah satu dari banyak indikator yang berhubungan dengan proses perubahan menuju globalisasi masyarakat dunia yang semakin menunjukkan eksistensinya.

Bab 5

DINAMIKA PARTAI POLITIK

1. Kredibilitas Politik PDIP

(Kompas, 10 Mei 2006)

Kerusuhan dalam pilkada Tuban adalah ironi bagi PDIP yang sebelumnya mengklaim telah memenangkan 50 persen pilkada yang diselenggarakan sejak bulan Juni 2005 sampai dengan Maret 2006.

Prestasi mencengangkan yang dikemukakan oleh Tjahjo Kumolo tersebut merupakan salah satu keberhasilan PDIP dalam persaingan politik lokal setelah menetapkan diri sebagai partai oposisi terhadap pemerintahan Yudhoyono-Jusuf Kalla.

Belum tentu masalah Tuban, PDIP dituding mencuri start kampanye Pemilu 2009, setelah partai bertubang banteng gemuk itu mengumpulkan para bupati, wali kota, dan gubernur, serta para ketua DPRD dari berbagai daerah dalam rakornas di Surabaya. Mereka berikrar setia terhadap delapan program partai yang disebut dengan Hasta Prasetiya, sebuah program partai yang peduli terhadap kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat dengan bingkai "ideologi" partai oposisi.

Sebenarnya orang tidak perlu terburu-buru menuduh "ikrar kesetiaan" sebagai tindakan mencuri start dan berpotensi menimbulkan ambivalensi loyalitas terhadap partai atau pemerintah. Sebab, jika kita kaji tanpa prejudice sebuah kekuatan partai oposisi, Hasta Prasetiya PDIP sama juga dengan program pemerintah. Kekawatiran terhadap rakornas PDIP dengan sejumlah prasangka politis adalah berlebihan.

Kegiatan konsolidasi dan berbagai pertemuan partai yang dibumbui dengan ikrar adalah kelaziman perilaku sebuah partai untuk terus menerus memperbarui dan menyesuaikan diri dengan dinamika politik lokal, nasional, bahkan "internasional" yang berkembang.

Mampu menarik simpati

Terlepas dari kisrah Tuban, kemenangan dalam sejumlah pilkada yang diraih PDI-P merupakan fenomena bahwa PDI-P masih mampu menarik simpati publik, dan ini sebenarnya yang perlu lebih dikhawatirkan oleh elite politik sehingga mereka mengemas tuduhan mencuri start kampanye dan loyalitas ganda. Di sisi lain semakin tinggi kekhawatiran terhadap manuver politik PDI-P, partai di bawah Megawati Soekarnoputri (tu jistru merasa di atas angin akan berhasil, bukannya hanya sebatas memenangi sejumlah pilkada, tetapi merasa dan tidak mustahil akan unggul pada Pemilu 2009).

Padahal perjalanan menuju tahun 2009 bukan pekerjaan mudah bagi PDI-P sebab berbagai faktor internal maupun eksternal setiap saat bisa menggarangi kredibilitasnya di masyarakat. Faktor mendasar yang harus ditangani adalah bagaimana memperkecil konflik internal di dalam organisasi sebab keluarnya sejumlah tokoh penting dalam jajaran kepengurusan PDI-P sangat mungkin berdampak terhadap larinya konstituen kepada partai lain.

Walaupun para elite di PDI-P cenderung membantah tidak ada pertentangan dan keluarnya sejumlah kader juga tidak berpengaruh terhadap agenda politik partai, fakta menunjukkan bahwa mereka yang keluar dari PDI-P maupun membuat opini publik melalui sejumlah isu kepemimpinan "otoriter" yang tidak menguntungkan bagi PDI-P.

Terkait dengan persiapan tahun 2009, PDI-P selayaknya tidak memitus begitu saja hubungan terhadap sejumlah kadernya yang berurusan dengan aparat penegak hukum. Bukan berarti membela orang yang bersalah menyelewengkan uang negara, tetapi semestinya pernyataan bernada empati harus dikeluarkan menyangkut masalah yang menimpa Said Agil Al Monawar, Theo P. Toemion, Syafruddin Iemonggung, dan sejumlah kader partai di daerah. Dalam konteks ini, PDI-P dapat membandingkan bagaimana partai-partai besar lain menyikapi kadernya yang berurusan dengan aparat penegak hukum sebagai upaya menciptakan hubungan kohesif dengan konstituennya.

Bungkam terhadap "nasib" kolega ataupun kadernya yang sedang bermasalah justru berpotensi menimbulkan respons negatif konstituen.

Mengutip pepatah kuno yang dikemukakan oleh Walter Lippman, "bahwa tidak ada orang menjadi pahlawan untuk pembantu rumah tangganya", bisa bermakna PDI-P lebih mementingkan citra partai yang direlayasi di depan khalayak luas, tetapi mengabaikan persoalan mendasar yang justru berfungsi sebagai penunjang utama kehidupan sebuah partai politik. Batangkali secara internal PDI-P sudah menyikapi masalah ini, tetapi gayungnya tidak dirasakan oleh masyarakat sehingga terperangkap dalam stigmatisasi "habis manis sepagh dibuang" terhadap nasib kadernya.

Dalam rangka membangun kekuatan partai menghadapi Pemilu 2009, PDI-P seharusnya mengevaluasi hubungan dengan donatur yang "diduga" bermasalah. Memelihara penyumbang dana untuk partai yang memiliki sejumlah persoalan dengan negara akan berakibat buruk bagi pemberantasan korupsi dan penegakan hukum di Indonesia. Apabila ini tidak dilakukan, rakyat dengan mudah berpaling ke partai lain yang dianggap tidak berkolaborasi dengan pengusaha hitam sebagai penyandang dana.

Faktor lain yang paling potensial menentukan keberhasilan dalam Pemilu 2009 adalah kontinuitas partai dalam menggalang massa, khususnya di wilayah pedesaan. Merumuskan pekerjaan yang membosankan, tetapi di sandi fungsi partai yang sesungguhnya. Dan ikrar Hasta Prasetya pada Rakornas PDI-P adalah salah satu wujud nyata untuk menggalang loyalitas massa melalui otoritas kepala daerah.

Kegiatan semacam ini sebenarnya juga dilakukan oleh partai lain yang rajin menyambangi massa di akar rumput, tetapi PDI-P memiliki sejumlah kesempatan yang lebih luas sebab mereka bisa menjalankan fungsi komunikasi politik yang *equalitarian* dalam jargon persamaan nasib dengan rakyat dan bertindak sebagai *information giver* yang berbeda terhadap sejumlah kebijakan pemerintah.

Dalam perspektif demokratisasi informasi, pesan-pesan yang berbeda dengan versi "pemerintah dan koalisi partai pendukungnya" jauh lebih menarik perhatian masyarakat yang merasa harapannya belum terpenuhi, bahkan didecewakan oleh pemerintah ketika menaikkan harga BBM secara keterlaluan.

Namun, meski upaya membangun kekuatan partai melalui berbagai macam pertemuan politik maupun kegiatan langsung terjun ke masyarakat telah dilakukan, bukan suatu jaminan PDI-P akan unggul pada Pemilu 2009.

2. Mempersiapkan Partai Lokal

(Media Indonesia, 22 Februari 2009)

Hiruk pikuk mempersiapkan RUU Pemerintahan Aceh (RUU PA) masih bergema, sebagian bernada optimisme, partai lokal akan memperkaya khasanah demokrasi dan perpolitikan di Indonesia. Namun tidak sedikit yang berpendapat, partai lokal adalah representasi menguatnya posisi separatisme. Adilnya akan mengganggu ketutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Wacana munculnya partai lokal hendaknya tidak disikapi dengan konfrontatif dan merayonis melainkan dengan kekhawatiran maupun kecurigaan. Isu yang harus menjadi perhatian adalah bagaimana hak hidup partai lokal secara politis dilindungi, dan bagaimana nilai khusus yang diusung partai lokal dapat berdampingan dengan partai-partai nasional secara harmonis.

Oleh karena itu, politisi di DPR yang mengkhawatirkan munculnya partai lokal, tidak terbelenggu dengan asumsi dan hipotesis yang bertumpu pada nilai minor terhadap partai lokal. Mereka lebih layak jika menuntirkan bagaimana partainya mampu berkompetisi secara beradab dengan "kemungkinan munculnya partai lokal". Upaya untuk menciptakan keunggulan partai nasional dari partai lokal harus diperjelas dengan langkah strategis.

Untuk mengalkulasi munculnya partai lokal sebagai pesaing partai nasional, kita melihat kekuatan partai politik di Provinsi Aceh, dengan menacu pada hasil pemilu legislatif di tingkat provinsi. Berdasarkan data KPU, partai politik yang mendominasi perolehan suara di Provinsi Aceh yang berbasis Islam adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menguasai 12 kursi di DPRD, Partai Amanat Nasional memiliki 9 kursi, Partai Bulan Bintang, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Bintang Reformasi masing-masing memiliki 8 kursi.

Selain itu masih ada Partai Persatuan Nabidlatul Ummah Indonesia yang mendapatkan 2 kursi dalam Pemilihan Umum tahun 2004. Jumlah kursi dari partai-partai tersebut adalah 48 kursi atau sekitar 70% dari total keseluruhan kursi di DPRD NAD yang berjumlah 69 kursi.

Sedangkan sekitar 30 % atau 22 kursi di DPRD Negeri Aceh Darussalam dikuasai oleh Partai-partai lain yaitu 12 kursi diperoleh Partai Golkar, enam kursi dimiliki oleh Partai Demokrat, dua kursi dikuasai PDI Perjuangan serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) mendapatkan satu kursi.

Dengan komposisi perolehan suara semacam itu, sebenarnya apa yang ditakutkan oleh para politisi di DPR dapat dihilangkan. Sebab partai nasional khususnya partai berbasis Islam memiliki posisi kuat di Aceh. Propinsi NAD. Tindakan yang harus dilakukan adalah menjalankan fungsi komunikasi politik yang baik terhadap rakyat Aceh. Tujuannya mempersiapkan kompetisi dengan partai lokal ataupun calon independen dalam pilkada dan tentu saja untuk mempertahankan suara dalam Pemilihan Umum 2009.

Menarik pada data KPU dalam Pemilu Legislatif tahun 2004, terdapat 12 partai politik yang tidak memperoleh kursi di DPRD NAD dengan total suara sebesar 320.470 pemilih. Jumlah inilah sebenarnya yang sangat potensial digarap lebih awal oleh partai lokal. Disamping itu, sudah barang tentu partai lokal juga mengharapakan perpindahan suara dari partai-partai tingkat nasional yang menguasai 70 % kursi di Provinsi Aceh.

Untuk menyiasati kaburnya suara pemilih, partai nasional harus benar-benar mengerti secara mendasar apa yang dikehendaki masyarakat Aceh, bukan terjebak dalam jargon politik nasional yang klise, gagah berani, lengkap dengan janji yang luar biasa mengagumkannya.

Meski demikian, seandainya partai nasional yang dominan mampu menciptakan pesan-pesan baru sejalan dengan wacana partai lokal, khususnya perdamaian, keadilan dan kesejahteraan ekonomi yang dituntut masyarakat Aceh, bukan tidak mungkin partai nasional dengan mudah mampu mempertahankan eksistensinya.

Jika upaya mempertahankan posisi partai nasional untuk tetap unggul di Propinsi NAD mengalami kesulitan akibat munculnya partai lokal yang lebih diterima oleh masyarakat Aceh, para pemimpin partai nasional yang nota bene sering berwacana terhadap signifikansi antara partai lokal dan separatisme, mestinya mencoba jalan lain untuk menepis kekhawatiran itu.

Partai-partai besar di tingkat nasional seperti partai Golkar, PDI Perjuangan, demikian juga partai yang dominan di Propinsi NAD seperti PPP, PAN dan PKS, selanjutnya berusaha membentuk partai lokal yang berbasis ideologi dan perjuangan yang ditekankan pada mengintegrasikan kepentingan masyarakat lokal.

Sebagai partai tingkat nasional tentunya memiliki semangat mempertahankan keutuhan NKRI, sehingga ketika membentuk partai lokal, tidak perlu ada pihak-pihak yang mengkhawatirkan bahwa partai lokal sebagai subordinat dari partai pusat itu akan mendorong munculnya disintegrasi.

Secara konkret, dua strategi mengantisipasi munculnya partai lokal di Provinsi Aceh akan bertumpu pada, pertama membuat jaringan komunikasi integratif yang berkelanjutan antara partai nasional dengan kerabatnya di Aceh. Kedua, ikut mendirikan partai lokal dengan wacana perjuangan (tingkat) nasional.

Dua tindakan itu, sejatinya tidak hanya bertumpu pada pemimpin dan aktivis politik. Sebab bukan rubah saja lagi bahwa partai politik beserta organ-organnya sering diaugap dengan sikap apatis, skeptis ataupun sikap lain yang lainnya tidak mempercayai lagi peran partai politik nasional untuk menciptakan keadaan yang lebih baik.

Oleh sebab itu para komunikator partai politik di tingkat harus mampu menjalin kerjasama yang sederhana dengan pemuka pendapat yang sangat dominan di Aceh. Hubungan bukan didasarkan pada struktur partai yang selalu membentuk arogansi struktural yang merasa "orang pusat lebih unggul".

Persoalan yang muncul, pasca-MOU Helsinki, ternyata tidak mudah menemukan pemuka pendapat yang sejalan dengan kebijakan partai nasional. Sebab, pasca perjanjian damai itu telah muncul pemuka pendapat baru, aktivis muda, dan sejumlah tokoh LSM yang mampu menunjukkan eksistensinya dalam pola hubungan sosial ekonomi dan politik yang sesuai tuntutan masyarakat. Era 'membentuk' pemuka pendapat dengan sejumlah keharasan yang melibatkan kekuasaan negara semakin pudar dan dijaui masyarakat Aceh.

Oleh sebab itulah diperlukan kejelasan para pimpinan dan aktivis partai nasional untuk menetapkan dan menggali secara mendalam peran pemuka pendapat yang bisa diajak bekerjasama mempertahankan suara pemilih. Pemuka pendapat yang kooperatif untuk ikut membentuk partai lokal dengan semangat nasional. Sebab di tangan pemuka pendapatlah gagasan partai nasional yang salurkan kepada rakyat Aceh bisa diterima.

3. Target PAN Tahun 2009

(Harian Seputar Indonesia, 2 Oktober 2006)

Dalam berbagai kesempatan pertemuan dengan kader partai. Ketua PAN Soetrisno Bachir selalu mengungkapkan bahwa PAN menargetkan seratus kursi di DPR-RI pada pemilihan umum tahun 2009. Untuk mencapai tujuan itu PAN menggunakan strategi sederhana dengan membawa rombongan artis dalam setiap kegiatan mengumpulkan massa di daerah-daerah.

Dua ketua PAN, bahwa partai harus menimpakkan wajah yang menyempangkan dan tidak harus selalu terjebak dalam ketegangan adalah alasan yang faktual dan membunsi sesuai dengan kebutuhan masyarakat sesuai. Alasan lain, mengapa PAN lebih suka berkolaborasi dengan artis dalam kegiatannya politiknya adalah, untuk mengimbangi sikap politik Amin Rais yang bersemangat untuk terus mengkritisi pemerintahan. Terlebih lagi jika kebijakan tersebut secara substansial di dukung oleh para politisi PAN dan kader PAN yang duduk dalam pemerintahan, maka Amin Rais akan semakin lantang menyuarakan ketidaksepakatiannya.

Diferensiasi perilaku politik antara Amin Rais dan pimpinan PAN sepiantas menunjukkan orientasi politik ganda. Namun sesungguhnya sebagai strategi politik ternyata cukup ampuh untuk menjaga loyalitas kader maupun simpatisan partai. Amin Rais yang masih diposisikan sebagai salah satu ikon reformasi politik di Indonesia, masih sangat kuat untuk menahan kader maupun simpatisan tidak meninggalkan PAN, sedangkan kelompok lain yang lebih moderat, tidak keberatan jika PAN sebagai pendukung kekuasaan SBY-JK. Artinya, dengan dua sikap politik tersebut, PAN mampu mencegah massanya untuk lari ke partai lain.

Indikator sederhana yang bersifat tentatif terhadap keberhasilan politik PAN adalah, kemampuan untuk memenangkan 18 persen pilkada di berbagai daerah di Indonesia. Angka perolehan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan hasil yang dicapai dalam pemilu legislatif tahun 2004. Menarik, banyak pendapat yang menyatakan bahwa kemenangan dalam pilkada tergantung dari tingkat kepercayaan publik terhadap "kandidat" yang diusung, namun sangat tidak adil jika faktor partai pendukung, diabaikan begitu saja. Sebab mereka juga memegang peran penting dalam mengatur strategi memenangkan pilkada.

Namun, kesuksesan orientasi politik ganda tersebut, bukan berarti akan berdampak positif pula dalam pemilihan umum tahun yang akan datang, sebab dinamika politik menuju tahun 2009 sangat dinamis dan tidak terduga. Partai-partai baru akan bermunculan dengan mengusung beragam tokoh yang dikenal masyarakat, dan bukan mustahil mereka adalah orang-orang yang sebelumnya dikenal sebagai elite dalam tubuh PAN. Oleh sebab itu, model dualisme orientasi politik PAN harus sejak dini dievaluasi agar tidak dipakai sebagai retorika partai lain untuk menarik massa PAN. Tetapi jika PAN tetap berupaya untuk menjalankan politik dengan model "kesimbangan", maka elite PAN seharusnya mampu menjelaskan tentang pola hubungan antara Amin Rais dan garis politik PAN yang sesungguhnya, sehingga bukan sekadar

mengemukakan perbedaan ekspresi dalam komunikasi verbal yang dilakukan oleh Amin Rais dan sejumlah elite PDIP. Sebab dalam keterbukaan komunikasi politik, simpatisan dan konstituen mempunyai hak untuk memperoleh informasi yang komprehensif terhadap kebijakan dan sikap politik partai.

Tertlepas dari model orientasi ganda, PAN yang selalu mengklaim sebagai partai tengah modern itu, seyogianya konsisten menjunjung jargon politik yang pernah diungkapkan dalam berbagai penggalangan konstituen seperti "Kerja Keras untuk Rakyat". Pernyataan itu hendaknya diwujudkan oleh seluruh aktivis partai, lebih khusus lagi bagi menteri - menteri kader PAN yang ada dalam pemerintahan SBY-JK. Mereka jangan sampai mengabaikan keberpihakan kepada rakyat, sebagaimana selalu diingatkan oleh Amin Rais.

Sebab, dalam situasi mengharapkan keadilan sosial ekonomi yang tiada kunjung tiba, maka masyarakat semakin peka terhadap perilaku elite dalam kekuasaan negara yang tidak berpihak kepada rakyat. Dengan demikian, jika rakyat merasa kurang diperhatikan oleh elite dalam tubuh PAN, tentu saja yang ada di lembaga legislatif ataupun yang menjadi menteri dalam kabinet SBY JK, maka dengan mudah mereka akan berpaling kepada partai lain yang mulai mengumbar janji - janji menggiurkan. Tentu saja, jika ini terjadi, akan mempersulit PAN dalam mencapai target 100 kursi di DPR-RI tahun 2009. Implikasinya, upaya mendudukkan Amin Rais dalam tempat yang lebih sesuai, sebagaimana pernah dikemukakan oleh Ketua PAN juga semakin sulit.

4. Marissa dan PDIP 2009

(Harian Sepuluh Indonesia, 23 Desember 2006)

Pemilihan Gubernur Banten telah usai, meski ada pernik - pernik saling mengklaim tidak puas diantara pasangan calon yang bersaing, namun tidak sampai menimbulkan konflik frontal diantara pendukungnya. Ini sangat menguntungkan bagi dinamika politik lokal maupun kehidupan politik Jakarta, yang mengharapkan pilkada di wilayah penyangga ibukota tersebut, berjalan dengan baik sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil perhitungan akhir KPUD Banten, pasangan Ratu Atut Chosiyah - UIM Masduki unggul dengan memperoleh 40,14 % suara, Sedangkan pasangan Zulkieflimansyah - Marissa Haque mendapat 33,01 %. Pasangan lainnya Tryana Sjanina - Bennyamin Devrie 22,74 %, dan kandidat yang memperoleh suara paling sedikit adalah pasangan Trojad Djuwaeli - Mas Achmad Daniri yang mengantongi 4,11 %.

Dibalik hasil itu, ada persoalan Marissa Haque yang gagal menjadi Wakil Gubernur dan harus bengkok dari PDIP DPR-RI. Jika kemarin kebelakang, Marissa tidak dicalonkan oleh PDI-P tetapi dipinang oleh PKS yang lebih melihat potensi dan popularitas artis senior tersebut. Pilihan PKS tidak meleset, sebab sesungguhnya Marissa dalam penyaringan internal di PDIP memiliki suara signifikan untuk diusung sebagai calon gubernur, tetapi ternyata partai berlandung banteng genuk itu lebih memilih Ratu Atut Chosiyah.

Marissa sudah kalah dan harus keluar dari PDI Perjuangan, padahal istri rocker Iqbal Fawzi itu, meminta DPP PDIP tidak menarik dirinya dari keanggotaan PDIP DPR. Marissa yang pernah tercatat sebagai anggota Komisi IV DPR ini tidak menginginkan DPP melakukan penggantian antarwaktu (PAW) terhadap dirinya karena masih mencintai partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu. (Sindo, 06 Desember 2006). Bisa jadi, itu suara ketika salah satu ikon PDI-P di Serang itu, merasa gagal dalam pilkada Banten.

Namun apa perlunya mengungkit sikap Marissa kebelakang yang dianggap tidak taat terhadap kebijakan partai dan arkat maju sebagai calon wakil gubernur mendampingi Zulkieflimansyah dari Partai Keadilan Sejahtera. Sebenarnya elite di PDI-P tidak perlu merasa menang ketika Marissa memang sudah kalah.

Jika mau berpikiran jernih dan tidak dililit oleh kecanggungan terhadap sikap politik Marissa dalam konteks pencalonan sebagai wakil gubernur, sebenarnya PDI-P harus bertindak taktis. Bukan sebatas untuk kepentingan politik semata dengan target memenangkan pilkada Banten. Sebab, ada tugas berat bagi PDI-P di wilayah penyangga Jakarta itu menuju pemilihan Presiden tahun 2009. Menjadi pertanyaan disini, yakinkah para elite di partai pimpinan Megawati Soekarnoputri tersebut mampu meraih suara yang memadai. PDI-P tentu tidak bisa mengandalkan gubernur terpilih yang notabene bukan kader partai, untuk menggelembungkan suara PDI-P dalam kompetisi 2009. Artinya, PDI-P tetap harus mencari orang kuat lain yang populer dan dipercaya masyarakat Banten.

Tentunya karakter itu tetap ada di Marissa Haque. Kendati kalah dalam pilkada, tetapi angka yang diperoleh sungguh mengesankan. Bagaimana jika peran PKS yang memiliki suara di DPRD Banten sekitar 18 %, tetapi kekuatan Marissa tidak diragukan lagi. Bahkan, sangat mungkin jika simpatisan PDI-P di wilayah perkotaan lebih cenderung untuk memilih Marissa dalam pilkada yang lalu.

Esensinya, mempertahankan Marissa di DPR RI tidak akan rugi dan bermakna strategis dalam menghadapi pemilu 2009 yang sudah mulai menggebu. Terlebih lagi, PDI-P yang diperkirakan akan kembali mencalonkan Megawati Soekarnoputri, perlu untuk didampingi wanita-wanita populer yang dikenal masyarakat. Bisa saja, PDI-P akan mencari artis lain yang juga sepopuler Marissa tetapi tidak mudah sebab untuk membentuk dan menciptakan citra individu yang melekat dengan partai, perlu proses panjang. Sedangkan Marissa sendiri tahu identik dengan PDI-P. Bahkan, jika dicermati dan dikaitkan dengan makna simbol dalam komunikasi politik, istri ceko asal Pandeglang itu, senantiasa berusaha tampil dengan atribut merah PDI-P termasuk foto resmi yang disebar ke segenap penjuru Banten. Namun, jika berprasangka dan mengungkap kesalahan, penampilan Marissa justru dinilai memecah suara PDI-P. Tetapi sekali lagi, apa perlunya menghakimi orang yang sudah kalah.

Meski demikian, harus diakui, tidak mudah mempertahankan Marissa di PDI-P, terlebih lagi ketika sejumlah elite politik di PDI-P sudah memiliki calon pengganti antar waktu di DPR-RI. Namun sesungguhnya yang lebih penting, adalah bagaimana partai berlogo banteng gemuk itu tetap berpikiran positif, bahwa Marissa Haque adalah orang yang mampu menggarap konstituen Banten untuk mendukung Megawati Soekarnoputri dalam pemilihan umum tahun 2009.

5. Peran Oposisi Partai Moncong Putih

(Koran Tempo, 12 April 2007)

Meski banyak mengkritik pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan M. Jusuf Kalla, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dinilai oleh berbagai publik masih gagal dalam menjalankan peran oposisi. Walaupun pada tanggal 27 Maret 2007, Lembaga Survei Indonesia (LSI) melaporkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap PDI-P meningkat dari 17,9% di bulan Desember 2007 menjadi 19,7% pada bulan Maret 2007, namun sesungguhnya tidak sebanding dengan kerja keras sebagai partai oposisi.

Dalam kalkulasi kekuatan politik, terutama di DPR-RI, tentu saja kegagalan itu bukan semata-mata akibat ketidakmampuan PDI-P dalam mengartikulasikan kepentingan rakyat dan kelemahan strategi kampanye yang tidak bisa mengajak masyarakat untuk mendukung peran oposisi.

Sebab, ketika fakta politik lebih banyak bicara tentang kekuatan voting dalam pengambilan keputusan di DPR-RI, maka tidak ada artinya popularitas peran oposisi di tengah rakyat. Esensinya, dalam balutan politik voting, PDI-P tidak pernah berhasil menjalankan perannya. Bahkan dalam realitas media, suaranya tertelan oleh dahsyatnya retorika partai-partai pendukung pemerintah yang merasa lebih aspiratif terhadap tuntutan reformasi.

Dalam berbagai isu politik selama ini, seperti kenaikan harga BBM dan penolakan impor beras, energi politik PDI-P dalam menjalankan peran oposisi di DPR-RI terbuang sia-sia. Harus diakui PDI-P terlalu berharap banyak kepada partai-partai yang ada di Senayan untuk membentuk kekuatan oposisi temporer. Padahal, mestinya elite politik partai pimpinan Megawati Soekarnoputri tersebut lebih jeli untuk mengkaji perilaku partai-partai yang gemang dalam menentukan posisinya maupun partai yang gemar beretorika mengidentifikasi diri sebagai koalisi kritis pemerintah.

PDI-P terlalu percaya terhadap suara individual para politisi "kritis" di Senayan, padahal pengalaman menunjukkan bahwa model pengambilan keputusan semua partai-politik di Indonesia, bahkan PDI-P sendiri, juga disinyalir oleh "parakader yang eksklusif" masih diwarnai oleh pola patrimonial yang memposisikan suara ketua umum bak sabda raja yang tidak bisa ditolak.

Jadi, apakah artinya, menggalang kekuatan dari para tukang kritik pemerintah di DPR-RI kalau penentu sikap politiknya adalah pimpinan partai. Partai di Indonesia memang tidak berbasis pada kekuatan dan kualitas individual tetapi lebih diwarnai oleh cara kerja ala paguyuban yang mekanistik dan berpijak pada satu poros.

Karenaitu, untuk menguatkan peran oposisi yang faktual sebagai kelompok penekan pemerintah, seharusnya PDI-P menggalang hubungan langsung dengan ketua partai yang berperan di DPR-RI bukan sekadar menggandeng mereka yang kritis di Senayan, tetapi sangat mungkin, mereka sekadar menjalankan strategi agar partai politiknya dinilai memiliki peduli masalah bangsa sehingga tidak diabaikan oleh konstituen. Melakukan pendekatan dan mengajak kerjasama dengan pimpinan partai lain merupakan efisiensi tindakan politik yang memungkinkan PDI-P tidak kehilangan tenaga dalam menjalankan peran oposisinya.

Tetapi persoalannya, tidak mudah bagi pimpinan PDI-P untuk menggandeng elite di puncak piramida partai lain, setidaknya tidaknya sepanjang

tahun 2007, ketika partai politik justru mencari energi tambahan untuk pemilu tahun 2009 dengan cara merapat kepada kekuasaan pemerintah. Selain itu, muncul kesan, bahwa PDI-P merasa "terlalu besar" untuk mau bekerjasama dengan pimpinan partai lain dalam menjalankan peran oposisinya. Akibatnya PDI-P sebagai kekuatan oposisi tetap akan berada dalam belenggu politik voting yang bertujuan mendukung dan melegitimasi kebijakan pemerintah SBY-JK.

Namun, sejatinya bukan berarti PDI-P harus pesimis menghadapi politik voting, sebab yang lebih penting adalah konsistensi untuk tetap kritis terhadap kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Fakta lain menunjukkan, bahwa dalam berbagai jajak pendapat, tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik menurun dan peran DPR juga dinilai semakin menjauhi dari rakyat. Kondisi ini merupakan kesempatan baik bagi partai yang mengklaim sebagai pilihan wong cilik untuk meningkatkan popularitasnya dalam survei politik yang akan datang.

Karena itu, dikaitkan dengan pemilu 2009, menjalankan peran oposisi sendirian lebih baik bagi PDI-P 'tentu saja dilengkapi pula konsep - konsep aktual dalam menjalankan pemerintahan yang beradab. Sikap oposisi bisa terus menerus didiseminasikan melalui berbagai kegiatan yang terprogram di masyarakat. Tidak perlu mengharap liputan luas dari media massa, atau berupaya sekuat tenaga untuk menyebarkan pesan - pesan oposisi melalui media elektronik, sebab dalam wacana komunikasi politik, popularitas tidak identik dengan tercapainya tujuan. Tentu PDI-P sudah berpengalaman dalam kampanye coblos moncong putih.

Dalam koridor demokratisasi dan analisis situasional, ada asumsi bahwa masyarakat cenderung mengekspresikan pilihan politik berbeda ketika melihat fakta yang disekelilingnya tidak beranjak lebih baik. Namun masalahnya dan sekaligus tantangan faktual bagi elite partai, apakah PDI-P mampu memosisikan sebagai partai pilihan yang ideal? Sebab, sepertinya masyarakat masih mengingat dengan jelas peran yang dilakukan PDI-P ketika berkuasa.

6. Menduga Pemenang Pilkada Jakarta

(Kompas, 3 Agustus 2007)

Menduga kekuatan para kandidat gubernur Jakarta yang bersaing, memang tidak mudah, mengingat mereka memiliki karakteristik kekuatan individual

maupun dukungan kelompok yang beragam. Jika merujuk pada hasil pemilu legislatif tahun 2004 di DKI Jakarta, jelas Fauzi Bowo - Prijanto yang didukung Koalisi Jakarta dengan perolehan suara 75,9 persen dalam pemilu tahun 2004, akan unggul dibandingkan dengan pasangan kandidat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang hanya 23,32 persen.

Tetapi faktanya, mengamati kampanye yang sudah berlangsung satu pekan, pasangan Adang Daradjatun - Dani Anwar lebih menarik perhatian publik. Dalam setiap kesempatan kampanye, jumlah massa yang datang jauh lebih besar, dibandingkan dengan yang berpartisipasi dalam kampanye Fauzi - Prijanto. Namun bukan berarti pasangan dari PKS akan unggul dan menang dengan mudah, sebab ada berbagai faktor yang bisa dijadikan alasan mengapa membludaknya massa belum tentu signifikan dengan jumlah suara yang diperoleh dalam pilkada.

Pendukung PKS memiliki loyalitas tinggi dan konsisten untuk mendukung sepenuhnya pasangan Adang - Dani. Dalam arti, massa PKS secara aktif dengan mobilitas tinggi, akan memeramaikan kampanye kandidat Gubernurnya di wilayah manapun di Jakarta. Kegairahan berpartisipasi dari pendukung pasangan yang selalu mengidentifikasi diri sebagai "Tim Oranye" tersebut, tampaknya juga mengacu pada substansi keterlibatan fisik dan emosi mereka untuk selalu bersama Adang dan Dani secara tulus.

Keberhasilan membentuk kader yang loyal adalah hasil dari proses panjang PKS dalam menciptakan partai yang kuat, bukan sekadar untuk menghadapi persaingan menjelang hajatan politik tingkat nasional maupun di tingkat lokal. Pola penguatan ideologis dilakukan dalam setiap kesempatan dan terprogram dengan baik. Hasilnya, ada komunikasi interaktif antar pimpinan, kader dan simpatisan partai yang berjalan dengan baik. Model hubungan dalam tubuh PKS dengan mudah menarik simpati masyarakat, termasuk di berbagai lingkungan sekolah maupun kampus.

Dalam konteks pilkada DKI, massa yang menjejal kampanye Adang - Dani, bisa diasumsikan sebagai pendukung riil, sehingga antara peserta kampanye dan pemilih tidak jauh berbeda jumlahnya. Meskipun demikian, anggapan tersebut sesungguhnya sekadar menghibur pasangan Fauzi - Prijanto. Ternyata diembel - embel dengan alasan bahwa konstituen Koalisi Jakarta bersifat lebih pasif dalam urusan kampanye, tetapi pada tanggal 8 Agustus 2007, mereka tetap akan memberikan suaranya kepada pasangan yang mengeksplorasi tema "keanekaragaman" dalam kampanye Olchi sebab itu,

jika merujuk pada asumsi tersebut, dapat dikatakan bahwa pasangan Foke - Prijanto akan memenangkan pilkada Jakarta.

Namun demikian, dalam wacana komunikasi publik, sesungguhnya kemenangan dalam setiap kampanye yang diselenggarakan pasangan PKS, berpotensi untuk mempengaruhi massa "baru" yang belum memiliki pilihan partai dengan jelas. Sebab secara manusiawi, orang - orang pada umumnya lebih menyukai pendapat mayoritas yang dikemas dan didiseminasikan media kepada khalayak. Dengan demikian, anggapan bahwa kelompok mayoritas yang diam, merupakan kunci kemenangan koalisi Jakarta untuk merebut kursi Gubernur belum tentu benar. Apalagi yang ditulis Kompas (19 Juli 2007), "pemilih Jakarta dalam pemilu tahun 2004, sulit untuk ditebak, pilihan partai tidak berkorelasi dengan pilihan calon Presiden". Artinya, menang suara konstituen bisa mudah berganti dan tidak tergantung pada orientasi partai politiknya.

Disinilah, persaingan antara Adang - Dani dan Foke - Prijanto, menjadi sulit untuk diprediksikan. Sebab meskipun dalam posisi perolehan suara 3.062.012 atau 73,9 persen berbanding dengan 941.684 suara atau 23,3 persen, tetapi peluang PKS untuk mendudukkan kandidatnya sebagai orang nomor satu di Jakarta masih tetap terbuka lebar. Sedangkan Foke - Prijanto harus bekerja keras, meskipun hasil jajak pendapat Kompas menunjukkan bahwa pasangan Adang - Dani memperoleh 35,5 persen, naik tipis dari bulan Juni sebesar 33,7 persen, sedangkan Foke - Prijanto dipilih oleh 60, 9 persen menurut dibandingkan dengan Juni, 66,3 persen (Kompas, 16 Juli 2007).

Kecenderungan berkurangnya popularitas Foke - Prijanto dan meningkatnya kepercayaan publik terhadap Adang - Dani, merupakan dampak perubahan orientasi pemilih partai Islam di luar PKS yang mendukung Adang - Dani. Hasil pemilu legislatif tahun 2004, menunjukkan bahwa perubahan pilihan politik warga Jakarta, tetap diwarnai oleh ikatan ideologis, khususnya partai yang berasaskan Islam. (Kompas, 19 Juli 2007). Esensinya, suara partai berasaskan Islam memegang kunci mengikatnya kandidat gubernur dari kekuatan PKS.

Oleh sebab itu, jika merunut ke belakang, maka sesungguhnya peluang Foke - Prijanto untuk memenangkan Pilkada, lebih baik jika Sarwono Kusumadimaja dan Jeffrie Geyoni maju dalam pilkada. Asumsinya, "pendukung utama" pasangan tersebut adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang dalam pemilu legislatif memperoleh 164.249 suara (3,47 %) dan Partai Amanat Nasional (PAN), mengantongi 333.116 suara (7,03 %). Meski pasangan tersebut

diperkirakan mengusung keberagaman dan demokrasi, namun tetap sebagai representasi dari partai berasaskan agama yang berpotensi menghadang laju popularitas Adang Duradjatun - Dani Anwar.

Sedangkan bagi Foke - Prijanto, yang didukung Koalisi Jakarta minus PKB dan PAN, tetap akan memiliki jumlah suara signifikan, sebab suara Golkar yang 9,16 %, PDI-P dengan perolehan 14,02 %, dan Partai Demokrat yang memiliki suara 20,24 % merupakan modal dasar untuk memenangkan pilkada Jakarta. Intinya, Fauzi - Prijanto lebih berpeluang memenangkan pilkada Jakarta, jika berhadapan dengan dua pasang pesaing yaitu Adang - Dani dan Sarwono - Jeffrie. Namun proses itu sudah berlalu, sebab yang ada dihadapan warga ibukota sekarang adalah, pilkada hanya diikuti oleh dua pasang kandidat yang bersaing ketat untuk meraih kursi Gubernur Jakarta.

7. Menakar Megawati pada 2009

(Media Indonesia, 16 September 2007)

Perhelatan rapat koordinasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sudah selesai dengan klimaks mencalonkan Megawati Soekarnoputri sebagai presiden pada Pemilihan Presiden 2009. Berita itu bukan sesuatu yang mengejutkan, karena sejumlah elite elite politik PDIP sudah memosisikan Megawati sebagai figur yang diandalkan dalam kompetisi politik nasional tahun 2009.

Pertanyaannya, jika Megawati Soekarnoputri maju sebagai kandidat presiden, sejauhmana kesiapan PDI-P untuk terus menerus meraih simpati rakyat. Sudah sering dibahas, bahwa dalam perannya sebagai partai oposisi, PDI-P diuntungkan secara politis mengingat pendapatnya sering tidak sejalan dengan partai koalisi pemerintah.

Dalam kajian komunikasi politik, keseragaman pendapat untuk mendukung sebuah kebijakan penguasa cenderung diabaikan oleh khalayak. Oleh karena itu, jika PDI-P bertindak kritis sebagai information giver dengan menyampaikan pesan - pesan politik yang berbeda dari pemerintah, maka tingkat kepercayaan publik terhadap partai moncong putih itupun akan merayap naik. Tetapi, di pihak lain, ketika rakyat masih jernih mengingat peran PDI-P ketika berkuasa, maka kritik PDI-P pun menjadi hambat dan terjerumus dalam "politik asal beda" yang menyuntikkan rakyat untuk merapat kepada Megawati Soekarnoputri.

Model untuk menggapai kepercayaan rakyat yang bisa meningkatkan popularitas PDI-P, antara lain, "ketenangan" internal partai ditingkat nasional. Semenjak sejumlah eksponen PDI-P memhuat partai sendiri dengan label Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), maka organisasi partai moncong putih pimpinan Megawati Soekarnoputri itu relatif lebih tenang. Tidak terdengar lagi berita miris seputar kader kartolan, kader indekosan dan sejumlah atribut sinisme lainnya, yang merugikan kekompakan dan sinergi partai berlambang banteng gemuk. Bahkan positioning PDI-P di masyarakat semakin menguat ketika PDI-P partai senyap. PDI-P terpecah.

Namun, jangan lupakan, konflik kepemimpinan di daerah, yang dipicu oleh campur tangan elite PDI-P di Jakarta, berpotensi menenggelamkan popularitas Megawati. Misalnya, Konferensi Daerah bulan Oktober 2006, PDI-P Sulawesi Selatan yang menetapkan Z.B. Pulaguna, mantan Pangdam Wirabwana, sebagai Ketua DPD PDI-P pada wilayah partai pohon beringin paling kuat di Indonesia Timur, menanti perpecahan dalam tubuh partai moncong putih. Sedangkan di depan mata, ada potensi konflik dalam kepemimpinan PDI-P DKI Jakarta yang menyangkut "uang maha" calon gubernur dalam pilkada 8 Agustus 2007. Berbagai konflik kepemimpinan di daerah berpotensi untuk mengurangi suara pemilih terhadap Megawati Soekarnoputri.

Meskipun demikian, PDI-P tetap masih bisa berharap meningkatnya kepercayaan rakyat dari silaturahmi dengan Partai Golkar di Medan maupun Palembang, yang sarat dengan unjuk kekeatan, pembentukan Baitul Muslimin untuk meraih dukungan kelompok Islam dan pemasangan iklan politik di media massa sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap rakyat. Tetapi secara esensial, pembentukan koalisi antar partai, merentang sayap politik baru dan memaparkan kekecewaannya terhadap kebijakan pemerintah melalui iklan politik, bukan hal yang aneh dalam dinamika politik nasional. Alhasil, upaya dan sikap politik PDI-P tersebut tidak terlampau banyak berkontribusi terhadap popularitas Megawati Soekarnoputri.

Jika faktor yang diuraikan tersebut diatas memberikan keuntungan maupun potensi kerugian bagi PDI-P dalam menyongsong tahun 2009, sebenarnya yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana sikap Megawati Soekarnoputri sebagai individu dan mantan Presiden. Seperti halnya masyarakat sudah terlanjut lama menunggu pertemuan antara mantan Presiden RI Kelima itu, dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kesempatan formal untuk menyemarakkan nilai-nilai demokrasi, dan dalam kesempatan informal sebagai upaya untuk menunjukkan kepada rakyat bahwa kultur kebersamaan sesama anak bangsa dijunjung tinggi oleh para pemimpin kita.

Membuka kembali hubungan dengan Presiden SBY, tidak akan menurunkan pamor, tetapi justru berpeluang meningkatkan kredibilitas Megawati sebagai sosok politisi yang matang. Jika upaya pertemuan itu terus tertunda, maka diperkirakan sejumlah konstituen "can" tidak akan berpihak kepada PDI-P. Sebab, seperti halnya rakyat belum lepas dari trauma gaya kekuasaan Orde Baru, yang selalu mengkaitkan persaingan politik dengan pembatasan hubungan formal maupun relasi kekerabatan. Ini pengalaman buruk dalam kehidupan bernegara yang tidak boleh terjadi lagi di era reformasi politik.

Hakikatnya, walaupun PDI-P secara kelembagaan telah matang mempersiapkan Megawati Soekarnoputri sebagai calon Presiden tahun 2009, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah, menjaga dan meningkatkan kredibilitas peran individual Megawati Soekarnoputri di mata rakyat, sebab terbukti bahwa citra personal mampu mengantarkan SBY ke kursi Presiden tahun 2004. Disamping itu sebagai putri Bung Karno, jangan terus menerus berharap dari upaya mengaitkan ataupun mengeksplorasi nasionalisme dan kebangsaan dari sisi historis untuk mempengaruhi publik, sebab dua kategori itu terlalu umum dan sudah menjadi milik semua partai politik dan seluruh rakyat Indonesia.

8. Tokoh Muda, Pemilih Muda dan Megawati

(Harian Seputar Indonesia Sure, 5 April 2008)

Megawati Soekarnoputri dalam suatu kesempatan menantang kepada generasi muda untuk tampil sebagai pemimpin nasional. Namun, yang menjadi pertanyaan, adakah tokoh belia yang bisa menerobos dominasi para politisi senior yang sudah malang melintang dalam dinamika kenegaraan di Indonesia.

Mengingat pemilihan umum semakin dekat, dan Partai Demokrasi Indonesia perjuangan (PDI-P) juga ingin membidik para pemilih muda, maka harapan Ketua Partai Moncong Putih itu, lebih ideal jika diwujudkan dalam sikap "kebetanian" menyalurkan generasi muda sebagai kandidat pemimpin bangsa dalam rangka menghadapi kompetisi politik nasional tahun 2009.

Kalaupun tidak sebagai orang nomor satu, bisa saja sebagai wakil presiden yang mendampingi tokoh senior. Singkatnya, Megawati Soekarnoputri memilih kandidat wapres generasi muda dalam arti yang sesungguhnya, bukan sekadar orang tua bersemangat muda ataupun tokoh tua tetapi umurnya masih di bawah Megawati dan tokoh lainnya yang sebaya.

Dalam wacana publik, tantangan Megawati tampaknya sejalan dengan harapan masyarakat yang merindukan munculnya tokoh muda yang bisa membawa kesejahteraan. Ada sikapisme masyarakat terhadap hegemoni kepemimpinan nasional dari para politisi senior yang tidak kunjung memberikan kemakmuran memadai.

Dalam perspektif sosiologi politik, kepatuhan terhadap amanat rakyat bisa jadi melekat pada generasi muda. Jean-Jacques Rousseau, yang membela tentang Kontrak Sosial, menegaskan, "sebagian besar rakyat dan manusia pada umumnya, hanya patuh ketika masih muda, begitu menjadi tua mereka tidak dapat diperbaiki lagi". Sekali adat - istiadat mapan - sia - sia kalau kita berusaha mengubahnya. Esensinya, anak muda bisa lebih konsisten terhadap tuntutan rakyat yang disuarakan lewat pilihan politik di bilik suara tahun 2009.

Sedangkan generasi tua, diasumsikan tidak mau berubah, dan berupaya melembagakan tradisi politik yang sudah berakar dalam kehidupan bernegara. Ikapun tokoh senior melakukan perubahan, biasanya lebih menyukai gerakan siklus, yang tampak maju tetapi sesungguhnya sedang menukik kembali ke belakang. Walhasil, tidak ada kemajuan berarti dalam memberikan kemakmuran kepada seluruh rakyat.

Tanpa menafikan tokoh - tokoh nasional usia belia di masa lalu yang mewarnai kehidupan politik kenegaraan, namun harapan putri Bung Karno tentang munculnya tokoh muda bisa sia - sia, sebab pendapat Bernard Dahm (dalam Sartono Kartodirdjo, 1971), mengamini tentang kelangkaan tokoh muda. Substansinya, mengharapkan pemimpin muda terpelajar memang sulit, sebab mereka umumnya para carieris, atau para pencari kerja (*job hunters*) yang menjual diri kepada orang asing untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Mereka yang terpelajar dan pintar menjadi kesayangan penjajah, karena bisa diperalat untuk segala macam tujuan. Karena itu, meski memiliki kontribusi besar dalam organisasi pemerintahan kolonial, tetapi para carieris tidak akan memperoleh peran yang bisa menunjukkan kepemimpinannya kepada rakyat. Intinya, pembelengguan kelas menengah secara sistematis sudah berlangsung sejak masa kolonial, dan cenderung dilembagakan hingga sekarang oleh sejumlah entitas politik yang masih saja terkesima oleh jargon masa lalu, dengan ideologi harmonisasi yang ditafsirkan sepihak.

Tetapi secara faktual, harus diakui bahwa anak muda terpelajar, yang mestinya bisa tampil sebagai pemimpin muda, ternyata hanya menjadi

pemburu kerja di pemerintahan, bergantung kepada pemilik modal, partai politik maupun berbagai institusi swasta lain yang mempekerjakannya. Dengan demikian, tidak salah jika mereka yang juga tampak perkasa dalam reformasi tahun 1998, ternyata belum mampu berperan banyak dalam dinamika politik nasional. Mereka bergabung di lembaga - lembaga politik menggunakan pola instan, dengan dukungan elite partai mereka bisa langsung menduduki jabatan penting. Namun implikasinya, mereka tidak bisa mandiri dan terperangkap dalam kontrol politisi senior.

Pada konteks ini, memunculkan istilah Prof. Koentjaraningrat, perilaku politik generasi muda masih memiliki "mentalitas yang suka menerabas, bernafsu untuk mencapai tujuan secepat - cepatnya, tanpa banyak kerelaan berusaha dari permulaan selangkah demi selangkah". Memang mereka sebelumnya aktif dalam gerakan pemuda ataupun mahasiswa, tetapi memasuki jenjang politik formal, idealnya melalui proses panjang dan berjenjang, bukan jalan pintas yang meminggirkan para kader senior partai.

Oleh sebab itu, tanpa menafikan kiprah tokoh muda partai moncong putih yang sudah berupaya mengikuti proses kaderisasi berjenjang, jika konsisten menghendaki pemimpin muda, PDI-P sebagai institusi politik yang memiliki konstituen tersebar di seluruh nusantara, selayaknya jika tidak melakukan perekrutan instan terhadap para aktivis muda sebagai calon politisi handal di masa depan. Biarkan orang - orang muda berkembang secara alamiah dan berekspresi sesuai dengan dinamika kehidupan politik, sehingga mereka bisa diharapkan menjadi basis kekuatan progresif sebuah partai politik.

Jika pola pengkaderan semacam itu dilakukan dan bisa ditunjukkan secara terbuka, maka masyarakat akan menilai PDI-P sebagai entitas politik yang memberikan andil besar dalam pemerataan tokoh muda yang akan membawa bangsa Indonesia mencapai kesejahteraan. Dan akan lebih besar lagi dampak positifnya terhadap para pemilih muda, apabila Megawati Soekarnoputri dan partai berlogo banteng gemuk itu, berani mencalonkan wapres dari kalangan aktivis muda. Pengalaman pemilihan gubernur Jawa Barat menunjukkan bahwa, para politisi dan elite partai, tidak perlu ragu - ragu mengunggulkan generasi muda untuk tampil dalam kepemimpinan lokal maupun nasional.

Namun melihat manuver politik yang dilakukan untuk meraih dukungan rakyat, seperti PDI-P tidak akan mencalonkan kandidat wapres dari kalangan anak muda. Selain belum menemukan figur yang bisa diterima oleh berbagai elemen di masyarakat, seperti Megawati Soekarnoputri dan

jarangannya lebih menitikberatkan pada pertimbangan religi, ideologi dan etnik dalam menerapkan wapres. Dengan demikian, tantangan terhadap munculnya tokoh berta, hanyalah sebatas pelengkap dalam komunikasi politik dihadapan rakyat, yang sesungguhnya sudah sangat merindukan tokoh muda.

9. Kabinet Bayangan Calon Presiden

(Harian Sepuluh Indonesia-Sore, 7 April 2008)

Munculnya wacana agar pasangan calon presiden dan wakil presiden menyusun komposisi kabinet bayangan pada masa kampanye tahun 2009 mendatang merupakan ide menarik, dan bisa dikaji lebih mendalam untuk menghasilkan pemerintahan yang kuat, sampai berakhir masa kekuasaan selama lima tahun.

Memang secara faktual, di negara - negara yang dinilai demokratis sekalipun, belum memberlakukan aturan semacam itu. Namun harus diakui bahwa, para kandidat presidennya, selalu didukung oleh kabinet bayangan yang sudah terlibat langsung sejak awal pencalonan. Mereka masuk dalam tim "sukses" dan memberikan kontribusi bahwa kampanye yang benar - benar bisa dipertanggungjawabkan secara praksis maupun dari sudut teori mengelola negara.

Ini jelas berbeda dengan sekundernya situasi di tanah air. Kampanye cenderung dijejali oleh para politisi, yang asal bicara dan membui rakyat yang sudah terlampau lama merindukan kesejahteraan. Isi kampanye, jangan sesuai dengan kriteria keberadaban akademis, dalam aspek aplikatifpun jauh dari kenyataan yang dihadapi oleh rakyat pada umumnya.

Akibatnya, kampanye dianggap hal yang remeh temeh, yang penting janji kepada rakyat, disertai dengan goyangan musik dangdut. Perkara nanti bisa tercapai apa yang diteriakkan, menjadi urusan belakangan. Karena itu, semua orang, tidak terbatas kepada para kandidat presiden dan wakilnya, bisa berkampanye, apa saja yang dikeluhkan rakyat dengan solusi "simaslahim" seperti mam sulap. Kondisi ini, tentu bisa diminimalisir, jika dalam tim sukses presiden diisi pula oleh kabinet bayangan, yang sesuai dengan bidangnya dan memiliki kredibilitas yang dapat diandalkan.

Memang persoalan yang bakal muncul adalah, jika ada salah satu anggota kabinet bayangan memiliki kelemahan dan citra negatif di masyarakat, kampanye kandidat presiden menjadi tidak efisien karena terlampau boros

mengeluarkan energi untuk menolak anggapan miring terhadap calon meriterinya. Namun kritik sejak dini lebih baik, dibandingkan kalau rakyat menuntut mundur seorang menteri yang baru menjabat, karena dinilai tidak mampu melaksanakan tugas dengan baik.

Dalam konteks yang lebih luas, sesungguhnya, kabinet bayangan akan lebih eksis menyertai kandidat presiden dan wakilnya, jika didukung pula oleh koalisi partai politik yang dilakukan sejak dini. Sebab, tidak bisa dinafikan bahwa institusi kepartaian sangat dominan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara pasca reformasi. Pengalaman menunjukkan, koalisi yang dibangun sesaat menjelang pemilihan presiden, berimplikasi kurang mengembirakan bagi rakyat. Penetapan kabinet tidak lagi merujuk kepada kepentingan negara untuk menyejahterakan rakyatnya, tetapi lebih diwarnai oleh berbagai pertimbangan kekuatan politik dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sementara itu, dalam penelaahan komunikasi politik, tentu saja sulit mengharapkan jalinan komunikasi integratif yang bisa memperlent kerjasama dalam menjalankan kekuasaan diantara sejumlah elite politik yang sesungguhnya memiliki berbagai macam perbedaan cara pandang dalam mengelola kekuasaan. Memang tujuan utama selalu klise, untuk demokrasi, kesejahteraan dan pernyataan lain yang sudah lazim. Tetapi strategi dan teknis untuk mencapai apa yang dicita - citakan itu, rentannya memiliki sejumlah perbedaan mendasar, diantara partai politik dan elitnya.

Prinsipnya, koalisi partai politik sejak awal diperlukan dalam penetapan kabinet bayangan yang didasarkan bukan semata - mata karena pencalonan partai, tetapi orang yang memiliki kredibilitas di bidangnya. Sebab, koalisi model pemilihan umum tahun 2004, terbukti mengecewakan konstituen yang berharap banyak dan terpilihnya SBY-JK. Dari partai yang mencalonkan Presiden, sampai yang tidak memperoleh suara memadai pun, umumnya tidak segera menetapkan orientasi koalisi dalam pemilihan presiden tahap pertama, mereka menunggu pemilihan presiden tahap ke dua yang hampir berakhir.

Pola semacam ini, jelas menunjukkan bahwa, partai politik tidak memiliki landasan dan orientasi yang jelas dalam membangun kekuatan berbasis pemilu. Sebab, model koalisi mendadak seringkali membingungkan ataupun mengecewakan konstituen. Bagaimanapun juga, ini contoh yang kurang baik tentang perilaku partai yang tidak "memiliki pendirian". Walaupun aksioma politik, tidak melarang, sebab kekuasaan adalah tujuan perjuangan partai. Namun jangan remehkan, bahwa kondisi itu, tidak akan menyebarkan demokrasi yang didukung oleh partai politik yang berpendirian kuat.

Jika kerjasama partai politik dilakukan sejak dini dan bisa mengantarkan pasangan kandidat ke Istana Negara tahun 2009, maka presiden terpilih tidak ragu-ragu menetapkan para menteri yang berasal dari kader partai maupun profesional yang didukung oleh partai politik, karena sudah dipersiapkan sejak dini. Secara faktual, bahwa pemerintah yang didukung oleh Kabinet yang solid dan memiliki pemikiran integratif dalam menyikapi berbagai persoalan bangsa, merupakan bekal yang paling berharga dalam menjalankan kekuasaan selama kurun waktu lima tahun.

Namun persoalannya, penetapan kabinet bayangan yang menyertai kandidat presiden dan wakil presiden dalam pemilu 2009 sulit diharapkan, sebab jika melihat perilaku partai politik, mereka cenderung akan mengulangi model koalisi kilat atau, kadangkala dilakukan sejak dini, dengan cara sembunyi-sembunyi, agar partai bisa mudah berganti haluan. Apalagi sudah bukan rahasia umum, bahwa budaya politik di Indonesia memang lebih suka mendekat atau berada disekitar lingkaran kekuasaan.

10. Menimbang Pasangan Mega – Sultan

(Suara Pembaruan, 20 Januari 2009)

Meskipun PDI Perjuangan belum secara tegas menetapkan pasangan Megawati Soekarnoputri dalam Pemilihan Presiden tahun 2007, namun melalui sinyal politik yang dipaparkan oleh elite dalam tubuh partai, sudah mulai mengarah kepada tokoh pilihan yang akan diposisikan sebagai calon Wakil Presiden.

Berdasarkan hasil berbagai lembaga polling, maka secara individual, posisi Megawati Soekarnoputri masih dibawah popularitas Presiden SBY. Bahkan hasil survei lembaga polling di Jakarta, tanggal 15 Desember 2008, menunjukkan tingkat popularitas Yudhoyono, jauh lebih unggul dengan meraih 65,9 persen, sedangkan Ketua Partai Monev Putih, hanya mendapat 8,6 persen. Meskipun demikian, hasil dari lembaga lain, yaitu Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis, yang dipublikasikan pada 10 Desember 2008, menunjukkan selisih yang amat tipis. SBY dipercaya oleh 37,37 persen responden, sedangkan Megawati diapresiasi oleh 35,61 persen.

Namun, jika merujuk kepada partai pengusungnya, justru dalam berbagai jajak pendapat pada bulan Desember, PDIP selalu masuk dalam tiga besar partai politik pilihan masyarakat. Bahkan hasil polling Lingkaran Survei Indonesia,

menempatkan PDIP paling unggul diantar parpol lain, dengan perolehan 31 %, jauh meninggalkan partai Partai Demokrat, dengan 19,3 persen dan Partai Golkar yang mengantongi 11,9 persen pilihan responden. Melihat posisi ini, jelas Megawati memiliki modal awal pencalonan yang memadai, dan tentu saja menjadi daya tarik bagi kelompok ataupun partai yang mau mencalonkan wakil presiden.

Merujuk kepada hasil polling yang dilakukan oleh sebuah media di Jakarta, pasangan Megawati yang paling banyak diapresiasi publik, dan berpeluang memenangi Pemilihan Presiden, adalah Hidayat Nur Wahid, dari Partai Keadilan Sejahtera, dengan perolehan 40,21 persen suara. Sedangkan jika dibandingkan dengan tokoh lain, termasuk Sultan Hamengkubuwono X, perolehan angka Megawati, hanya dalam kisaran 9 sampai 11,91 persen. Namun, mengingat partai pendukung HNW, belum menentukan sikap, dan didasarkan kepada dukungan berbagai elemen masyarakat, seperti halnya PDI Perjuangan cenderung memilih Sultan Yoga sebagai pendamping Megawati, tanpa menghiraukan bahwa duet Mega – Sultan hanya direspon oleh 9,87 persen responden.

Dalam dinamika politik yang tidak terduga, tentu saja angka tersebut bisa berubah melalui kerja keras dan strategi mencari konstituen yang memadai. Berdasarkan penelitian Herbert H. Feith dan Lance Castles (1988), tentang aliran pemikiran politik yang ada di Indonesia, meskipun dalam konteks sejarah, seperti ini bisa dipakai sebagai pijakan untuk memprediksikan peluang Mega – Sultan.

Megawati Soekarnoputri, dan PDI Perjuangan dikelompokkan dalam partai nasionalis, yang notabene memiliki pengaruh kuat di Pulau Jawa. Di pihak lain, pendukung Sultan juga diasumsikan dekat dengan nilai-nilai tradisional Jawa. Dua aliran tersebut, nasionalis dan tradisional Jawa, akan semakin kuat jika Nahdlatul Ulama, yang dalam koridor Feith dan Castles, juga memiliki keterkaitan dengan tradisional Jawa, memberikan dukungannya. Dengan kata lain, Mega – Sultan, akan memperkokoh pemusatan otoritas Jawa.

Pada hal, peluang untuk menjadi Presiden dan wakil presiden, tidak hanya ditentukan oleh poros Jawa. Tiga pilar tersebut, partai nasionalis, tradisional Jawa dan NU, belum cukup aman untuk mengantarkan duet Mega – Sultan. Jika merujuk kepada jumlah pemilih di pulau Jawa yang jumlahnya kurang lebih 87 juta, bisa saja optimis, tetapi survei dari Reform Institute yang dipaparkan bulan Juli 2008, menegaskan bahwa 65,48 persen responden tidak mempersoalkan etnik Jawa maupun Non Jawa sebagai pemimpin mereka.

Selain itu hambatan lain yang akan muncul, adalah jika mencermati hasil Pemilu 2004, partai agama memperoleh sekitar 38,33 persen suara, sedangkan partai berbasis massa pluralis/nasionalis mencapai 59,53 persen. Dalam konteks ini, PDI-P akan mengalami kesulitan untuk menggaet massa pluralis, karena harus berhadapan dengan Partai Golkar dan Partai Demokrat yang juga memiliki kekuatan signifikan pada Pemilu 2009.

Oleh sebab itu, tanpa mengabaikan eksistensi Sultan di Partai Golkar, tetapi kalau mencermati dukungan partai – partai Islam yang bisa fleksibel memberikan dukungan terhadap pemegang kekuasaan negara, dan mencermati hasil polling pasangan Megawati Soekarnoputri dan Hidayat Nur Wahid sebagai tolak Partai Islam, sepertinya PDI-P harus merapat kepada partai yang berbasis massa Islam, dengan memfungsikan Baitul Muslimin sebagai mesin politik yang diandalkan.

Namun persoalannya, bagi PDIP tidak mudah untuk mempengaruhi massa dari partai – partai Islam, di luar yang afiliasi politiknya ke NU, sebab dalam paradigma Feith dan Castles, mereka hanya memiliki sentuhan yang amat tipis dengan partai nasionalis semacam PDIP. Bahkan dengan tradisionalisme Jawa, tidak ada pertautan sama sekali. Padahal, representasi partai – partai Islam yang menguat dalam menyongsong pemilihan umum 2009, sepertinya bukan yang terikat oleh pemikiran Nahdlatul Ulama.

Esensinya, duet Megawati Soekarnoputri dan Sultan Hamengkubuwono X, akan menemui banyak hambatan. Oleh sebab itu, bukan mustahil jika sejumlah elite dalam tubuh Partai Moncong Putih itu, masih ada yang berupaya mencari tokoh berbasis massa Islam di luar NU untuk mendampingi Megawati. Sedangkan pendukung Sultan, sepertinya juga masih tetap memposisikan Sultan sebagai Calon Presiden. Alhasil, selain duet pasangan elite itu belum tentu terwujud, juga masih harus melalui proses panjang jika mau melenggang ke Istana Negara dengan keunggulan yang memadai.

11. Duet Megawati – Jusuf Kalla

(Kompas, 18 Maret 2009)

Dalam dinamika politik nasional yang makin menghangat, wacana koalisi antara Megawati Soekarnoputri dengan M. Jusuf Kalla menarik untuk ditelaah. Ketika alasan yang dikemukakan demi menegakkan kebhinekaan di Negara Kesatuan Republik Indonesia,

Namun tidak bisa dipungkiri, selain dalih itu juga sudah lazim dipakai oleh partai lain, tetapi yang paling faktual dalam tubuh Partai Golkar, ada yang kurang sepakat dengan duet Mega-JK. Dalam hitungan politik praktis, partai pohon beringin merasa lebih unggul, karena pada pemilu 2004 muncul sebagai pemenang, dan pada kompetisi politik lokal, Partai Golkar merupakan partai politik yang paling banyak memenangkan pemilihan kepala daerah di berbagai wilayah. Oleh sebab itu, wajar saja jika sejumlah elite dalam tubuh Partai Pohon Beringin menginginkan kursi presiden untuk M. Jusuf Kalla.

Di pihak lain, Megawati Soekarnoputri tidak mungkin bersedia ditempatkan sebagai Calon Wakil Presiden, mengingat keputusan PDIP sudah bulat untuk menempatkan putri Bung Karno itu sebagai orang nomor satu pada pemilu 2009. Terlebih lagi dalam berbagai polling, popularitas Megawati Soekarnoputri memiliki kecenderungan selalu lebih unggul dibandingkan dengan M. Jusuf Kalla.

Terlepas dari siapa yang akan menjadi calon presiden dan siapa pula yang akan menjadi kandidat wakil presiden, gagasan koalisi dua kekuatan politik itu secara kalkulatif menguntungkan. Terutama jika dikaitkan dengan ideologi "stabilitas pemerintahan" yang menghendaki kekuatan mayoritas, demi mempertahankan kebhinekaan, dan sejumlah alasan klise lain yang menunjukkan kekuatan pemerintahan selama lima tahun.

Bagi PDIP pilihan terhadap partai pohon beringin untuk maju bersama dalam pemilihan presiden, telah melalui proses panjang setelah tahun 2004 menggandeng tokoh agama, ternyata tidak berhasil untuk bertahan di istana negara. Pilihan terhadap Partai Golkar jelas dilandasi oleh kepercayaan yang kuat dari partai moncong putih, bahwa mereka sudah memiliki Baitul Muslimin, sebagai sayap politik partai moncong putih yang diandalkan di akar rumput kantong – kantong Islam.

Pertimbangan lain, bisa saja karena melihat jajaran elite Partai Pohon Beringin yang juga berbarisan tokoh dari berbagai organisasi Islam, maka PDIP juga tidak risau bakal kehilangan pemilih di basis massa Islam. Karena itu, dalam urusan pilihan rakyat yang didasarkan kepada persamaan agama, tidak menimbulkan masalah krusial yang merugikan Partai Moncong Putih.

Namun melihat kekuatan dan potensi yang ada di dua partai besar itu, bukan berarti duet Mega – JK tidak memiliki resiko yang menghadang kesuksesan mereka. Sebab, bagi sebagian massa akar rumput PDI-P dan loyalis

Megawati Soekarnoputri, elite Partai Pohon Beringin dan Jusuf Kalla sepertinya secara empirik masih dinilai memiliki jarak kekuasaan dengan mereka.

Implikasinya, massa cair di akar rumput partai banteng gemuk itu, bukan mustahil akan mengalihkan suaranya kepada tokoh atau partai lain, yang memiliki kesamaan orientasi politik, seperti halnya partai-partai dalam lingkai nasionalis-sekuler yang agresif dalam menyongsong pemilu 2009. Beralihnya suara ini bisa dipahami, mengingat konstituen pada umumnya, tidak begitu memahami dan tidak menghiraukan perlunya koalisi permanen, untuk menegakkan kebhinekaan dalam menghadapi strategi "voting" di lembaga legislatif, yang sudah menjadi gejala umum dalam dinamika politik di Indonesia.

Tinjauan Geopolitik

Dalam tinjauan geopolitik, Megawati Soekarnoputri dengan partai berlabang banteng merah memiliki kekuatan yang terkonsentrasi di wilayah Timur dan sebagian Indonesia Tengah. Sedangkan Golkar, jika mengukung tokoh Indonesia Timur sebagai "presiden ataupun wapres", yang dipasangkan dengan kandidat PDI Perjuangan, dipastikan mampu menarik simpati massa di belahan Timur Indonesia.

Menang ada asumsi, Partai Golkar mulai kehilangan tenaga dalam kontes Pilkada tingkat Provinsi di Sulawesi, Maluku dan Papua. Tetapi untuk urusan memilih tokoh ataupun partai politik, mengingat kawasan Timur memiliki pengalaman kebhinekaan semasa Golkar sebagai partai utama pendukung kekuasaan, maka pemilih Indonesia Timur sepertinya lebih condong kepada M. Jusuf Kalla.

Intinya, koalisi Partai PDIP - Partai Golkar ataupun Mega-JK, akan berjaya di Indonesia Timur. Tetapi persoalannya, mengingat budaya paternalistik juga masih menjadi gejala dalam politik di Indonesia, maka bisa saja kawasan Indonesia Bagian Barat, khususnya Sumatera yang memiliki pemilih signifikan, Merasa tidak terwakili oleh duet Mega - JK.

Sebab secara politis Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua PDI-P lebih merepresentasikan dari kawasan Timur, Bagian Tengah dan sebagian Pulau Jawa, sementara itu, M. Jusuf Kalla, meskipun Golkar kuat di Indonesia Bagian Barat, khususnya Sumatera, tetapi citra JK terlanjur terikat kuat oleh lingkai "Sandiagar Bugis" yang mewakili suara Sulawesi dan sekitarnya. Akibatnya, koalisi banteng - beringin akan menghadapi tantangan berat di wilayah barat Indonesia.

Bagaimana jika koalisi tetap berlabang, tetapi PDI-P menaruh tokoh yang merepresentasikan kekuatan politik di Indonesia Bagian Barat. Tentu saja ini sangat mungkin terjadi. Namun persoalannya hingga saat ini, melihat lingkaran dalam kekuatan partai pohon beringin yang berkuasa, kecil kemungkinan mereka akan mencalonkan tokoh internal dari kawasan Indonesia Barat sebagai presiden maupun wakil presiden. Kalau pun partai berlabang banteng merah itu menetapkan sepihak, dengan memilih tokoh Golkar berpengaruh yang berasal dari wilayah Barat Indonesia, maka surat partai beringin akan terpecah dan dampaknya PDI Perjuangan harus bekerja lebih keras untuk mengamartakan putri Bung Karno itu kembali ke tampuk kekuasaan.

Dengan demikian, bagi PDIP pilihan pendamping menuju kursi Presiden dengan menggandeng Partai Golkar, meskipun memiliki peluang, tetapi memiliki resiko yang berpengaruh terhadap upaya meddling ke istana. Disamping itu melihat gelagat politiknya, secara kelembagaan partai pohon beringin gamang untuk berdampingan dengan Megawati Soekarnoputri. Terlebih lagi dogma politik yang seringkali disuarakan oleh pimpinan Partai Golkar, bahwa mereka tidak biasa menempatkan diri sebagai partai oposisi, maka pilihannya harus berada dalam lingkaran kekuasaan.

Dengan kata lain, menyangkut urusan koalisi dengan PDI-P, Partai Golkar tetap akan menunggu hasil pemilihan legislatif, dan diperkirakan mereka tidak lagi memaksakan JK sebagai presiden, jika ada tokoh lain yang lebih populer serta berpotensi menang dalam pemilihan presiden. Artinya, siapapun tokoh yang dinilai unggul, Partai Golkar cenderung akan mendukung dan menetapkan koalisinya. Akibat, harapan membentuk koalisi permanen sulit terwujud, dan celaknya hampir semua partai mengukung jargon klise dalam masalah koalisi permanen.

12. Menduga Pasangan Presiden 2009

(Suara Pembaruan, 1 April 2009)

Dinamika politik menyongsong pemilihan presiden kian menggeliat. Partai politik dan sejumlah elite mulai menghitung siapa kira - kira yang akan maju dalam pemilihan Presiden pada pertengahan tahun 2009. Lajak pendapat sebuah lembaga di Jakarta yang dipublikasikan tanggal 2 Maret 2009, memprediksikan, bila dilakukan pemilu sekarang, SDY akan unggul dengan memperoleh 60 persen.

Namun persoalannya, itu hanya keunggulan individual, sebab jika SBY disandingkan dengan M. Jusuf Kalla, Wakil Presiden saat ini, maka tingkat kepercayaan publik ternyata hanya pada kisaran 18,00 persen, jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan pasangan Megawati - Sri Sultan Hamengkuwongso X, yang diapresiasi oleh 23,40 persen responden. Jumlah ini hanya bisa disangi jika SBY berpartner dengan HB X, yang menanggung respon 36,50 persen dari responden. Artinya Sultan Yoga memiliki posisi yang sangat kuat dan berpotensi menjadi rebutan antara koalisi Partai Demokrat dan poros yang dimotori oleh PDI Perjuangan.

Tetapi melihat gelagat Partai Demokrat yang memiliki kepercayaan diri sangat kuat, berkin figure SBY, maka bisa saja partai berlogo tiga berlian itu tidak akan terlewat ngotot mencari tokoh untuk disandingkan dengan SBY, meskipun hasil jajak pendapat menunjukkan bahwa, seandainya SBY berpasangan dengan tokoh lain, misalnya disandingkan dengan Hidayat Nur Wahid, hanya memperoleh 15,6 persen, sedangkan dipasangkan dengan Sri Mulyani yang bukan partisan malah kepercayaan publik sangat terbatas, yaitu dalam kisaran 6,60 persen saja yang memberikan respon positif. Tentu saja ini apresiasi yang cukup mengherankan, mengingat blantika politik Indonesia yang diasumsikan mengalami kejenuhan terhadap peran elite partai, ternyata masyarakat tetap tidak merespon figure yang menonjol dari jalur akademis.

Eksistensi Kandidat Golkar

Oleh sebab itu, menurut kepada hasil jajak pendapat, yang paling ideal adalah kalau SBY berpasangan dengan Sultan HB X, tetapi tentu saja tanpa melalui kendali Partai Golkar, sebab secara organisasional, Partai Golkar cenderung menagokan M. Jusuf Kalla sebagai presiden ataupun wakil presiden untuk mendampingi kandidat presiden yang lebih populer. Dengan komposisi SBY-HB X, maka kemungkinan besar yang akan dihadapi kedua tokoh itu adalah pasangan Megawati Soekarnoputri - M. Jusuf Kalla.

Dalam hitungan politik praktis, seandainya Partai berlogo tiga berlian itu, tidak menaggaet Sultan, maka SBY cenderung akan dipasangkan dengan HNW, mengingat dalam persaingan politik di DPR, Partai Demokrat memang terkesan sering memberikan sinyal untuk dekat dengan PKS dalam menghadapi berbagai kebijakan yang menuai kritik masyarakat. Disamping itu, pengalaman menunjukkan tidak ada relevansi yang kuat antara jumlah konstituen partai dengan pilihan presiden dan wapres, sehingga Partai Demokrat pun sangat mungkin tidak akan khawatir jika SBY didampingi oleh tokoh PKS.

Namun demikian secara kalkulatif, jika SBY-HNW berhadapan dengan Megawati - JK, Megawati-HB X ataupun siapa saja yang merepresentasikan kekuatan PDI-P dan Partai Golkar, maka perjuangan SBY untuk bertahan di istana negara harus mencari bekerja lebih keras dengan menghimpun seluruh elite dari partai baru ataupun partai kecil yang ikut dalam kompetisi politik nasional. Tetapi masalahnya, mengintegrasikan mereka dalam sebuah koalisi pada pemilihan presiden tahap pertama akan menemui kesulitan, sebab dibelakang partai-partai tersebut ada otoritas Prabowo, Suliyoso dan Wiranto yang melekat kuat di lingkungan konstituennya.

Sesungguhnya, terlepas dari perolehan jajak pendapat, mengingat peran Partai Golkar dalam koalisi pemerintah yang dipimpin duet SBY-JK cukup signifikan, maka seandainya Megawati berpasangan dengan dengan Sultan HB X, ada kecenderungan SBY yang secara individual memiliki popularitas tertinggi, akan merapat ke Jusuf Kalla. Tidak dapat dipungkiri, bahwa dalam hitungan politik di Senayan, Partai Golkar adalah faktor penentu dalam herbagai kebijakan yang diputuskan melalui voting. Artinya Partai Pohon Beringin sesungguhnya sudah banyak mengeluarkan tenaga untuk mendukung kebijakan pemerintah. Dengan demikian, sudah sepantasnya jika M. Jusuf Kalla juga tetap menjadi pilihan SBY untuk maju bersama dalam pemilihan presiden.

Berdasarkan asumsi tersebut, hampir dapat dipastikan Presiden SBY akan berhadapan dengan Megawati, atau Koalisi Partai Demokrat akan bersaing dengan Poros partai berlogo banteng merah. Kalau di kubu Partai Demokrat maupun basis kekuatan PDI-P terdapat tokoh Partai Golkar yang mendampingi Megawati Soekarnoputri maupun Susilo Bambang Yudhoyono, maka suara partai beringin kuning itu, dipastikan akan terpecah. Akibatnya potensi pasangan kandidat pihak ketiga, yang dalam berbagai jajak pendapat mulai menunjukkan eksistensinya, juga memiliki peluang yang sama untuk merebut posisi menuju istana negara.

13. Koalisi Pasca Kemenangan Demokrat

(Media Indonesia, 14 April 2009)

Hiruk pikuk pertemuan antar elite politik setelah pemilu legislatif, dipastikan frekuensinya semakin meningkat. Tentunya bisa dimaklumi, mengingat kompetisi politik nasional masih akan terus berlanjut hingga pemilihan presiden.

Memang sebelumnya sudah dilakukan berbagai pertemuan, di antara pimpinan partai, tetapi umumnya masih belum jelas arahnya, dan cenderung tidak transparan dalam pengungkapan kepada publik yang tentunya juga sebagai calon pemilih partai mereka. Padahal, pertemuan di antara elite partai selayaknya diungkapkan saja ke publik. Setelah pertemuan justru menghasilkan berbagai penafsiran, seperti mengaitkan dengan koalisi setengah hati, koalisi semu yang mudah berubah sesuai arah angin, dugaan bahwa pertemuan itu hanyalah penjajagan untuk mengetahui kekuatan partai lain, ataupun mengukur kekuatan lawan, dan tentu saja termasuk sederetan asumsi lain dalam konotasi negatif.

Sesungguhnya, dalam wacana kekuatan mayoritas yang mendukung politik keneparaan, pemerintahan yang terbentuk dari hasil koalisi sejak dini, mampu menghasilkan pemerintahan yang kuat, karena didukung oleh pemikiran integratif di antara parpol yang bekerjasama. Pengalaman politik di Indonesia, khususnya tahun 2004, menunjukkan bahwa, koalisi yang dibangun sesaat menjelang Pemilihan Presiden putaran ke dua, memiliki hambatan dalam menjalankan roda pemerintahan, dan kurang bisa diterima oleh rakyat sebagai konstituen, yang telah rela memberikan suaranya untuk pasangan presiden terpilih. Kondisi itu, sedikit – tidaknya tampak dari respon masyarakat yang kecewa terhadap rusunan Kabinet dalam pemerintahan hasil pemilihan umum tahun 2004.

Munculnya Kandidat Kuat

Kecenderungan menjelang pemilu legislatif, juga menunjukkan gejala yang sama dengan pemilu tahun 2004, partai politik yang memiliki jumlah suara memadai maupun partai kecil yang minim suaranya, umumnya tidak segera menetapkan orientasi koalisi dalam pemilihan Presiden sejak dini. Bahkan setelah berakhirnya pemilu legislatif pada 9 April 2009, yang menempatkan Partai Demokrat sebagai pemenangnya, diperkirakan masih akan muncul pola sikap partai politik, yang belum mau secara tegas untuk membentuk aliansi dengan partai tertentu secara permanen.

Masamunya jelas bisa ditebak, mereka masih tetap mengotai pasangan presiden dan wakil presiden mana yang paling berpotensi sebagai pemegang tiket ke istana negara. Jika dalam pemilihan presiden tahap pertama, masih belum sepenuhnya bisa diprediksikan siapa yang menang, maka partai – partai itu akan menunggu sampai dua das pemilihan presiden tahap pertama berakhir. Setelah itu, barulah mereka menetapkan aliansinya menjelang

pemilihan presiden tahap kedua yang semakin jelas bisa diprediksi siapa pemenangnya. Tentunya, bisa saja dugaan parpol itu meleset, jika ternyata pemilihan presiden hanya berlangsung hanya dalam satu putaran.

Pola semacam ini menunjukkan bahwa partai politik tidak memiliki landasan dan orientasi yang jelas. Prinsip kepartaian lebih banyak merujuk kepada bagaimana strategi jangka pendek untuk memperoleh atau mempertahankan posisi dalam tubuh pemerintahan, atau dalam bingkai klise sebagai koalisi "strategis". Oleh karena itu, wajar jika berkembang pendapat bahwa, partai politik hanya bernafsu memburu kekuasaan.

Secara kultural, mengerumuni orang kuat, terikat oleh budaya paternalistik yang telah mendarah daging di dalam tubuh kepartaian di Indonesia. Sebagaimana menurut William Liddle (dalam Sartono Kartodirdjo, 1999), yang membahas tentang kepemimpinan sosial, bahwa pola hubungan pemimpin – pengikut, seperti hubungan "raja – langgan" dan suatu kebudayaan yang berdasarkan tradisi menghormati berpengaruh terhadap struktur partai. Sementara Herberth Faith dan Lance Castles, dalam buku yang monumental tentang Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965, menengarai sebagai model abdi dalam kraton, dalam koridor "sabda pandito ratu", kehendak raja harus diikuti oleh rakyatnya.

Prinsipnya, elite partai lebih suka mengerubungi "pemenang" ataupun orang kuat dalam kompetisi politik nasional, dibandingkan untuk memperkuat peran oposisi sebagai salah satu ciri demokrasi bernegara. Lebih celaka lagi, pola merapat ini dilakukan dengan mengabaikan prinsip dasar perjuangan partai politik yang sudah melekat di lingkungan konstituennya.

Pada hal partai politik menurut Miriam Budiardjo (1995), adalah, "suatu kelompok terorganisir yang anggota – anggotanya mempunyai orientasi, nilai – nilai, serta cita – cita yang sama dan mempunyai tujuan untuk memperoleh kekuasaan". Intinya, partai harus konsisten terhadap karakteristik konstituennya. Mungkin bagi petinggi partai penentu kebijakan koalisi politik, persoalan koalisi mendadak tidak dianggap sebagai masalah serius, sebab mereka merasa sebagai pemilik suara yang bebas untuk memanfaatkannya sebagai alat bargaining mencari kekuasaan.

Tetapi bagi massa yang di akar rumput, yang sudah kenyang makan – asam garam dalam dinamika politik lokal maupun nasional, pola semacam itu dinilai jauh dari pembelajaran politik yang bermanfaat untuk menumbuhkan demokrasi bernegara.

Dalam wacana ideal untuk menciptakan pemerintahan yang solid, memang harus dibangun koalisi sejak awal, artinya dalam konteks ini, Partai Demokrat sebagai pemenang pemilu legislatif, di luar penetapan calon wakil presiden untuk mendampingi SBY, harus bertindak proporsional dalam merencanakan pemerintahan bersama partai politik lain.

Dalam arti, harus dipilah ataupun dikelompokkan, partai mana yang memang sejak dini telah menetapkan koalisi, partai apa yang bersikap setengah hati dalam koalisi, partai manapula yang menjalankan strategi ganda dalam koalisi, misalnya di satu sisi mendukung dan di pihak lain terus melakukan kritik melalui sayap – sayap politik di luar institusi kepartaiannya. Intinya, dikaitkan dengan politik praktis, tidak semua partai politik dalam koalisi itu harus memperoleh kursi kekuasaan dalam kabinet maupun organ – organ negara strategis lain dibawah pengendalian pemerintah yang berkuasa.

Penetapan para pejabat negara apapun, jika Partai Demokrat berhasil untuk bertahan di Istana Negara, maka tidak memerlukan proses panjang, mengingat mereka sudah lama mengatur aliansi strategis dalam menjalankan pemerintahan lima tahun ke depan. Dalam koalisi yang mengukur keterlibatannya partai politik secara proporsional, tingkat penolakan masyarakat terhadap susunan personalia dilingkar kekuasaan presiden terpilih, tentunya bisa diminimalisir, karena kerjasama politik yang dibangun sejak awal sudah diketahui oleh konstituennya ataupun masyarakat luas.

Namun persoalannya, di ujung kemenangan sebuah koalisi partai politik, maka semua pendukung yang ada di dalamnya merasa memiliki perjuangan yang sama dengan entitas politik lain yang sudah beraliansi sejak awal, sehingga dalam penyusunan pejabat negara, sebagai hak prerogatif presiden pun, bisa saja tetap diwarnai oleh tarik menarik kepentingan antar elite politik pendukung koalisi. Akibatnya, bukan mustahil jika susunan personalia kabinet dan pejabat negara lainnya, juga berpotensi mengecewakan konstituennya.

Oleh sebab itu, meskipun pemilihan presiden masih menunggu sekitar tiga bulan lagi, namun hasil pemilu legislatif 2009 ini harus benar – benar dipakai sebagai titik awal bagi Partai Demokrat, untuk bertindak tegas dan proporsional dalam membentuk pemerintahan yang kuat selama lima tahun ke depan.

14. Menduga Arah Partai Golkar

(Media Indonesia, 14 Mei 2009)

Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, tanggal 5 Mei 2009 memutuskan diterimanya pasangan Muhammad Jusuf Kalla – Wiranto sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam bingkai historis, pasangan tersebut merupakan penyatuan kembali antara Partai Golkar, dengan Wiranto yang meninggalkan partai beringin kuning, untuk membentuk Partai Hati Nurani rakyat. Sedangkan pada konteks mengukur kekuatan menghadapi persaingan politik nasional, Partai berlogo pohon beringin dan Partai Hanura, memiliki nuansa ideologis yang sama, sehingga konstituennya tidak terlampau berbeda.

Bahkan merosotnya suara Partai Golkar, diasumsikan karena sebagian konstituennya lari ke partai Hanura. Karena itu, pasangan JK Wiranto, dengan modal kira – kira 17,8 persen suara, secara ideologis memang memiliki energi dan bisa cepat menyatukan langkah. Tetapi, tampaknya teramat berat untuk menggapai konstituen dengan ideologi berbeda. Walaupun ada penambahan suara dari partai – partai kecil yang memiliki ideologi berbeda, tetapi terlampau sulit untuk menciptakan koalisi strategis, karena loyalitas pemilih partai kecil sulit untuk diprediksikan.

Meskipun demikian, duet JK Wiranto tetap memiliki kekuatan, yaitu kepuasan konstituen, khususnya pemilih loyal Golkar – Hanura dalam bingkai ideologis. Bahkan jika duet ini berhasil masuk ke Istana Negara, maka bagi Partai Beringin Kuning, berat kembali ke fitahnya, sebagai pemegang kendali utama pemerintahan.

Namun dalam belunggu kepentingan faksi, ternyata duet itu tidak berjalan mulus, sehingga Partai Beringin juga memberikan kesempatan kepada faksi lain, yang berkeinginan mencalonkan tokoh Golkar, untuk mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono, dengan catatan tidak menggunakan atribut dan fasilitas partai Golkar.

Menafikan Oposisi

Secara faktual, Partai Golkar tidak terbiasa sebagai partai di luar pemerintahan, bahkan ketika era reformasi politik mewarnai kehidupan bernegara, partai berlanjutan pohon beringin, yang diasumsikan sebagai

representasi kekuatan Orde Baru, tetap memiliki kekuatan signifikan dalam pemerintahan. Pada era kekuasaan Presiden Abdurrahman Wahid itu, Golkar ada dalam pemerintahan, meskipun dalam perkembangannya: ikut memainkan peran ketika mengganti Gus Dur.

Sedangkan pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri, Golkar masih sangat erat berhubungan dengan PDI Perjuangan sebagai pemegang kekuasaan maupun sebagai partai pemenang pemilu tahun 1999. Hubungan baik antara Golkar dan pemerintah, bisa dilihat dari sikap politik Akbar Tanjung yang sejalan dengan Presiden Megawati Soekarnoputri waktu itu.

Paling akhir, tentu tidak asing, bagaimana M. Jusuf Kalla yang notabene bukan calon Partai Golkar, tetapi dalam waktu singkat para politisi Partai Golkar yang secara resmi mencalonkan Wiranto dan Salahuddin Wahid pun merapat, dan mendudukkan IK sebagai Ketua Partai Golkar. Artinya, jika bicara konstelasi politik makro di tubuh partai politik beringin, meskipun sekarang telah mencalonkan M. Jusuf Kalla - Wiranto, tetapi diprediksikan tidak akan terjadi perubahan yang mendasar dalam sikap politiknya terhadap strategi masuk dalam lingkaran kekuasaan. Terlebih lagi, jika mengingat sejumlah elite Golkar yang lebih suka merapat ke Partai Demokrat.

Kalaupun IK tidak berhasil memenangi pemilihan presiden tahun 2009, tidak ada yang bisa menjamin bahwa Golkar akan bersikap sebagai oposisi. Terlebih lagi jika paska pemilihan presiden, Jusuf Kalla tidak lagi sebagai komandan partai, maka bisa dipastikan bahwa Golkar akan merapat dan mendukung poros partai pemerintahan dibawah kendali Partai Demokrat.

Loyalitas Golkar

Esensinya, tradisi politik golkar untuk tetap dalam pemerintahan yang berkuasa akan terus bertahan. Perilaku politik yang dibangun untuk menafikan peran oposisi tetap akan langgeng. Bahkan bukan mustahil, meskipun saat pemilihan presiden, secara resmi mereka di luar ordinar Poros Cikeas, tetapi bisa saja memperoleh kursi di kabinet ataupun dalam posisi lain yang tidak lepas dari lingkaran koalisi partai pemerintah.

Tentunya bukan tanpa pertimbangan jika aliansi pemerintah, merangkul tokoh partai bernaung kuning. Sebab bagaimanapun juga, tingkat loyalitas partai beringin untuk mendukung pemerintah bisa diandalkan. Kalaupun selama tahun 2004-2009, ada yang menilai IK kurang sejalan dengan ordinar kekuasaan SBY, tetapi secara faktual, mayoritas sikap politik partai beringin di Senayan tidak pernah mengingkari perannya sebagai koalisi pemerintah.

Oleh sebab itu, masih terlampau dini jika masyarakat pada umumnya sedemikian percaya, bahwa partai beringin kuning itu diharapkan menjadi oposisi yang kuat, untuk menyeimbangkan dinamika demokrasi dalam kehidupan bernegara. Di lain pihak, tidak ada jaminan bahwa bersikap sebagai partai oposisi, akan menimbulkan dukungan massa. Sebab perilaku politik dalam kondisi yang "tanpa gejala" dan "tidak ada musuh bersama", masyarakat cenderung mengunggulkan politik patrimonial, yang lebih mendengarkan apa yang dikemukakan oleh pemegang kekuasaan, dibandingkan dengan mengamati kritik nyaring partai oposisi. Pada konteks ini, apa yang dialami Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, adalah contoh faktual yang terjadi dalam kompetisi politik nasional saat ini.

Namun celakanya, ketika berada di dalam akansi pemerintah, Partai Golkar juga tidak berhasil memperoleh dukungan yang berarti dari masyarakat. Ini terbukti dalam pemilihan legislatif tahun 2009, yang hanya memperoleh suara dalam kisaran 14-15 persen. Padahal, tahun 2004, sebagai kungum dalam kompetisi menuju Senayan, bisa saja, bermacam - macam alasan dalam menyulapi kekalahan Golkar dalam pemilu Legislatif, tetapi intinya, teramat sederhana mengaitkan kelemahan partai politik dengan posisinya dalam koalisi pendukung pemerintah, atau berada pada jalur oposisi.

Bab 6

KOMUNIKASI POLITIK DAN KEKUASAAN

1. Deputi Khusus Pancasila Lemhamnas

(Kompas, 27 Juni 2006).

Sebagai ideologi negara, Pancasila menjadi wacana yang ramai dibicarakan kembali di kalangan elite politik dan kalangan yang memiliki perhatian besar terhadap kelangsungan negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

Dalam koridor reformasi politik, diskusi tentang Pancasila menjadi kian dinamis karena menghasilkan keberagaman pemikiran, dari yang menyuarakan Pancasila dalam analisis positivistik bersifat final yang lebih menekankan perluasan nilai sesuai perkembangan zaman, maupun pendapat lain yang bersifat subyektif berpijak pada penafsiran integralistik untuk kepentingan kelompoknya.

Namun, yang muncul dalam wacana publik tetap ada kesepakatan, Pancasila adalah payung ideologis kehidupan bernegara. Namun, jika masih muncul kekhawatiran atas menipisnya pemahaman atas nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah sikap wajar, mengingat pengabaian terhadap ideologi negara mendorong munculnya konflik kepentingan dalam masyarakat yang kian meningkat.

Pemahaman dan penghayatan terhadap Pancasila tampaknya tidak lagi bersifat matematis dengan butir-butir pengembangan dari tiap sila yang potensial dipakai sebagai alat penguasa menghasilkan kebijakannya.

Serainya nilai-nilai Pancasila yang hakiki adalah sumber kekuatan demokrasi dalam kehidupan bernegara, jika dijalankan dengan benar dan tidak sebatas retorika belaka.

Karena itu, sungguh memprihatinkan saat Lemhannas menjaili kesadaran dan penghayatan akan pentingnya Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa kian menipis, terutama di kalangan elite bangsa. (Kompas, 14/7/2006)

Namun, di balik pernyataan Lemhannas itu, yang lebih menonjol adalah upaya pembentukan "Deputi Khusus" yang akan memberi pemahaman Pancasila sesuai tuntutan zaman. Upaya melestarikan Pancasila dalam konteks wawasan kebangsaan yang dinamis adalah mulia. Tetapi, bukan berarti harus menciptakan unit baru, sebab bisa menjadi kontra produktif bagi citra pemerintah. Idealnya, dimasukkan dalam salah satu unit kerja yang ada.

Deputi Khusus

Kecenderungan membentuk entitas baru dalam organisasi pemerintah, sejati harus diminimalkan untuk menampik asumsi masyarakat, unit kerja baru identik perluasan jaringan kekuasaan dan berpotensi menciptakan birokrasi baru yang kian menyulitkan pelayanan kepada rakyat. Padahal dalam tinjauan sosiologis, organisasi pemerintah seharusnya menjadi abdi masyarakat, bukan tuju bagi masyarakat. Sedangkan dalam konteks kultural, Daniel Lerner mengemukakan, yang diperlukan adalah kinerja modern bukan pembentukan organisasi baru yang modern.

Meski demikian, karena Deputi Khusus yang menangani Pancasila di Lemhannas telah terbentuk, terlepas dari efisiensi dan prejudice tentang perluasan jaringan kekuasaan, selainya deputi itu ditanggapi dengan apresiasi yang proporsional.

Dalam konteks difusi informasi dan situasi perubahan politik, nilai-nilai Pancasila yang dilontarkan Lemhannas akan semakin kompleks saat dihadapan dengan bentuk pesan yang beragam dari berbagai kelompok masyarakat. Memang tidak ada lagi "penguasa informasi" yang bisa mengemas Pancasila dalam jargon "untuk kepentingan pembangunan", sebab belantara retorika kian berjubel dengan jargon baru yang disuarakan para pemuka pendapat (opinion leader) yang diakui kredibilitasnya. Mereka umumnya memiliki massa potensial yang tidak mudah untuk mengekor opini pemerintah.

Selain itu, tanpa dukungan hegemoni politik dalam kekuasaan negara sebagaimana Pemerintahan Orde Baru yang menjalankan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), upaya menyosialisasikan dan

mendiseminasikan hasil kajian Pancasila, memerlukan finansial dan kerja keras untuk bisa diterima masyarakat yang terinformasi seleptis terhadap keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Karena itu, pembentukan Deputi Khusus yang menangani Pancasila di Lemhannas harus benar-benar melaksanakan program kerja yang memenuhi dengan tak menafikan dinamika politik masyarakat, bukan sebaliknya, membentak kelompok elite baru dan komunitas baru yang seolah paling beradab dalam kehidupan bernegara di Indonesia.

2. Standar Informasi Gempa

(Harian Sepuluh Indonesia, 31 Juli 2006)

Berita simpang siur yang memperingatkan akan terjadi gempa pada sejumlah wilayah di Indonesia, semakin menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Sepertinya di Republik ini tidak ada pemegang otoritas yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan informasi seputar gempa bumi dan bencana alam lainnya sejak dini.

Aliran informasi gempa dan sejumlah bencana alam lainnya, memang cenderung bergerak bebas tanpa dikelola dengan keteraturan yang terkoordinasi. Padahal, dalam perspektif tanggung jawab negara terhadap keselamatan rakyat, pemerintah sejatinya tidak sekadar berulang-ulang membantah berita yang tidak berujung pangkal, tetapi harus menjalankan fungsi diseminasi informasi dengan meneroskan berita seputar gempa dan berbagai sumber yang dipercaya, demi mengurangi ketidakpastian yang berkembang di masyarakat.

Kecemasan masyarakat juga semakin kronis ketika para futurolog dan paranormal mengumbar ramalan seputar gempa yang menyebarkan. Sementara pesan layanan singkat (SMS) yang berisi akan terjadi gempa dan tsunami di sejumlah wilayah, malah lebih mirip sebuah teror yang menancam dibandingkan dengan peringatan untuk waspada.

Namun disisi lain, sangat beralasan pula jika pemerintah selalu bertahis bahwa gempa, tsunami dan bencana lainnya tidak bisa diprediksi dengan pasti. Pemerintah memang sudah berusaha energetis dalam menangani bencana yang akan datang. Bahkan Presiden SBY dalam acara Hari Anak - Anak Internasional mengungkapkan bahwa tidak perlu menyepak hidup di ugem yang penuh bencana. Sebuah pernyataan kepastian terhadap gejala alam,

walaupun di sisi lain tetap dalam bingkai menanamkan rasa "rasionalisme" terhadap tanah air.

Jika semula kecemasan itu hanya ada di beberapa daerah yang relatif dianggap rawan bencana, belakangan hampir melanda di sebagian besar wilayah di Indonesia. Oleh sebab itu, sudah sepantasnya jika pemerintah membuat kebijakan yang berisi standar informasi peringatan dini tentang gempa dan tsunami. Kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi kecemasan masyarakat, akibat pendapat yang simpang siur dari pejabat pemerintah dan sejumlah kalangan yang tiba-tiba sering berbicara gempa dan tsunami. Standarisasi informasi bukan berarti membungkam mereka dalam kebebasan menyampaikan informasi, tetapi demi untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat, agar mereka mampu meminimalisir dampak negatif jika sewaktu-waktu muncul gempa bumi dan tsunami.

Idealnya, panduan tentang penyelamatan menghadapi gempa dilakukan secara terus menerus dalam kerangka gerakan massal ke seluruh wilayah Indonesia. Jika sekarang pemerintah merasa sudah berupaya maksimal dalam mengantisipasi bencana melalui "tanggap darurat" yang serba reaktif, ataupun telah membuat jaringan informasi berbasis teknologi tinggi untuk mendeteksi gempa, tetapi pada saat ini, yang harus dilakukan adalah menyosialisasikan upaya mengufas ancaman gempa dan tsunami melalui berbagai media massa dengan dukungan dana yang memadai. Memang, belakangan muncul tip dari Bakornas tentang cara menghadapi bencana yang disiarkan melalui radio, namun sepertinya tidak memiliki gaung kuat yang dapat dipakai sebagai referensi masyarakat ketika menghadapi gempa.

Sungguh ironis, jika penyebaran informasi untuk mencegah jatuhnya korban maupun untuk menyelamatkan nyawa manusia, dilakukan secara sporadis dan kurang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Padahal dalam urusan menarik simpati rakyat yang semakin skeptis terhadap tercapainya kesejahteraan sosial ekonomi dalam koridor keberdaban bernegara, pemerintah sanggup mengeluarkan dana sedemikian banyak untuk mengkampanyekan kenaikan harga BBM, keamanan jaringan listrik tegangan ekstra tinggi - SUTET, rencana kenaikan tarif dasar listrik dan sejumlah diseminasi informasi lain yang berisi kebijakan dari kekuasaan negara, melalui berbagai media, yang mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Disamping itu, untuk mengurangi tuduhan bahwa aparat pemerintah terlampaui lamban dalam mengantisipasi *early warning system*, maka

selayaknya jika sistem informasi gempa, tsunami dan bencana lainnya, dapat diantisipasi oleh pemerintah dengan menetapkan sejumlah fleksibilitas kebijakan penyebaran informasi yang memberikan keleluasaan kepada aparat pemerintah yang terkait dengan masalah bencana, untuk bertindak tanpa khawatir terhadap tuduhan menyalahi prosedur yang telah ditetapkan. Sebab, tidak ada manfaatnya dalam situasi darurat, jika terus bersikap pada jalur komando yang birokratis. Padahal keterlambatan menyebarkan informasi ke berbagai pihak akan berdampak pada hilangnya sejumlah nyawa manusia.

3. Kemandirian Penasehat Presiden

(Harian Sepuluh Indonesia, 26 Oktober 2006)

Salah satu poin krusial yang bakal diperdebatkan Pansus DPR dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Dewan Pertimbangan dan Penasihat Presiden (DPPP) adalah menyangkut kedudukan dan kewenangan DPPP. DPR menghendaki DPPP bersifat mandiri dan personal. (Sepuluh-Indonesia, 12 Oktober 2006). Jika perdebatan seputar kemandirian lembaga itu berkepanjangan, maka upaya untuk segera menyelesaikan peraturan tersebut tidak akan tercapai, padahal dalam pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 2006 di depan DPR, Presiden berkomitmen untuk segera menyelesaikan RUU yang memiliki arti strategis bagi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Namun, yang menjadi pertanyaan, mungkinkah DPPP mampu berdiri mandiri. Sebab orang-orang kepercayaan Presiden SBY yang sudah sering dilansir media massa adalah, mereka yang tidak sekadar memiliki kemampuan personal memadai, tetapi ada kriteria lain yang substansinya untuk mendukung jalannya kekuasaan.

Presiden SBY memiliki sejumlah staf khusus. Andi Alfan Mallarangeng, Dino Patti Djalal, Heru Lelono, Yenny Zambha Wahid dan dari kalangan TNI pensiun maupun yang masih aktif sebagai Sekretaris Pribadi. Selain staf khusus, ada pula Dewan Penasihat yang bisa dikategorikan sebagai orang di lingkungan dalam Presiden yang terdiri dari Rachmawati Soekarnoputri, Sjahir, Ali Alatas dan T.B. Salahi.

Jika dianalisis dari segmentasi politik yang dinamis, maka esensi yang menonjol adalah bahwa Presiden SBY memilih orang-orang sekelilingnya dengan orientasi menciptakan sinergi politik yang mampu mendukung pemerintah sampai pada kompetisi politik tahun 2009. Memang sebuah

pernyataan yang klise dan sudah dibicarakan oleh banyak pihak, tetapi tidak ada salahnya jika mengkaji kembali peran orang-orang dekat Presiden yang secara faktual sudah berjalan.

Orang di lingkaran Presiden SBY yang paling mencuri perhatian banyak pihak adalah Rachmawati Soekarnoputri, pewaris politik Soekarno yang sering mengidentifikasikan diri selalu konsekuen mengadopsi pemikiran Soekarno itu adalah penasihat urusan politik Presiden SBY. Sestingguhnyanya dalam kalkulasi politik sederhana, Rachmawati Soekarnoputri dengan Partai Pelopornya yang memiliki konstituen terbatas tidak akan mampu menggelembungkan dukungan terhadap Presiden SBY. Namun demikian pilihan terhadap Rachmawati Soekarnoputri tidak terlepas dari sikap Megawati Soekarnoputri yang hingga kini belum menunjukkan upaya berdamai dengan Presiden SBY. Rachmawati merupakan penyeimbang ideologis kelompok nasionalis di lingkaran dalam Presiden SBY, setidaknya tidaknya eksistensinya akan dilirik oleh massa partai-partai nasionalis yang sudah bosan terhadap berbagai konflik dan perpecahan yang berkepanjangan.

Upaya untuk menarik simpati terhadap kelompok nasionalis, juga menjadi salah satu tugas Heru Lelono, staf khusus bidang gerakan mahasiswa Presiden SBY. Mantan orang Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) PDI-P ini tentunya paham kondisi internal PDI-P dan diharapkan mampu mengorganisasikan mahasiswa dan generasi muda nasionalis untuk mendukung kredibilitas pemerintahan Presiden SBY.

Pendorong kiprah Heru Lelono, pilihan yang tepat jatuh ke Andy Arief, mantan aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) ini meskipun bukan lingkaran dalam Presiden SBY, namun sebagai orang penting di PT Pos Indonesia besar kemungkinan berpeluang membantu mengorganisasikan kalangan mahasiswa dan anak muda untuk menjaga citra positif Presiden SBY. Andy Arief juga paling berpeluang mengimbangi keberadaan Budiman Sudjatniko beserta sejumlah aktivis muda lain yang ada di gerbong PDI-Perjuangan.

Orang muda lain di lingkaran dalam Presiden SBY adalah Yenny Zanuhba Wahid. Posisi putri Gus Dur ini bukan sekadar menunjuk pada keahliannya dalam komunikasi politik, tetapi putri diharapkan mampu membentuk persepsi positif tentang relasi politik antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan Presiden SBY. Terlebih lagi ketidakakuran dua PKB versi Choirul Anam dan Muhajirin Iskandar, berpotensi mengancam lajinya massa moderat PKB kepada Yenny Wahid sebagai alternatif rujukan.

Jika Rachmawati Soekarnoputri dan Yenny Wahid sebagai daya tarik untuk meraih dukungan dari massa kelompok nasionalis dan nahdliyin. Bagaimana dengan posisi Andi Alfian Mallarangeng, Politisi muda asal Sulawesi Selatan ini, selanjutnya bukan hanya bertindak sebagai juru bicara Presiden SBY, proyeksi ke depan adalah menjentikkan reputasi M. Jusuf Kalla dan tokoh-tokoh Golkar Sulawesi yang sangat kuat di Indonesia Timur. Andi Mallarangeng akan bekerjasama dengan para purnawirawan TNI di lingkaran dalam Presiden SBY untuk merapat kepada massa Golkar yang memiliki ikatan historis maupun ideologis dengan TNI demi menggalang citra pemerintahan Presiden SBY.

Orang di lingkaran dalam Presiden SBY lainnya yang sangat dikenal adalah Sjahrir. Penetapan Sjahrir sebagai penasihat ekonomi Presiden, tidak terlepas dari reputasinya sebagai ekonom yang kritis, mantan aktivis gerakan mahasiswa, Ketua Partai Perhimpunan Indonesia Baru dan dianggap mampu menangkis kritik dari para ekonom yang tidak sejalan dengan kebijakan perekonomian Presiden SBY. Sjahrir juga dipandang ideal untuk berhadapan dengan sesama aktivis Malari, Hariman Siregar yang rajin mendampingi pertemuan-pertemuan antara Megawati, Gus Dur, Akbar Tanjung, Wiranto dan Try Sutrisno.

Untuk membentuk citra positif menghadapi pemilihan umum tahun 2009 di forum internasional, maka pilihan jatuh kepada Dino Patu Djatal sebagai juru bicara Presiden SBY untuk urusan luar negeri. Mantan Direktur Amerika Utara dan Amerika Tengah Departemen Luar Negeri, ini memiliki peluang untuk menggalang dukungan internasional khususnya negara-negara core dengan sekutu-sekutunya. Dino juga akan bersinergi dengan Ali Alatas dalam membentuk image positif Indonesia di kancah politik internasional.

Pada hakikatnya dalam wacana politik, mereka yang memiliki posisi sebagai penasihat maupun staf khusus Presiden SBY, secara esensial akan bekerja bukan sekadar menjalankan profesi secara mandiri sesuai dengan bidangnya saja, tetapi peran politik yang melekat jauh lebih dominan, sampai tahun 2009. Oleh sebab itu, harapan Pansus DPR agar DPPF bersifat mandiri dan personal, sepertinya sesuatu yang sulit untuk diwujudkan mengingat tolok ukur kemandirian dan personal, sangat bias dalam wacana politik praktis.

4. Komunikasi Di Wilayah Konflik

(Suara Pembaruan, 30 Januari 2007)

Dalam tingkat reformasi politik yang difasilitasi secara integralistik sesuai dengan kepentingan kelompok, kebhinekaan di Indonesia menghadapi tantangan yang mengkhawatirkan dan berpeluang untuk memporak-porandakan nilai-nilai persatuan yang ada di masyarakat.

Isu seperti perbedaan etnik dan agama dalam kerangka "belief" dari beragam komunitas menimbulkan sejumlah konflik yang tidak pernah usai. Beragam retorika dari pemuka pendapat, elite politik dan pemerintah yang berupaya mengedepankan nilai-nilai toleransi untuk menjaga harmonisasi di lingkungan masyarakat yang plural, sepertinya tidak pernah dihiraukan oleh berbagai kelompok yang lebih berasyik masuk memelihara stereotype dan prejudice terhadap orang-orang di luar komunitasnya.

Tanpa menafikan pendekatan hukum dan keamanan yang telah dilakukan oleh pemerintah, ataupun pendekatan sosial dari lembaga swadaya masyarakat yang aktif menggalang perdamaian di berbagai wilayah di Indonesia, langkah baiknya jika pemerintah melalui berbagai elemen-elemen yang ada di masyarakat memperkenalkan program pencegahan konflik melalui strategi komunikasi antar budaya, atau komunikasi diantara orang-orang yang berbeda nilai (value), kepercayaan (belief) maupun karakteristik lain melekat pada kelompok.

Strategi komunikasi antar budaya untuk meredakan konflik, menurut Samovar, Porter dan lain (1988), pada hakikatnya sebagai upaya untuk menumbuhkan nilai-nilai bersama yang menghasilkan rasa aman dan saling menghargai. Ada sejumlah tindakan yang harus didiseminasikan oleh pemuka pendapat ataupun organ-organ kekuasaan negara yang menjalankan program perdamaian melalui pendekatan komunikasi antar kelompok.

Pertama, meminimalisir atau bahkan menghilangkan etnosentrisme. Sikap ini menganggap nilai-nilai yang dianut oleh kelompoknya jauh lebih unggul dibandingkan keyakinan yang dianut oleh kelompok lain. Perwujudan etnosentrisme bisa melebar dengan menganggap bahwa nilai kebenaran, kejujuran dan kesungguhan dalam bermasyarakat, bahkan bernegara hanya dimiliki oleh kelompoknya. Nilai etnosentrisme yang diekspresikan secara demonstratif berpotensi untuk menimbulkan konflik di lingkungan masyarakat majemuk.

Kedua, hindari ketidakpercayaan (*lack of trust*) terhadap orang-orang yang memiliki karakteristik berbeda. Pelembagaan sikap yang tidak menghiraukan nilai-nilai sosial budaya kelompok lain, berpeluang menyulut pertentangan di wilayah yang berpenduduk heterogen. Tindakan tersebut semakin menajamkan upaya untuk hidup berdampingan secara damai, jika para pemuka pendapat dan sejumlah elite justru sengaja mengelola "ketidakpercayaan" sebagai salah satu benteng ketahanan sosial kelompoknya.

Ketiga, jangan selalu melakukan penarikan diri (*withdrawal*) jika berinteraksi dan berkomunikasi dengan kelompok yang berbeda. Sebab tindakan ini mendorong munculnya pola komunikasi eksklusif dan berpotensi memicu pertikaian antar kelompok horizontal di wilayah-wilayah yang heterogen dari segi etnik dan kepercayaan. Jika di suatu wilayah terdapat kelompok-kelompok yang satu sama lain tidak mau berinteraksi dan berkomunikasi, maka berpeluang membuka pertikaian yang tidak akan pernah berakhir.

Keempat, Pelihara empati terhadap orang-orang yang bukan berasal dari kelompoknya. Empati merupakan partisipasi emosional dan intelektual secara imajinatif pada pengalaman orang lain, atau secara sederhana diartikan, bagaimana menempatkan posisi diri sendiri dalam kedudukan orang lain. Pengabaian empati akan memicu berkembangnya pertikaian antar komunitas yang berbeda. Oleh karena itu, jika masyarakat yang bersitegang di daerah rawan konflik tidak saling berempati, sulit membayangkan tercapainya perdamaian sejati seperti harapan masyarakat pada umumnya.

Kelima, jangan mudah memberikan stereotip (*stereotype*) negatif terhadap kelompok yang memiliki karakteristik sosial-budaya berbeda. Stereotip sendiri adalah upaya menggeneralisasikan kesamaan perilaku seseorang dengan karakter kelompoknya. Sikap ini dinilai emosional, dan jelas merupakan hambatan sosial (*social constraint*) yang serius dan mengganggu pluralisme dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam wacana komunikasi antar budaya, faktor stereotip adalah sikap yang paling banyak mewarnai kehidupan masyarakat majemuk. Meski sebagai hal yang umum, namun jika stereotip dikemas dalam aroma kebencian dan sinisme, bisa menjadi sumber perpecahan dalam masyarakat. Mengekspresikan stereotip terhadap kelompok lain yang memiliki perbedaan keyakinan di wilayah rawan konflik, akan menghasilkan prasangka (*prejudice*) dalam bentuk kecurigaan, kesangsian dan ketidakpercayaan terhadap pihak-pihak yang tidak disukai.

Dilihat sisi lain, prasangka dapat memicu munculnya *antilocution*, yaitu tindakan mendiskusikan secara negatif orang di luar kelompoknya dan *exclusion*.

Kecenderungan menghindar dari kelompok yang tidak disukai. Selain itu, prasangka juga mendukung sifat diskriminasi terhadap orang-orang dari komunitas tertentu yang dianggap sebagai pesaing potensial kesejahteraan kelompoknya. Klitik perwujudan stereotip, adalah *violence*, yaitu serangan fisik dan upaya pemusnahan terhadap kelompok lain, dengan cara satu persatu maupun massal (*extermination*).

Implikasi maksimal dari prasangka sangat berbahaya dan berpeluang untuk mengakibatkan arti kebhinnekaan masyarakat di Indonesia yang sesungguhnya selalu mengklaim sebagai masyarakat yang berbudi luhur dan penuh tenggang rasa terhadap orang-orang yang memiliki sejumlah nilai dan karakteristik berbeda.

Oleh sebab itu, mengingat makna yang terkandung dalam komunikasi antar budaya sangat penting bagi harmonisasi hubungan antar kelompok, maka selakanya jika segenap komponen masyarakat yang bergerak untuk menciptakan perdamaian di berbagai wilayah Indonesia, berupaya untuk menyebarkan keterampilan komunikasi antar kelompok secara intensif demi mengembangkan nurani kolektif (*conscience collective*) yang bermanfaat untuk mencegah konflik maupun tindak kekerasan antar kelompok.

Memang sebuah pekerjaan yang tidak mudah dan sangat mungkin menghadapi tantangan maupun penolakan dari berbagai kelompok yang ada di masyarakat. Terlebih lagi dalam koridor demokrasi yang ditafsirkan sepihak sesuai dengan kepentingan kelompok, maka upaya menanamkan sikap saling menghargai semakin sulit terwujud, mengingat perbedaan justru cenderung dimanfaatkan sebagai sumber kekuatan dalam dinamika politik lokal maupun nasional yang berkembang di era reformasi.

5. Lee Kuan Yew dan Demokrasi

(Suara Pembaruan, 27 Juli 2007)

Lee Kuan Yew, Menteri Senior Singapura, dalam suatu kesempatan di Jakarta tanggal 24 Juli 2007 mengungkapkan bahwa sistem multipartai di Indonesia yang baru diharapkan masyarakat parlemen diluluskan oleh partai yang tidak sama dengan partai asal presiden, mewujudkan pemerintahan dalam melaksanakan kebijakannya.

Sebuah pernyataan yang sudah menjadi pembicaraan sehari-hari oleh berbagai pihak yang kritis terhadap jalannya kekuasaan. Parlemen yang kuat tetapi tidak sejalan dengan pemerintahan memang berpotensi menghambat pelaksanaan kebijakan publik. Paradigma ini sejalan dengan pendapat Jean-Jacques Rousseau, dalam pembahasan tentang Kontrak Sosial yang menegaskan bahwa, "jika legislator lebih mengedepankan pandangan ataupun kepentingan kelompok, maka substansi negara menjadi lemah, reformasi apapun menjadi tidak mungkin".

Namun demikian, yang mengkhawatirkan bagi kehidupan politik di Indonesia, terkait dengan pernyataan Lee Kuan Yew adalah, Singapura sering dipakai oleh berbagai kalangan yang pragmatis ataupun mereka yang mengunggulkan stabilitas keamanan sebagai ideologi negara, gemar menganalogikan kondisi di Negeri Singa itu sebagai rujukan mencapai kesejahteraan masyarakat. Pernyataan Lee sangat mungkin dimanfaatkan untuk memberikan legitimasi dalam menjalankan pemerintahan yang otoriter, dengan alasan apa artinya demokrasi dan kebebasan, jika tidak mampu memberikan kemakmuran kepada rakyat.

Tanpa bermaksud menilai kehidupan politik di negara kota itu, ada baiknya, berbagai pihak yang bersemangat mengunggulkan sistem politik Singapura, harus mencermati Singapore Paper on Shared Values Tahun 1991 yang berisi panduan sederhana untuk menghormati etika kehidupan bernegara. Nilai-nilai rasional yang terkandung di dalamnya mencakup, pertama, *nation before community and society above self*, yang menggaris bawahi, kepentingan negara dalam upaya memakmurkan rakyatnya berada di atas kepentingan pribadi.

Kedua, *family as the basic unit of society*, keluarga sebagai kesatuan dasar masyarakat, oleh karena itu harus menjadi perhatian negara. Nilai rasional yang ketiga adalah *community support and respect for the individual* yang berprinsip bahwa perlu ada keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu.

Selanjutnya nilai yang keempat adalah *consensus, not conflict*, pendapat yang berbeda harus diakomodasikan dan dicari jalan konsensus, bukan justru menciptakan konflik yang berkepanjangan. Sedangkan yang kelima, *racial and religious harmony*, harmonisasi terhadap keanekaragaman rasial dan agama yang dipeluk masyarakat.

Kelima nilai tersebut dijalankan untuk mencapai kesetaraan dan keseimbangan dengan terminologi kesejahteraan sosial-ekonomi. Oleh sebab

ma, elite politik dan pemerintah yang seringkali lebih mengunggulkan faktor ekonomi dalam hubungannya dengan kesejahteraan rakyat, seharusnya tidak membandingkan Singapura dari aspek kehidupan politik yang dipersepsikan secara general melalui kebebasan bertindak, berbicara dan mengeluarkan pendapat.

Dengan sudut pandang keimamuran untuk semua rakyat, semestinya para elite politik di Indonesia membandingkan masalah – masalah lain sebagai penunjang meningkatnya pertumbuhan ekonomi Singapura. Silahkan dicermati catatan Bank Dunia dari tahun ke tahun, bagaimana Singapura menetapkan peraturan untuk memulai bisnis, dengan mematok prosedur yang membutuhkan waktu singkat dan menjamin kepastian hukum. Bandingkan dengan Indonesia dengan prosedur yang berbelit – belit dan memakan waktu sangat panjang ditambah lagi dengan biaya “dibawah meja” yang sangat tinggi.

Oleh sebab itu, mengabdikan demokratisasi politik dengan dalih mencontoh Singapura, sangat tidak relevan. Yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah kerja keras membenahi birokrasi pemerintahan, bukan memimpikan kembalinya gaya pemerintahan yang membelenggu kebebasan untuk berpartai. Hakikatnya, ketika krisis ekonomi belum juga selesai model pemerintahan otoritarian paternalistik yang menafikan kebebasan berpartai, masih menjadi daya tarik untuk mengatasi berbagai persoalan yang melilit bangsa Indonesia.

Padahal dalam era reformasi, seharusnya elite politik dan pemerintahan tidak lagi menhinggakan model kekuasaan yang memiliki kewenangan tinggi dalam mengontrol kehidupan rakyat dan menafikan eksistensi partai politik. Sebab selain terbukti gagal menciptakan masyarakat yang berkesejahteraan, hampir tidak ada kajian teoritis maupun faktual yang menyatakan bahwa keimamuran berkelanjutan bisa dicapai dengan jalan tangan besi. Dalam tinjauan historis di sejumlah negara dengan penguasa tiran pada awalnya mampu memberikan ketamamuran bagi rakyatnya, namun sejalan dengan meningkatnya kesadaran bernegara, masyarakatpun menjadi jenuh dan menuntut kebebasan politik untuk melengkapi kehidupan bernegara yang sejahtera dan demokratis. Sebagai contoh, Presiden Chun Doo Hwan yang memerintah tanpa oposisi mampu membuat Korea Selatan makmur. Meski demikian, dalam perkembangannya rakyat mulai memberontak untuk menentang Chun (Miriam Budiardjo, 2001).

Oleh sebab itu, sayangnya para elite dalam pemerintahan dan sejumlah pihak penaja jargon stabilitas, tidak mengkamibinghentikan demokrasi yang

memfasilitasi sistem multi partai sebagai bang kokacian dan keputusan masyarakat. Sebab demokrasi bukan sekadar lirik pikuk untuk bertindak semau sendiri, tetapi demokrasi adalah sistem yang paling beradab untuk mencapai kesejahteraan sosial, ekonomi dan politik.

6. Program Instan Kompor Gas

(Harian Seputar Indonesia, 20 September 2007)

Program pemerintah membagikan kompor gas gratis untuk mendorong masyarakat mengonversi penggunaan bahan bakar minyak tanah ke gas, masih terus menuai masalah. Dari persoalan yang menyangkut ketidaktahuan menggunakannya, kekhawatiran mudah terbakar (*inflammable*) sampai alasan yang paling substansial tidak mampu membeli gas yang harganya fluktuatif.

Kompor gas merupakan barang mewah bagi masyarakat kebanyakan atau warga miskin pada umumnya. Oleh sebab itu, untuk memperkenalkannya perlu proses panjang dan kesabaran, sehingga upaya mengurangi subsidi minyak tanah keperluan rumah tangga yang nilainya sekitar 30 triliun setiap tahun bisa tercapai. Jadi bukan sekadar membagikan kompor gas untuk mengurangi pasokan minyak tanah, lantas masyarakat miskin beramai – ramai menggunakan gas atau *liquefied petroleum gas* (LPG) elpiji.

Mengingat berbagai persoalan dalam penggunaan gas, seharusnya pemerintah tidak terburu nafsu untuk membagi – bagikan kompor dan tabung gas kepada masyarakat. Sebab dalam perspektif komunikasi inovasi, menurut Everett M. Rogers dan F. Floyd Shoemaker, upaya memperkenalkan ide perubahan harus memperhatikan lima kategori kelompok masyarakat sebagai sasaran dari berbagai program perubahan, yaitu inovator, adopter penula (*early Adopter*), mayoritas awal (*early majority*), mayoritas akhir (*late majority*) dan penerima perubahan yang paling lambat (*laggard*). Intinya, program perubahan harus menetapkan sasaran yang jelas dan dilakukan dengan bertahap sesuai dengan karakteristik masyarakat.

Memperkenalkan ide perubahan harus dimulai dari para inovator sebagai agen pembaharuan yang memiliki kredibilitas di mata rakyat, lebih berorientasi kepada iden, dan bisa bekerjasama dengan tokoh masyarakat. Dalam konteks penggunaan elpiji, agen pembaharuan adalah petugas pemerintah yang membagikan dan memberikan penjelasan kepada masyarakat penerima kompor gas di desa maupun di kota, jangan beranggapan bahwa orang kota

yang "kurang beruntung" tidak perlu insentif para agen perubahan. Sebab secara mendasar, hakikatnya mereka memiliki nasib dan kapasitas yang sama, sulit untuk diubah, berubah.

Pekerjaan paling awal dari para petugas lapangan adalah menemukan orang yang mau menerima perubahan sebagai adopter pemula (*early adopter*), untuk menggunakan kompor gas. Mereka dipilih sebaiknya para pemuka pendapat (*opinion leader*) di lingkungan masyarakat miskin. Namun persoalannya, dalam bingkai politik pasca reformasi, memaksa mereka untuk mendukung program pemerintah sangat sulit. Oleh sebab itu, para petugas lapangan harus menggunakan model komunikasi interaktif, yang memposisikan pemuka pendapat dalam kesepadanan, mengajak dialog dan mencari titik temu terhadap program perubahan yang sedang dijalankan.

Jika adopter pemula berhasil dipengaruhi dan secara konstan mau menggunakan gas, maka petugas lapangan harus mengikutsertakan mereka, untuk menarik mayoritas awal (*early majority*) sebagai pengguna elpiji. Kelompok ini mempunyai kepercayaan besar terhadap pemuka petalapak, sehingga dengan sukarela akan mengikuti jejak para tokoh di lingkungannya. Dengan kata lain, perubahan bersifat partisipatif bukan karena tekanan sepihak, seperti halnya kelompok minyak tanah ataupun pola komunikasi koersif dari petugas pemerintah.

Dua kelompok "adopter pemula dan mayoritas awal" merupakan kekuatan untuk menciptakan perubahan. Oleh sebab itu, pemerintah dan para agen pembaharuan harus tetap memfasilitasi mereka agar bisa mempengaruhi mayoritas akhir (*late majority*), untuk menggunakan gas sebagai pengganti minyak tanah.

Seandainya, mayoritas akhir sudah mendominasi penggunaan gas, maka melalui komunikasi homofili yang berpihak ada kesetaraan nilai = nilai sosial-ekonomi di lingkungan masyarakat kurang mampu, maka kelompok yang paling kolon (*laggard*) untuk menolak pembaharuanpun, lebih mudah mengikuti jejak mayoritas akhir dalam menggunakan kompor gas.

Oleh sebab itu, tanpa bermaksud menilai dari segi ekonomis, maka pengelompokan masyarakat dalam konteks perubahan teknologi seharusnya menjadi titik tolak program koersif minyak tanah ke penggunaan gas. Namun persoalannya, justru pilihan pemerintah untuk membagikan kompor gas gratis adalah program instan - *short cut*, yang terkesan menafikan

karakteristik masyarakat miskin yang bisa berubah secara evolusi. Akibatnya upaya menyosialisasikan penggunaan gas justru menciptakan masalah baru di masyarakat.

Bab 7

TRANSPARANSI INFORMASI DAN KORUPSI

1. RUU Informasi dan Pemberantasan Korupsi

(*Harian Sepuluh Indonesia*, 21 Maret 2006)

Rancangan Undang-Undang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (KMIP) merupakan pekerjaan rumah Dewan Perwakilan Rakyat RI yang akan segera memasuki tahap pembahasan antara Komisi I DPR RI dan pihak pemerintah. Proses selanjutnya diharapkan RUU KMIP segera dipisahkan menjadi undang-undang sehingga upaya masyarakat dalam mencari, memilih, menyebarkan bahkan menolak secara tegas informasi dapat dijamin legalitasnya.

Batuan informasi dalam RUU KMIP sudah tertuang pada pasal demi pasal secara komprehensif. Namun seperti halnya penjelasan terhadap pasal-pasal di dalamnya belum mampu untuk menempatkan informasi sebagai alat efektif untuk mengawasi lalu lintas informasi di berbagai birokrasi badan publik di Indonesia. Sebab, yang tampak menonjol adalah justru upaya mengemas informasi sebagai komoditas yang direkayasa, di hambat dan dibingkai pemerintah sehingga tidak menampakkan lagi bentuk aslinya sebagaimana yang seharusnya disampaikan kepada masyarakat.

Dalam bentuk lain, informasi publik versi RUU KMIP berpeluang mengalir ke suatu arah tertentu dan dipakai secara kasar untuk merepresentasikan kekuatan negara yang arogan terhadap pluralisme informasi. Artinya : pesan pemerintah diposisikan sebagai informasi yang harus dipercaya kebenarannya tanpa memberikan peluang munculnya transaksi pesan secara berimbang di masyarakat. Terpapar, ideologi parasitoid dalam bernegara yang menjunjung tinggi doktrin "pengendali informasi adalah negara beserta organ organ kekuasaannya" masih terus memanasapkan lukunya. Di pihak

lain, sembari memanfaatkan ketidakberdayaan dan sikap skeptisme yang terus menggelembong di masyarakat, berbagai kelompok elite politik di Indonesia justru semakin bersemangat untuk menempatkan rakyat hanya sebagai penerima jatah "kemauan informasi" yang harus ditelan mentah-mentah.

Upaya menggiring untuk menerima informasi sepihak itu tampak jelas ketika mencermati materi dalam RUU KMP yang penuh dengan pengecualian, sebagaimana pada Bab VI yang berisi "Informasi yang Dikecualikan". Setidaknya-tidaknya ada tiga pasal yang berpotensi mengganggu kebebasan informasi, yaitu Pasal 20 berisi seputar "informasi yang merugikan kepentingan Nasional", Pasal 21 yang intinya menegaskan adanya "informasi yang dilarang disampaikan oleh badan publik karena merugikan kepentingan nasional dan kerahasiaan pribadi seseorang". Sedangkan dalam Pasal 22 memberikan ketentuan bahwa "badan publik dapat menahan sementara waktu untuk memberikan informasi kepada pengguna informasi karena informasi tersebut masih dalam proses perumusan".

Sebenarnya, informasi sulit untuk dipaksakan memenuhi batasan-batasan sepihak untuk kepentingan negara maupun kelompok karena informasi selalu bergerak bebas dan berjalan linier menembus berbagai macam lapisan khalayak tanpa menghiraukan implikasinya. Informasi juga mengalir yang menghasilkan umpan balik untuk membentuk persepsi yang sama terhadap opini publik atau sebaliknya informasi malahan memicu konflik yang berkepanjangan jika tidak diorganisasikan dengan baik. Berpijak pada eksistensi informasi di atas maka pasal-pasal pengecualian dalam RUU KMP jika ditelaah lebih teliti berpeluang membatasi kebebasan komunikasi interaktif yang sering dilakukan berbagai kalangan dalam menginvestigasi kasus korupsi pada badan-badan publik.

Apabila pasal-pasal yang mengecualikan informasi "tertentu" dipakai oleh badan politik untuk melakukan pengorganisasian pesan dengan baik agar bisa memberikan kejelasan kepada pengguna informasi, tidak menjadi persoalan. Tetapi, bagaimana jika setiap informasi harus ditahan terlebih dahulu, dikemas dengan prinsip kepatutan untuk mengelabui atau mengalihkan perhatian sehingga substansi untuk mengklarifikasi dugaan korupsi menjadi menghilang. Di sinilah masyarakat pengguna maupun pencari informasi tidak mampu berbuat banyak menghadapi beberapa pasal pengecualian sebagaimana yang ditegaskan dalam RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik.

Sementara RUU KMP seperti yang ditunjukkan di dalamnya bahwa "badan publik wajib memberikan informasi kepada masyarakat" sesungguhnya sangat

relevan dengan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Artinya, setiap lembaga pemerintahan dan badan publik harus transparan memberikan informasi kepada masyarakat berhubungan dengan sistem pelaksanaan pemerintahan: struktur organisasi, diagram arus kegiatan, dan visualisasi lain yang menambah kejelasan kepada masyarakat pengguna informasi. Jika ini dilaksanakan dengan baik, persoalan aliran surat yang tidak transparan sebagaimana dalam masalah surat palsu pada lembaga pemerintah yang merampok pemerintahan SBY-JK tidak akan muncul.

Kebebasan memperoleh informasi adalah keharusan dan tuntutan perkembangan demokratisasi yang terjadi pada semua elemen masyarakat. Komunikasi interaktif yang tidak berjalan satu arah jelas bermanfaat untuk pencegahan, pengusutan maupun pemberantasan korupsi. Karena itu, jika batasan pengecualian yang terdapat dalam RUU KMP dikembalikan kepada fungsi informasi yang alami maka setidaknya-tidaknya Rancangan Undang-Undang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik memberikan harapan, antara lain *pertama*, kebebasan memperoleh informasi akan mengurangi kemungkinan terjadinya korupsi secara substansial di berbagai badan publik. *Kedua*, kebebasan informasi dapat mengawasi kecenderungan pada pejabat publik yang secara terang-terangan maupun tersembunyi melakukan penyalahgunaan wewenang yang sarat nuansa korupsi. *Ketiga*, kebebasan memperoleh informasi dapat meminimalisasi pola korupsi yang dilakukan secara sistematis melalui pelembagaan perilaku menyimpang didalam organisasi pemerintahan maupun badan publik.

Namun, apabila RUU KMP tetap mencantumkan beberapa pasal pengecualian dan tidak mengkomodifikasi makna kebebasan informasi yang sesungguhnya, di pihak lain DPR RI justru akhirnya menyetujui sebagai Undang-Undang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik maka yang muncul dalam ranah komunikasi publik adalah kebebasan semu mencari dan menyalurkan informasi yang tidak berakutik menghadapi kasus-kasus tindak pidana korupsi.

2. RUU Rahasia Negara dan Pelembagaan Anti Kritik

(Harian Sepuluh Indonesia, 22 Agustus 2006)

Walaupun perdebatan tentang definisi rahasia negara yang terlalu luas masih terus berlangsung di masyarakat, namun seperti itu pemerintah tidak

menghentikan dan tetap berupaya untuk secepatnya menyetapkan RUU tersebut sebagai Undang-Undang.

Bahkan sejumlah elite dalam pemerintahan Presiden SBY - JK justru secara berulang kali mengungkapkan bahwa di negara yang paling bebas seperti Amerika Serikat, juga memberlakukan rahasia negara melalui *Freedom of Information Act* tahun 1967, dengan menetapkan beberapa pengecualian dalam kebebasan informasi, yaitu masalah pertahanan dan keamanan, penegakan hukum serta perlindungan privasi individual. Padahal pada satu sisi, Amerika Serikat justru memberikan ruang seluas-luasnya kepada rakyat untuk menggunakan kebebasan berekspresi dalam menilai dan mengkritik pemerintah secara terbuka.

Oleh sebab itu, menganalogikan RUU Rahasia Negara dengan *Freedom of Information Act* sepertinya tidak akan bermanfaat bagi perkembangan demokratisasi politik di Indonesia. Pada prinsipnya, pemberlakuan rahasia negara di era reformasi, secara substansial akan berpengaruh terhadap kualitas komunikasi politik antara pemerintah dengan rakyat yang sudah berjalan interaktif, akan berbalik arah menjadi pola linier yang didominasi oleh retorika, himbauan, jargon dan petunjuk pemerintah yang tidak bisa diperdebatkan lagi.

Selain itu, pengecualian informasi juga berpotensi terhadap buruknya kualitas hubungan antara pers dengan pemerintah, yang sering diwarnai oleh perbedaan kepentingan dalam menyebarkan informasi faktual. Padahal seharusnya dalam koridor demokratisasi penyebaran pesan, interaksi antara pemerintah dengan media massa yang terjalin dengan baik adalah perwujudan dari konsistensi keterbukaan informasi.

Namun secara empirik, keterbukaan dan persahabatan antara pers dengan penguasa memang sulit untuk terus dipertahankan, sebab pada saat pemerintah merasa semakin kuat, justru cenderung menghindari untuk bersikap terbuka kepada media massa yang semula sebagai institusi yang paling diandalkan untuk mendiskusikan kebijakan politiknya. Tingkat hubungan yang baik antara pers dengan pemegang kekuasaan negara yang berubah menjadi tidak harmonis, jelas bukan hanya dominasi negara - negara sedang berkembang, sebagai contoh, Presiden Amerika Serikat Richard Nixon yang memiliki relasi sangat baik dengan media pada kampanye kepresidenan tahun 1968, tetapi kredibilitasnya terus menurun di mata pers ketika dia sering mengeluh bagaimana liputan media tidak berpihak kepadanya, sampai akhirnya *Newsweek*

juga mengungkapkan bahwa, pemerintahan terbuka Nixon semakin tertutup. Contoh lain, Presiden Roosevelt sekalipun sangat pandai untuk mendominasi media, namun lambat laun kecakapannya menghadapi pers menurun bahkan pernah memaki dua orang wartawan sebagai orang dungu.

Secara kontekstual, dikaitkan dengan keadaan di Indonesia, sebenarnya hubungan antara pemerintah dan media massa yang terjadi sejak era kebebasan pers berlangsung tanpa masalah berarti, namun setelah Departemen Kominfo mengeluarkan anekda peraturan tentang substansi penyebaran informasi, maka relasi kelesifan itu pun menuai ketegangan. Terlebih lagi ketika muncul RUU Rahasia Negara, berkembang pula prejudice di masyarakat bahwa pembatasan informasi, lambat laun akan berdampak pula terhadap sikap pemerintah yang alergi terhadap kritik.

Pada hal tanpa dikaitkan dengan rahasia negara saja, sejumlah elite politik maupun pemerintahan sudah sangat tertutup, tidak mau dinilai rakyat dan masih terperangkap dalam gaya komunikasi politik paternalistik, yang menciptakan "ruang kesediaan menerima kritik" sebangun dengan bentuk piramida. Intinya, massa atau rakyat merupakan penampang piramida yang sudah sepantasnya menjadi sasaran kritik jika elite dalam kekuasaan negara tidak berhasil menjalankan suatu kebijakan. Namun sebaliknya, posisi elite dalam struktur kekuasaan, justru semakin tinggi semakin sedikit memberikan ruang kritik kepada masyarakat, bahkan ketika di puncak piramida, bisa saja tidak menyisakan *space* kesediaan menerima kritik.

Berkaitan dengan asumsi tersebut, maka sangat wajar jika masyarakat dan media mengharapkan agar peraturan tentang rahasia negara, tidak dipakai sebagai alat untuk melembagakan piramida ruang kritik, sebab yang harus dilakukan justru menyediakan ruang kritik sesuai dengan model piramida terbalik. Dalam artian, elite politik dan pemerintahan di Indonesia seharusnya memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat untuk menilai, mengevaluasi ataupun mengkritik kebijakan pemerintah sebagai perwujudan demokrasi dalam komunikasi politik yang dijalankan.

3. Meneropong Korupsi di Legislatif

(Media Indonesia, 13 November 2006)

Konflik antara aparat kejaksaan dengan DPRD di sejumlah daerah dalam masalah korupsi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APRD), sesungguhnya tidak muncul seketika. Perseteruan itu telah mengalami proses panjang seiring dengan menguatnya kekuasaan partai dalam dinamika politik lokal, dan sebaliknya semakin melamunnya peran birokrasi pemerintahan akibat direduksi oleh kepentingan politik praktis di daerah.

Namun tanpa bermaksud untuk memihak, ada hal-hal yang jika tuduhan yang dilancarkan kepada sejumlah anggota legislatif yang sekarang meluas menjadi konflik antara Kejaksaan Agung dan DPR tersebut, dianalisis dari wacana historis tentang peran birokrasi pemerintahan sejak pemerintahan Soeharto sampai era reformasi.

Pada hakikatnya sepanjang pemerintahan Orde Baru, birokrasi pemerintahan atau sering disebut sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki sikap primordial yang kuat terhadap orientasi politik tunggal dalam kehidupan bernegara. Tidak peduli mereka adalah pemegang kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif sebagaimana aparat kejaksaan, maupun kekuasaan legislatif yang diisi oleh para PNS wakil Golkar, semuanya terikat dalam lingkup Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang tunduk kepada hegemoni kekuasaan Golkar sebagai partai pemerintah.

Akhiral, persoalan apapun, termasuk penyimpangan dalam penggunaan uang negara di dalam Penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang melibatkan ketiga unsur kekuasaan pemerintah, tidak sampai menimbulkan konflik berkepanjangan di antara mereka. Semua masalah yang terjadi di lingkaran kekuasaan pemerintahan di daerah akan diselesaikan dengan mudah melalui kompromi, yang mengorbankan pada kesamaan tujuan, yaitu melanggengkan kekuasaan Orde Baru beserta atribut posisionalnya yang menempatkan birokrasi pemerintahan sebagai kelas dominan yang tidak bisa dinas oleh rakyat.

Tetapi dalam pertalannya, kenyamanan memang harus ada batasnya, sebab suatu kala situasi politik berubah dan menghasilkan sejumlah peraturan yang membatasi perilaku birokrasi pemerintah yang mematu - mutui diri sebagai orang yang paling berfikir, paling tahu, paling bisa dan semacam klaim lain yang utamanya mengunggulkan peran dalam mengatur jalannya kekuasaan pemerintahan di daerah, maka posisinya dengan mudah diambil oleh kekuatan partai-partai politik.

Munculnya kekuasaan partai dalam pemerintahan di daerah tidak mudah diterima oleh kelompok birokrasi yang merasa sebagai kelompok terdidik atau dalam istilah Clifford Geertz sebagai "peraya dengan pekerjaan halus" di

pemerintahan". Oleh sebab itu, tidak aneh jika mereka sering menuduh bahwa elite politik hasil reformasi tidak memiliki kelayakan untuk menjalankan pemerintahan yang beradab, tentu sembari mengungkapkan status sosialnya yang tidak mendukung.

Gampangya, elite politik diasumsikan lebih banyak yang muncul dari kelas pinggiran dan bukan hulu priyayi. Memang pada awal reformasi kenegaraan, sejumlah orang dari kelompok marginal tiba-tiba menjadi elite yang berkuasa. Akibatnya, mereka dipandang sinis oleh masyarakat yang terpengaruh oleh pola pikir priyayi, bahkan dengan nada mengejek, ungkapan "kera munggal bale" atau pengemis yang naik ke bale - bale, seolah menjadi karakteristik dominan dalam model kekuasaan politik dalam pemerintahan di daerah pasca reformasi.

Asumsi yang melecehkan terhadap sejumlah elite politik di daerah tersebut, sebenarnya tidak pada tempatnya, sebab sangat wajar jika para aktivis partai politik selain Golkar dalam masa kekuasaan Soeharto, lebih banyak didominasi oleh kelompok marginal dalam masyarakat. Hanya merekalah yang berani berbeda orientasi dengan penguasa, karena kurang menghiraukan resiko sosial ekonomis jika berseberangan dengan pemerintah. Sebaliknya kelas terpelajar ataupun kelas menengah tidak memiliki kemandirian dan selalu berasing sehingga orientasinya hanya sebatas mengejar kepuasan material menjadi priyayi dan tunduk terhadap hegemoni politik penguasa.

Persaingan antara birokrat pemerintah dan elite politik tidak pernah berhenti dan terus berlanjut meski komposisi personal DPRD sudah semakin intelek. Namun di saat gemuruh reformasi melemah, dan bergerak bak siklus yang maju ke depan tetapi ternyata secara perlahan-lahan disinyalir sedang menaiki ke belakang, maka birokrat pemerintah yang berpengalaman menguasai pemerintahan di daerah dengan azas legal formal, mulai untuk gigit dengan gencar mengkritik elite politik di DPRD.

Dalam unjutan sosiologi birokrasi, birokrat di daerah masih memiliki kekuatan untuk menggalang solidaritas sesama aparat pemerintah atau garis PBS melalui semangat mematu - mutui diri sebagai priyayi yang beretika. Tentu saja sembari terus berupaya untuk melembagakan kembali manajemen pemerintahan yang seras, selaras, seimbang dalam pelaksanaan di atas demokrasi integralistik.

Dengan asumsi keceratan hubungan antara aparat eksekutif dan legislatif dalam semangat korps yang bernuansa nostalgia, maka cukup

berlainan jika sejumlah elite politik ataupun anggota DPRD merasa sebagai orang-orang yang di bidik untuk dikorbankan dalam kasus korupsi. Di pihak lain, para birokrat dalam pemerintahan di daerah bebas melenggang tanpa ada yang mengusik meski mereka disuayal memiliki peran dalam berbagai kasus korupsi berama-sama dengan anggota legislatif.

Oleh karena itu, sangat wajar jika sejumlah elite politik sering menunjukkan kegeramanannya dan terus mempertanyakan kinerja aparat penegak hukum yang dinilai masih suka terbang pilih, dengan sasaran memposisikan anggota legislatif sebagai pihak yang kelad kasus-kasus korupsi di daerah. Sedangkan para birokrat yang sesungguhnya telah menumbangkan korupsi secara sistematis dalam belitan aspek legal formal seperti tidak tersentuh oleh aparat penegak hukum.

4. Melahirkan Bibit Pemberantasan Korupsi

(Jurnal Nasional, 14 April 2007)

Menangani kasus korupsi, memerlukan waktu yang sangat panjang jika hanya mengandalkan kinerja lembaga-lembaga pemerintah. Idealnya, pemberantasan korupsi harus melibatkan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat.

Oleh karena itu, mestinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang notabene sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi di Indonesia menciptakan formula baru, yang melibatkan rakyat secara langsung dalam pemberantasan korupsi.

Sesungguhnya, pemberantasan korupsi secara substansial bisa mengadopsi teori difusi inovasi dari Everett M. Rogers dan Floyd Shoemaker (1971), yang berisi strategi menciptakan kader perubahan yang mampu mempengaruhi sikap masyarakat. Ada beberapa pola yang bisa diterapkan oleh KPK melalui pendidikan anti korupsi yang terencana.

Pertama, memberikan kesempatan kepada masyarakat luas khususnya generasi muda untuk mengikuti pendidikan anti korupsi secara terbuka, dengan selektifitas yang tidak terkait dengan status sosial, termasuk di dalamnya tingkat pendidikan, status ekonomi dan politik yang disandang oleh seseorang. Seleksi hendaknya dilakukan oleh lembaga independen yang kredibilitasnya diakui. Tahap ini memerlukan kecermatan yang tinggi mengingat

faktor integritas dan moralitas bisa sangat subjektif. Meski demikian, dengan mengalokasikan waktu yang proporsional untuk mengklarifikasi tingkat kejujuran seorang calon peserta, maka untuk mencari aparat atau kader pemberantas korupsi yang baik tidak terlalu sulit.

Selanjutnya, sebagian besar aparat yang menangani korupsi cenderung elitis dan memiliki jarak dengan masyarakat di akar rumput. Sebab umumnya, mereka direkrut dari kalangan birokrasi pemerintah, dan hanya sejumlah kecil saja yang berasal dari masyarakat biasa menduduki posisi-posisi tinggi di lembaga pemerintah yang terkait dengan penanganan korupsi, seperti KPK, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ataupun lembaga pengawasan internal di departemen dan pemerintah daerah. Akibatnya, masyarakat segan dan tidak memiliki keberanian untuk berkomunikasi secara terbuka ketika melaporkan berbagai dugaan korupsi.

Oleh sebab itu, pendidikan anti korupsi yang terbuka bagi rakyat untuk dipertukan, karena model pembelajaran ini akan menghasilkan keberanian kolektif rakyat untuk memerangi korupsi, dan bisa memangkas jarak kekuasaan dalam pelaporan korupsi. Jarak kekuasaan menurut Larry A. Samovar (1988) adalah otoritas yang dimiliki seseorang dan berpotensi menghambat kelancaran komunikasi yang egaliter. Dalam konteks ini, ada rasa sungkan masyarakat untuk memberikan informasi seputar korupsi kepada aparat pemerintah.

Kedua, pemegang sertifikat atau lisensi pendidikan anti korupsi yang berhasil menyelesaikan pendidikannya dengan baik, harus diposisikan sebagai rakyat biasa yang tidak memiliki keistimewaan di masyarakat maupun dalam lingkaran kekuasaan negara. Mereka diharapkan konsisten untuk memberantas korupsi dan tetap bagian dari keseharian masyarakat, bukan sebaliknya dengan kekuasaan harus yang dimiliki, mereka justru bersekongkol dengan orang-orang yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Ketiga, masyarakat yang sudah pernah mengikuti pendidikan anti korupsi diharapkan membentuk komunitas anti korupsi di wilayahnya. Komunitas anti korupsi dimaksudkan sebagai wadah komunitas yang peduli terhadap masalah korupsi. Tidak sekadar bisa melaporkan kepada pemerintah dan pers saja, tetapi harus terlibat langsung dan mengikuti proses penyelesaiannya. Sebab, kasus korupsi yang dieksplorasi oleh pejabat terkait, seringkali tidak terdengar bagi kelanjutan penyelesaiannya.

Keempat, lulusan pendidikan anti korupsi yang memiliki kredibilitas ataupun konsistensi dalam memerangi praktik korupsi, solusi dan nepotisme

dapat menjadi fasilitator pada berbagai kegiatan pemberantasan korupsi di masyarakat, yang diselenggarakan oleh pemerintah atau institusi lain yang peduli terhadap pemberantasan korupsi.

Kegiatan yang memberikan peran serta masyarakat dalam pendidikan anti korupsi tersebut diatas, di dalam proses penyelenggaraan, jangan berprasangka akan diikuti oleh para pengangguran yang mencari pekerjaan, sebab dengan pola pemilihan yang terencana, termasuk pola pemberian kompensasi yang transparan, maka hanya bibit-bibit unggul saja yang mampu untuk menembus sebagai peserta pendidikan.

Hakikatnya, pola kegiatan pendidikan anti korupsi, diharapkan melahirkan agen pembaharuan yang langsung berasal rakyat, bukan dari "komunitas" yang justru selama puluhan tahun dianggap ikut melembagakan korupsi "formal" yang sengaja diciptakan untuk menguatkan loyalitas terhadap penguasa.

5. RUU KMIP dan Kultur Keterbukaan

(Suara Penaburuan, 12 Juni 2007)

Rancangan Undang-Undang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (RUU KMIP) yang saat ini sedang dibahas oleh Panitia Kerja Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah, masih menyisakan sejumlah masalah krusial yang justru berpotensi mengharibai kebebasan informasi.

Dalam RUU KMIP terdapat pasal-pasal tentang informasi publik yang dicekalkan, dengan alasan apabila dibuka dan diberikan kepada masyarakat dapat mengambil proses penegakan hukum, mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan menyebabkan persaingan yang tidak sehat, dan berbagai ketentuan lainnya yang prinsipnya membatasi kebebasan informasi demi untuk keamanan nasional, menjaga aset negara maupun perlindungan terhadap privasi individual.

Jika pasal-pasal yang mengatur tentang pengecualian informasi publik tersebut memberikan batasan yang jelas termasuk di dalamnya tidak memberikan peluang munculnya peraturan dibawahnya yang justru bertentangan dengan semangat kebebasan informasi maka pasal perkecualian tidak akan memiliki implikasi yang merugikan bagi masyarakat. Tetapi, jika yang muncul dalam pengecualian informasi adalah ketentuan untuk cegah sudah pasti akan memberikan celah kepada para pemegang otoritas informasi

di hadapan publik untuk memposisikan sejumlah informasi dalam kategori rahasia.

Membanasi informasi publik dengan dalih untuk melindungi rakyat dan demi keamanan nasional tentu saja sangat mulia, tetapi dalam perspektif universal sebagaimana yang tercantum dalam Pernyataan Umum tentang Hak Azasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, "setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan, dan pendapat dengan cara apapun dan dengan tidak memandang batas-batas". Tentu saja pernyataan tersebut tidak mudah untuk diterapkan di Indonesia.

Terlebih lagi pemerintah dan para politisi di DPR seringkali merujuk Amerika Serikat yang dinilai sangat liberal dalam kehidupan politik, tetapi masih menetapkan sejumlah ketentuan informasi yang tidak boleh dipublikasikan karena berbagai pertimbangan. *Freedom of Information Act* (FOIA) tahun 1967 di Amerika membatasi sembilan pengecualian yang intinya menyangkut (1) rahasia keamanan nasional, (2) aturan-aturan personal dan praktek internal sebuah badan pemerintah, (3) materi yang secara khusus dicekalkan berdasarkan UU Federal, (4) rahasia perdagangan atau informasi keuangan yang mendapatkan hak istimewa, (5) memorandum anjur atau di dalam badan pemerintah untuk kepentingan hukum, (6) berkas pribadi dan kesehatan, (7) informasi untuk penegakan hukum, (8) pemeriksaan dan peraturan perbankan dan lembaga-lembaga keuangan, (9) informasi dan data geologi, termasuk peta-peta, yang berhubungan dengan sumur-sumur minyak.

Ketentuan FOIA tersebut tampaknya sudah diadopsi dalam materi RUU KMIP. Kendati demikian, dengan tidak mengesalkan upaya DPR dan Pemerintah dalam pembahasan RUU KMIP ataupun tanpa menafikan kebebasan informasi yang telah dicapai dalam reformasi politik di Indonesia, menganalogikan eksistensi pengecualian dalam kerahasiaan negara dengan Amerika harus secara komprehensif dalam bingkai kultur transparansi. Sebab FOIA secara prinsipil justru menciptakan sebuah perintah bahwa informasi resmi harus dapat diakses oleh publik sehingga publik dapat memeriksanya.

Esensinya meski ada informasi yang masuk dalam klasifikasi rahasia negara, tetapi AS punya komitmen untuk menciptakan budaya tertentu memberikan perlindungan yang berarti terhadap kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berkeadilan, kebebasan beragama, dan kebebasan melakukan protes rasial. Amerika Serikat juga membuka proses-proses perdebatan di dalam

permasalahan ini sendiri ke depan mata dan telinga masyarakat". (Rodney A. Smith, 2001).

Hakikatnya, kita tidak bisa secara parsial membandingkan kebebasan informasi tanpa mengaitkan pada kultur demokrasi yang telah berjalan di suatu negara. Tentu saja termasuk Inggris, yang baru – baru ini menjadi sasaran studi banding dari anggota DPR dan pemerintah. Substansinya, membangun kultur demokrasi adalah keharusan yang tidak bisa ditunda. Pemerintah ditunggu konsistensinya dalam menjalankan peran yang transparan sebagai pelayan publik. Dalam konteks komunikasi politik, keterbukaan pemerintah dan elite dalam kekuasaan negara merupakan titik awal dari tumbuhnya demokrasi yang natural. Dua entitas yang berperan dalam menjalankan keheradaban negara, secara prinsip tidak bisa lagi memarat – marat diri sebagai kelas dominan yang memiliki kekuatan untuk mengatur informasi dengan penuh kerahasiaan. Iklim demokrasi dan transparansi yang kondusif jelas akan mendorong masyarakat untuk menggunakan hak memperoleh informasi secara maksimal tanpa ada keraguan maupun ketakutan berhubungan dengan pemerintah.

Namun, harapan akan terwujudnya demokratisasi informasi tersebut seperti tidak akan segera datang, sebab RUU KMIP yang diidentikkan dengan kesungguhan untuk menciptakan keterbukaan dalam menjalankan kekuasaan yang demokratis, ternyata justru mengadopsi kebijakan yang terkesan berlawanan dengan semangat transparansi informasi. Pembahasan RUU KMIP di tingkat panitia kerja antara DPR dan pemerintah dilaksanakan tertutup. Artinya, masyarakat khususnya komunitas yang bergerak dalam ranah komunikasi publik dan memiliki kepedulian terhadap ketentuan seperti informasi yang dikecualikan, tidak bisa mengikuti atau mendalami akses keterbukaan dalam penyusunan RUU tersebut.

Dalam kerangka makro yang sejalan dengan reformasi kenegaraan, tentu saja keterutupan dalam proses penyusunan peraturan, merupakan pembelajaran politik yang tidak seiring dengan retorika para elite negeri ini yang secara klasik tidak bosan – bosannya mengunggulkan demokrasi dan keterbukaan.

6. Keterbukaan Informasi BUMN

(Santia Pembinaan, 9 Oktober 2007)

Rancangan Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik (RUU KIP)

masih menghadapi persoalan tentang ketidaksepakatan antara DPR dan pemerintah, menyangkut berbagai persoalan mendasar.

Materi RUU KIP yang alot diperdebatkan adalah, informasi yang dikecualikan karena jika dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum, mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual, dan berbagai ketentuan lain yang prinsipnya membatasi kebebasan informasi demi keamanan nasional, menjaga aset negara maupun perlindungan terhadap privasi individual.

Namun permasalahan yang semula dikhawatirkan akan membelenggu kebebasan informasi publik tersebut seperti dapat diatasi dengan menetapkan batasan informasi yang dikecualikan. Walaupun masih perlu penunasan yang lebih tepat, agar tidak multi tafsir atau diselewengkan oleh para pemegang otoritas informasi di lembaga pemerintah atau badan – badan publik. Eksesnya, hampir ada titik temu yang signifikan antara DPR, pemerintah dan berbagai kelompok masyarakat yang memperjuangkan kebebasan informasi.

Meski demikian, RUU KIP ternyata tidak kehabisan masalah yang kontroversial dan memancing perdebatan di DPR maupun di lingkungan masyarakat yang peduli terhadap kebebasan informasi, sebab ketika pasal krusial tentang informasi yang dikecualikan mendekati titik temu antara kemauan pemerintah dan pihak legislatif, muncul masalah lain, menyangkut pendefinisian badan publik yang wajib memberikan informasi kepada masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah mengkhendaki bahwa BUMN tidak bisa digolongkan sebagai badan publik. Sedangkan sejumlah anggota DPR berprinsip BUMN sebagai badan publik.

Pelembagaan Ketertutupan

Sesungguhnya semua entitas penyelenggara negara yang memperoleh anggaran dari pemerintah, merupakan badan publik. Oleh sebab itu ketika pemerintah bersikukuh untuk mengecualikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai institusi yang tidak memiliki kewajiban membuka informasi kepada publik, jelas menuai kritik masyarakat dan komunitas yang memperjuangkan kebebasan informasi. Sebab berdasarkan Undang – Undang Nomor 19 tahun 2003, BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara dan berasal dari kekayaan negara. BUMN sebagai salah satu pelaku perekonomian nasional yang berdasarkan demokrasi ekonomi, diharapkan berperan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam posisi milik negara, tentunya rakyat berhak untuk mengetahui kondisi BUMN. Di sisi lain, transparansi dalam tubuh BUMN bukanlah sesuatu yang harus dijaahiri, sebab dalam Undang-Undang yang dikeluarkan semasa Presiden Megawati Soekarnoputri berkuasa tersebut, di dalamnya mengandung semangat demokratisasi dan keterbukaan informasi. Misalnya, pimpinan BUMN wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran.

Sebuah ketentuan ideal yang mengarah kepada penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Memang semangat dari UU No. 19 tahun 2003, adalah keterbukaan, sebab asumsinya, menjahankan manajemen "perusahaan plus moral" secara tertutup, tanpa memberikan kesempatan masyarakat untuk berpendapat, mengkritik ataupun melakukan pengawasan, musuh sebuah institusi publik bisa memaksimalkan kinerja dan mendistribusikan keuntungan untuk kesejahteraan rakyat.

Dengan pelembagaan "ketertutupan" yang didukung pemerintah maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan, maka dari waktu ke waktu BUMN bisa dimanfaatkan secara terelutub atau dalam-dalam oleh sejumlah entitas yang menguasai atau memiliki dominasi dalam kekuasaan negara, tanpa perlu khawatir terhadap kontrol masyarakat.

Transparansi BUMN

Oleh sebab itu, dengan memanfaatkan momentum keterbukaan informasi, selakannya budaya tertutup BUMN harus segera dibuka dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui kinerja BUMN secara komprehensif. Intinya, BUMN sebagai badan publik yang sepenuhnya dibiayai oleh negara wajib membuka informasi kepada masyarakat yang secara publik berhak untuk mengetahui atas kekayaan yang dimiliki negara.

Sedangkan BUMN yang "sebagian modalnya" dikuasai oleh pihak lain di luar pemerintah, maka harus ada mekanisme peraturan dan pengawasan yang menjamin transparansi. Dalam UU BUMN yang bersangkutan tetap mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi yang terkait dengan kepemilikan modal pemerintah. Sedangkan yang memengaruhi modal pihak swasta, masyarakat harus menjadi *stakeholder* yang memiliki hak akses informasi, karena berkaitan dengan alasan perlindungan dan menjaga privasi individu.

Namun demikian, seperti halnya ketentuan semacam itu terdapatnya rumus dan berpotensi disalah artikan. Oleh karena itu, yang lebih ideal adalah menempatkan BUMN yang kepemilikan modalnya secara penuh dikuasai pemerintah, maupun yang sebagian dimiliki oleh pihak swasta, tanpa terkecuali wajib membuka informasi kepada publik. Dengan asumsi, pihak swasta yang menanamkan modal di BUMN, mestinya sudah siap mengikuti aturan tentang keterbukaan informasi yang diberlakukan pada badan publik.

7. Keterbukaan Informasi dan FOIA

(Media Indonesia, 17 Oktober 2007)

Rancangan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (RUU KIP) yang saat ini sedang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah, masih menyisakan sejumlah masalah krusial yang justru berpotensi menghambat kebebasan informasi.

Dalam RUU KIP terdapat pasal-pasal tentang informasi publik yang dikawatirkan dengan alasan apabila dibuka dan diberikan kepada masyarakat dapat menghambat proses penegakan hukum, mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan menyebabkan persaingan yang tidak sehat, dan berbagai ketentuan lainnya yang prinsipnya membatasi kebebasan informasi demi untuk keamanan nasional, menjaga aset negara maupun perlindungan terhadap privasi individu.

Bila pasal-pasal yang mengatur tentang perkawajiban informasi publik tersebut tidak memberikan batasan yang jelas, bukan masalah untuk memberikan akses kepada para pemegang otoritas informasi di badan publik untuk memposisikan sejumlah informasi dalam kategori rahasia.

Sesungguhnya dalam Pernyataan Umum tentang Hak Azasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, "setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan, dan pendapat dengan cara apapun dan dengan tidak memencang batas-batas". Tentu saja pernyataan tersebut tidak mudah untuk diterapkan di Indonesia, dimana para politisi dan elit dalam kekuasaan negara selalu berbicara tentang pentingnya demokrasi yang sesuai dengan budaya bangsa Indonesia sebagai pemerintahan politik integralistik yang diabdikan sepenuhnya menurut kepentingan sendiri.

Freedom of Information Act (FOIA)

Alasan lain yang juga sering dikemukakan oleh pemerintah tentang perlunya pembatasan dalam informasi adalah, Amerika Serikat yang sangat liberal dalam kehidupan politik, tetapi masih menerapkan sejumlah ketentuan informasi yang tidak boleh dipublikasikan karena berbagai pertimbangan. Apalagi Indonesia yang masih dalam tarat menumbuhkan demokrasi, sudah barang tentu harus menetapkan pembatasan – pembatasan terhadap keterbukaan informasi.

Dalam Freedom of Information Act (FOIA) tahun 1967, terdapat sembilan pengecualian yang intinya menyangkut (1) rahasia keamanan nasional; (2) aturan – aturan personal dan praktek internal sebuah badan pemerintah; (3) materi yang secara khusus dikecualikan berdasarkan UU Federal; (4) rahasia perdagangan atau informasi keuangan yang mendapatkan hak istimewa; (5) memorandum antar atau di dalam badan pemerintah untuk kepentingan hukum; (6) berkas pribadi dan kesehatan; (7) informasi untuk penegakan hukum; (8) pemerintah dan peraturan perbankan dan lembaga – lembaga keuangan; (9) informasi dan data geologi, termasuk peta – peta yang berhubungan dengan sumur – sumur minyak.

Kendati demikian, tanpa mengesalkan hasil reformasi yang mendorong tumbuhnya kebebasan informasi, menganalogikan eksistensi pengecualian kerahasiaan negara di Indonesia dengan Amerika, tentunya harus melihat pula tentang kultur transparansi yang sudah mendarah daging dalam kehidupan politik di negeri Paman Sam tersebut.

Amerika memiliki komitmen menciptakan budaya terbuka, memberikan perlindungan yang berarti terhadap kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berkumpul, kebebasan beragama, dan kebebasan melakukan protes massal. "Amerika Serikat juga membuka proses – proses pemerintahan di masyarakat tentang berbagai persoalan pemerintah secara terbuka" (Rodney A. Sivella, 2004).

Intinya, jangan membandingkan kebebasan informasi hanya mengambil batasan yang ketat dari FOIA, tanpa melihat kultur demokrasi yang telah berpijak di Amerika. Indonesia mengadopsi ataupun meniru FOIA tetapi budayamasyarakat dan aparat pemerintah masih didominasi oleh ketertutupan. Misalnya, masyarakat juga dengan pepandu memendam dalam – dalam, dan memukul nggy – nggy. Dalam arti memendam dalam dalam betis bungk dan mengeksplorasi kebaikan sebuah – huasnya. Alasan ini pula yang sering

dipakai oleh pemerintah dalam memperlakukan sejumlah "tokoh, entitas, komunitas" agar tidak diusik, meski tindakannya merugikan rakyat.

Kesimpulannya, nilai – nilai ketertutupan dan serba rahasia masih menguasai tradisi masyarakat dan birokrasi pemerintahan. Oleh sebab itu, bisa saja peraturan tentang keterbukaan informasi tidak akan berpengaruh signifikan terhadap semangat rakyat dalam mencari dan menggunakan informasi dari badan – badan publik.

Menumbuhkan Kultur Demokrasi

Intial perbedaan mendasar kalau di AS, FOIA ibarat sebuah pelengkap dari masyarakat yang sudah demokratis, di Indonesia, RUU KIP harus mendorong tumbuhnya demokratisasi dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dengan demikian, pasal – pasal yang ada di dalamnya secara substansial harus mudah dipahami, bisa memangkas jarak psikologis antara kekuasaan pemerintah dengan rakyat, dan yang lebih penting adalah keterbukaan dan kebebasan informasi harus berpihak kepada kepentingan publik yang lebih luas.

Oleh karena itu, idealnya, RUU KIP juga harus mampu menumbuhkan budaya demokratisasi yang menunjang kebebasan informasi. Sebab dalam tradisi ketertutupan dan "ketakutan" masyarakat terhadap simbol – simbol pemerintah, mustahil sebuah peraturan tentang keterbukaan yang berisi aneka pasal pengecualian yang rumit bisa mencapai sasaran yang diharapkan. Hakikatnya, jika demokratisasi mendorong masyarakat untuk menggunakan hak memperoleh informasi secara maksimal tanpa ada keraguan berhubungan dengan badan publik.

8. Keterbukaan Informasi dan Pemberantasan Korupsi

(Harian Sepatan Indonesia Sore, 19 Oktober 2009)

Pembahasan Rancangan Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik (RUU KIP) oleh Panitia Kerja Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah, berakhir tanggal 20 September 2007. Namun proses pengesahan menjadi Undang – Undang tampaknya tidak akan segera terwujud mengingat masih ada pasal krusial yang menjadi perdebatan antara berbagai pihak yang berkepentingan terhadap transparansi informasi.

Tetapi dari persoalan tersebut, masyarakat sangat memerlukan aturan keterbukaan informasi untuk mendukung pemberantasan korupsi yang terjadi di lingkungan badan - badan publik. Salah satu ketentuan yang bisa dipakai sebagai titik tolak mengawasi dugaan korupsi di badan publik adalah pasal 7 ayat (1) RUU KIP, yang menyebutkan bahwa badan publik wajib menyediakan, memberitakn dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pengguna informasi selain informasi yang dikawatirkan sesuai dengan ketentuan.

Jika pasal tersebut diberlakukan, maka diharapkan praktek korupsi di berbagai badan publik, bisa diberantas sampai ke akar - akarnya. Aplikasinya sangat sederhana, setiap badan publik yang memperoleh dana dari pemerintah, sumbangan masyarakat maupun sumber luar negeri, wajib memberitakn kepada rakyat, dengan cara menginformasikan jumlah dana yang diperoleh, peruntukan dan target penyelesaian kegiatan, melalui papan pengumuman di lokasi kegiatan yang mudah diketahui oleh masyarakat. Jangan berdalih, hal semacam ini sudah dilakukan melalui website, sebab harus diakui sebagian besar rakyat Indonesia belum familier terhadap teknologi komunikasi - informasi.

Substansinya, kegiatan yang dilakukan oleh badan - badan publik khususnya instansi pemerintah, tidak hanya berorientasi kepada ketentuan dari berbagai lembaga pengawasan negara, tetapi semua kegiatan yang menggunakan uang pemerintah harus melibatkan pengawasan rakyat. Sebab, secara faktual, keterbukaan informasi penggunaan dana pemerintah masih terbatas dalam kegiatan pembangunan fisik yang memiliki nilai uang cukup besar, seperti pembangunan jembatan, kantor pemerintah, rumah sakit, sekolah dan berbagai pembangunan lainnya yang menggunakan dana ratusan juta sampai milyaran rupiah.

Dalam perspektif komunikasi publik, informasi yang mengandung diferensiasi sosial - ekonomi ataupun jarak kekuasaan, antara sumber informasi dan penerima pesan, sebagaimana pengumuman tentang jumlah uang yang sangat besar, diinformasikan oleh lembaga yang tidak beresmbaan langsung dengan masyarakat, cenderung diabaikan dan tidak melekat dalam memori rakyat pada umumnya sebagai penerima pesan. Sebab mereka cenderung sulit menghubungkan nilai uang yang besar dan sumber pesan yang tidak familier dengan lingkungannya. Dalam arti lain, antara tingkat pelaksanaan kegiatan pemerintah dan masyarakat berjalan sendiri - sendiri dalam menyikapi informasi publik yang menyangkut penggunaan uang negara.

Oleh sebab itu dalam keterbukaan informasi, setiap pekerjaan ataupun kegiatan yang dibiayai dengan uang negara, seyogianya memasang papan pengumuman di lokasi kegiatan, yang memaparkan tentang penggunaan dana. Misalnya, puskesmas, sekolah - sekolah, kantor desa dan institusi lainnya yang memperoleh anggaran dari pemerintah untuk merenovasi bangunan, pengadaan barang dan kegiatan - kegiatan lain yang menjadi tanggungjawabnya wajib memasang papan pengumuman yang mudah dibaca oleh masyarakat.

Tampaknya sepele, tetapi dari informasi tersebut, masyarakat terdorong untuk ikut mengawasi penggunaan uang negara di lingkungannya sendiri. Dalam wacana komunikasi politik, informasi kegiatan skala kecil yang menyangkut kepentingan masyarakat secara langsung, bisa menghasilkan respons yang mendorong keberanian masyarakat untuk mengusut aliran dana pemerintah yang dipakai membiayai berbagai kegiatan. Dengan kata lain, keterbukaan informasi, sesungguhnya sejalan dengan maksud untuk menumbuhkan budaya anti korupsi di masyarakat.

Sejauh ini, karena tidak ada keterbukaan informasi, maka pelaksanaan kegiatan yang menggunakan uang negara, terlebih lagi yang berskala kecil, cenderung hanya diketahui oleh pemerintah dan kelompok kritis yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat, sehingga masyarakat umum tidak bisa ikut mengawasi penggunaan dana pemerintah di lembaga - lembaga publik karena keterbatasan informasi.

Oleh sebab itu, transparansi informasi harus menjadi titik tolak dan pilar utama dalam pemberantasan korupsi yang bertuas pada rakyat. Mengandalkan kinerja organ pengawasan dalam kelangkaan negara saja, mustahil bisa memberantas korupsi yang sudah berakar di badan - badan publik. Oleh sebab itu, meski keterbukaan informasi dinilai oleh sejumlah elite dalam pemerintahan berpotensi mengganggu kinerja badan - badan publik, tetapi peraturan tentang keterbukaan informasi harus segera diwujudkan demi untuk menciptakan Indonesia yang bersih dari korupsi.

Namun persoalannya, jika memerhatikan pasal - pasal yang mengatur tentang sanksi bagi orang yang menyalahgunakan informasi dalam RUU KIP, maka harapan mewujudkan keberanian masyarakat dalam menggunakan informasi untuk mengungkap kasus - kasus korupsi di badan publik sulit tercapai, sebab selain sulit trauma terhadap kelemahan otoritas pemerintah, ketidaksi penyalahgunaan informasi terdapat ambiguitas, ambiguitas dan lebih banyak berpikuk kepada pejabat publik dibandingkan dengan posisi rakyat selaku pengguna informasi.

9. Birokrasi Informasi dan Korupsi

(Suara Karya, 14 Januari 2008)

Rancangan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (RUU-KIP), dalam waktu yang tidak terlalu lama akan disahkan menjadi Undang-Undang. Namun ternyata, pasal-pasal yang terkandung di dalamnya cenderung mengukuhkan badan-badan publik sebagai sub-ordinat kekuasaan menjadi semakin kuat dalam mengontrol informasi publik. Sebaliknya masyarakat sebagai pengguna informasi tidak berdaya karena terperangkap oleh birokrasi keterbukaan informasi.

Dalam ketentuan tentang hak publik atas informasi, pasal 4 RUU-KIP menyebutkan bahwa, "setiap orang berhak memperoleh, menggunakan dan menyebarkan informasi publik". Namun, sesungguhnya, informasi publik yang bisa diperoleh dengan mudah oleh masyarakat luas, terbatas pada informasi yang dikeluarkan oleh badan publik karena "kewajiban" sebagaimana ketentuan dalam pasal 7 sampai dengan pasal 13, yang mengatur kewajiban badan publik untuk menyediakan, memberikan dan menyebarkan informasi.

Subyektivitas Keterbukaan

Ditambah, RUU-KIP tidak hanya dipenuhi oleh pasal-pasal informasi yang dikasualkan, tetapi juga dijejali sejumlah faktor yang bisa dipakai oleh badan publik sebagai dalih untuk tidak membuka akses informasi kepada masyarakat. Misalnya, ketentuan tentang badan publik yang wajib memuat pertimbangan politik, sosial, budaya, dan/atau pertahanan keamanan secara tertulis, dalam memberikan informasi publik. Ketentuan ini, sepihak sangat baik, namun bisa membuka peluang seluas-luasnya, untuk menafsirkan keterbukaan informasi secara subyektif, berdasarkan kepentingan badan publik untuk menutup akses data penyimpangan keuangan negara.

Padahal, semangat amaran reformasi, sebagaimana yang teruang dalam Undang-Undang No. 28 tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, masyarakat memiliki hak dan tanggungjawab untuk ikut mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih, melalui partisipasi dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi kepada institusi yang bertanggungjawab terhadap pembatasan korupsi. Artinya, secara faktual ada potensi ketidakseragaman antara pemberantasan korupsi dengan peraturan keterbukaan informasi dalam upaya membuka kasus-kasus korupsi di badan publik.

Bahkan hanya sampai disitu kesulitan untuk memperoleh informasi, sebab dalam RUU-KIP ditegaskan bahwa, badan publik harus melaksanakan kewajiban membangun dan mengembangkan "sistem informasi" dan dokumentasi, pengelolaan informasi publik secara baik dan efisien. Substansi idealnya adalah, supaya masyarakat mudah mengakses informasi publik dengan biaya terjangkau. Tetapi bagi badan publik, ketentuan itu akan diorientasikan kepada efisiensi dalam pembiayaan sistem informasi internal. Artinya jika masyarakat kesulitan mengakses informasi publik karena pengelolaan yang kurang marut penggunaan uang rakyat, maka badan publik bisa saja berkelit dengan alasan "dana yang tersedia" untuk menjalankan transparansi informasi tidak memadai.

Sesungguhnya, dalam kajian tentang demokrasi dan kebebasan dari George Clark dan Melvin Urofski (2001), ditandaskan bahwa "pemerintahan terbuka yang memiliki nilai pertanggungjawaban dan partisipasi demokratis, memerlukan ongkos besar dan harus mengorbankan sejumlah kepentingan efisiensi". Esensinya, keterbukaan memang memerlukan biaya, sehingga badan publik yang bernaung dibawah pemerintah wajib mengeluarkan dana yang layak, agar transparansi informasi bisa dinikmati oleh rakyat. Jadi bukan sebaliknya, kelangkaan dana sengaja dibiarakan, dengan maksud menutup sejumlah informasi publik yang sarat dengan kasus-kasus penyamaan keuangan negara.

Pembatasan Akses Informasi

Jika kewajiban badan publik untuk membuka akses informasi penggunaan anggaran pemerintah saja sudah diuntungkan oleh sejumlah ketentuan yang bisa ditafsirkan secara subyektif, maka dalam domain yang mengatur mekanisme akses informasi publik, kental pula nuansa "betapa sulitnya" masyarakat memperoleh informasi korupsi di badan publik. Disebutkan dalam Pasal 21, "setiap orang dapat mengajukan permintaan memperoleh informasi publik kepada badan publik secara tertulis maupun tidak tertulis. Tampaknya mudah, terlebih lagi ketentuan dalam pasal 20 menandakan, "tata cara memperoleh informasi publik didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu dan biaya ringan".

Namun prinsip cepat dan tepat waktu dalam RUU-KIP ternyata bisa tidak bermakna sama sekali, ketika batasan waktu memperoleh informasi dari badan publik, justru membutuhkan jangka yang lumayan panjang. Ditegaskan dalam RUU itu, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya

persetujuan dari pengguna informasi, badan publik wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisi tentang berbagai hal yang terkait dengan informasi yang diminta. Selanjutnya badan publik juga bisa memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan kepada pemohon informasi, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja berikutnya, dengan memberikan alasan tertulis. Total waktu yang dibutuhkan untuk meminta informasi dari badan publik, dalam ukuran "selambat-lambatnya" bisa mencapai 17 hari kerja. Jangka waktu yang terlampau panjang, jika merujuk kepada modus operandi penggelapan uang negara yang serba cepat dalam menyalahgunakan dana.

Ketentuan seputar jangka waktu dalam RUU - KIP, memberikan kesan ebagai upaya memberi kesempatan badan publik untuk mengait pesan dengan berbagai pertimbangan, sebelum dikeluarkan kepada masyarakat. Artinya, jika dilakukan dengan prinsip pengorganisasian pesan agar bisa memberikan kelulusan kepada pengguna informasi, tidak menjadi persoalan. Namun diperkirakan, yang akan muncul justru informasi ditahan terlebih dahulu, dengan maksud untuk memoles data, dugaan penyimpangan ketanggan negara agar menjadi tidak bermakna.

Selain itu, dalam konteks menyalahgunakan kewenangan membuka akses informasi, bisa saja mengulur waktu bertujuan memperoleh "biaya silyman" dari pengguna informasi. Artinya informasi dalam klasifikasi cepat mempunyai tarif terselubung. Alhasil, upaya memperoleh informasi publik yang menyangkut data penyelewengan uang negara bisa berpotensi menimbulkan korupsi baru.

Oleh sebab itu, jika pasal - pasal yang mengatur tentang hak publik atas informasi, kewajiban badan publik, untuk membuka informasi seperti penggunaan uang negara, dan mekanisme akses informasi publik masih bermuka burokratis, maka yang akan muncul adalah keterbukaan informasi semu, yang menutup partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

10. Perkecualian Informasi RUU KIP dan Potensi Alam

Pembahasan terhadap Rancangan Undang - Undang Keterbukaan Informasi Publik (RUU-KIP) di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, hingga kini belum menunjukkan gejala akan berakhir dan segera memasuki proses pengesahan. Padahal substansi yang ada di dalamnya, sangat berguna untuk membentuk masyarakat informasi yang kritis terhadap penyelenggaraan berbagai kegiatan badan publik sebagai sub-ordinat pemerintah.

Meskipun demikian, bukan berarti RUU-KIP harus secepatnya diselesaikan tanpa menghiraukan masukan dari berbagai pihak yang peduli terhadap Keterbukaan Informasi. Sebab, jika mencermati Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang terdapat dalam RUU-KIP, masih ada beberapa persoalan yang berpotensi untuk menghambat kebebasan masyarakat untuk memperoleh, menggunakan dan mencari informasi yang dibutuhkan. Bahkan termasuk beberapa rumusan yang sudah menjadi kesepakatan antara DPR dan pemerintah, sebenarnya berpotensi menafikan perubentukar masyarakat informasi.

Salah satu aspek krusial yang terkandung di dalam RUU - KIP adalah pasal - pasal tentang pengecualian informasi publik. Ketentuan ini, prinsipnya menegaskan bahwa, tidak semua informasi publik bisa diakses oleh masyarakat, sebab ada sejumlah informasi apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi, akan menghambat proses penegakan hukum, mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual maupun perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat, serta informasi yang membahayakan pertahanan negara dan kepentingan nasional.

Informasi Kekayaan Alam

Ketentuan yang terkait dengan pengecualian informasi, sebagian bisa diterima karena alasan yang logis. Namun ada beberapa persoalan terkait dengan kepentingan nasional adalah seputar "informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia". Barangkali maksudnya baik untuk melindungi data geologi dan geofisik, termasuk peta - peta yang berhubungan dengan sumur minyak di Indonesia supaya tidak "dicuri" atau dieksplorasi oleh negara lain tanpa melalui jalur formal hubungan bilateral.

Namun, bagaimana jika memaparkan potensi alam untuk menarik investor, apakah ini juga dinilai melanggar Undang - Undang. Padahal dalam era otonomi daerah, Provinsi Kabupaten Kota bertumbuh - tumbuh untuk menginformasikan sumber daya alam yang dimiliki, melalui aneka kegiatan pameran pembangunan atau melalui website, dengan tujuan supaya pemilik modal mau menanamkan usaha di daerah.

Oleh karena itu, peraturan ini harus memberikan kejelasan, jangan sampai semangat keterbukaan untuk mengaitkan perekonomian lokal yang diadopsi oleh pemerintah daerah menjadi hilang akibat ketentuan ini. Jika masalah ini tidak diuraikan, maka pengusahaan potensi alam di daerah, dikhawatirkan

akan menjadi kekuasaan institusi – institusi yang ada di pemerintah pusat. Dengan kata lain pemberian otonomi kepada daerah, akan diproteksi sedikit demi sedikit dan lama kelamaan semakin kabur.

Informasi Pendidikan Pribadi

Masalah lain dalam pasal perkecualian informasi dalam RUU-KIP adalah, menyangkut ketentuan, "informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan pengguna informasi publik dapat mengungkapkan kerahasiaan pribadi, yaitu informasi pribadi termasuk informasi konfidensial pribadi yang menyangkut kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan informal". Yang menjadi pertanyaan disini, apakah informasi pendidikan pribadi mengganggu privasi seseorang. Bukankah jejak rekam pendidikan formal maupun non formal seseorang, termasuk proses penyelesaiannya, selalu dikemukakan secara terbuka oleh diri sendiri, kelompok maupun entitas lainnya yang berkepentingan terhadap kualitas seseorang.

Rasanya memang aneh jika informasi pendidikan menjadi sedemikian rahasianya di Indonesia. Apakah bangsa ini akan dimotivasi atau dilindungi secara legal pencapaian derajat kelulusan dari satuan pendidikan yang bersifat instan, tanpa menghiraukan proses peradaban yang mendukung nilai – nilai akademis. Ketentuan dalam RUU – KIP ini juga bisa diasumsikan sebagai upaya menafikan eksistensi pendidikan bermutu yang dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh publik. Kalaulah pendidikan dikaitkan dengan rahasia pribadi yang tidak boleh dipublikasikan, bisa saja, dengan catatan seluas yang berhubungan dengan pendidikan sebagai "tugas intelijen". Namun jika menyangkut persoalan intelijen sudah difasilitasi oleh peraturan yang berhubungan dengan pertahanan negara dan keamanan nasional.

Ketentuan informasi konfidensial pribadi yang menyangkut pendidikan dalam RUU-KIP ini, akan menimbulkan asumsi minor tentang kelompok masyarakat yang gemar terhasut gelar instan, atau lebih menyukai menempuh pendidikan dari berbagai penyelenggara pendidikan yang tidak diakui kredibilitasnya, dan tidak sejalan dengan semangat hati menacerdasakan bangsa. Tentu saja masalah ini berpotensi menjadi kontraproduktif terhadap berbagai peraturan penyelenggaraan pendidikan.

Rahasia Undang – Undang Sistem Pendidikan Nasional juga tidak saja menitikberatkan kepada hasil yang dicapai, tetapi mengisyaratkan pula pentingnya proses pembelajaran dalam menentuhkan pendidikan. Memang benar, sebab dalam RUU-KIP pasal 3 huruf f disebutkan, "Undang – Undang

ini bertujuan memberikan dan menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi publik dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa". Sebuah tujuan mulia dalam mencapai demokratisasi berbasis kecerdasan masyarakat.

Memang dalam perkecualian informasi publik sudah diikuti oleh pasal tentang "Tidak termasuk kategori informasi yang dikecualikan", antara lain : putusan badan peradilan, penetapan, keputusan, peraturan, surat edaran atau kebijakan lain yang tidak berlaku mengikat (fatwa), pengungkapan untuk penelitian, dan pihak yang rahasianya diungkap memberi persetujuan. Tetapi jika ketentuan ini tidak dijelaskan lebih terinci, maka dikhawatirkan sistem informasi dan transparansi yang sudah dilembagakan oleh badan publik, kelompok dan individu yang bekerja secara profesional, sangat mungkin untuk dipersalahkan.

Dengan demikian, upaya bangsa Indonesia untuk meningkatkan masyarakat informasi, justru dikhawatirkan akan berhadapan dengan perlindungan hukum terhadap pemegang otoritas informasi yang cenderung subyektif dan menutup informasi publik.

11. Rahasia Negara, Korupsi dan Komisi Informasi

(Media Indonesia, 21 Agustus 2008)

Ketika tuntutan masyarakat semakin kencang, agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengungkapkan kasus – kasus korupsi secara transparan, pihak lain pemerintah justru berupaya menyelesaikan Rancangan Undang – Undang Rahasia Negara (RUU-RN), yang didalamnya mengandung berbagai pasal pembatasan informasi dan berpotensi pula menghambat pemberantasan korupsi.

Secara substansial, pemberantasan korupsi bisa mendukung kesuksesan, apabila akses untuk mendapatkan informasi terbuka lebar, tanpa dihalangi oleh peraturan yang menempatkan lembaga pemerintah bisa sedemikian dominannya mengkategorikan berbagai macam informasi sebagai rahasia institusi dalam kekuasaan pemerintah.

Karena itu Rancangan Undang Undang Rahasia Negara (RUU-RN), yang banyak mengatur kerahasiaan sebuah instansi pemerintah, secara tidak akan mematikan upaya pemberantasan korupsi. Pekerjaan mengungkap segala penyimpangan yang berpotensi merugikan kemajuan negara menjadi tertahan

dan tidak mampu memberikan harapan kepada rakyat yang menindukan transisi dari kanvas kasus korupsi.

Dengan RUU - RN, diundaskan bahwa instansi pemerintah memiliki sejumlah informasi yang termasuk dalam kategori rahasia negara. Dengan alasan, jika informasi itu dibuka kepada publik, maka akan mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi instansi. Persoalannya, instansi pemerintah cenderung lebih nyaman bekerja dalam ketersembunyiannya, tanpa diketahui oleh masyarakat pada umumnya. Sebab, organisasi pemerintah selalu mengklaim bahwa tugas yang dijalankan adalah demi kepentingan negara.

Walaupun didalamnya tersirat memberikan pelayanan kepada publik, namun dihayatirkan lebih menonjolkan kepentingan pemerintah dalam perspektif penguasa. Dengan kata lain, instansi pemerintah akan berupaya menerapkan berbagai kegiatan yang seharusnya bisa dipertanggungjawabkan kepada publik, tetapi karena alasan untuk kelancaran pekerjaan akan memasukkan dalam kategori yang sangat rahasia maupun rahasia.

Terlebih lagi dalam RUU - RN sebagaimana yang tercantum dalam pasal 25, terdapat Dewan Rahasia Negara. Entitas tersebut selain memiliki anggota tidak tetap sesuai dengan kebutuhan, berkumpul anggota tetap yang terdiri dari 41 pejabat tinggi negara, yaitu Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kominfo, Jaksa Agung, panglima TNI, Kepala Kepolisian RI, Kepala BIN, Kepala Arsip Nasional RI dan Kepala Lembaga Sandi Negara, yang mungkin saja lebih banyak berpihak kepada sesama instansi pemerintah dalam lingkup serikat korps yang integratif. Rezim kerahasiaan instansi, bisa memberikan peluang berbagai pihak yang berhubungan dengan pemerintahan, untuk lebih bebas "bermain-main" dengan keuangan negara, yang notabene harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Oleh sebab itu, RUU Rahasia Negara yang sekarang sedang diproses oleh pemerintah dalam hal ini oleh Departemen Pertahanan dan Keamanan, harus tetap mengungkap tingkat keterbukaan dalam penyelesaian korupsi. Jika RUU - RN berupaya menutupi masalah yang berpotensi merugikan keuangan negara, maka tujuan reformasi politik menjadi semakin jauh.

Sebenarnya jika berbicara tentang rahasia negara, Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU-KIP), yang

sudah disahkan DPR pada tanggal 3 April 2008, layak dijadikan rujukan. UU tersebut didalamnya mengatur informasi yang wajib dibuka kepada publik, dan pertanggungjawaban informasi yang tidak bisa diakses publik, karena menyangkut rahasia negara, rahasia kelembagaan, dan berbagai kerahasiaan berkaitan dengan privasi individual. Secara prinsipil, ketentuan tentang rahasia negara telah diakomodasikan dalam UU KIP, dan bisa diberlakukan untuk melindungi eksistensi negara yang berdaulat.

Namun persoalannya, pemerintah dan sejumlah fraksi di DPR RI seperti yang memiliki keinginan kuat untuk meneruskan RUU - RN menjadi Undang - Undang, sebelum masa tugas para wakil rakyat itu berakhir pada tahun 2009. Karena itu, jalan tengah yang sejatinya bisa dilakukan, agar Dewan Rahasia Negara tidak menjadi lembaga dominan pengkategorian rahasia negara di berbagai instansi pemerintah, maka keberadaan Komisi Informasi (KI), yang diatur dalam UU KIP sebagai lembaga regulator dan penyelesaian sengketa akses informasi, harus diberi peran dalam penetapan rahasia negara yang rentan terhadap persoalan korupsi.

Tentunya, dengan catatan, KI benar - benar independen dan merepresentasikan kemauan masyarakat terhadap check and balance kekuasaan. Sebab pada UU KIP sendiri, pola rekrutmen KI yang obyektif juga masih disangsikan, mengingat keterlibatan pemerintah cukup dominan didalamnya. Belum lagi jika bicara komposisi jumlah ideal, agar komisi mampu mengimbangi kekuatan pemerintah untuk menyimpan rahasia negara, tentu menjadi lebih pesimis untuk menciptakan masyarakat informasi yang anti korupsi.

Oleh sebab itu, pada tataran ideal, RUU Rahasia Negara lebih baik ditunda pembahasannya, dan biarkan UU KIP dijalankan lebih dahulu. Seandainya dalam pelaksanaannya, ternyata keterbukaan informasi menimbulkan masalah dalam kedaulatan, keutuhan dan mengganggu fungsi penyelenggaraan negara, maka RUU Rahasia Negara bisa dibahas kembali, dengan mengakomodasikan aneka persoalan yang tidak tertampung dalam UU No 14 Tahun 2008, tanpa mengabaikan keterbukaan informasi sebagai perangkat pemberantasan korupsi.

12. Rahasia Negara, KPK dan Komisi Informasi

(Suara Pembinaan, 14 November 2008)

Ketika tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan Komisi Pemberantasan Korupsi menguat, Dewan Perwakilan Rakyat justru berupaya untuk menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara (RUU RN), yang berpotensi menghambat pengungkapan penyalahgunaan keuangan negara.

Tentu saja antusiasme DPR itu memuat persepsi yang menghubungkan dengan "ketidaknyamanan" terhadap pola pemberitaan kasus korupsi anggota legislatif. Secara substansial KPK tidak menyalahi aturan sebab berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002, tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai lembaga negara yang bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun, memiliki keleluasaan dalam mencari dan menggunakan informasi untuk kepentingan pengungkapan kasus korupsi.

Berpijak kepada Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, juga secara tegas menyebutkan bahwa, asas penyelenggaraan negara berpijak kepada kepentingan umum dan keterbukaan. Dengan demikian, pengungkapan kasus korupsi secara terbuka oleh KPK berjalan linier dengan semangat transparansi dalam menjalankan pemerintahan.

Oleh sebab itu, menguatnya semangat untuk membahas kembali RUU RN, menimbulkan kekhawatiran akan munculnya kembali rezim ketertutupan yang memberikan berbagai keistimewaan kepada badan-badan publik dalam mengelola keuangan negara.

Berdasarkan maskah yang terdapat dalam RUU Rahasia Negara, instansi pemerintah memiliki sejumlah informasi dalam kategori rahasia negara. Jika informasi itu dibuka kepada publik, mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan. Padahal, jika merujuk kepada Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU-KIP), masalah rahasia negara sudah diatur secara komprehensif dalam informasi yang dikecualikan dan tidak tidak bisa diakses publik.

Namun persoalannya, dalam kemasan untuk kepentingan pertahanan nasional dan aneka dalih demi terpeliharanya Negara Kesatuan Republik

Indonesia, bisa saja keterbukaan informasi diabaikan, dan DPR lebih terfokus untuk melindungi rezim ketertutupan di berbagai entitas kekuasaan negara.

Padahal berdasarkan model pengelolaan informasi dalam bingkai "rahasia instansi" yang ditetapkan secara sepihak oleh badan-badan publik, membuka peluang untuk lebih bebas dalam menyalahgunakan kekuasaan yang berujung kepada penyelewengan keuangan negara, yang notabene harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Mencermati kekhawatiran itu, jika DPR memang berniat untuk membahas kembali RUU RN, maka selayaknya harus mempertimbangkan peran KPK dalam pemberantasan korupsi yang sangat bergantung terhadap keterbukaan informasi di badan-badan publik. Singkatnya, KPK harus dimasukkan sebagai anggota tetap dalam Dewan Rahasia Negara, bersama-sama dengan Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kominfo, Jaksa Agung, panglima TNI, Kepala Kepolisian RI, Kepala BIN, Kepala Arsip nasional RI dan Kepala Lembaga Sandi Negara.

Bahkan jika upaya Indonesia benar-benar mau membentuk masyarakat informasi yang menjunjung tinggi keterbukaan dan demokratisasi dalam bernegara, maka Komisi Informasi, yang dibentuk berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008, sebagai lembaga yang merepresentasikan kemauan rakyat terhadap transparansi dalam pengelolaan keuangan dan kegiatan lain yang menjadi tanggungjawab badan publik.

Masuknya dua entitas, yang kental dengan nuansa "anti korupsi" di Dewan Rahasia Negara, dimaksudkan agar pengkategorian informasi sebagai rahasia negara tidak melenceng menjadi upaya melindungi ketertutupan dalam pengelolaan informasi yang selama ini menjadi karakteristik badan publik. Eksistensi KPK dan KI dalam DRN, diharapkan bisa meminimalisir ketidakpercayaan rakyat terhadap RUU RN yang dinilai tidak berpihak kepada upaya pemberantasan korupsi.

Tentu saja dengan keyakinan bahwa KPK dan KI tetap independen dan bekerja untuk kepentingan umum, bukan sebaliknya, terperangkap dalam koneksi "mendukung kekuasaan" untuk menutup informasi badan-badan publik yang terlindung dibalik asas proporsionalitas dan aneka pengecualian dalam menjalankan tugas negara.

Jika semangat semacam itu yang muncul, maka peran KPK menjadi terganggu dan substansi keterbukaan informasi yang tertuang dalam UU No. 14 Tahun 2008 hanya dipakai sebagai pemanis dalam demokrasi integralistik yang ditafsirkan sepihak oleh hegemoni kelompok dominan dalam kekuasaan negara.

13. Rahasia Negara dan Keterbukaan Informasi

(Pikiran Rakyat, 27 Februari 2009)

Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara (RUU-RN) masih mengandung pasal krusial yang berpotensi menghambat pelaksanaan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Dalam naskah RUU-RN, terdapat pasal yang menyebutkan bahwa, pemilik rahasia negara memiliki wewenang untuk menentukan rahasia negara, dan menetapkan siapa saja yang berhak menggunakannya. Ketentuan ini didukung pula oleh peran Dewan Pertimbangan Kebijakan Rahasia Negara (DPKRN). Jelas ketentuan ini tidak sejalan dengan pasal 9 sampai 10, UU KIP, bahwa badan publik harus menyediakan informasi yang diberikan secara berkala, diumumkan secara serta merta dan informasi yang tersedia setiap saat.

Ketentuan dalam RUU-RN dapat diasumsikan, bahwa badan publik yang semula bisa tunduk terhadap UU KIP, untuk memberikan akses informasi kepada masyarakat, bisa saja menolak dengan alasan rahasia negara. Bahkan badan publik yang notabene lembaga negara bisa saja menolak penyidik dan atau hakim yang berupaya untuk mengetahui rahasia negara dalam proses pengadilan.

Dengan demikian, secara singkat dapat dikemukakan, UU KIP berupaya menciptakan masyarakat informasi dan menghendaki keterbukaan di semua sektor badan publik, tetapi sebaliknya RUU-RN justru menutup akses informasi terhadap badan-badan publik, dengan berbagai dalih yang pada intinya merujuk kepada lerganggunya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga pemerintahan. Sebab tidak bisa dipungkiri, bahwa dalam klaim sepihak yang dilontarkan institusi pemerintah, transparansi informasi identik dengan kritik masyarakat yang berpotensi mengganggu kinerja semua entitas yang menjadi sub-ordinat kekuasaan negara.

Oleh sebab itu, agar eksistensi demokrasi informasi tetap terjaga, maka rahasia negara harus metujuk kepada berbagai pasal yang mengatur pengecualian informasi publik dalam UU No. 14 tahun 2008. Namun persoalannya, UU Rahasia Negara memberikan mandat kepada BPKRN yang terdiri dari organ sub-ordinal kekuasaan negara, untuk menetapkan klasifikasi rahasia negara.

Dalam UU KIP, klasifikasi informasi yang bersifat rahasia, didasarkan pada pengujian dan dipertimbangkan dengan seksama, tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat, akan membahayakan kepentingan yang lebih besar lagi. Di pihak lain, UURN melalui DPKRN menetapkan rahasia negara dengan tolok ukur yang berbeda. Akibatnya bisa saja muncul konflik kelembagaan antara Komisi Informasi yang mengawal UU KIP, dan Badan Pertimbangan Kebijakan Rahasia Negara yang berupaya melindungi badan publik dalam bingkai rahasia negara. Misalnya, satu pihak menganggap informasi tertentu wajib dibuka kepada publik, tetapi di pihak lain menilai sebagai informasi rahasia. Tentu saja ketidaksinkronan diantara lembaga pemerintah ini akan menial kekecewaan dari rakyat.

Meskipun demikian, seandainya masyarakat sebagai pengguna informasi tidak puas, mereka bisa mengajukan kepada Komisi Informasi, sebagai lembaga independen yang dibentuk berdasarkan UU KIP untuk menangani konflik informasi. Namun, badan publik bisa saja minta bantuan kepada BPKRN agar meniadakan klasifikasi informasi yang diminta pengguna sebagai rahasia negara. Dengan kata lain, Komisi Informasi bisa saja berpihak kepada masyarakat pengguna informasi, sedangkan BPKRN justru melindungi pemilik rahasia negara, dalam hal ini badan publik. Alhasil, keterbukaan yang selama ini sudah bisa dinikmati masyarakat, dikhawatirkan akan menuai sejalan dengan menguatnya peraturan rahasia negara yang dominan.

Karena itu, agar ada keselarasan antara UU KIP dengan RUU Rahasia Negara, maka sebaiknya dalam pembentukan anggota tetap BPKRN sebagaimana yang tampak dalam naskah RUU-RN pasal 22, yang terdiri dari Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Kepala POLRI, Panglima TNI, Kepala BIN, Kepala Lembaga Sandi Negara, sedapat mungkin memasukkan Komisi Informasi sebagai perwakilan publik dalam menetapkan rahasia negara.

Namun seperti itu, skenario itu sulit untuk diwujudkan, mengingat semangat yang terdapat dalam RUU Rahasia Negara, justru menempatkan badan publik, yang sesungguhnya sudah tunduk terhadap transparansi

informasi dalam UU Keterbukaan Informasi Publik, kembali menjadi lembaga negara yang memiliki hak – hak istimewa dalam menentukan dan mengelola rahasia negara. Akibatnya, keterbukaan informasi pun dikhawatirkan akan memudar, dan diganti oleh hegemoni ketertutupan informasi.

14. Demokratisasi Informasi dan Transaksi Elektronik

(Media Indonesia, 1 April 2009)

Undang – Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menjamin transparansi dan demokratisasi informasi, dikhawatirkan tidak akan bermanfaat banyak ketika dihadapkan pada eksistensi Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Terlepas dari ketentuan yang dinilai menghambat kebebasan pers, sesungguhnya UU ITE masih memiliki pasal krusial lain yang cenderung tidak berjalan linier dengan semangat keterbukaan. Dalam pasal 40 ayat (3) UU ITE ditegaskan, "pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi". Ketentuan tentang data elektronik strategis, bisa saja tidak sekadar, lembaga atau instansi pemerintah itu wajib membuat dokumen elektronik dan rekam cadang elektroniknya untuk pengamanan data agar tidak hilang, tetapi dikhawatirkan yang cenderung ditonjolkan adalah, sifat atau substansi informasi yang tidak bisa diakses oleh publik, karena alasan data "strategis" dengan penafsiran integralistik atau secara sepihak untuk kepentingan badan publik maupun instansi pemerintah.

Bisa saja data strategis menyangkut tugas pokok dan fungsi, informasi anggaran negara, sumber daya manusia, dan berbagai informasi lain yang jika dibuka, akan memudahkan masyarakat untuk mengkritisi kinerja instansi pemerintah sebagai sub-ordinat kekuasaan negara. Padahal, institusi pemerintah dinilai tidak terbiasa untuk menerima kritik dari rakyat, sebab sudah terlampau lama menikmati hak istimewa terhadap penguasaan dan pengendalian informasi sesuai dengan kepentingannya.

Sebenarnya, jika mencermati UU KIP, badan publik ataupun institusi pemerintah memiliki kewajiban untuk mengumumkan informasi publik secara berkala, mengumumkan secara serta merta dan menyedukan informasi publik setiap saat kepada masyarakat ataupun pengguna informasi. Karena

itu, sendainya instansi pemerintah menggunakan UU ITE untuk menutup akses informasi tertentu, dengan alasan sebagai informasi elektronik strategis yang wajib dilindungi, maka alasan tersebut tidak sejalan dengan UU KIP yang sudah mengatur secara terinci, terhadap informasi publik yang dikecualikan, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 17 sampai dengan pasal 20 dan sejumlah ketentuan lain yang mendukung pengecualian informasi publik.

Pasal – pasal tersebut tersebut pada prinsipnya menandakan bahwa, informasi yang dikecualikan adalah informasi publik jika dibuka kepada pengguna ataupun masyarakat pada umumnya, akan menghambat proses penegakan hukum, mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, serta perkecualian lain yang merugikan badan publik maupun individu tertentu. Klasifikasi informasi yang bersifat rahasia, dalam UU KIP harus ditetapkan melalui pengujian, dan dipertimbangkan secara seksama tentang konsekuensi yang timbul, apabila suatu informasi dibuka kepada publik akan mengganggu kepentingan yang lebih besar lagi.

Di pihak lain, instansi pemerintah bisa saja menutup akses informasi, yang sesungguhnya bukan dalam klasifikasi rahasia negara, dengan berlindung dibalik ketentuan "informasi strategis" yang wajib dilindungi sebagaimana tercantum dalam UU ITE. Secara esensial, ada potensi munculnya penafsiran berbeda, antara informasi/rahasia versi UU KIP, dan data elektronik strategis yang wajib dilindungi versi UU ITE.

Jika terdapat perbedaan penafsiran menyangkut kriteria informasi, maka pengguna informasi dapat melaporkan kepada Komisi Informasi sebagai lembaga mandiri yang dibentuk berdasarkan UU KIP, memiliki fungsi menjalankan keterbukaan informasi dan bertugas menyelesaikan sengketa informasi dengan jalan mediasi dan/ atau adjudikasi nonlitigasi. Namun persoalannya, tidak bisa diabaikan, ada kecenderungan jika menyangkut persoalan rahasia negara, ataupun informasi strategis yang wajib dilindungi, Komisi Informasi disinyalir tidak akan mampu berhadapan dengan lembaga pemerintah yang memiliki kekuasaan karsial terhadap rakyat maupun pengguna informasi pada umumnya.

Oleh sebab itu, agar eksistensi UU KIP tetap terjaga, maka sudah selayaknya jika pemerintah dengan pijakan UU ITE, dalam menetapkan informasi strategis yang berstatus "rahasia negara", tetap merujuk kepada pasal – pasal

UU KIP yang sudah mengatur rahasia negara dalam bingkai informasi yang dikeluarkan.

Selain itu, demi untuk menjaga keselarasan dalam menciptakan masyarakat informasi sebagai salah satu upaya untuk mendukung tercapainya good governance, sejatinya Komisi Informasi memiliki peran yang memadai dalam peraturan pemerintah dan aneka petunjuk teknis yang mendukung UU ITE. Dalam arti, Komisi Informasi sebagai perwakilan publik, harus ikut serta dalam menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi. Tujuannya, agar tidak ada penafsiran berbeda antara pemerintah yang berpegang kepada UU ITE, dan Komisi Informasi yang membawa amanat UU KIP dalam menetapkan rahasia negara dari sudut pandang lembaga pemilik informasi strategis, maupun substansi informasi yang dianggap strategis dalam koridor rahasia negara.

Namun persoalannya, ketika dua Undang-Undang tersebut terperangkap dalam dua kutub kepentingan berbeda, yang satu berpihak kepada pengguna informasi dan lainnya lebih tunduk terhadap kekuatan organ-organ kekuasaan negara dalam melindungi data strategis sebagai dalih menutup akses informasi, maka sepertinya sulit untuk mensinkronkan antara Komisi Informasi dan pemerintah sebagai pemilik informasi yang dipertmasalahkan.

Alhasil Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, yang diharapkan mampu mengawal semangat transparansi di dalam kehidupan bernegara, akan diposisikan hanya sebagai pemantas dalam demokrasi, karena eksistensinya terperangkap oleh jerat ketertutupan, yang dilindungi oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bab 8

IKLAN POLITIK DAN PENCITRAAN

1. Membaca Hasil Jajak Pendapat

(Kompas, 9 Agustus 2005)

Hasil jajak pendapat yang ditulis Kompas pada 25 Juli 2005 yang intinya bahwa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih sangat populer di mata rakyat, ditanggapi dengan sukacita oleh Andi Mallarangeng selaku Juru Bicara Presiden.

Membaca hasil jajak pendapat tidak sebatas melihat data kuantitatif yang dipaparkan secara sepenggal-sepenggal, tidak terintegrasi. Menelaah data primer memerlukan kejernihan pemikiran yang bebas nilai, dalam artian dalam benak kita tidak boleh ada persepsi terhadap persoalan yang diteliti terlebih dahulu. Ini merupakan sesuatu yang mutlak dalam penelitian ilmiah, terkhusus terhadap model penelitian yang sifatnya pesanan untuk menjalankan kebijakan publik ataupun memengaruhi konsumen. Dalam lingkup akademis, penelitian ilmiah pesanan sering dikatakan sebagai penelitian pelat merah ataupun penelitian berbasis pihi.

Menarik apa yang dieksplorasi oleh Andi Mallarangeng dari hasil jajak pendapat mengomparasikan popularitas Presiden SBY dengan dua presiden sebelumnya dalam menangani masalah (1) pemerintahan, (2) politik dan keamanan, (3) kesejahteraan sosial, serta (4) hukum. Penilaian responden dalam masa pemerintahan Presiden SBY selama sembilan bulan dibandingkan dengan dua presiden terdahulu adalah Presiden SBY memperoleh 77,5%, 78,6%, 81,9%, dan 82,3%, Presiden Megawati Soekarnoputri dengan nilai 58,0%, 63,1%, 60,2%, dan 57,7%, sedangkan Presiden Abdurrahman Wahid mendapatkan angka 52,0%, 54,2%, 52,6%, dan 54%. Angka-angka itu menunjukkan Presiden

SBY jauh mengungguli dua presiden pendahulunya. Persentase itu adalah keyakinan responden, sebatas tingkat kepercayaan bahwa pemerintah mampu mengatasi masalah-masalah di atas tanpa mengaitkan dengan hasil.

Ternyata tingkat popularitas yang tinggi memang tidak berjalan seiring secara signifikan dengan tingkat kepuasan kinerja pemerintah dalam memperbaiki perekonomian Indonesia secara makro yang dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Hasil jajak pendapat menggambarkan bahwa kepuasan responden dalam masa pemerintahan sembilan bulan adalah, untuk responden pemilih SBY adalah 52%, sedangkan responden bukan pemilih SBY sebesar 29,1%. Angka ini tertinggi dibandingkan dengan masa pemerintahan tiga bulan dan enam bulan yang dilaluinya.

Jelas di sini bahwa masyarakat masih sebatas mengharapkan dengan mengekspresikan dalam keyakinan, sementara kepuasan kinerja pemerintah faktual, bukan sebatas harapan. Dalam konteks inilah selayaknya Andi Mallarangeng bisa menafsirkan dengan baik sehingga selaku Juru Bicara Presiden dia tidak terjebak pada representasi popularitas belaka.

Cenderung menurun

Fakta lain yang juga tidak dihiraukan oleh Andi Mallarangeng adalah tingkat kepuasan responden terhadap kinerja SBY. Data kuantitatif menunjukkan bahwa tingkat kepuasan responden pemilih SBY maupun bukan pemilih SBY cenderung mengalami penurunan yang berkelanjutan sejak masa pemerintahan tiga bulan, enam bulan, sampai sembilan bulan, kecuali masalah hukum yang naik 0,4% di lingkungan pemilih SBY dan 1,9% yang diekspresikan oleh bukan pemilih SBY dalam masa pemerintahan tiga bulan sampai enam bulan. Namun itu tidak berlangsung lama, sebab memasuki sembilan bulan pendapat responden kembali menitik sangat tajam.

Secara sederhana kita dapat mengaitkan masa sembilan bulan pemerintahan Presiden SBY dalam tingkat popularitas dengan tingkat kepuasan adalah sebagai berikut. Keyakinan dalam mengatasi persoalan ekonomi adalah 77,5%, tetapi kepuasan responden pemilih SBY terhadap masalah ini hanya 57%, bukan pemilih SBY 29,1%. Masalah politik dan keamanan dengan tingkat keyakinan 78%, yang merasa puas terhadap kinerja pemerintahan dalam persoalan ini, di lingkungan pemilih SBY adalah 68,8%, bukan pemilih SBY 48,0%.

Selanjutnya keyakinan kemampuan Presiden SBY dalam masalah hukum adalah 82,3%, namun pemilih SBY yang merasa puas hanya 69,2% dan bukan

pemilih SBY sebatas 50,9%. Bidang lain yaitu kesejahteraan sosial, dengan tingkat harapan dan keyakinan 78,6%, namun tingkat kepuasan adalah 57,5% dikemukakan oleh pemilih SBY dan 38,3% yang diungkapkan oleh bukan pemilih SBY.

Menelaah jajak pendapat tentang popularitas Presiden SBY seyogianya tidak sekadar mengomparasikan dua presiden terdahulu yang proses terpilihnya tidak semulus dalam pemilihan presiden langsung. Membandingkan keyakinan terhadap kemampuan Presiden SBY mestinya diikuti pula dengan menelaah secara historis kinerja pemerintahan dalam mencapai hasil yang secara signifikan sangat diharapkan masyarakat. Menganalisis atau secara sederhana membaca jajak pendapat dalam paradigma penelitian ilmiah harus merujuk apakah jawaban responden konsisten dengan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan lain. Dengan demikian, tidak hanya mengategorikan saja tetapi lebih baik jika dikaitkan dengan analisis data berkesinambungan (*continuous measures*).

Prinsip yang harus diperhatikan dari jajak pendapat tersebut adalah antara harapan dan kenyataan. Terdapat perbedaan mencolok yang harus disikapi oleh Andi Mallarangeng dengan berpikir komprehensif dan lebih cermat lagi. Walaupun Juru Bicara Presiden itu telah mengemukakan tidak boleh terbuai oleh hasil jajak pendapat tentang popularitas Presiden SBY, tetapi substansinya sangat relatif penuh dengan kata-kata bijak sehingga terkesan tidak menghiraukan janji kampanye yang telanjur masuk dalam memori rakyat.

Mestinya cermin yang paling terang adalah dengan menggarisbawahi antara tingkat keyakinan yang di dalamnya ada harapan masyarakat dan kenyataan yang dihadapi terhadap kinerja pemerintah. Selisih antara harapan dan kenyataan tersebut memiliki kecenderungan yang semakin melebar. Kepuasan terhadap kinerja pemerintahan SBY yang diekspresikan oleh pemilih SBY maupun bukan pemilih SBY cenderung mengalami penurunan, jika pun mengalami kenaikan sebagaimana masalah perekonomian dan penegakan hukum hanya dalam kisaran yang sangat kecil dibandingkan hasil maksimal kepuasan responden pada masa-masa pemerintahan SBY sebelumnya.

Jika harapan dan kenyataan tidak menjadi pelajaran yang berharga dan lebih menyukai dan berasyik masuk untuk membandingkan dengan pemerintahan Abdurrahman Wahid maupun Megawati Soekarnoputri, tidak tertutup kemungkinan jajak pendapat berikutnya akan semakin mengalami kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang diekspresikan oleh responden.

Tentunya amat disayangkan apabila modal dasar keyakinan terhadap kemampuan Presiden SBY yang sangat tinggi tidak diimbangi dengan kemampuan menghasilkan kesejahteraan sosial, ekonomi, politik, dan keamanan, serta penegakan hukum.

2. Iklan Puas Diri Mendagri

(Kompas, 22 Desember 2005)

Sepertinya tiada henti, Menteri Dalam Negeri Moh Maruf terus memasang iklan institusi Departemen Dalam Negeri. Isinya, keberhasilan pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan sejak Juni 2005.

Dengan bangga dipaparkan grafik yang menunjukkan 92 persen pilkada berjalan lancar dan tertib, sedangkan yang bermasalah hanya delapan persen. Jumlah yang amat kecil dan memberi harapan tumbuhnya demokratisasi dalam pemilihan kepala daerah langsung.

Disertai pesan "mari kita tingkatkan kualitas pilkada agar lebih banyak lagi wilayah yang menyambut kepala daerah terpilih dengan damai", serasa pemilihan kepala daerah tidak memiliki persoalan berarti bagi pemerintah. Sepintas pemaparan keberhasilan pilkada sepanjang tahun 2005 amat menenteramkan masyarakat yang semula khawatir terhadap terjadinya konflik horizontal.

Golput

Terlepas dari klaim keberhasilan pilkada, betapa terkejutnya saya saat membaca persentase golongan putih (golput) sebesar 31,3 persen dalam pilkada tahun 2005 (Kompas, 15/12/2005). Angka terbesar sepanjang sejarah pemilu di Indonesia, jauh lebih banyak dari perkara pemerintah yang berspekulasi dengan mematok jumlah golput dalam pilkada akan rendah.

Golput, sebagai nonpartisipan, tidak memiliki kekuatan berarti dalam legitimasi atau persentase jumlah suara pemilih. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005, pengesahan hasil pilkada tidak menentukan persyaratan persentase jumlah pemilih yang menggunakan haknya. Namun, aspek legal berbeda dengan tinjauan politis sebab tidak maksimalnya jumlah pemilih pada pilkada akan berpengaruh terhadap legitimasi politik kepala daerah terpilih dalam menjalankan kekuasaannya.

Penyelenggaraan pilkada, sebagaimana dalam iklan institusi Depdagri, semestinya keberhasilannya tidak hanya diukur dari bermasalah atau lancar dan tertib saja. Kriteria ini mengesankan jargon politik yang mengedepankan stabilitas keamanan sebagai tolok ukur kegiatan pemerintahan dan negara. Esensinya pilkada berjalan lancar, tetapi dalam situasi dingin dan kurang bergairah karena rendahnya partisipasi masyarakat.

Negara maju

Secara komprehensif, keberhasilan pilkada harus merujuk sejauh mana keterlibatan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam situasi demokratis tanpa tekanan mana pun. Karena itu, sayang jika pemilih terdaftar yang hanya bisa memengaruhi pemerintah lewat pemilu, tidak menggunakan kesempatan itu.

Meski demikian, keikutsertaan dalam pilkada bukan mobilisasi massa atau tindakan memaksa masyarakat melalui berbagai upaya agar berbondong-bondong memilih calon kepala daerah yang tidak dikenal. Pada hakikatnya, kata kunci yang melekat dalam pilkada adalah partisipasi konsisten sebagai bentuk keterlibatan mental dan emosi konstituen terhadap calon kepala daerah yang dipilih langsung.

Jumlah golput yang tinggi pada pilkada tahun 2005 seyogyanya tidak dipakai sebagai dalih bahwa di beberapa negara maju golput juga mendominasi pemilu. Selanjutnya kita mematuhi-matuhi diri, demokratisasi di Indonesia tumbuh subur seraya merujuk tingginya angka golput di negara maju. Bagaimanapun juga, golput dalam bahasan apatis, skeptis, dan akumulasi kekecewaan tidak dapat dibandingkan dengan perilaku pemilih golput negara maju yang cenderung mengantukan kalkulasi ekonomi. Karena itu, amat wajar jika institusi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pilkada harus mampu meminimalkan jumlah golput tahun 2006, setidaknya lebih kecil dari 31,3 persen dilatung dari jumlah pemilih terdaftar.

Masalahnya tidak mudah menekan angka golput sebab sumber alasan tidak mau ikut memilih pilkada terkait sikap masyarakat yang tidak percaya bahwa "pilkada akan menghasilkan kesejahteraan yang lebih nyata bisa dinikmati". Terlebih, pilkada yang dikemas dalam kubu partai. Kurangnya perhatian partai politik di pusat atau daerah terhadap berbagai masalah krusial masyarakat memberi kontribusi amat besar untuk bersikap golput dalam pilkada.

Berdasar hasil polling (Kompas, 26/9/2005), citra partai politik di mata responden umumnya amat buruk, tidak ada partai politik yang memiliki citra baik dan memperoleh nilai 60 persen. Angka tertinggi, 55,6 persen, hanya dicapai satu partai.

Saat ini, seiring bertambahnya masalah di masyarakat, bukan mustahil jika tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik akan kian turun dan memengaruhi jumlah golput pada pilkada tahun 2006.

Guna menciptakan dinamika yang konstruktif sekaligus menekan jumlah golput pada pilkada tahun 2006, bukan hal yang salah jika isi pesan iklan layanan masyarakat Depdagri diganti secara berkala dengan menyetengahkan aneka macam pesan. Keberagaman pesan pilkada yang dikemas tanpa prasangka akan membuka pikiran masyarakat bahwa kehidupan bernegara harus selalu dikembangkan ke arah lebih baik.

Imbauan

Seperti harapan Mendagri, untuk meningkatkan kualitas pilkada, sebaiknya pesan layanan masyarakat yang dimuat bertubi-tubi di berbagai media itu menyertakan berbagai imbauan kepada masyarakat guna berpartisipasi menentukan pilihan kepala daerahnya sesuai dengan nurani. Seruan itu minimal memberi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah untuk bersikap netral dan tidak larut dalam cermin buram partai politik.

Sebaliknya dengan satu pesan monoton, sumber pesan Depdagri kehilangan banyak kesempatan memberi pembelajaran tentang demokratisasi pilkada. Dalam perspektif komunikasi, pesan yang disampaikan berulang-ulang akan menghasilkan kejenuhan informasi. Dengan kata lain, pesan-pesan yang diterima khalayak tidak lagi dapat diproses menjadi sesuatu yang bermanfaat.

3. Sentimen Anti Amerika

(Ringkasan tulisan ini dimuat di Harian Sepuluh Indonesia, 14 April 2006)

Pendahuluan

Dalam kaitannya dengan kedatangan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Condoleezza Rice ke Indonesia, Lembaga Survei Indonesia (LSI) memaparkan hasil survei tentang Sentimen Anti-Amerika tahun 2003 sampai dengan tahun 2006.

Pada prinsipnya, hasilnya yang dipaparkan oleh LSI sangat positif untuk memberikan dukungan terhadap peran Amerika Serikat dalam dinamika politik internasional. Terlebih lagi, pada saat negara adidaya itu dalam sorotan tajam masyarakat dunia yang tidak menyukai keterlibatan Amerika Serikat di Irak.

Namun, jika mencermati lebih teliti, maka sikap masyarakat Indonesia, tidak sepenuhnya ekspresi natural yang berlandaskan kepada prinsip individual yang kuat. Sebab, ada kecenderungan bahwa penilaian mereka terhadap negeri Paman Sam dipengaruhi oleh faktor dinamika politik yang ada disekelilingnya. Karena itu, masyarakat Indonesia masih terikat oleh jarak kekuasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bisa saja tidak mau mengungkapkan sikap politik yang sesungguhnya ketika menghadapi petugas survei.

Jarak kekuasaan merupakan ketidaksederajatan dalam struktur masyarakat. Menurut Geert Hofstede (dalam Mulyana dan Rakhmat, 2006 : 193), jarak kekuasaan memiliki implikasi, antara lain dalam paternalisme atau bapakisme, yang menghasilkan perbedaan kekuasaan antara orang tua dan anak-anak, perbedaan kekuasaan diwujudkan dalam perbedaan status, orang lebih mengunggulkan siapa orang itu (*ascribed status*) daripada apa yang telah dicapai (*achieved status*).

Hasil Survei Sentimen Anti Amerika

Hasil survei yang dilakukan oleh The Pew Research Center, menunjukkan bahwa sentimen anti Amerika yang diungkapkan oleh masyarakat Indonesia mencapai 83 % pada tahun 2003, menurut LSI sebagai angka tertinggi dalam survei lima tahun terakhir. Sentimen anti-Amerika pada tahun tersebut, yang mencapai puncaknya di Indonesia, sedikit – tidaknya dipicu oleh gencarnya opini internasional tentang kampanye anti perang Irak, yang bukan hanya dilakukan oleh negara – negara periperal, tetapi juga di dukung oleh negara – negara sentral (negara maju). Intinya, perang Irak dianggap sebagai buah kelalaian Amerika Serikat yang menelan banyak korban jiwa. Perang itu juga dinilai tidak sejalan dengan Hak Azasi manusia. Padahal Presiden Roosevelt pada tahun 1941, sudah merumuskan *The Four Freedoms*, yaitu Kebebasan untuk berbicara dan mengemukakan pendapat (*freedom of speech*), kebebasan beragama (*freedom of religion*), kebebasan dari ketakutan (*freedom from fear*), dan kebebasan dari kemiskinan (*freedom from want*).

Walaupun opini politik internasional masih saja memposisikan Amerika sebagai sumber masalah di Irak, tetapi meningkatnya hubungan bilateral Indonesia-Amerika yang semakin kohesi di era Presiden SBY, membawa implikasi terhadap pengungkapan sentimen anti Amerika.

Hasil survei the Pew Research Center yang berpusat di Amerika, menunjukkan bahwa pada bulan Mei tahun 2005, persepsi masyarakat yang anti Amerika bergeser secara signifikan dan mencapai kisaran angka sebesar 87 % atau berkurang sekitar 26 % dari tahun 2003. Bahkan data terakhir yang dilansir (mungkin kali awal tahun 2006), sentimen anti Amerika yang dielapsikan masyarakat Indonesia semakin menurun, hanya 41 % saja. Artinya turun lebih 50 % dari angka tertinggi yang terjadi pada survey tahun 2003. Perkembangan yang luar biasa, apabila ekspresi publik dalam survey tersebut memang dilakukan benar-benar bebas nilai, dalam artian tidak ada faktor yang menekan untuk mempengaruhi pilihan publik.

Jika dikaji lebih rinci, ternyata apresiasi masyarakat terhadap peran politik Amerika Serikat di Indonesia yang melumut tidak terlepas dari konteks situasi sosial politik nasional. Ketika pemerintah Indonesia gencar menyuarakan anti terorisme, opini publik nasional bereaksi keras terhadap bom bunuh diri dan tewasnya Dr. Azhari merupakan faktor pemicu bergesernya sentimen Anti Amerika di Indonesia. Sufi untuk disangkal bahwa persoalan terorisme dimunculkan berada, termasuk di Indonesia selalu bersentuhan dengan keterlibatan Amerika yang lantang menyuarakan anti terorisme (tentu dengan segala kelemahan yang selalu menimbulkan pro dan kontra). Kesimpulan sederhana adalah ketika pemerintah, elite politik, pemuka pendapat dan sejumlah elemen masyarakat beramai-ramai menyerukan perang melawan terorisme, maka disitu muncul pertautan yang erat antara masyarakat Indonesia dengan eksistensi Amerika. Dalam formulasi lain, yang menuju ke asumsi publik adalah, kebijakan pemerintah Indonesia lebih merapat kepada Amerika, walaupun sebatas pada persoalan anti terorisme.

Barangkali tidak ada masalah yang perlu diulas atau sehalilnya dibanggakan dari presentase angka-angka hasil survey, namun survey opini publik global yang menyangkut sentimen negatif masyarakat Indonesia terhadap Amerika Serikat, menyisakan sejumlah pertanyaan yang menggelitik pikiran. Intinya: apakah masyarakat atau responden bisa dengan bebas mengungkapkan sikapnya secara spontan.

Sebab dalam tujuan historis dan pengalaman empirik di Indonesia, dimana hegemoni negara terhadap rakyatnya sedemikian kuatnya, maka

hasil survey sentimen Anti-Amerika menyisakan pertanyaan metodologis terkait proses penelitian di lapangan, yaitu apakah masyarakat mau berterang-terang mengungkapkan ketidaksukaannya ketika relasi politik-ekonomi antara Indonesia-Amerika sedemikian kohesi.

Karena memberikan penilaian negatif terhadap peran Amerika di Indonesia sama saja dengan mempersepsikan kebijakan negara yang tidak disukai. Padahal menilai pemerintah bukan pekerjaan yang mudah bagi kelompok masyarakat tertentu, apalagi ketika mereka berhadapan dengan atribut ataupun simbol-simbol tidak familiar, misalnya keberadaan peneliti yang kurang dikenal atau malahan asing bagi publik.

Asumsi Kendala Penelitian

Membaca sebuah jajak pendapat yang dilakukan oleh media massa tentang politik, ekonomi dan bidang lainnya sepanjang tahun 2005, memang enak tanpa harus menelusuri beragam berita sebelumnya. Kita akan disuguhkan gambaran ringar, mudah dicerna namun tetap memiliki bobot yang signifikan untuk memperoleh fenomena terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan negara.

Ada berbagai ragam jajak pendapat, yang diulas panjang lebar, tetapi menghasilkan sejumlah boxar pertanyaan yang menggelitik pikiran, terutama yang terikat oleh peran pemerintah. Ada asumsi bahwa responden masih terkendala oleh belenggu kekuasaan negara yang sangat kuat, bahkan bisa saja menakutkan bagi masyarakat, untuk secara terbuka mengungkapkan pendapatnya.

Mengutip Jajak Pendapat Kompas (26 Desember 2006), tentang keyakinan terhadap perilaku elite politik, yang lebih baik pada tahun 2006 dibandingkan tahun 2005. Dari sepuluh kota besar yang menjadi sampel jajak pendapat, 50 % atau pada lima kota, tiga berada di Pulau Jawa dan dua terdapat di Sulawesi serta Papua mengungkapkan "ketidakkeyakinannya" bahwa perilaku elite politik akan lebih baik.

Bandingkan dengan pertanyaan lain yang mengemukakan "yakin atau tidak yakinkah anda, pada tahun 2006 kondisi perpolitikan di Indonesia akan lebih baik". Jawaban yang diperoleh dari responden adalah harapan yang melambung tinggi dari sepuluh kota besar di Indonesia, tanpa pengecualian, semuanya mengungkapkan keyakinannya tentang kondisi politik tahun 2006

yang lebih baik. Bahkan responden dari Banjarmasin memiliki optimisme yang luar biasa besarnya dengan tingkat keyakinan mencapai 90,5 persen. Sebab, domain perpolitikan bisa jadi dipahami kerja pemerintah, jadi apa boleh buat, responden pun memberikan apresiasi yang sangat tinggi.

Barangkali tidak ada masalah yang perlu dirisankan dari hasil itu, tetapi jika ditelaah lebih rinci, dan dikaitkan dengan aspek historis tentang hegemoni komunikasi politik negara terhadap rakyatnya, maka akan muncul sederetan asumsi, bahkan prasangka (*prejudice*) terhadap perilaku responden yang tidak berdaya ketika harus menilai pemerintah. Betapa sulitnya untuk mengungkapkan dengan "sumbang" keterlibatan kekuasaan negara secara negatif. Namun sebaliknya, di satu sisi, masyarakat cenderung lebih bebas mengekspresikan pendapatnya, ketika yang menjadi obyek pertanyaan adalah individu atau sekelompok orang yang ada dalam ikatan institusi partai politik.

Secara umum dapat ditegaskan, bahwa menilai elite politik adalah hak individual yang tidak terkait dengan jarak kekuasaan, sehingga responden lebih bebas untuk mengekspresikannya penilaiannya. Sedangkan menanggapi, sedangkan menanggapi perpolitikan secara makro, termasuk menilai hubungan Indonesia - Amerika Serikat, dapat dianalogikan dengan mempersepsikan kebijakan pemerintah yang memiliki fungsi mengikat terhadap rakyatnya. Dalam artian, rakyat harus tunduk untuk mengikuti keamuan pemerintah.

Jajak pendapat yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga survei, tentu saja diketahui oleh responden, karena umumnya dilakukan secara langsung dengan menggunakan metode pencuplikan sistematis berdasarkan buku telepon. Dengan demikian, sangat mungkin bahwa jawaban responden yang menilai pemerintah cenderung "mencari aman" dan responden juga masih terpengaruh oleh trauma kedigdayaan penguasa masa lalu yang tidak suka penilaian negatif.

Contoh lain, apresiasi responden ketika menanggapi kebijakan pemerintah yang muncul dalam beberapa jajak pendapat di Harian Kompas, menunjukkan angka yang mengunggulkan aparat atau penyelenggara negara. Bahkan citra marut industri perikanan (Kompas, 20 Desember 2005), dengan pengebangan liar maupun ditangkap dengan optimisme 55 persen responden di sepuluh kota besar di Indonesia berpendapat, bahwa pemerintah serius dalam menindak perusak lingkungan di daerahnya dan hanya 34 persen yang menjawab tidak serius.

Masih dalam Kompas (20 Desember 2005), soal pengungsi di Poso Sulawesi Tengah, responden yang merasa puas terhadap kinerja pemerintah dalam menangani pengungsi mencapai 47,6 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang merasa tidak puas hanya memperoleh 36,9 persen. (Dalam perkembangannya, ini memang terbukti, bahwa masalah Poso dapat diatasi oleh pemerintah). Jawaban senada dari responden tampak pula dalam Jajak Pendapat tentang terorisme, dengan pertanyaan "puas atau tidakkah anda dengan upaya pemerintah daerah anda, dalam mencegah tindakan terorisme di daerah anda", sejumlah 66,6 persen mengekspresikan kepuasannya, sementara yang tidak puas hanya dalam kisaran 26,1 persen. (Kompas, 20 Desember 2005). Jajak Pendapat lain dengan topik yang berbeda di Kompas, umumnya menghasilkan angka - angka yang cenderung sama ketika menilai kebijakan pemerintah dan mengekspresikan citra institusi di luar pemerintahan.

Secara esensial, jika ternyata jawaban yang bernada memuji kebijakan pemerintah tersebut lekat dengan unsur kekhawatiran negara sebagai institusi yang paling berhak melakukan "coercion" terhadap rakyatnya, maka keterandalan jawaban responden menjadi kajian yang menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut dengan pendekatan yang berbeda.

Dalam Kutub Pendapat Mayoritas

Berpijak kepada asumsi kendala penelitian, yang sangat mungkin menghasilkan ekspresi responden yang terperangkap oleh peran kekuasaan negara yang sedemikian kuat, maka survei tentang Sentimen Anti Amerika, yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia, bukannya tidak mungkin dipengaruhi pula oleh jarak kekuasaan yang melekat pada responden. Dalam perspektif metodologi riset, eksistensi kekuasaan negara bisa menjadi salah satu pemicu keberreaksian (*reactivity*) dalam pengumpulan data suatu penelitian. Keberreaksian ini dikenal pula sebagai Hawthorne effect. Sebutan ini diambil dari studi Hawthorne Plant of The Western Electric Company di Chicago, dimana keadaan keberreaksian tersebut ditemukan (Marrisse Male dan Trisnoningtiis, 1994:25). Dalam studi tersebut orang - morang yang menjadi obyek penelitian studi, sadar terhadap kehadiran peneliti di lingkungan mereka.

Dikaitkan pada konteks survei anti Amerika, bisa saja responden tidak mau mengungkapkan berperilaku sewajarnya karena pertimbangan yang sangat kompleks menyangkut kepentingan sendiri ataupun kelompoknya. Survei yang mengeksplorasi sentimen Anti-Amerika, besar kemungkinan diketahui oleh mereka yang dijadikan sampel penelitian, dengan demikian,

jawaban mereka sebagai responden ketika menilai Amerika, memiliki potensi untuk terperangkap dalam "kebijakan pemerintah Indonesia", artinya apresiasi masyarakat ketika menilai Amerika cenderung "mencari aman" karena terpengaruh oleh persepsi terhadap jarak kekuasaan. ditambah lagi dengan fakta politik pengalaman masa lalu, bahwa kekuasaan negara alergi terhadap kritik dan perbedaan pendapat yang muncul di masyarakat.

Penutup

Jika faktor keberaksian tampak menggejala dalam pelaksanaan penelitian sentimen Anti-Amerika di Indonesia, maka yang paling memungkinkan dan dianggap ideal adalah dilakukannya penelitian lanjutan melalui pendekatan metodologi yang berbeda. Rasanya lebih ideal jika penelitian yang diselenggarakan di Indonesia juga diseimbangkan dengan menggali sisi kualitatif melalui pengamatan langsung dengan model *indepth interview* di lapangan.

Pola ini akan memberikan peluang untuk memperoleh informasi faktual dari masyarakat yang tidak bias oleh jarak kekuasaan. Dengan demikian, release terhadap hasil penelitian di media massa ataupun pemaparan dalam diskusi maupun berbagai seminar tidak sekedar berfokus pada grafik turun naiknya persepsi publik terhadap sentimen anti Amerika, tetapi dalam babasan komprehensif yang mampu menggambarkan sebuah peta karakteristik sikap masyarakat Indonesia terhadap Amerika.

Dalam perspektif aplikatif, tidak ada yang salah dengan model positivistik yang menggunakan prosentase dari survey sentimen Anti-Amerika di Indonesia, tetapi mungkin saja angka-angka tersebut belum sepenuhnya itapat merepresentasikan fakta sosial yang sesungguhnya. Meski demikian, lepas dari aspek metodologis yang terpenting adalah apakah hasil penelitian tersebut bisa memberikan pemahaman yang lebih sederhana dari sejumlah masalah yang teramat rumit untuk diuraikan satu per satu.

4. "Polling" Pilkada dalam RUU Pemilu

(Suara Pembaruan, 5 Oktober 2006)

Sejalan dengan kebebasan informasi, salah satu fenomena yang menonjol dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung adalah keterlibatan berbagai lembaga penyelenggara polling yang menyemarakkan

dinamika politik lokal dengan memaparkan serangkaian prediksi perolehan suara kandidat kepala daerah melalui media massa.

Mengingat keberadaan polling sudah seperti kebutuhan pokok dalam ritual pemungutan suara, maka sudah sebayaknya jika Panitia Khusus (Pansus) Penyelenggaraan Pemilu dan Pemerintah memasukkan substansi polling yang dapat dipakai sebagai rujukan pilkada.

Eksistensi pemaparan hasil jajak pendapat oleh institusi penyelenggara polling, jauh lebih potensial untuk diikuti masyarakat, dibandingkan dengan kampanye. Dalam formulasi yang faktual di beberapa daerah penyelenggara pilkada, juru kampanye partai politik dari pasangan kandidat kepala daerah harus berjuang keras untuk menghadapi kandidat unggulan versi polling.

Lembaga-lembaga penyelenggara jajak pendapat memang bebas untuk mempublikasikan serangkaian perlakuan hasil pemungutan suara, tanpa harus berhadapan dengan "terminologi waktu" dan sederetan aturan lainnya sebagaimana ketentuan yang diberlakukan pada kegiatan kampanye.

Malahan sebuah lembaga polling, dalam kisaran beberapa jam sebelum pelaksanaan pemungutan suara, bisa saja melakukan siaran perstantang hasil jajak pendapat kepada sejumlah media di tingkat lokal maupun nasional tanpa harus dicurigai sedang melakukan kampanye terselubung bagi kandidat kepala daerah.

Sepintas seperti tidak ada yang salah dengan pemaparan hasil jajak pendapat, sebab penyelenggara polling umumnya mengidentifikasikan diri sebagai lembaga "independen", ilmiah dan memiliki visi mendukung jalannya pilkada sebagai sarana kedaulatan rakyat di tingkat lokal.

Bahkan keberadaan lembaga polling di Indonesia bisa saja menyelaraskan dengan eksistensi Gallup Poll di Amerika Serikat maupun Australian Public Opinion Polls yang kredakberpihakannya dapat dipertanggungjawabkan. Walaupun harus diakui ada penyelenggara polling yang mengaku teras terang sebagai konsultan dari kandidat kepala daerah yang bersaing dalam pilkada.

Kandidat Unggul

Dalam konteks situasi di Indonesia, persentase perolehan suara para kandidat kepala daerah yang diartikan secara luas di media massa, sangat berpotensi mempengaruhi konstituen yang belum memiliki pilihan pasti untuk menjadi epigon "kandidat unggul" versi polling.

Substansi inisiatifnya menjadi perhatian DPR dan Pemerintah dalam menyusun RUU Penyelenggaraan Pemilu. Sebab dalam perspektif ilmu komunikasi, yang dikenal dengan teori spiral kebisaan (*spiral of silence*) dari Noelle-Neuman, mengemukakan bahwa "orang-orang umumnya secara alamiah memiliki rasa takut terkecil, sehingga dalam pengungkapan pendapatnya, mereka cenderung menyalut dan mengikuti opini yang menguasai mayoritas khlayak," dengan kata lain, calon kepala daerah yang unggul dalam jajak pendapat, sangat mungkin menjadi rujukan bagi sebagian besar konstituennya yang masih mengambang orientasi pilihannya.

Dalam pemikiran apolitis, orang lebih nyaman berada di tengah kelompok politik mayoritas dibandingkan harus bertalian dibalik eksistensi komunitas politik yang lebih kecil. Pendapat tersebut, memang kontradiktif teori bahwa "media massa tidak memiliki kekuatan sebagai pembawa pesan tunggal dalam mempengaruhi khlayak".

Meski demikian, tidak bisa dinafikan bahwa masyarakat Indonesia yang baru masuk dalam era kebebasan pers, memiliki kecenderungan untuk memposisikan media massa sebagai salah satu sumber informasi politik yang paling dipercaya.

Oleh sebab itu, berpikir pada eksistensi media massa di era reformasi dan kekuatan pendapat mayoritas publik, maka demi mengantisipasi potensi jajak pendapat sebagai bentuk "kampanye yang terselubung", maka sejak dini RUU Penyelenggaraan Pemilu harus harus mengakomodasikan aturan yang bisa dipakai sebagai rujukan pemaparan hasil polling dalam pilkada.

Namun untuk daerah yang pada saat ini sedang menyelenggarakan pilkada, sebaiknya Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU/D) membuat aturan teknis, bahwa "pemaparan hasil jajak pendapat melalui media massa dikategorikan sama dengan kampanye", sehingga pelaksanaannya harus mengacu pada ketentuan yang telah diberlakukan sebagaimana dalam UU No 32 Tahun 2004 yaitu, "waktu kampanye adalah 14 hari dan berakhir tiga hari sebelum hari pemungutan suara".

Meski demikian, untuk tetap menjaga prinsip demokratisasi informasi, seyogianya yang dianalogikan pemaparan hasil polling sama dengan substansi kampanye, hanya menyangkut "berakhirnya waktu kampanye, yaitu 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara". Dengan demikian pelaksanaan jajak pendapat yang sudah dimulai jauh sebelum pemungutan suara tidak perlu dipersialkan sebagai tindakan "menenun start kampanye". Ketentuan kampanye juga jangan sampai mengahiri eksistensi penelitian dari pakar dan berbagai

pihak dalam masyarakat yang mempengaruhi calon pemenang pilkada melalui media massa.

5. Iklan Politik

(Suara Pembaruan, 07 Oktober 2008)

Menyongsong pemilihan umum tahun 2009, media massa diwarnai oleh hiruk pikuk iklan politik yang tidak kunjung surut. Sebagian orang mengkhawatirkan, bahwa dominasi pencitraan di media akan berdampak terhadap kekeliruan rakyat dalam menetapkan pilihannya.

Sesungguhnya, tidak ada yang perlu dirisaukan terhadap iklan kampanye tokoh, sebab secara faktual, iklan politik tidak mampu mempopulerkan seorang tokoh. Berdasarkan jajak pendapat Reform Institute, popularitas Prabowo yang iklannya mendominasi media, hanya diapresiasi oleh 3-7 persen responden. Termasuk dalam kisaran angka itu, adalah Wiranto, dan Amin Rais, yang mungkin saya terangkat oleh iklan Soetrisno Bachir (SB) di media. Angka-angka itu, dibawah SBY yang mengantongi tingkat popularitas sebesar 19,06 persen dan Megawati Soekarnoputri yang diapresiasi 19,40 persen responden.

Bahkan mengutip Majalah Tempo, 21 Juli 2007, hegemoni iklan politik di media hampir tidak memiliki pengaruh terhadap popularitas seorang tokoh. Prabowo Subianto, hanya dipilih oleh 1,5 persen, dan SB hanya diapresiasi 0,3 persen responden. Jauh dibawah Wiranto, yang dengan frekuensi iklan politik di media massa lebih sedikit, tetapi bisa menggaji 7,8 persen suara responden.

Hasil jajak pendapat tersebut diatas, cukup mengherankan, mengingat sebuah polling di Jakarta, menunjukkan bahwa, iklan politik Prabowo, mampu menarik perhatian sekitar 20,1 persen responden dan iklan SB disukai oleh 11 persen. Sedangkan iklan kampanye politik Wiranto malahan tidak masuk dalam hitungan yang berarti.

Artinya, secara sederhana dapat dikatakan, kampanye politik yang menarik, tidak sejalan dengan kepopuleran tokoh. Kalau mereka sekadar mengungkapkan sikap kritis, melalui retorika yang berani - apidalam menyikapi kondisi bangsa Indonesia, itu sudah jamak dilakukan oleh berbagai kelompok. Untuk bisa dijadikan referensi pilihan politik, calon konstituen menuntut agar para tokoh,

memahami keadaan yang sesungguhnya di tengah masyarakat, menjalankan komunikasi homofili yang menempatkan tokoh – tokoh itu, memang senasib dengan masyarakat pada umumnya. Jadi bukan sekadar ritual obral janji yang mudah untuk dilingkari.

Namun persoalannya, tuntutan itu sulit dipenuhi, sebab di luar konteks pencitraan media, ada jarak kekuasaan, sosial dan ekonomi, yang terlampaui jauh antara sang tokoh dengan rakyat yang menjadi sasaran kampanye.

Sementara itu, dalam kajian akademis, iklan politik yang membombardir media massa, tidak selamanya bisa membengkelkan suara konstituen dalam pemilu. Mengutip pendapat, Stewart L. Tubb dan Sylvia Moss (2005), bahwa “kampanye yang lebih banyak mendengar” tidak mengobral janji secara hiruk pikuk di media, dan lebih terfokus mendengarkan kehendak rakyat, mampu mengantarkan Bill Clinton melenggang ke Gedung Putih untuk pertama kalinya.

Oleh karena itu, hingar bingar iklan politik melalui media massa, sebagaimana yang terjadi belakangan ini, sepertinya tidak cukup untuk mengantarkan seorang tokoh atau parpol bisa meraih konstituen lebih banyak.

Namun jika mencermati berbagai hasil jajak pendapat yang dieksplorasi media massa, yang berkaitan dengan alasan memilih partai dalam Pemilu 2009, masyarakat lebih tertarik kepada “citra elite pemimpin dan kelembagaan partai politik dibandingkan janji partai dan alasan pragmatis lainnya. Karena itu para elite tetap akan membombardir iklan politik yang menitikberatkan kepada upaya mengeksplorasi “kehebatan” tokoh ataupun citra partai.

Tetapi, sejatinya para elite partai jangan menelan mentah – mentah aneka hasil jajak pendapat itu. Sebab ada kecenderungan bahwa, persepsi publik terhadap citra tokoh dan parpol tidak pasif. Dalam arti, masyarakat tidak bisa hanya menerima informasi dari gemuruhnya bombardir iklan “kehebatan” tokoh. Mereka akan berupaya mencari tahu semua sikap dan tindakan yang dilakukan para elite yang getol berkampanye, melalui beragam sumber informasi yang dipercaya.

Sejalan dengan konteks tersebut, Dan Nimmo (2000), mengingatkan, bahwa pemberi suara, tidak mudah terkecoh oleh iklan tokoh politik, sebab mereka akan mencari petunjuk tentang peran, pengalaman, latar belakang dan potensinya sebagai pejabat publik yang layak untuk dipilih. Di pihak lain, informasi yang terakumulasi dari rekam jejak seorang tokoh dan parpol

tersebut, bersifat “irreversible”, artinya sulit untuk diralat melalui kekritisan yang disuarakan melalui media.

Karena itu, iklan kampanye tokoh dan parpol di media jelas bukan alat yang paling efektif untuk menangkuk simpati rakyat. Pandangan hipodermis tentang keperkasaan media untuk mempengaruhi publik, yang mungkin saja dipercaya oleh berbagai elit politik, harus diabaikan. Sebab dalam lingkai kebebasan informasi dan skeptisme publik terhadap kehidupan politik, mengakrol citra di media, justru akan menghasilkan “teori akibat minimal”, yang artinya, iklan politik di media, tidak bisa mempengaruhi masyarakat yang masih ragu – ragu menetapkan pilihannya, tetapi memang bisa diandalkan untuk memperkuat keputusan orang – orang yang sebenarnya sudah menjadi pengikut tokoh yang berkampanye.

Ringkasnya, iklan kampanye tokoh, bukan sebagai referensi utama masyarakat untuk menilai popularitas tokoh dan partai politik, tetapi iklan politik hanya diposisikan sebagai “selingan menghibur” yang bisa menarik perhatian sesaat, tetapi mudah untuk dilupakan. Oleh sebab itu, bagi tokoh dan partai politik yang tidak berdaya menghadapi persaingan iklan politik di media tidak perlu khawatir, mengingat rakyat adalah penilai sejati dalam politik yang demokratis.

6. Pluralisme dan Retorika Politik

(Kompas, 31 Maret 2009)

Menjelang Pemilu 2009, isu pluralisme seolah – oleh menjadi senjata ampuh bagi sejumlah partai politik yang selama ini dikenal memiliki massa yang cenderung homogen dari aspek ideologi.

Namun yang menjadi pertanyaan adalah, sejauhmana pluralisme memang menjadi orientasi total, dalam arti bukan sekadar retorika, tetapi ada ketunggalan mengaplikasikan konsep keanekaragaman dari sudut universal. Sebab, gencarnya perbincangan tentang pluralisme dari elite politik akhir – akhir ini, ternyata belum bisa merasuk ke massa di akar rumput, yang sesungguhnya sebagai sasaran agar menyadari betapa pentingnya semangat kebhinekaan dalam kehidupan bernegara.

Konflik antar ataupun intra kelompok yang tidak kunjung usai di berbagai wilayah tanah air, prasangka (prejudice) yang dipelihara secara terlembaga terhadap komunitas lain yang berbeda dalam nilai, sikap dan pandangan

dunia (worldview), dan tindakan - tindakan yang mengatasnamakan kebenaran sepihak, merupakan bukti faktual bahwa kesediaan hidup dalam keanekaragaman yang harmonis menjadi barang mahal.

Dalam penelaahan tentang keanekaragaman masyarakat, Diana L. Fick (2007), intinya menyatakan bahwa, pluralisme merupakan keterlibatan secara energetik dengan keragaman, bukan toleransi tetapi pencarian secara aktif untuk memahami perbedaan - perbedaan. Pluralisme juga bukan relativisme, tetapi komitmen, berbasis kesediaan untuk berdialog - mengritik dan mau dikritik.

Dari pernyataan tersebut, terdapat berbagai persoalan yang harus dilakukan oleh partai politik yang gencar menyuarakan pluralisme. Mereka harus bersedia menempatkan orang - orang dari luar garis ideologi utamanya, dalam sebuah jabatan politik strategis, demi menciptakan sebuah sinergi partai. Mensinkronkan kekuatan dari kelompok yang beraneka ragam dalam sebuah semangat pluralisme, adalah pencapaian (achievement) positif partai, sehingga akan memiliki pengaruh besar di masyarakat.

Eksistensi di masyarakat yang heterogin adalah tujuan utama, oleh karena itu, partai politik sebaiknya mengkampanyekan perlunya toleransi. Mengant tampak sederhana bagi para politisi atau sekelompok elite, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa prasangka kelompok masih terus hidup di berbagai komunitas. Oleh karena itu partai harus mencari perbedaan yang ada di masyarakat, dan memanfaatkannya sebagai salah satu landasan, dalam membangun basis partai yang kuat.

Prinsipnya, partai politik mengemas dan mendiseminasikan perbedaan bukan sebagai ancaman yang menakutkan bagi konstituen mayoritas partai, tetapi justru sebaliknya, bisa membentuk sebuah komunitas dalam tubuh partai plural yang kuat. Namun persoalannya, masih terlampau banyak, diferensiasi yang ada di masyarakat justru diorganisasikan untuk membangkitkan semangat kelompok.

Jika konsisten berpijak pada ide keanekaragaman, langkah baiknya jika partai politik tidak selalu mengunggulkan keyakinan dasar secara sepihak. Sebab partai plural, adalah sebuah komitmen "kebersamaan" terhadap perbedaan. Walaupun, sesungguhnya orientasi terhadap pluralisme, tidak perlu menanggalkan maupun mengisolasi identitas ideologinya, fostri keberagaman adalah kekuatan sejati dalam demokrasi bernegara.

Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa jalan menuju kondisi itu memerlukan proses panjang. Partai politik harus tidak bosan - bosannya membuka dan memfasilitasi dialog integratif antar kelompok, di akar rumput sebagai basis konstituen, bukan dalam seminar dan diskusi elite yang tidak menumbun. Ini mungkin karena tidak memiliki implikasi langsung di masyarakat. Harus diukir suatu im, betapa langkanya dialog antar kelompok yang langsung melibatkan rakyat kebanyakan, demi memperkuat semangat kebersamaan.

Kalaupun partai politik gencar menyuarakan pluralitas, tetapi pemaparan Elizabeth Faller Collins, dalam tulisan tentang Indonesia, "Sebuah Budaya Kekerasan?", di Asian Survey, Juli 2002, bisa membuat pesimis. Dikemukakan bahwa, kekerasan muncul karena kegagalan lembaga-lembaga politik dan hukum, untuk menyediakan perangkat hukum bagi penyelesaian konflik, mengatasi keluhan penguatan identitas komunal untuk mengendalikan sumber ekonomi, dan penggunaan kekerasan oleh negara (state-sanctioned violence) untuk menghasut atau menekan konflik.

Tidak bisa dinafikan, meski banyak dibantah oleh elite politik dan pemerintah dengan aneka dalih, tetapi secara substansial konflik dan kekerasan di Indonesia seringkali dipicu oleh berbagai perbedaan yang menyangkut karakteristik etnik maupun keyakinan dasar sebuah kelompok. Jelas ini berpotensi mengganggu semangat keanekaragaman dalam dalam berpolitik di masyarakat heterogin.

Dengankata lain, pluralisme yang nvaring disuarakan oleh partai politik bisa saja hanya dianggap retorika yang tidak menumbun di masyarakat, sehingga tidak akan berpengaruh banyak dalam menanggung konstituen pada pemilihan umum tahun 2009.

7. Jajak Pendapat dan Kampanye Terselubung

(Suara Pembaruan, 8 Juli 2009)

larangan mengumumkan hasil jajak pendapat pada masa tenang, dan pemaparan hasil quick count (penghitungan cepat) pada hari 11 pemungutan suara, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 245 UU 10/2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pertimbangannya, kegiatan tersebut adalah kajian akademis yang harus dihormati dan tidak ada dampak signifikan terhadap pemungutan suara.

Dalam konteks yang sama, Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPi) mendaftarkan uji materi terhadap Pasal 188 UU 42/2008, yang melarang pengumuman hasil jajak pendapat pada masa tenang dan quick count pada hari H pemilihan presiden. Namun, mengingat ketentuan itu memiliki substansi yang sama dengan yang tercantum pada Pasal 15 UU 10/2008, maka diperkirakan MK akan memberlakukan keputusan yang sama, yaitu mencabut pembatasan tentang jajak pendapat dan penghitungan cepat.

Bagaimanapun, putusan MK, yang menyangkut jajak pendapat dan quick count, harus dilaksanakan oleh semua pihak yang berkepentingan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemilihan umum. Namun, tanpa bermaksud meniadakan kembali putusan lembaga yang dipimpin Mahfud MD tersebut, sesungguhnya pencabutan larangan pemaparan jajak pendapat pada masa tenang, yaitu tiga hari sebelum dilakukan pemungutan suara, berpotensi menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya. Sebab, dalam perspektif komunikasi politik, opini mayoritas yang dipaparkan oleh media memiliki pengaruh signifikan terhadap sikap masyarakat.

Berdasarkan teori spiral kebisuhan (*spiral of silence*) dari Noelle dan Neuman, pendapat pribadi sangat bergantung pada yang dipikirkan ataupun diharapkan oleh orang lain. Oleh karena itu, seseorang akan mengamati lingkungannya untuk mempelajari pandangan mana yang bertahan atau memperoleh dukungan dan pendapat mana yang tidak diminati atau kurang populer.

Jika merasakan bahwa pandangannya termasuk di antara yang tidak dominan, seseorang cenderung tidak akan mengekspresikan sikapnya, karena adanya ketakutan terisolasi dalam kehidupan bermasyarakat.

Akibatnya, pendapat dominan menjadi semakin luas, kuat, dan memperoleh dukungan publik. Sedangkan opini yang kurang populer semakin tidak dihiraukan oleh masyarakat pada umumnya.

Persepsi individu bukan satu-satunya kekuatan yang bekerja dalam proses ini. Sebab, peran media ikut menentukan pandangan dominan yang mendorong masyarakat merasa lebih nyaman ada dalam lingkaran pendapat mayoritas (Eko Harry Sasanto, SP, 5 Oktober 2009). Dalam konteks pemaparan hasil jajak pendapat di media, bukan mustahil jika sejumlah masyarakat lebih menyukai untuk memilih pasangan calon presiden yang paling unggul versi jajak pendapat, dibandingkan memberikan suaranya untuk kandidat lain yang kurang populer.

Memang asumsi ini bertentangan dengan teori dampak terbatas dari media yang mengkritisi spiral kebisuhan. Namun, berdasarkan jajak pendapat sebuah majalah mingguan, 5 April 2009, masyarakat masih memposisikan iklan politik di media massa sebagai rujukan dalam pemilihan umum. Sebanyak 59,7 persen responden mengapresiasi iklan di televisi sebagai referensi dalam pemilihan umum, sedangkan 2,2 persen memilih media cetak, dan 1,9 persen mempercayai radio sebagai acuan dalam menetapkan pilihannya.

Kompetisi Politik

Sesungguhnya, jika lembaga penyelenggara jajak pendapat dalam mengumumkan hasil survei di televisi atau surat kabar hanya sebatas menginformasikan kepada khalayak tanpa maksud terselubung lainnya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun, tidak bisa dimungkiri, dalam dinamika kompetisi politik nasional menuju Istana, sebuah lembaga penyelenggara jajak pendapat mempublikasikan hasil jajak pendapat dalam kemasan yang mirip iklan politik.

Bukan tidak mungkin hasil jajak pendapat popularitas pasangan calon presiden dan calon wakil presiden ditampilkan dalam bentuk foto dan ditempatkan secara mencolok di media cetak. Atau bisa saja, sebuah stasiun televisi dan radio, menyiarkan hasil jajak pendapat secara bertubi-tubi dalam aneka kemasan berita, yang tidak menyalahi aturan kampanye prosedural, tetapi secara terselubung memiliki aroma kampanye yang kuat. Pemaparan hasil jajak pendapat semacam ini memiliki dampak signifikan untuk mempengaruhi konstituen dalam menetapkan pilihan.

Oleh karena itu, mengingat putusan MK sifatnya wajib dilaksanakan, maka Komisi Pemilihan Umum dan organ-organ kekuasaan negara yang memiliki otoritas dalam penyelenggaraan pemilihan umum, harus segera mengantisipasi putusan MK yang menyangkut jajak pendapat dan quick count dalam UU 42/2008, dengan menyiapkan ketentuan teknis pelaksanaan pengumuman hasil jajak pendapat di media pada masa tenang. Dengan demikian, tiga hari sebelum pelaksanaan pemilihan presiden 8 Juli 2009, benar-benar bersih dari kampanye terselubung dari sejumlah entitas yang berkepentingan untuk mendukung pasangan capres-cawapres.

Namun, persoalannya, ketika semangat untuk keluar sebagai pemenang sedemikian kuat, bukan mustahil justru pemaparan hasil jajak di masa tenang akan dimanfaatkan sebagai kampanye putaran terakhir untuk mempengaruhi pilihan konstituen. Akibatnya, pemungutan suara yang diharapkan jujur dan

adil akan terperangkap dalam jerat prosedural, yang mengabaikan substansi demokratisasi dan transparansi dalam kompetisi politik nasional maupun lokal.

Bab 9

KEBEBASAN INFORMASI DAN POLITIK LOKAL

1. Marginalisasi Politik Pedesaan

(Media Indonesia, 2 Maret 2006)

Tidak banyak reaksi dan bungkam kepangjangan adalah sikap berbagai kalangan dalam menyikapi demonstrasi para kepala desa yang menuntut agar larangan kepala desa menjadi pengurus partai politik direvisi.

Tiga pekan telah berlalu ketika Persatuan Kepala Desa dan Perangkat Desa Nusantara (Parade Nusantara) beramai-ramai mendatangi Departemen Dalam Negeri. Sepertinya tidak akan muncul gasing yang kuat untuk mendiskusikan secara terbuka dan demonstrasi terhadap peran kepala desa dalam kehidupan politik di wilayahnya.

Kecendrungan elite pemerintahan dan politisi mengabaikan politik pedesaan, menimbulkan sejumlah pertanyaan, apakah saat ini komunitas pedesaan dianggap tidak memiliki posisi strategis sebagai alat untuk melakukan bargaining politik.

Atau mungkin sikap yang tidak peduli tersebut sebagai strategi untuk mengecilkan persoalan, padahal dibalik semua itu, sesungguhnya adalah kesadaran yang tinggi bahwa desa adalah sumber potensial untuk pemilihan umum yang akan datang.

Hakikatnya, melarang kepala desa menjadi pengurus partai politik tentu saja secara faktual tidak sejalan dengan kehidupan politik di pedesaan yang dinamis sejak bergulirnya reformasi di Indonesia.

Tuntutan Parade Nusantara adalah sesuatu yang wajar dan harus direspons dengan baik, bukan sebaliknya dengan menuduh bahkan menenggelamkan ide tersebut ke dalam wacana masa lalu yang merujuk pada hegemoni politik tunggal yang menguasai pemerintahan desa.

Keterlibatan kepala desa sebagai pengurus partai politik tidak perlu dikhawatirkan akan mengembalikan peran politik yang mendukung sepenuhnya politik penguasa sebagaimana masa Orde Baru.

Larangan menjadi pengurus partai bukan jalan terbaik untuk menciptakan demokratisasi di pedesaan, terlebih lagi dengan menggunakan dalih untuk menjaga netralitas posisinya dilingkungan masyarakat.

Sebab faktanya, kepala desa semenjak pemerintahan Orde Baru pun sebenarnya memiliki orientasi politik yang diketahui dengan jelas oleh masyarakat.

Mestinya kepala desa di era reformasi justru diberi kebebasan untuk berpolitik termasuk keterlibatannya sebagai pengurus partai politik di tingkat desa maupun pada tingkatan lainnya sesuai dengan aktivitas politiknya.

Perilaku politik kepala desa yang transparan dan tidak terselubung akan memberikan manfaat dalam pembelajaran demokrasi kepada rakyat. Orang nomor satu dalam pemerintahan desa tersebut tidak perlu bergerilya mendukung partai politik tertentu secara sembunyi-sembunyi ataupun bersekongkol dengan partai politik pemerintahan untuk melanggengkan kekuasaan.

Jika kepala desa adalah salah satu representasi dari dinamika politik di pedesaan, lantas apa salahnya mereka menjadi pengurus partai politik demi untuk menciptakan kehidupan politik di tingkat desa yang lebih beradab.

Bagaimanapun juga politik pedesaan adalah buah reformasi yang memiliki andil besar dalam menciptakan pluralisme ideologis untuk melawan hegemoni politik penguasa yang puluhan tahun memberangus demokrasi di akar rumput.

Sebenarnya raelasi ataupun tuntutan dari Parade Nusantara sangat terlambat, sebab sinyal larangan kepala desa berpartai sudah diawali antara lain oleh peraturan yang menyebutkan, "dalam kampanye, partai politik di larang melibatkan kepala desa" (UU No 22/2001).

Padahal mestinya kepala desa yang dipilih secara langsung oleh rakyat harus diposisikan sebagai orang bebas dan tidak terikat oleh ketentuan sebagaimana diberlakukan pada PNS, walaupun keterlibatannya dalam kampanye partai politik tentunya harus merujuk sebagaimana yang diberlakukan terhadap pejabat negara, misalnya larangan menggunakan fasilitas pemerintah.

Larangan kepala desa berpartai mengingatkan pada *floating mass* (masa mengambang) era pemerintahan Soeharto. Konsep massa mengambang menganggap rakyat di pedesaan tidak patut mengetahui seluk beluk politik ataupun ideologi partai.

Mereka lebih layak mengurus kepentingan hidup dengan bingkai nilai ekonomis yang jauh dari partisipasi terhadap kegiatan partai politik. Tidak hanya sampai di situ, pembicaraan politik adalah dominasi negara terhadap rakyatnya sehingga tidak terjadi transaksi interaktif ketika rakyat menerima pesan politik yang dilontarkan oleh pemerintah beserta organ-organ kekuasaannya di tingkat desa.

Esensi Peraturan Pemerintah No 72/2005 tentang Desa, yang tidak memperbolehkan kepala desa menjadi pengurus partai, jika dicerna lebih teliti akan membentuk asumsi-asumsi bahwa kekuasaan negara ingin menjadikan desa bebas politik sehingga mudah dikendali dan diarahkan untuk mencapai tujuan politik pemerintah.

Oleh sebab itu, pendapat yang menyatakan, "jika kepala desa berpartai maka cenderung menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan partainya" adalah kurang tepat, malahan terkesan justru melindungi kembalinya praktik *floating mass* secara merayap.

Sebab sebagai peraturan yang bersentuhan dengan kepartaian, sudah memberikan batasan yang menahkikan seseorang, termasuk pejabat pemerintah sebagai pemegang lisensi tunggal sebuah partai politik sebagaimana era Orde Baru.

Larangan kepala desa berpolitik menimbulkan kekhawatiran munculnya depolitisasi massa dan marginalisasi politik pedesaan yang lambat laun akan berimbas "memaksa" masyarakat pedesaan untuk selalu sejalan dengan perilaku partai politik rezim yang berkuasa.

Peraturan tersebut juga menguatkan anggapan bahwa desa sebagai lambung suara untuk pemilu 2009 harus digarap sejak dini oleh partai-partai pendukung

pemerintah yang jelas akan berupaya sekuat tenaga mempertahankan kekuasaannya.

Secara umum Departemen Dalam Negeri mengkaji lagi, apakah kebijakan tidak boleh menjadi pengurus partai bagi kepala desa sejalan dengan semangat reformasi, atau memang sudah seyakinya diberlakukan bagi kepala desa sebagai pemangku gerbang politik wilayah pedesaan. Bagaimanapun juga kepala desa memiliki hak dan kesempatan politik yang sama dengan pengurus partai lainnya, termasuk hak untuk menentukan partisipasi politik secara bebas.

Meski demikian, seandainya Departemen Dalam Negeri maupun instansi lain yang terikat melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintahan No 72/2005 dengan memperbolehkan kepala desa sebagai pengurus partai politik, sebaiknya pencalonan kepala desa tetap bersifat independen tidak didasarkan pada pencalonan dari partai politik yang ada di wilayahnya.

2. Transparansi Politik Kepala Desa

(Harian Kompas Indonesia, 28 April 2006)

Salah satu tuntutan perangkat desa yang berujung rasa ke Jakarta dan hingga sekarang masih menjadi wacana publik, adalah perubahan terhadap salah satu pasal dalam PP No. 72 tahun 2005 yang melarang kepala desa menjadi pengurus partai politik. Namun, berbagai kalangan cenderung seragam menyuarakan penolakannya. Ketidaksetujuan kepala desa berpartai dikaitkan dengan wacana politisasi birokrasi pemerintahan desa yang dapat merusak harmonisasi kehidupan sosial pedesaan.

Sebenarnya sejalan dengan dinamika politik desa yang ditandai oleh banyaknya partai politik yang membuka ranting di tingkat desa, maka ketakutan mempolitisasi pemerintahan desa menjadi sesuatu yang tidak berdasar. Sebab situasi politik di era otonomi daerah tidak bisa dianalogikan dengan masa Orde Baru yang tidak pernah memberikan kesempatan partai politik memiliki pengurus di tingkat desa. Dengan dalih floating mass pemerintah pada masa itu membatasi aktivitas politik masyarakat pedesaan tetapi memberikan peluang sebesar-besarnya kepada Golongan Karya untuk menjalankan mesin politiknya melalui birokrasi pemerintahan desa.

Argumentasi para desa kepala yang membandingkan bupati yang berhak menjadi pengurus partai disergah dengan dalih Bupati tidak secara

langsung berhubungan dengan masyarakat sehingga tidak menimbulkan hemipolitisasi negatif dalam pemerintahan kabupaten. Tentu saja pendapat ini tidak sepenuhnya dapat diterima, sebab secara faktual bupati bisa dengan mudah menancapkan pengaruhnya langsung ke masyarakat melalui otoritas pejabat daerah termasuk kepala desa di wilayahnya. Artinya bupati yang tidak berhubungan langsung dengan rakyat masih memiliki peluang untuk mempolitisasi birokrasi pemerintahan untuk kepentingan partai politiknya.

Pejabat pemerintahan di daerah yang pegawai negeri sipil itu, seharusnya berdasarkan peraturan tidak boleh berpartai demi netralitas posisinya sebagai pelayan masyarakat. Namun kenyataannya mereka tidak lepas dari "bermain" politik demi untuk memperoleh jabatan dalam birokrasi. Para pejabat di daerah tersebut pada umumnya adalah mantan tim sukses bupati secara terselubung dalam pilkada, maka tidak terlalu sulit bagi bupati untuk menggerakkan mereka sebagai salah satu organ partai terselubung yang mampu mendukung berkembangnya partai politik bupati di wilayahnya.

Persekongkolan antara bupati dan para pejabatnya dalam mengendalikan massa pedesaan adalah representasi dari upaya memberangus demokratisasi politik lokal sebagaimana yang dicita-citakan oleh Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jika jalannya pemerintahan di daerah selalu diwarnai oleh hegemoni politik kepala daerah beserta pejabatnya, maka secara substansial tidak ada perbedaan yang signifikan, antara situasi politik pada masa pemerintahan Soeharto dibandingkan dengan era otonomi daerah yang diklaim lebih demokratis dan menjamin kemandirian rakyat dalam aktivitas politik secara beradab.

Barangkali yang membedakan hanya terminologi ketertindukan terhadap struktur politik pemerintah yang berkuasa. Semasa Orde Baru, kepala desa beserta rakyatnya "yang tidak boleh berpartai" akan dimanfaatkan suaranya oleh hegemoni Golongan Karya sebagai paman tunggal dengan puncak piramida adalah presiden, sedangkan pada saat ini, bupati dengan sejumlah otoritasnya berpotensi mengeksploitasi "status independen" kepala desa untuk kepentingan keberlangsungan kekuasaan maupun partai politiknya. Dalam konteks politik, kepala desa dianggap sebagai sumber kekuatan yang tidak bertuan, maka hal yang lumrah jika bupati merasa paling berhak untuk memanfaatkan kepala desa sebagai subordinasi partai politik secara terselubung.

Apapun alasannya yang perlu disikapi tanpa emosional dengan mengkaitkan trauma politik masa lalu, adalah kenyataan bahwa terdapat banyak peraturan

yang tidak memungkinkan sebuah institusi politik maupun pemerintah menjadi organisasi tunggal yang bebas menjalankan mesin politiknya. Oleh karena itu, jika PP No. 72 Tahun 2005 itu direvisi dan memperbolehkan kepala desa sebagai pengurus partai politik, justru akan menciptakan situasi politik pedesaan yang transparan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan terjadinya konflik antar partai di desa, faktanya secara empirik pada era otonomi daerah, perseteruan antar warga desa umumnya bukan dipicu oleh perbedaan orientasi terhadap partai politik, tetapi justru disulut oleh faktor stereotip maupun prejudice sosial terhadap kelompok – kelompok yang ada di pedesaan.

Orientasi politik kepala desa yang transparan akan bermanfaat untuk menubatsi kecenderungan bupati sekarang yang gemar mengeksploitasi kepala desa sebagai mesin politiknya. Keterlibatan kepala desa dalam partai politik yang dijamin legalitasnya oleh peraturan, menjahilkan mereka tidak perlu lagi sebagai pendukung partai politik terselubung yang memabikan geruh masyarakat desa.

3. ExxonMobil : Harapan Masyarakat Desa

(Seputar Indonesia, 18 Mei 2006)

Badan Musyawarah DPR RI akhirnya memutuskan tetap melanjutkan proses pengusulan hak angket Blok Cepu dan akan menhincarkan lebih lanjut masalah itu pada tanggal 23 Mei 2006. Disisi lain berbagai kelompok masyarakat juga masih terus mengesalkan penunjukan ExxonMobil sebagai pengelola Blok Cepu. Namun sebaliknya, masyarakat setempat di Blok Cepu seperti tidak peduli terhadap pro dan kontra seputar perdebatan itu, mereka justru bersuka cita menyambut kehadiran ExxonMobil sebagai perusahaan yang diharapkan bisa memberikan kesejahteraan kepada warga desa.

Masyarakat di sekitar Blok Cepu yang umumnya buruh tani beteri saja berandai – andai tentang kesejahteraan ekonomi jika ExxonMobil beroperasi tetapi selayaknya jangan terburu raka, sebab banyak contoh aktual, bahwa beroperasinya perusahaan multinasional di wilayah pedesaan tidak secara signifikan berdampak pada kesejahteraan masyarakat setempat. Runtalan teori tetesan ke bawah yang sering dipakai sebagai acuan para perencana pembangunan seringkali justru meleset berbalik arah menjadi bentuk eksploitasi sumber alam yang dilakukan oleh pemilik modal yang menanamkan investasi di desa.

Sepertinya sudah merupakan kelaziman, jika kehadiran industri di pedesaan, "seperti halnya ExxonMobil di Blok Cepu", pada awalnya disambut dengan antusias oleh masyarakat setempat karena kesempatan untuk bekerja di perusahaan terbuka lebar, meski hanya mengandalkan tenaga saja. Namun sesuai dengan karakteristik kultural masyarakat pedesaan, mereka cenderung memposisikan bekerja di pabrik mirip dengan kegiatan sektor agraris yang bisa mengatur waktu sendiri dengan semangat kolektivitas. Tentu saja perilaku ini tidak sejalan dengan aturan perusahaan yang memiliki jadwal ketat dengan kejelasan tugas. Akibat ketidaksemaan budaya kerja tersebut, maka sebagian besar buruh pabrik masyarakat setempat lebih banyak yang memutuskan berhenti kerja dan memilih bekerja sektor informal di sekitar pabrik dengan penghasilan yang tetap rendah.

Mereka pun sudah bisa diduga, tidak ikut larut dalam suka cita menikmati melimpahnya kesejahteraan dari perusahaan di wilayahnya dan kemakmuran hanyalah angan – angan belaka. Di sisi lain, pabrik tidak pernah mengenal konyang untuk menanggung keuntungan dan mengeksploitasi sumber daya perusahaan sambil terus menghipnotis masyarakat setempat dengan menebarkan simbol baru yang menjunjung tinggi budaya material.

Demi mengimbangi budaya material yang merajalela, jalan pintas yang lazim dilakukan oleh masyarakat adalah menjual tanah kepada pemilik modal. Orientasi ekonomi masyarakat pedesaan pun yang semula menjaga harmonisasi lahan pertanian dengan moralitas sebagai ikon ekonomi desa tergeser oleh orientasi ekonomi pabrik yang progresif, spekulatif dan efisien. Persepsi tentang tanah hanya dititik beratkan pada aspek komersialisasi dan tidak lagi terkait dengan unsur historis yang dikelola dengan sentuhan peribadatan. Dinamika kehidupan pabrik berjalan dinamis, sementara masyarakat desa yang sudah tidak bertahan berjalan tertatih – tatih sekadar bertahan hidup, berharap belas kasihan dari para pemegang otoritas perusahaan untuk sekadar memberikan bantuan yang lebih banyak bersifat konsumtif.

Tentunya potret buram beroperasinya industrialisasi di pedesaan seperti itu tidak diharapkan terjadi di Blok Cepu. Oleh sebab itu selayaknya jika ExxonMobil melakukan upaya untuk menyejahterakan dengan memberdayakan masyarakat setempat melalui pendidikan formal maupun informal dengan memberikan pelatihan kemampuan teknis sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Sudah barang tidak disertai dengan anggapan bahwa masyarakat desa adalah komunitas indolent-lamban yang memiliki sederetan karakteristik negatif penghambat perubahan berpikir ke arah lebih baik.

Faktor lain yang perlu menjadi perhatian ExxonMobil bahwa sejalan dengan reformasi politik di Indonesia, masyarakat desa tidak mudah untuk direpresi oleh aparat pemerintahan maupun tokoh lokal yang dibentuk "untuk kepentingan perusahaan" sebab mereka memiliki hubungan yang erat dengan pemuka adat yang berada di luar kekuasaan negara, terbiasa berbicara tentang berbagai masalah yang dihadapi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan masyarakat desa juga sangat menjangkau media massa sebagai sumber informasi yang menyuarakan ketidakadilan. Eksistensi dan kengawasan tersebut merupakan ancaman bagi masyarakat setempat untuk melakukan perlawanan terhadap praktik-praktek perusahaan yang tidak beradab.

4. Bunuh Diri Korban Gempa

(Kompas, 15 Juni 2006)

Bunuh diri yang dilakukan Mardi, warga Gunung Manuk, Salam, Patuk, Gunung Kidul, sungguh mengenaskan. Di sela kesedihan ditimpa bencana gempa, muncul kisah pilu yang mengugah nurani (Kompas, 31/6/2006)

Tindakan bunuh diri Mardi tidak sendirian sebab sudah terdapat banyak kisah tentang bunuh diri dari mereka yang merasa terpinggirkan secara sosial maupun ekonomi di Indonesia.

Akar masalah bunuh diri tidak sekeras muncul dalam kaitan dengan kepunasaan atau ketidakagungan individu saat menghadapi berbagai masalah yang kian tidak terurai. Faktor pendorong muncunya tindakan mengakhiri hidup adalah gejala sosial sebagai perwujudan dari kerentanan moral kolektif yang berimplikasi kepada individual.

Korban Kegagalan

Bencana gempa yang mendorong Mardi mengakhiri hidup dengan menceburkan diri ke sumur juga bukan tindakan individual, tetapi fakta sosial keterpurukan masyarakat yang tidak bisa berbuat banyak menghadapi penderitaan. Kasus Mardi adalah *anomic suicide*, korban kegagalan sosial masyarakat saat mereka tidak tahu apa yang bisa dilakukan ketika harmoni siklus hidup yang mekanistik mengalami guncangan hebat.

Terlepas dari masalah Mardi, sejumlah peristiwa bunuh diri yang terjadi di masyarakat sebenarnya memiliki motivasi berbeda, seperti bunuh diri dalam

motif *egoistic suicide*, terjadi karena rendahnya tingkat integrasi sosial yang memaksa individu mengambil keputusan sendiri.

Jenis bunuh diri lain adalah *altruistic suicide* yang dilakukan karena kuatnya integrasi sosial sebagaimana tampak dalam kewajiban membela kehormatan terhadap nilai-nilai yang dianut (*obligatory altruistic suicide*), juga bunuh diri *optional altruistic suicide* yang berprinsip pada penghormatan dan penghargaan akan diperoleh jika bunuh diri. Selain itu, ada *mystical suicide*, bunuh diri untuk ritual kepercayaan.

Bunuh diri *altruistic*, menurut Emile Durkheim, sosiolog kelahiran Perancis, biasa terjadi pada *lower society*, meski tidak menutup kemungkinan terjadi di lingkungan *more recent civilization*, kelas sosial lebih tinggi.

Bunuh diri Mardi yang *anomic suicide* adalah gejala yang menonjol dalam angka tindakan bunuh diri akibat tertekan beban yang tidak terpecahkan. Karena itu, tanpa menyalahkan pihak mana pun dalam mengatasi bencana di Bantul dan Klaten, termasuk peran pemerintah yang dinilai banyak pihak kurang cekatan, amat toleranis, dan tidak fleksibel. Tindakan Mardi adalah bagian dari kritik terhadap kebijakan penanganan korban gempa, dan lenekatanya seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak yang terkait penanganan bencana untuk segera mengembalikan siklus hidup dengan pendekatan kemasyarakatan yang memperkuat daya tahan korban menghadapi musibah.

Karena itu, masalah Mardi seharusnya dijadikan upaya mengingatkan elite politik, pemerintah, dan kelompok kepentingan lain yang selalu menjadikan masyarakat desa sebagai sumber eksploitasi sosial budaya maupun ekonomi agar peka terhadap sensitivitas siklus hidup masyarakat desa. Gangguan terhadap keteraturan hidup yang serba bersahaja dengan segala keterbatasannya adalah pemici menguatnya sikap fatalisme dan tindakan *anomi* saat tidak berdaya menghadapi perubahan lingkungan sosial ekonomi yang tidak sejalan dengan kesiapan spiritual dan moralitas masyarakat. Mereka tidak menghiraukan jargon-jargon adiluhung masyarakat kolektif seperti keselarasan dan gotong royong.

Potret buram

Mengingat bunuh diri Mardi dan kasus-kasus bunuh diri lain terkait dengan gejala sosial, maka selayaknya pemerintah tidak hanya melihat korban dalam

kuantifikasi saja, tetapi juga secara substansial menganggap sebagai salah satu potret buram kebijakan pembangunan yang tidak sejalan dengan kesiapan mental masyarakat. Pemerintah harus tidak bosan mengevaluasi model pembangunan yang empati terhadap masyarakat miskin, bukan sebaliknya membiarkan mereka sebagai korban pembangunan seperti dalam model piramida korban pembangunan.

Memang sebuah pernyataan amat klise, tetapi itulah fakta sosial yang terus melembaga dan tidak bisa diatasi kekuasaan negara dari waktu ke waktu.

5. Revitalisasi (Politik) Pertanian

(Harian Sempur Indonesia, 12 September 2006)

Dalam pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 2006, Presiden SBY mengemukakan tentang perlunya revitalisasi pertanian sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Program yang tepat dalam situasi perekonomian yang menyodorkan kalkulasi keberhasilan namun belum dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Oleh sebab itu, pemerintah dan sejumlah elite politik pendukungnya, mestinya tidak emosional jika menanggapi akumulasi kritik dari berbagai pihak. Dan jangan terlalu gegabah untuk mempertahankan asumsi angka - angka yang sungguh luar biasa perkembangannya, tetapi di sisi lain bagi masyarakat yang mengharapkan pemulihan ekonomi, ibarat menunggu godot yang tidak kunjung tiba. Meskipun demikian, dari 73 menit pidato Presiden SBY, salah satu masalah yang menarik adalah, upaya untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat melalui revitalisasi pertanian. Pengungkapan persoalan pertanian yang menyita waktu sekitar kurang lebih lima menit, seolah menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kepedulian terhadap persoalan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia yang agraris.

Mengupayakan kembali perlunya diperkuat basis pertanian, adalah langkah tepat bagi pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu. Tetapi persoalannya, upaya merevitalisasi pertanian pasca reformasi kenegaraan harus dipilih program yang tepat dan sejalan dengan koridor demokratisasi politik di lingkungan petani pedesaan. Harus diakui, bahwa komunitas petani adalah basis sosial kultural dan politik dalam struktur masyarakat Indonesia. Mereka memiliki potensi besar sebagai sumber kekuatan politik yang dinamik, bahkan jika diorganisasikan dengan baik, bisa mempengaruhi jalannya kekuasaan dalam

dinamika politik lokal maupun nasional. Namun demikian, meski petani mampu memberikan kontribusi besar dalam politik kekuasaan negara, tetapi kesejahteraan yang dimiliki petani umumnya sangat memprihatinkan dan terperangkap dalam kemiskinan struktural.

Kemiskinan merupakan realitas dari sebagian besar masyarakat pertanian di Indonesia, namun kondisi ini bukan kesalahan mendasar dari sikap atau perilaku petani yang sering dikritik tidak produktif, lamban, bersifat fatalistik, sebab biang keladi dari penderitaan tersebut adalah keterlibatan berbagai pihak yang mengeksploitasi petani secara sosial - ekonomi. Sebuah pernyataan klise dan sering dikemukakan oleh berbagai pihak, tetapi masih sangat relevan dalam situasi pasca reformasi yang seharusnya mengedepankan demokratisasi terhadap semua bidang kehidupan masyarakat.

Dalam upaya revitalisasi pertanian, yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah menyapkan pola - pola eksploitasi ekonomi di wilayah atau desa - desa pertanian melalui kebijakan penetapan kawasan industri yang konsisten, untuk melindungi siklus sosial ekonomi petani dan lingkungannya. Ini penting demi menghindari tindakan semena - mena pemilik modal yang tidak pernah kenyang untuk menggosur lahan pertanian. Disamping itu, penghargaan terhadap siklus pedesaan, akan menguatkan tatanan sosial yang mampu melawan budaya konsumtif, sehingga mereka akan tetap menjagalah pertanian sebagai aset sosial ekonomi yang tidak mudah untuk dipindahtangankan. Dalam perspektif pembangunan desa yang manusiawi, petani tidak mudah dikuasai oleh kekuatan - kekuatan ekonomi yang cenderung mengabaikan nilai - nilai pedesaan yang harmonis.

Kepedulian terhadap revitalisasi pertanian, juga harus tetap mengakui eksistensi lembaga pertanian yang dibentuk berdasarkan aspirasi masyarakat setempat dalam wujud kelompok - kelompok sosial dan ekonomi yang tidak diorganisasikan oleh pemerintah. Mengutip pendapat Vernan Rutan, ahli pembangunan pedesaan, bahwa "munculnya lembaga - lembaga pedesaan yang tidak sinkron dan dipaksakan oleh pemerintah dan sejumlah pihak yang berkepentingan di kawasan pertanian, justru akan mengakibatkan petani sulit berkembang". Berpijak pada pernyataan itu, pemerintah seyogyanya memberikan hak hidup institusi yang tumbuh di lingkungan petani, melalui prinsip demokratisasi berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Bukan sebaliknya, memaksakan lembaga formal dalam kontrol kekuasaan negara, yang belum tentu disukai petani sebagaimana model kelompok tani pada masa lalu, yang cenderung menetapkan sederetan kewajiban kepada petani dengan dalih kepentingan pembangunan.

Pada intinya, revitalisasi pertanian harus bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup petani secara konsisten, bukan upaya membangun kembali jaringan politik pedesaan, melalui pembentukan kelompok tani dan penguatan peran politik penyuluh pertanian. Jika ini yang terjadi, dikhawatirkan program revitalisasi pertanian hanya sekadar membuka akses pemerintah terhadap kepentingan politik pedesaan. Sebab melalui politisasi birokrasi desa, para penyuluh pertanian yang seharusnya memberikan informasi maupun membekali kemampuan teknis tentang strategi peningkatan produktivitas pertanian kepada petani, lambat laun akan bergeser menjadi corong kekuatan politik pemerintah yang mematok target untuk mendukung persaingan politik di tingkat lokal maupun nasional.

Sebenarnya, dalam perspektif komunikasi pembangunan pedesaan, program revitalisasi pertanian yang ideal adalah keterbukaan informasi seputar bantuan, modal, subsidi, pembangunan wilayah, dan berbagai fasilitas lain yang sangat dibutuhkan petani kecil. Namun di sisi lain, jika revitalisasi pertanian ternyata lebih berbau politis ketimbang upaya yang sungguh-sungguh untuk meningkatkan kesejahteraan petani, maka sulit untuk mencapai keberhasilan, sebab petani pasca reformasi memiliki hubungan yang kohesif dengan berbagai sumber informasi alternatif yang sering mempunyai pendapat berbeda dengan pemerintah. Oleh sebab itu, sangat wajar sendainya petani memiliki keberanian menolak program revitalisasi pertanian yang dipolitisir untuk kepentingan sejumlah elite politik dalam pemerintahan.

6. Plus Minus Calon Independen

(Suara Karya, Rabu, 20 Agustus 2008)

Diperbolehkannya calon perseorangan untuk mengikuti pemilihan kepala daerah di sejumlah wilayah merupakan momentum yang baik untuk meningkatkan demokrasi pemerintahan di daerah. Keikutsertaan mereka diharapkan memangkas skeptisme masyarakat terhadap sosok calon pemimpin, dan mampu mengurangi tingginya angka golput yang menjadi kecenderungan pada berbagai kompetisi politik lokal.

Calon independen dipastikan mengurangi minat kelompok elite pemburu kekuasaan di daerah untuk merapat dan memosisikan partai politik sebagai institusi yang memiliki otoritas tinggi dalam menentukan kandidat kepala daerah. Terbuka banyak jalan untuk membangun kredibilitas individu

melalui aneka kegiatan yang benar-benar membina dan bermanfaat bagi rakyat sebagai basis konstituen yang harus menjadi perhatian utama. Dengan demikian, bukan hanya janji kosong yang diumbar oleh agen-agen partai politik dalam kampanye singkat, yang berujung pada pengingkaran terang-terangan kepada pemilihnya.

Dalam konteks kalkulasi pembiayaan, calon independen juga tidak akan segan mengeluarkan dana kepada rakyat sebanyak mungkin, tanpa kecurigaan dikecup para makelar politik yang ada di lingkungan parpol gurem sampai yang menguasai kursi di DPRD. Dengan dana yang memadai, para pemburu kekuasaan dengan basis rakyat tanpa partai bisa membentuk kelompok terorganisasi, dalam wujud lembaga swadaya masyarakat, pusat riset, atau jaringan institusional lainnya yang hukikannya sebagai sarana untuk memopulerkan ketokohnya.

Pola semacam ini lebih efektif dan bisa menjadi ukuran popularitas yang sesungguhnya dari calon perseorangan jika dibandingkan dengan model pencalonan melalui partai politik, yang birokratis, tidak efisien, dan tidak memberikan kepastian dukungan yang memadai. Belum lagi jika struktur kekuasaan dalam parpol itu terpecah dalam banyak faksi, yang satu sama lain memiliki orientasi pencalonan kepala daerah yang berbeda, tentu saja termasuk masalah yang menyangkut dukungan "dana" ke partai politik.

Meski berpotensi untuk mengurangi peran partai politik dalam menentukan kepemimpinan di daerah, tetapi keberadaan calon perseorangan dalam pilkada, sesungguhnya berdampak positif bagi pengkaderan politik yang profesional. Sebab, konflik di dalam parpol yang dipicu oleh persaingan antara aktivis yang sudah sepantasnya diajukan sebagai kandidat gubernur, bupati, wali kota termasuk wakilnya, dan para "kader karibatan penyandang dana" bisa diminimalisasi. Dengan kata lain, terbuka peluang yang lebih besar bagi kader partai politik untuk menjadi kepala ataupun wakil kepala daerah.

Jika pola ini berjalan dengan konstan, maka konflik internal partai yang sering kali mengakibatkan konstituen terpecah, sebagaimana dalam berbagai pilkada di Tanah Air, di mana kader partai yang populer dan didukung oleh massa partai justru tidak diusung oleh partainya akan semakin berkurang.

Mencalonkan tokoh di luar partai tidak salah, bahkan dalam perspektif sosiologi politik menurut Robert D. Putnam (1979), kelompok *influential* atau orang-orang yang berpengaruh merupakan pesaing potensial dari para aktivis

dalam struktur partai. Mereka memiliki kans yang lebih besar dalam merebut simpati para petinggi partai, untuk mendukung upaya mencari kekuasaan. Meski demikian, bukan berarti keterlibatannya secara instan dalam berpolitik untuk mengejar kekuasaan dapat dibenarkan, sebab ada mekanisme organisasi yang harus diikuti oleh siapa pun yang akan aktif dalam organisasi politik.

Rush dan Althoff (1999) mengemukakan, "kesuksesan partai politik, selain bergantung pada ideologi yang di hormati pengikutnya, juga mempunyai susunan organisasi, pembagian tugas dan mekanisme yang jelas tanpa tergantung pada satu otoritas kekuatan internal partai". Esensinya, jika partai politik ingin kuat, pengaderan harus berjalan sesuai dengan mekanisme organisasi.

Namun, tanpa mengabaikan berbagai nilai positif yang terkait dengan calon perseorangan, munculnya kekhawatiran terhadap pengingkaran semangat independen kepala daerah adalah hal yang wajar.

Diasumsikan, jika mereka terpilih sebagai kepala daerah, tidak bisa konsisten untuk tampil sebagai "pemimpin independen". Sebab, kepala daerah calon perseorangan yang berada dalam lingkaran kekuasaan tidak bisa lepas dari pengaruh anggota legislatif di wilayahnya.

Model relasi politik dalam kekuasaan paternalistik yang memosisikan kekuatan dominan adalah rujukan dalam menjalankan pemerintahan mengakibatkan kepala daerah independen tidak berkutik untuk melawan dominasi mayoritas di legislatif. Akibatnya, masyarakat yang merindukan seorang gubernur, bupati atau wali kota yang memiliki pendirian kuat dan bebas dari pengaruh partai politik tidak akan terwujud. Demokratisasi yang peduli terhadap pemerintahan dari dan untuk rakyat pun hanya menjadi angan-angan belaka. Sebab, dinamika kekuasaan pemerintahan lokal, tetap saja didominasi oleh para politisi yang cenderung mengabaikan kepentingan rakyat pada umumnya.

Esensinya, jangan terburu nafsu menilai bahwa calon independen lebih memiliki kredibilitas dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sebab berpijak pada kalkulasi politik praktis, tidak ada perbedaan signifikan antara terpilihnya kepala daerah yang berasal dari calon perseorangan dan yang diusung partai politik.

7. Rating dan Integrasi Nasional

(Risnis Indonesia, 6 Februari 2009)

Rating dan share program televisi, menjadi rujukan lembaga penyiaran demi untuk memenuhi tuntutan khalayak mayoritas. Tentu saja, tanpa menghiraukan karakteristik tayangan ideal. Padahal televisi mengemban misi mulia, yang memiliki sederetan ketentuan untuk memberikan manfaat dalam kehidupan bermasyarakat.

Secara faktual, memang stasiun televisi memiliki ketergantungan besar terhadap masuknya iklan dari acara-acara yang diminati penonton. Akibat tetap saja rating, diunggulkan oleh "institusi" penilik, dasan televisi. Namun yang menjadi persoalan lembaga rating pemersa televisi, hanya di dominasi oleh AGB Nielsen Media Research, sehingga tidak ada alternatif yang dapat dipakai sebagai pedoman para pekerja televisi.

Tanpa mempersoalkan tentang metode penarikan sample secara acak bertingkat (stratified random sampling) yang dilakukan oleh AGB Nielsen, ataupun proses akademis pengukuran kepemirsan yang sering menjadi perdebatan di ranah ilmu komunikasi massa, harus diakui bahwa hasil layanan kepemirsan televisi dari Nielsen adalah gambaran faktual tentang animo masyarakat terhadap jenis tayangan di sejumlah stasiun televisi.

Bisa saja para pemerhati televisi, berbagai kelompok masyarakat yang prihatin terhadap eksplorasi tayangan yang diasumsikan "tidak bermutu" bersuara lantang mengingatkan agar televisi memberikan tontonan yang mendidik dan bermoral dan sejumlah persyaratan lain sebagaimana yang terkandung dalam UU NO. 32 tahun 2002, yang tidak kunjung dilaksanakan. Tetapi tampaknya, berbagai kritikan itu, tidak memiliki dampak yang berarti. Artinya, Nielsen tetap sebagai rujukan stasiun televisi.

Keunggulan AGB Nielsen sebagai lembaga pengukuran kepemirsan televisi (*Television Audience Measurement*), kali ini memperoleh "pesaing temporer", pada pertengahan tahun 2008, dan yang terakhir pada bulan Desember 2008. Lembaga yang berupaya untuk memberikan alternatif rating kepemirsan, dimotori oleh Yayasan Sains, Estetika dan Teknologi (SET) dan beberapa lembaga "independen" lain, serta di dukung oleh jaringan pemerhati televisi di sebelas kota di Indonesia. Mereka melakukan survei dengan menilai kualitas acara televisi.

Berpijak kepada "kualitas", survei ini berupaya untuk menempatkan bahwa program acara televisi harus memberikan informasi bermutu kepada khalayak. Para penilai acara tersebut atau pada konteks rating kualitas disebut sebagai panelis, adalah mereka dianggap tahu menilai secara kritis terhadap film bermutu, dan sejumlah atribut lain yang intinya mereka adalah kelompok terpelajar.

Hasilnya, tentu sudah bisa diduga, tayangan yang memiliki rating tinggi berdasarkan penilaian AGB Nielsen, ternyata bukan menjadi pilihan para penelis. Tentu saja tidak ada yang aneh, mengingat pemerhati televisi memiliki sejumlah kriteria ideal. Misalnya, talkshow yang mengeksplorasi sisi kehidupan manusia, seperti Kick Andy unggul mutlak berdasarkan penilaian panelis rating kualitatif.

Hak Masyarakat Desa

Terlepas dari hasil pemeringkatan kualitatif, maupun model Kuantitas pemerisa AGB Nielsen, yang menjadi keprihatinan adalah masyarakat desa sebagai khalayak televisi terbesar di Indonesia justru dilupakan. Paradigma mengkaitkan televisi secara elitis, sebagaimana yang dilakukan oleh "lembaga" rating alternatif, maupun AGB Nielsen, yang menetapkan panelis di perkotaan dan wilayah penyangga kota, yang diasumsikan terdidik, adalah bentuk pengabaian dan menutup akses masyarakat desa untuk bersuara terhadap jenis acara televisi yang mereka kehendaki.

Padahal sejalan dengan reformasi kenegaraan, perkembangan teknologi komunikasi dan demokratisasi informasi, masyarakat pedesaan, tetap mampu menilai dengan kritis sebuah program televisi tanpa terperangkap oleh gencarnya tayangan televisi yang menjual mimpi.

Meski demikian, bukan berarti stasiun televisi harus menjual program siaran yang merujuk kepada "manajemen pemberitaan" model pers pembangunan seperti masa Orde Baru, tetapi paling tidak apa komatan masyarakat desa terhadap program televisi tetap diperhatikan. Sebab program berita, yang diklaim sebagai sumber informasi bermutu, bahkan termasuk sebagai unggulan dalam survei kualitas, tetapi secara faktual dalam berbagai stud. empirik menunjukkan bahwa warga pedesaan apatis terhadap program berita.

Balikkan beritaseputar kemajuan "luar biasa" yang hangar bungai dan diklaim sejumlah kelompok kepentingan sebagai keberhasilan dalam pembangunan,

namun karena warga desa tidak ikut menikmati, maka tidak dilibatkan. Dengan kata lain, mengutip pendapat Denis MacQuail (2004), dalam Teori Hegemoni Media, bahwa: "konsep dominasi ataupun pemaksaan pandangan secara langsung terhadap kelas yang lebih lemah melalui media, tidak berhasil dalam mempengaruhi khalayak". Jadi, percuma saja menciptakan citra keunggulan melalui media jika sebatas retorika. Pada konteks ini Daniel Lerner dalam penelitiannya di negara-negara sedang berkembang, mengingatkan bahwa "sebagian besar masyarakat pedesaan, dalam kisaran 62 % - 86 %, jengkel, menyesal dan marah terhadap berita tentang masalah yang dihadapi oleh negara".

Oleh karena itu, untuk memberikan hak memperoleh informasi ataupun hiburan yang sejalan dengan situasi pedesaan, maka sudah selayaknya, jika lembaga yang peduli terhadap program televisi, melibatkan komunitas desa sebagai penelis untuk menilai acara televisi.

Secara substansial, sejumlah entitas yang berkuat dalam program penyiaran, baik lembaga pemeringkat maupun para praktisi televisi, hendaknya tidak sekedar memposisikan masyarakat pedesaan sebagai khalayak marginal, yang tidak mampu menjadikan program televisi bermutu, atau memberikan stigma minor bahwa masyarakat desa tidak bisa memberikan kontribusi ekonomis terhadap lembaga penyiaran.

Sebab jika kondisi ini terus berlanjut, dikhawatirkan akan mengancam kebhinekaan di Indonesia. Sebab, mereka akan mengungkit berbagai mimpi yang ditawarkan televisi, sebagai bentuk paling nyata sebuah ketimpangan kesejahteraan sosial-ekonomi yang dilembagakan. Padahal televisi sebagai lembaga penyiaran memiliki tujuan memperkokoh integrasi nasional.

Daftar Pustaka

- Adoni, Hanna, Aziba A. Cohen and Sheril Mane. 1981. *Social Reality And Television News - Perceptual Dimension Conflict in Selected Life Area*. dalam Wilton dan Harold de Bock (ed.), *Mass Communication Review Yearbook, Volume II*. Beverly Hill: Sage Publication.
- Amokwa, Kwadwo, Carolyn A. Lin & Michael B. Salwen. (ed). 2003. *Concepts and Cases International Communication*. Australia etc: Thomson Wadsworth.
- Asasi. 1999. *Analisa Dokumentasi Hak Asasi Manusia*. Juni, Jakarta: ELSAM.
- Baylis, John & Steve Smith. 2003. *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*. Third Edition. Oxford: Oxford University Press.
- Blake, Red H and Edwin O. Hulsbosch. 1975. *A Taxonomy of Concepts in Communication*. New York: Hastings House Publisher.
- Bodan, Robert dan Steven J. Taylor. 1997. *Introduction to Qualitative Research Methods: A Phenomenological Approach to The Social Sciences*. New York: John Wiley and Sons.
- Bower, John W and James J. Bradac. 1982. *Issues in Communication Theory: A Metatheoretical Analysis*. *Communication Yearbook 5*. Sage Publication.
- Bottomore, Tony. 1983. *Sosiologi Politik*. terjemahan Sahat Simamora, Jakarta: Rineksara.
- Brown, IAC. 1977. *Technical of Persuasion: From Propaganda to Brainwashing*. Ringwood/Victoria-Australia: Sociologi. Penguin Book Ltd.
- Guillardio, Miriam. 1994. *Demokrasi di Indonesia: Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia.
- Cluot, Daniel. 1976. *Social Change in Twentieth Century*. New York: Academy Press.
- . 1983. *Social Change in Peripheral Society: The Creation of Balkan Colony*. New York: Academy Press.
- Collins, Elizabeth Fokker. 2002. *Indonesia: Sebuah Budaya Kekerasan & Dalam Bahasa Inggris*, dimuat di Asian Survey, vol. xlii no. 4, Juli/Agustus 2002, hal. 502-604. Diterjemahkan oleh Nico Harjanto dan Putar Widjarnoko.

- Comden, John G and Mitsuko Saito (ed). 1976. *Communicating Across Culture for What?* Tokyo : The Soma Press.
- Conner, John. 1984. *Mass in Communications Research. Mass Communication Review Yearbook*. Beverly Hill : Sage Publication.
- Dalam, Bernhard. 1991. "Kepemimpinan dan Reaksi Massa di Jawa dan di Vietnam", dalam Kartodirdjo, Sartono. 1990. *Kepemimpinan Dalam Dimensi Sosial*. Jakarta : Penerbit LP3ES.
- DeFleur, Melvin L. 1970. *Theories of Mass Communication, Second Edition*. New York : David McKay Inc.
- Delta, Jesse G. 1987. "Communication Research : A History", dalam Charles R. Berger (ed), *Handbook of Communication*. California Newbury : Sage Publication.
- Devito, Joseph. 1978. *Communicology: An Introduction to the Study of Communication*. New York : Harper and Row Publisher.
- Dolan, Peter. 1983. *The Position of The Press in The US Power Structure, Mass Communication Review Yearbook*, Volume IV, Beverly Hill : sage publication.
- Durbergen, Maurice. 1997. *The Study of Politics, atau Sosiologi Politik*, terjemahan Daniel Dhukidag, Jakarta : Rajawali Pers.
- Garna, Judiafina K. 1992. *Metode Penelitian : Pendekatan Kualitatif*, Bandung : CV Pustaka Akademika.
- Geertz, Clifford. 1981. *The Religion of Java, atau Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*, terjemahan Bur Rosmanita, Jakarta : Pustaka Jaya.
- Giddens, Anthony. 1986. *Capitalism and Social Modern Theory : An Analysis of Writing of Mark, Durkheim and Max Weber, atau Kapitalisme dan Teori Sosial Klasik dan Modern* : Suatu Karya Tulis Marx, Durkheim dan Max Weber, terjemahan Soelvelo Kramadibrata, Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Hamman, Samuel. 1990. *Emile Durkheim : Raksasa Sosiologi*, Jakarta : Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Hooqvelt, Aukie M. 1976. *The Sociology of Developing Societies*, The Mac Millan Press Ltd.
- Jahi, Ann, ed. 1988. *Komunikasi Massa dan Pembangunan Pedesaan di Negara Negara Dunia Ketiga*, Jakarta : P.E. Guernodit.
- Jayaweera, Neville : and Sarath Amunugama, ed. 1987. *Rethinking Development Communication : The Asia Mass Communication*, Singapore : Kelford Press Pte Ltd.
- Kartodirdjo, Sartono. 1990. *Kepemimpinan Dalam Dimensi Sosial*. Jakarta : Penerbit LP3ES.

- Kim, Young Yun. 1984. "Searching for Creative Integration", *Methods for Intercultural Communication Research*, William B. Gudykunst and Young Yun Kim, Sage Publication.
- Kincaid, Lawrence and Wilbur Schramm. 1990. *Asas-asas Komunikasi Antar Manusia*, terjemahan Agus Setiadi. Jakarta, LP3ES dan East West Communication Institute Hawaii.
- Krech, David, Richard S. Crutchfield and Egerton L. Ballachey. 1962. *Individual in Society*, International Student Edition, Mc. Graw - Hill Kogakusha, Ltd.
- Krans S and David D. 1976. *The Effect of Mass Communication Political Behavior*, Pennsylvania : State University Press.
- Lee, Everett S. 1987. *A Theory of Migration*, Yogyakarta : PPK Universitas Gadjah Mada.
- Lerner, Daniel. 1983. *The Passing of Traditional Society : Modernization in Middle East, atau Memudarnya Masyarakat Tradisional*, terjemahan Mujiarto T, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Lippman, Walter. 1960. "The World Outside and The Pictures", *Mass Communication*, ed. Wilbur Schramm, Urbana : University of Illinois Press.
- . 1998. *Public Opinion*, Terjemahan Opini Publik, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Littlejohn, Stephen W & Karen A. Foss. 2005. *Theories of Human Communication*, Eight Edition, Australia : Thomson- Wadsworth.
- Littlejohn, Stephen W. 1992. *Theories of Human Communication*, Fourth Edition, Belmont California, Wadsworth Publishing Company.
- Mulyana, Deddy. 2005. *Ilmu Komunikasi : Suatu Pengantar*. Cetakan Ke delapan, Bandung : Remaja Rosda Karya.
- . 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif : Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Cetakan Kelima, Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Mulyana, Deddy & Jahuddin Rakhmat (ed). 2006. *Komunikasi Antar Budaya*, Bandung : Penerbit Rosda Karya.
- MacBride, Sean. 1980. *Communication and Society: Today and Tomorrow : Many Voices One World*, London, Kogan Page.
- McQuail, Denis. 1984. *With the Benefit of Hindsight : Reflection on Uses and Gratification Research: Critical Studies in Mass Communication I*.
- . 1987. *Mass Communication Theory : An Introduction, second edition*, London : Sage Publication.
- Miller, Gerald Rand Mark Steinberg. 1975. *A New Analysis of Interpersonal Communication*, Chicago, Palo Alto, Toronto : Science Research Associates.

- Myers, Michele Tobia and Gail E. Myers, 1988. *Managing By Communication*, New York, New Newsey, London, Mc: Graw-Hill International Book Co.
- Nimmo, Dan, 1993. *Political Communication and Public Opinion in America*, atau *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media*, Cetakan kedua, (terjemahan Tjun Surjantun, Bandung: Remaja Rosdi Karya.
- Noel-Noemann, Elizabeth, 1973. *Return to the Concept of Powerful Mass Media*, *Studies of Broadcasting* 9.
- Ollien, Clarice N., George A. Donohue and Phillip J. Tichenor, 1983. "Structure, Communication and Social Power: Evolution of the Knowledge Gap Hypothesis", *Mass Communication Review Yearbook*, eds: Ellen Wartella and D. Charles Whitney (eds), Volume 1, Beverly Hill, London: Sage Publications.
- Pace, R. Wayne dan Don E. Faules, 1998. *Komunikasi Organisasi: Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan*, terjemahan Deddy Mulyana dik. Editor Deddy Mulyana, Bandung: Remaja Rosdi Karya.
- Putnam, Robert D., 1979. *Comparative Study of Political Elites*.
- Rachmadi, E. 1988. *Informasi dan Komunikasi dalam Peredaran Internasional*, Bandung: Penerbit Alimmi.
- Ray, Michael L., 1973. "Marketing Communication and Hierarchy of Effects", *Model Communication Research*, ed. Peter Clarke, Beverly Hill: Sage Publications.
- Reddi, Usha Vyasulu, 1987. "New Communication Technologies", *Rehanguing Development Communication*, Jayaweera, dan Saradi Amunugama (ed), *The Asia Mass Communication*, Singapore: Kelford Press (Pte Ltd).
- Rivers, William L., Jay W. Jensen & Theodore Peterson, 2003. *Mass Media and Modern Society*, terjemahan Media Massa dan Masyarakat Modern, Edisi Kedua, Jakarta: Prenada Media.
- Robbins, Stephen P., 1996. *Organizational Behavior, atau Perilaku Organisasi*, terjemahan Hadyana P. Jakarta: Prenhalinda.
- Rogers, Everett M and Floyd E. Shoemaker, 1971, *Communication of Innovations: A Cross Culture Approach*, New York, The Free Press.
- Rivers, William L., Jay W. Jensen & Theodore Peterson, 2003. *Mass Media and Modern Society*, terjemahan "Media dan Masyarakat Modern", Jakarta: Penerbit Kanisius.
- , 1983. *Diffusion of Innovations*, Third Edition, London: The Free Press.
- , 1996. *Communication Technology: The New Media in Society*, New York: The Free Press.
- Rogers, Everett M and Lawrence Kincaid, 1981, *Communication Networks*, New York: The Free Press.

- Rogers, Everett M and Lynne Swearing, 1969. *Modernization Among Peasants*, New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Rubin, Brent D., 1992. *Communication and Human Behavior*, Third Edition, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.
- Ruby, Michael dan Philip Altbach, 1997. *An Introduction to Political Sociology, atau Pengantar Sosiologi Politik*, terj. Kuntal Kartono, ter. Rajawali Pers.
- Ruttan, Vernon W., "Integrated Rural Development Programs: Skeptical Perspective" dalam Soetomo, 1991. *Strategi Pembangunan Pedesaan Menuju Penguasaan Hasil-Hasil Pembangunan, dalam Percikan pemikiran Fisipol UGM Tentang Pembangunan*, Yogyakarta: Aditya Media.
- Samovar, Larry A and Richard E. Porter, 1988. "Approaching Intercultural Communication", eds: Samovar and Porter, *Intercultural Communication: A Reader*, Belmont - California: Wadsworth Publishing Company.
- Sarat, Turi B., 1979. "An Overview of Challenges and Opportunities", *Intercultural Communication Theory and Research*, Dan Nimmo, Ed., *Communication Yearbook* 3, New Jersey: Transaction Books.
- Schramm, Wilbur, 1977. *Big Media Little Media*, Beverly Hill: Sage Publication.
- Samovar, Larry A and Richard E. Porter, 1988. *Communication Between Culture*, Belmont - California: Wadsworth Publishing Company.
- Samovar, Larry A, Richard E. Porter & Edwin R. McDaniel, 2007. *Communication Between Culture*, Sixth Edition, Australia: Thomson - Wadsworth International Student Edition.
- Samovar, Larry A, Richard E. Porter and Neel C. Jain, 1981. *Understanding Intercultural Communication*, Belmont - California: A Division of Wadsworth Inc.
- Sendjaja, Sasa Djurnasa, 1991. *Peranan Ilmu dan Ilmuwan Dalam Menjawab Perubahan Dunia Komunikasi*, Surabaya: ISKI.
- Setiawan, Bambang, 1990. "Komunikasi Politik dan Ketahanan Nasional", *Percikan Pemikiran Fisipol UGM tentang Pembangunan*, Cetakan Kedua, Yogyakarta: Penerbit Aditya Media.
- Singarimbun, Moeri dan Sofian Effendi, ed., 1989. *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LPJES.
- Siregar, Barita E dan Munandor Sulaiman, 1999. *Revitalisasi Ilmu Sosial Memasuki Milenium Ketiga*, Seminar Lokakarya Nasional 31 Juli 1999, Bandung: Yayasan Ilara Lima.
- Suarna, Frans Magnis, 1987. *Etika Politik: Prinsip - Prinsip Kenegaraan Modern*, Jakarta: Penerbit Gramedia.
- Suwandi, Harsago, 1993. *Peranan Pers Dalam Politik di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Sinar Harapan.

- 1995. *Komunikasi Politik*. Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Suryatmaja dan Alvin Y. So. 1991. *Perubahan Sosial dan Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit LP3ES.
- Sutella, Rodney. "Naskah Kespiduk Hak Masyarakat Untuk Tahu : Transparansi Dalam Lembaga-Lembaga Pemerintahan", dalam "Demokrasi" 2001. Jakarta : Office of International Information Programs, US Department of State.
- Sulzer, Alex. 2006. *Analisis Teks Media : Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. Cetakan Keempat. Bandung : Penerbit Remaja Rosda Karya.
- Tubbs, Stewart J. dan Sylvia Moss. 1996. *Harian Communication: Konteks - Konteks Komunikasi*. Buku I dan Buku II. terjemahan Deddy Mulyana dan Gibranasari. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.
- USIS. 2005. *Demokrasi*. Jakarta : Office of International Information Programs US Department of State.
- Urofsky, Melvin L. "Naskah Pertama Pendahuluan : Prinsip - Prinsip Dasar Demokrasi", dalam "Demokrasi" 2001. Jakarta : Office of International Information Programs, US Department of State.
- Wiliam, John. 2008. *The Media of Mass Communication atau "Teori Komunikasi Massa"*. Edisi Ke Delapan, Terjemahan Iri Wibowono. Jakarta : Penerbit Kompas.
- West, Richard dan Lynn H. Turner. 2008. *Pengantar Teori Komunikasi : Analisis dan Aplikasi, atau Introducing Communication Theory : Analysis and Application*. Jakarta : Penerbit Salemba Humanika.
- Wallerstein, Immanuel. 1979. "Dependency in an Interdependence World : The Limited Possibilities of Transformation Within The Capitalist World Economy", dalam *The Capitalist World Economy*, Immanuel Wallerstein. New York : Cambridge University Press.
- Weaver, Warren. 1972. "Recent Contributions to the Mathematical Theory of Communication", dalam *Mathematical Theory of Communication*, Claude Shannon dan Warren Weaver. Urbana : University of Illinois Press.
- Wood, Julia F. 2004. *Communication Theories in Action* (Third Edition). Canada: Thomson - Wadsworth Publishing.

BIODATA PENULIS

Dr. Eko Harry Susanto, lahir di Pekalongan, Jawa Tengah. Menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar Negeri, SMP Negeri dan SMA Negeri di Pekalongan. Tahun 1976 kuliah di Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Menulis skripsi "Pengaruh Partisipasi Masyarakat Nelayan Dalam Pembangunan Terhadap Peningkatan Pendapatan Nelayan". Mengambil lokasi penelitian di kawasan Pantai Utara Kabupaten Batang, Jawa Tengah, dan berhasil lulus sarjana tahun 1981. Mengawali mengajar pada berbagai Perguruan Tinggi di Jakarta sejak tahun 1982.

Tahun 1993 kuliah di Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia, menyusun tesis tentang Kepemimpinan Kepala Desa sebagai Agen Modernisasi : Kemudi dan Faktor - Faktor Pendukung Dalam Hubungan Antar Etik. Pada prinsipnya tesis tersebut mengupas pola komunikasi dalam suatu kawasan yang plural dan heterogen dari segi etnisitas, di salah satu wilayah Pantai Utara Jawa Barat. Tahun 1996 lulus Magister Sains (M.Si) Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia.

Karena ketarikannya memilih kompleksitas model komunikasi di masyarakat, tahun 1998 melanjutkan kuliah di Program Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung, dan lulus bulan Januari 2004. Menulis disertasi tentang Kredibilitas Opinion Leader Pedesaan (Studi tentang Perubahan Peran Pemuka Pendapat di Desa - Desa Lokasi Industri). Dengan lokasi penelitian di salah satu Kabupaten di Jawa Barat, disertasi ini membahas tentang dinamika kawasan industri di wilayah penyangga kota, yang berjalan seiring dengan titik titik reformasi politik di Indonesia. Tuntutan demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara di tahun 1998, memiliki dampak yang sangat berarti terhadap peran opinion leader yang tidak lagi dalam pengendalian hegemoni kekuasaan negara. Kuliah di Program Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran diselesaikan pada bulan Januari Tahun 2004.

Saat ini Dr. Eko Harry Susanto, mengajar di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara Jakarta. Selain itu, menjadi dosen pada Program S1 dan S2 di berbagai perguruan tinggi lain. Menulis buku *Komunikasi Politik dan Otonomi Daerah* (2009), memberi pengantar Buku *Sketsa Politik Pilkada Kaburi* (2009), dan menjadi salah satu penulis buku *Kapita Selekta Ekonomi Indonesia - Sulastiono Sagie* (2009).

Aktif menulis di Jurnal Ilmiah, dan menuangkan pendapatnya lewat opini di *Harian Kompas*, *Korasi Tempo*, *Suara Pembaruan*, *Media Indonesia*, *Bisnis Indonesia*, *Sepatu Indonesia*, *Suara Karya*, *Jurnal Nasional dan Pikiran Rakyat Bandung*. Kegiatan lainnya adalah, memberikan ceramah maupun sebagai fasilitator dalam seminar, diskusi publik dan workshop, yang berkaitan dengan Komunikasi Politik, Strategi Penelitian, dan masalah lain yang terkait dengan transparansi komunikasi maupun otonomi daerah.